



Vol. 1 | No. 1 | DES 2021

ISSN 2828-9498

- ANALISIS KETERLIBATAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM MENGAWAL IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KABUPATEN SUMENEP Ike Yuli Mestika Dewi, Khoirul Asiah, Mafruhah, Yetti Hidayatillah, Badrul Al-Rozy
- KAJIAN MODEL PENDIDIKAN KESETARAAN KEJAR PAKET
 BERBASIS KOMUNITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
 DI KABUPATEN SUMENEP
 - Ach. Syaiful, Siful Arifin, Amiruddin, Rasuki, Zainollah
- MODEL PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH LINGKUNGAN DI KABUPATEN SUMENEP
 Damanhuri, Ah. Syamli, Tatik Hidayati, Mohammad Takdir, Paisun
- PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA
 DI KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF HEXA HELIX
 Mohammad Hidayaturrahman, Rillia Aisyah Haris, Imam Hidayat
 Miming Indrasatin, Priyo Armaji
- PENINGKATAN PENDAPATAN PENGRAJIN BATIK TULIS
 MELALUI PENGEMBANGAN MOTIF DAN PERBAIKAN PROSES MEMBATIK
 DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021
 Budi Suswanto, Abu Tholib, Agung Firdausi Ahsan, Moh. Iqbal Bachtiar
- SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021
 Tri Hendra Wahyudi, M. Hasan Ubaid, M. Fajar Shodiq Ramadlan

Achmad Zain Nur, Nita Selvia Rohmavati

SURVEI INDEKS KESALEHAN SOSIAL MASYARAKAT SUMENEP TAHUN 2021
Sri Handayani, Sri Rizqi Wahyuningrum, Mohammad Ali Al Humaidy, Afifullah



PELINDUNG

Bupati Sumenep (Achmad Fauzi, SH., M. H) Wakil Bupati Sumenep (Hj. Dewi Khalifah, SH, MH, M. Pd. I)

PENGARAH

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep (Ir. Edy Rasiyadi, M. Si)

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep (Drs. Yayak Nurwahyudi, M. Si)

PEMIMPIN REDAKSI

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kab. Sumenep (Helmi, S.Sos)

REDAKTUR

Dr. Mohammad Ali Humaidy, M.SI Dr (C) Mohamad Suhaidi, M.Th.I Dr. Ach. Syaiful, M.Pd.I

EDITOR/REVIEWER

Dr (C) Zaitur Rahem M. Pd. I Dr. Salamet, M.Phil Masyithah Mardhatillah, M.Hum

SEKRETARIAT

Andy Chandra Kusuma

SETTING & LAYOUT

Khoiril Anwar, S.Pd Nur Raudhatul Jannah

PENERBIT

BAPPEDA Kabupaten Sumenep

REDAKSI & TATA USAHA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Sumenep Jl. Trunojoyo No. 120 Sumenep

Daftar Isi

ARTIKEL ILMIAH

ANALISIS KETERLIBATAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM MENGA-WAL IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KABUPATEN SUMENEP

Ike Yuli Mestika Dewi, Khoirul Asiah, Mafruhah, Yetti Hidayatillah, Badrul Al-Rozy

- KAJIAN MODEL PENDIDIKAN KESETARAAN KEJAR PAKET BERBA-SIS KOMUNITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABU-PATEN SUMENEP Ach. Syaiful, Siful Arifin, Amiruddin, Rasuki, Zainollah
- PEMBANGUNAN BERORIENTASI *LI MASLAHATI AL-UMMAH* (MENUJU KABUPATEN SUMENEP *THAYYIBAH WARABBUN AL-GHAFUR*)
 Abdul Basid, Syamsuri
- STRATEGI PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN (STUDI MULTISITUS DI SEKOLAH UNGGULAN SDN PANGARANGAN 1 DAN SMPN 1 SUMENEP Ahmad Shiddiq, Asmoni, Jamilah, Agusriyanti Puspitorini, Mulyadi
- PENINGKATAN PENDAPATAN PENGRAJIN BATIK TULIS MELALUI PENGEMBANGAN MOTIF DAN PERBAIKAN PROSES MEMBATIK DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021
 Budi Suswanto, Abu Tholib, Agung Firdausi Ahsan, Moh. Iqbal Bachtiar, Achmad Zain Nur, Nita Selvia Rohmayati
- KONSEP SMART CITY SEBAGAI ALTERNATIF PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUMENEP Zainul Wahid, Imam Syafi'i
- SINERGITAS MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN MENUJU SUMENEP CERDAS Musleh Wahid, Dainori

Daftar Isi

- FILSAFAT MANAJEMEN PEMASARAN SYARI'AH (DALAM KAJIAN ONTOLOGI, EPISTIMOLOGI DAN AKSIOLOGI)
 Faizatul Fitriyah
- MODEL PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH LINGKUNGAN DI KABUPATEN SUMENEP Damanhuri, Ah. Syamli, Tatik Hidayati, Mohammad Takdir, Paisun
- PENINGKATAN MUTU DAN LAYANAN PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI ASSESMENT VISITASI AKREDITASI BERBASIS ONLINE PADA SEKOLAH DI KABUPATEN SUMENEP Moh. Wardi, Musleh Wahid, Encung Ahmadi, Heri Fadli Wahyudi
- MODEL PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KECAMATAN
 DI KABUPATEN SUMENEP
 Junaidi, Khamsil Laili, Fathorrahman, Lailul Ilham, Sahli, Ainul Yaqin
- PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF HEXA HELIX Mohammad Hidayaturrahman, Rillia Aisyah Haris, Imam Hidayat, Miming Indrasatin, Priyo Armaji
- DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENGEMBANGAN BUDIDAYA TAMBAK UDANG Shulhan, Zainol Kamal, Misnatun, Ahmad Effendi, Agus Hasan Mustofa, Khairun Nisa'
- MODEL PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI KOMUNIKASI EFEKTIF PADA KELOMPOK RELAWAN TANGGAP BENCANA COVID-19 DI KABUPATEN SUMENEP Moh. Zuhdi, Ahmad Muwafiq, Abd. Sukkur Rahman, Moh. Ikmal
- PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BUM DESA DI KABUPATEN SUMENEP Sutrisno, Abdur Rakib, Abdul Azis, Ach. Baidlawi Bukhari
- ANALISIS SOSIAL MASYARAKAT SUMENEP DALAM MENINGKAT-KAN KUALITAS GARAM RAKYAT Mukhlishi, Ubaidillah Cholil, Moh. Fadli, Nurul Huda, Zainol Huda, Dedi Eko Riyadi Hs, Tamimah, Mohammad Sholeh

Daftar Isi



IMPLEMENTASI TEKNOLOGI PRODUKSI *VIRGIN COCONUT OIL* (VCO) BERBASIS DESA BINAAN DI KABUPATEN SUMENEP N. Eko Satriawan, Mohammad Hosnan, Musthafa, Moh. Halim, Ach. Kholish, Ach. Haris Abdi Manaf

SURVEI PEMBANGUNAN



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERIN-TAHAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021 Tri Hendra Wahyudi, M. Hasan Ubaid, M. Fajar Shodiq Ramadlan



SURVEI INDEKS KESALEHAN SOSIAL MASYARAKAT SUMENEP TAHUN 2021

Sri Handayani, Sri Rizqi Wahyuningrum, Dr. Mohammad Ali Al Humaidy, Afifullah



Analisis Keterlibatan Dewan Pendidikan dalam Mengawal Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Sumenep

Ike Yuli Mestika Dewi¹, Khoirul Asiah¹, Mafruhah¹, Yetti Hidayatillah¹, Badrul Al-Rozy² (¹Dosen STKIP PGRI Sumenep, ² Penyuluh Anti Korupsi Jawa Timur)

Abstrak:

Jalur pendidikan menjadi salah satu strategi pencegahan korupsi yang dicanangkan oleh KPK. Implementasi pendidikan anti korupsi menjadi sesuatu yang strategis untuk diwujudkan. Dorangan pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi direspon positif oleh sejumlah propinsi, kabupaten/kota, termsuk Kabupaten Sumenep. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep menerbitkan Perbup Nomor 37 Tahun 2020, sebagai wujud komitmen dalam mengawal pendidikan anti korupsi di Sumenep. Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) sebagai salah satu lembaga indepependen dan mitra strategis dinas pendidikan, merespon secara aktif keberadaan Perbup tersebut. Dengan berbagai upaya, DPKS mengawal secara aktif implementasi atas Perbup tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif. Sementara proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara mendalam (indepth interview), observasi, dan dokumentasi. Analisis atas data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analisys). Dalam mengawal Perbup tersebut, DPKS melakukan beberapa kegiatan, antara lain : melakukan monev ke sejumlah sekolah (SDN dan SMPN) berkaitan implemenatsi Perbup, melakukan FGD dengan tema Implementasi Perbup dengan melibatkan sejumlah stakholder pendidikan, dan studi banding implementasi pendidikan anti korupsi di kabuaten/kota yang telah memiliki pengalaman dalam implementasi pendidikan anti korupsi.

Kata Kunci: Keterlibatan, DPKS, Implementasi, Peraturan Bupati, Pendidikan Anti Korupsi

PENDAHULUAN

KPK menetapkan tiga strategi dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia, yaitu penindakan, pencegahan dan pendidikan. Tiga strategi tersebut menjadi kunci dalam upaya memberantas perilaku yang masih menjadi fenomena sosial dalam kehidupan bangsa ini. Korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa yang membutuhkan penangan yang juga luar biasa. Menurut Green, 2016 (dalam Buana, dkk, 2021: 24) merupakan sebuah bentuk kejahatan yang lahir dari struktur elitis sekaligus diskriminatif. Korupsi merupakan 'anak kandung' dari ketidakadilan.

Satu dari tiga strategi tersebut, strategi melalui pendidikan anti korupsi menjadi sesuatu yang fenomenal dan posisinya



menjadi sangat strategi dilakukan. Alasannya sederhana; dengan pendidikan anti korupsi target akhirnya mengarah pada upaya membentuk karakter anti korupsi, karena perilaku korup sebenarnya, terletak pada mental dan karakter. Bukan terletak pada besar dan kecilnya gaji dan pendapatan, bukan terletak pada besar dan kecilnya peluang. Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan akan dapat membentuk insan-insan yang memiliki karakter kuat "untuk tidak mau melakukan korupsi".

Strategi tersebut oleh KPK diterjemahkan dengan melakukan nota kesepahaman implementasi pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di Hotel Kartika Chandra Jakarta, pada 11 Desember 2018 (https://nasional.kompas.com). Nota kesepahaman tersebut dilakukan bersama 4 kementerian, yaitu Menteri Dalam Negeri (Tjahyo Kumolo), Menetri Riset, Teknologi dan Pendidikn Tinggi (M. Nasir), Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Muhadjir Effendy), dan Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin).

Pendantangan nota kesepahaman tersebut menjadi cikal bakal tentang permulaan implementai strategi pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan. Antara KPK dan kementerian terkait telah melakukan kolaborasi taktis dalam implementasi pendidikan anti korupsi secara maksimal yang dilakukan mulai pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Dunia pendidikan sebagai pusat pembentukan karakter, memiliki posisi strategi dalam mengawal implementasi pendidikan anti korupsi dengan maksimal. Sejak saat itu, lembaga pendidikan dalam semua jenjang, telah dintutut untuk aktif melakukan gerakan pendidikan anti korupsi dengan bentuk yang memungkin dilakukan, baik dalam pembelajaran di ruang kelas, maupun dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Dalam konteks itu, untuk memperkuat implementasi pendidikan anti korupsi, semua kepala daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) membuat regulasi yang dapat menjadi dasar kebijakan implementasi pendidikan anti korupsi di dalam dunia pendidikan, termasuk pemerintah Kabupaten Sumenep. Sebagai respon terhadap upaya KPK tersebut, pemerintah Kabupaten Sumenep, mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor: 37 Tahun 2020, tentang Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep. Dengan peraturan ini, implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep telah menjadi kebijakan yang sangat kuat. Pemerintah Kabupaten Sumenep, telah memerintahkan kepada satuan pendidikan untuk memastikan pendidikan anti korupsi telah include dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan di dalam satuan pendidikan.

Implementasi pendidikan anti korupsi sejatinya menjadi tanggungjawab bersama *stakeholder* pendidikan, termasuk Dewan Pendidikan yang menjadi patner strategis dinas pendidikan dalam mengawal peningkatan mutu pendidikan. Dengan posisi strategis tersebut, Dewan Pendidikan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendorong implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep, yang telah mendapatkan legitimasi dari pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Bupati, Nomor 37 Tahun 2020. Dengan peran dan fungsi yang dimiliki Dewan Pendidikan, langkah-langkah nyata dalam mengawal implementasi Peratutan Bupati tersebut secara kaffah.

Berdasarkan gambaran tersebut, dalam kajian ini dapat diajukan rumusan masalah yang fokus pada satu hal, yaitu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dalam mengawal implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Jenjang Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk peneli-



tian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif(Moleong, 2008: 3). Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpresentaskan oleh individu-individu (Sukmadinata, 2015: 94) Sementara metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam kata-kata tertulis atau lisan baik dari individu maupun kelompok serta perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2008:3). Ada juga yang memberikan definisi bahwa penelitian kualitatif (qualitative research) adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2015 : 60).

Sementara itu, proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara mendalam (indepth interview), observasi, dan dokumentasi, seperti kliping koran, arsip atau catatan penting dari narasumber. Sebab, dalam penelitian kualitatif, jenis data yang dihasilkan adalah data lunak, berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi dan analisis dokumen. Untuk melakukan analisis atas data yang diperoleh, digunakan teknik analisis isi (content analisys) untuk mengurai data-data yang didapatkan. Sekaligus bersifat deskripstif dimana data dideskripsikan sekaligus dianalisis dengan cara berfikir reflektif. Analisis digunakan untuk menggambarkan tentang katagori-katagori yang ditemukan dan muncul dari data (Moleong, 2008 : 3).

PEMBAHASAN

Dewan Pendidikan tiak bisa diam begitu saja, apalagi diam seribu bahasa atas dugaan penyelewengan dalam proses pengelolaan pendidikan yang terjadi. Selalu berfikir positif atas pelaksanaan pendidikan, itu merupakan suatu keharusan, tetapi memastikan tidak ada penyelewengan dalam dunia pendidikan, itu jauh lebih bermartabat bagi Dewan Pendidikan (Suhaidi, 2017). Narasi tersebut merupakan penegasan tentang fungsi strategis Dewan Pendidikan dalam mengawal eksistensi pendidikan yang berintegritas dan bebas korupsi.

Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep dengan beberapa fungsi yang diberikan, memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengawal peningkatan mutu pendidikan, termasu juga memiliki implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 di Kabupaten Sumenep dengan maksimal. Dengan demikian, kebijakan penting ini dapat dikawal dengan baik, sehingga implementasi pendidikan anti korupsi dapat terimplementasi dengan maksimal di Kabupaten Sumenep.

Sebagai wujud komitmen terhadap peran dan fungsinya, Dewan Pendidikan merespon secara positif keberadaan Perbup Nomor 37 Tahun 2020 dengan beberapa kegiatan taktis dengan tetap mengacu kepada kewenangan yang melekat, yaitu kajian, pengawasan dan rekomendasi. Hal itu menunjukkan tentang kontribusi aktif Dewan Pendidikan dalam menguatkan implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten, seperti dalam gambar berikut:

Gambar 1 : Tahapan Kegiatan DPKS dalam Mengawal Pendidikan Anti Korupsi



Sumber : Data dianalisis dari hasil wawancara dan riset dokumen DPKS 2020



Sebagaimana dijelaskan dalam gambar di atas, Dewan Pendidikan telah melakukan serangkaian kegiatan untuk memperkuat Perbup Nomor 37 Tahun 2020 serta untuk menguatkan implementasi pendidikan anti korupsi di wilayah Kabupaten Sumenep. Berdasarkan data di atas, setidaknya terdapat 4 (empat) kegiatan yang telah dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep. Pertama, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap satuan pendidikan mulai jenjang SD Negeri sampai SMP Negeri. Monitoring dilakukan untuk mengukur sejauh mana sekolah merespon Perbup Nomor 37 Tahun 2020 dan mengimplementasikannya di sekolah. Berdasarkan data DPKS, terdapat 18 sekolah yang dijadikan sampel dalam kegiatan ini monev ini, sebagaimana data berikut:

Tabel : Data Sekolah Sampel Monev DPKS dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2021

No	Satuan Pendidikan	Pelaksanaan
1	SDN Pakamban Laok	
2	SDN Pragaan Laok 1	
3	SDN Prenduan 1	
4	SDN Karduluk 1	
5	SDN Gapura Barat 1	
6	SDN Legung Timur 1)21
7	SDN Bangselok 1	Tanggal 27 s/d 29 Mei 2021
8	SDN Pandian 1	Σ
9	SDN Dungkek 1	1 29
10	SDN Pangarangan 1)/s ₂ /c
11	SMPN 1 Guluk-Guluk	al 27
12	SMPN 1 Pragaan	ŋġġś
13	SMPN 1 Batang-Batang	Tar
14	SMP 1 Gapura	
15	SMPN 1 Dungkek	
16	SMPN 2 Sumenep	
17	SMPN 1 Sumenep	
18	SMPN 5 Sumenep	

Sumber: Dokumen DPKS 2021

Dalam pelaksanaan monev tersebut, DPKS menyimpulkan bahwa impelementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020, belum terimplementasi sesuai dengan amanah Perbup. Sebab, rata-rata sekolah yang menjadi sampel dalam kegiatan money ini, menyatakan belum mendapatkan sosialisasi dari dinas pendidikan, sehingga pendidikan karakter dan budaya anti korupsi yang dilaksanakan, bukan karena ada dan tidak adanya Perbup, melainkan karena memang tuntutan utama pendidikan harus mampu membentuk siswa vang berkarakter. Hal itu relevan dengan Program Penguatan Karakter (PPK) melalui Peraturan Presiden RI, Nomor 87 Tahun 2017. PPK ini merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggungjawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental [GNRM] (Dewi, 2019 16).

Kedua, melaksanakan kegiatan bintek E-Learning Pengetahuan Dasar Anti Korupsi untuk Anggota DPKS. Dengan kegiatan ini, anggota DPKS mendapatkan pemahaman dan pengalaman tentang materi-materi anti korupsi secara menyeluruh, sehingga dapat memperkuat upaya-upaya Dewan Pendidikan dalam mengawal implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep. Bimtek ini memiliki tujuan ideal, selain untuk menguatkan pemahaman anti korupsi bagi anggota DPKS, juga untuk ditransformasi ke pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu kepala sekolah, guru maupun tenaga kependidikan lainnya.

Ketiga, melaksanakan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) tentang implementasi Perbup Nomor Tahun 2020. Kegiatan FGD merupakan forum diskusi stakeholder pendidikan untuk mendiskusikan tentang implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep,



pada 05 Juni 2021. Tema FGD adalah menjadi " Perbup Nomor 37 Tahun 202, Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep". Dalam kegiatan FGD ini, DPKS juga menjabarkan data-data lapangan yang diperoleh melalui monev sebagai bahan diskusi. Hasil FGD kemudian dinarasikan rumusan rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati Sumenep untuk ditindaklanjuti, sehingga implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di sekolah dapat menjalan dengan maksimal.

Keempat, melaksanakan kegiatan studi banding implementasi pendidikan anti korupsi ke Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Kegiatan ini dilakukan untuk mempelajari dan memahami pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang dilakukan di Surabaya sekaligus sebagai acuan bagi DPKS dalam merumuskan konsep pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep. Kegiatan studi banding pendidikan anti korupi ini menjadi kegiatan kunci DPKS dalam proses pengawalan atas implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 di Kabupaten Sumenep. Sebab, kegiatan ini menjadi penyempurna dalam rangka penyusunan rumusan konsep pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep.

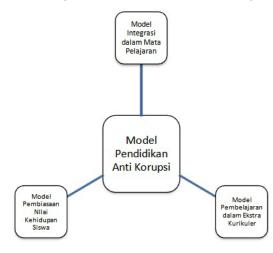
Berdasarkan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dalam mengawal implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep, baik didasarkan pada hasil money, FGD maupun studi banding tentang pendidikan anti korupsi, terdapat beberapa langkah kegiatan yang dapat dilakukan memaksimalkan dalam imlpementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep. Dengan kegiatan-kegiatan sistematis tersebut, dapat menjadi bukti keterlibatan Dewan Pendidikan secara aktif dalam menguatkan implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep telah berjalan maksimal.

Dalam konteks itu, dengan Perbup

Nomor 37 Tahun 2020 tersebut, pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep telah memiliki landasan aturan yang kuat. Peraturan Bupati memberikan legitimasi kuat tentang komitmen pemerintah daerah dalam merespon gerakan anti korupsi yang dicanangkan oleh KPK, sehingga pendidikan anti korupsi yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran di sekolah, dapat menguatkan kesadaran baru peserta didik untuk takut pada korupsi.

Implementasi pendidikan anti korupsi dalam konteks sekolah, dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, karena dalam pelaksanaannya pendidikan anti korupsi di sekolah, bersifat dinamis dan kondisional. Secara umum, dapat dilakukan dengan tiga model pelaksanaan implementasi, sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2 : Model Implementasi Pendidikan Anti Korupsi



Dengan tiga model tersebut, pendidikan anti korupsi sangat mungkin akan dapat diterapkan di Kabupaten Sumenep. Apabila, merujuk pada hasil Monev yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan terhadap sejumlah sekolah, baik SDN maupun SMPN, implementasi pendidikan anti korupsi masih dilaksanakan dengan sebatas penerapan nilai dalam kehidupan siswa di sekolah. Walaupun, secara umum, implementasi pendidikan anti korupsi di Su-



menep, nyaris belum maksimal. Bahkan, rata-rata sekolah mengaku belum tahu dan belum memahami tentang Perbup 37 Tahun 2020 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep.

Padahal, berdasarkan materi Perbup, secara teknis implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi telah dijabarkan secara rinci, yang dapat dikembangkan melalui kegiatan kurikuler, kokurekuler dan ekstra kurekuler. Dengan tiga kegiatan tersebut, implementsi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dapat dilakukan dengan sejumlah pendekatan. *Pertama*, integrasi nilai karakter dalam proses pembelajaran tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum. *Kedua*, merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik. Ketiga, mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Keempat, pembiasaan nilainilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah. Kelima, membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan-ketentuan sekolah. Keenam, memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat (Perbup Nomor 37 Tahun 2020).

PENUTUP

Sebagai lembaga independen yang menjadi mitra strategis dinas pendidikan, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) menjadi salah satu *stakeholder* pendidikan yang cukup strategis dalam mengawal peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumenep. DPKS dalam prakteknya menjadi salah satu lembaga yang secara proaktif ikut serta dalam mengawal implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020, melalui posisi dan kewenangan yang dimiliki. Dalam mengawal Perbup tersebut, DPKS melakukan beberapa ke-

giatan, antara lain: melakukan monev ke sejumlah sekolah (SDN dan SMPN) berkaitan implemenatsi Perbup, melakukan FGD dengan tema Implementasi Perbup dengan melibatkan sejumlah *stakholder* pendidikan, dan studi banding implementasi pendidikan anti korupsi di kabuaten/kota yang telah memiliki pengalaman dalam implementasi pendidikan anti korupsi.

Berbagai kegiatan tersebut menjadi gambaran tentang upaya Dewan Pendidikan dalam mengawal implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 di Kabupaten Sumenep serta dapat dianggap sebagai dukungan nyata Dewan Pendidikan terhadap upaya pencegahan korupsi yang menjadi konsentrasi KPK RI melalui jalur pendidikan. Dengan keterlibatan tersebut, implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 tersebut, dapat menjadi kekuatan strategis dalam upaya besar mewujudkan Kabupaten Sumenep sebagai Kabupaten bebas korupsi di masa depan. Bahkan, dapat menjadi pondasi dalam mewujudkan masyarakat Sumenep yang berkarakter kuat. Menurut Busyro Karim (2015 : 71) masyarakat berkarakter kuat adalah masyarakat yang memiliki akhlak, moral, budi pekerti yang baik, memiliki kepribadian, kemandirian, keyakinan diri, dan disiplin yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buana, Mirza Satria, Erlina, Eka Yulia Rahman, *Paradigma Pendidikan Politik Anti Korupsi dan Kesetaraan Gender di Partai Politik*. Integritas: Jurnal Anti Korupsi, Vol. 7, No. 1 Tahun 2021. https://jurnal.kpk. go.id/index.php/integritas/article/ view/733/125

Dewi, Ike Yuli Mestika. 2019. *Karakter Toleran Pada Anak Sekolah Dasar*. Banten: CV AA Rizki

https://nasional.kompas.com

Karim, Busyro. 2015. Ijtihad Kebijakan: Catatan Pemikiran dan Solusi dalam Membangun Kabupaten Sumenep





- Selama 5 Tahun
- Lexy J. Moleong, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda
- Suhaidi, Mohamad. *Gagal Paham Tentang Dewan Pendidikan*, dalam Kabar
 Madura, 12 Januari 2017



Kajian Model Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket Berbasis Komunitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep

Ach. Syaiful, Siful Arifin, Amiruddin, Rasuki, Zainollah (Tim Peneliti LP2M INKADHA Beraji Sumenep)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menghasilkan model pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket di Kabupaten Sumenep dengan menjadikan komunitas program keluarga harapan (PKH) sebagai sasaran utama agar mendapatkan layanan pendidikan melalui program pendidikan kesetaraan kejar paket. Metode dalam penelitian ini menggunakan motode kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pendidikan kejar paket di Kabupaten Sumenep belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar penerima manfaat program keluarga harapan yang masih tergolong rendah. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka dalam penelitian ini dirumuskan model pendidikan kesetaraan kejar paket berbasis komunitas program keluarga harapan. Salah satu model yang ditawarkan adalah mengintegrasikan program pendidikan keseteraan kejar paket dengan program PKH. Teknis pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket berbasis Komunitas PKH ini bisa dilaksanakan dengan beberapa cara/model diantaranya, Pertama, kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan kejar paket program A.B dan C bisa dilaksanakan di lokasi komunitas PKH berada. Kedua. KPM PKH mendatangi tempat penyelenggara pendidikan kesetaraan kejar paket terdekat. Model yang pertama sangat dianjurkan, hal ini sesuai dengan keinginan KPM PKH.

Kata Kunci: *Pendidikan kejar paket, program keluarga harapan.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen dasar bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap negara memberikan prioritas yang tinggi terhadap pendidikan bagi warga negaranya, termasuk Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 mengamanatkan bahwa "setiap warga negara berhak mendapat-

kan pendidikan", sementara ayat 2 juga menyatakan bahwa "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya" Untuk mewujudkan amanat tersebut, pemerintah telah mempersiapakan tiga jenis pendidikan yakni pendidikan formal, informal dan non-formal. Ketiga jalur pendidikan tersebut dipersiapkan untuk melayani



semua warga negara agar mendapatkan pendidikan yang layak dan agar terbentuk manusia Indonesia yang berkualitas dan sejahtera. Namun faktanya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan pendidikan. Sebagian di antara mereka bahkan ada yang buta huruf, belum pernah mengenyam pendidikan, atau mengalami putus sekolah dengan berbagai macam alasan.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang masyarakatnya masih banyak mengalami buta huruf. Ia juga termasuk kabupaten dengan tingkat pendidikan masyarakat yang cukup rendah. Berdasarkan data terbaru, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumenep berada pada angka, 5,71 dan harapan lama sekolah berada di angka 13,2. Tentu hal ini berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia yang menyebabkan Kabupaten Sumenep masih mendapat predikat sebagai salah satu kabupaten tertinggal di provinsi Jawa Timur.

Kondisi di atas juga dapat dilihat dari data tingkat pendidikan Keluarga Penerima Manfaat (PKM) Program Keluarga Harapan (PKH) di salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumenep, yakni di Kecamatan Batu Putih. Berdasarkan data yang didapatkan dari salah satu pendamping PKH di Kecamatan Batu Putih, dari 2.512 Keluarga Penerima Manfaat PKH, sekitar 50% di antaranya tidak lulus Sekolah Dasar (SD/MI), 30% lulus Sekolah dasar (SD/MI), 15% lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS) dan hanya 5% yang mempunyai ijazah SMA atau yang sederajat. Fakta ini menunjukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumenep masih rendah, terutama dari aspek pendidikan.

Oleh karena itu, perlu inovasi dan terobosan baru untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumenep, termasuk merevitalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Kabupaten Sumenep sebagai salah

satu penyelenggara pendidikan kejar paket program paket A, B dan C. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, hampir semua kecamatan di Kabupaten Sumenep sudah dan atau pernah memiliki PKBM, hanya saja tidak terlaksana dengan baik karena berbagai kendala. Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ini berupaya mencari model yang tepat untuk menyelenggarakan pendidikan kejar paket berbasis komunitas Program Keluarga Harapan (PKH). Selain untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumenep, ia juga bertujuan agar masyarakat di Kabupaten Sumenep bisa mendapatkan layanan pendidikan tanpa terkecuali. Dari situ, fokus penelitian ini dapat dideskripsikan dalam rumusan masalah berikut: (1) Bagaimana kondisi tingkat pendidikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep? (2) Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket di Kabupaten Sumenep? (3) Bagaimana rancangan model pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket pada komunitas PKH di Kabupaten Sumenep?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menggambarkan kondisi pendidikan penerima bantuan Program Keluarga Harapan serta pelaksanaan pendidikan kejar paket di Kabupaten Sumenep. Model demikian diharapkan dapat memberi usulan tentang konsep/model yang cocok untuk melaksanakan pendidikan kesetaraan kejar paket berbasis komunitas PKH di Kabupaten Sumenep.

Secara khusus, penelitian ini berlokasi di Desa Larangan Bharma, Kecamatan Batuputih dan Desa Bancamara, Kecamatan Dungkek Sumenep. Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan beberapa alasan. Satu di antaranya adalah karena Kecamatan Batuputih dan Dungkek mer-



upakan dua kecamatan yang sudah mempunyai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam melaksanakan pendidikan kejar paket dari paket A, B dan C. Selain itu, berasarkan studi awal yang dilakukan oleh tim peneliti, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Dungkek memiliki kondisi pendidikan yang sangat rendah bahkan banyak yang tidak lulus Sekolah Dasar atau putus sekolah.

Subyek dalam penelitian ini, dengan demikian, adalah para pemangku jabatan dari Dinas Pendidikan yang membidangi pendidikan kejar paket dan Dinas Sosial yang membidangi pelaksanaan PKH. Warga masyarakat/keluarga penerima manfaat PKH juga merupakan subyek lain dalam penelitian ini, termasuk pengelola PKBM dan para tutor. Sementara itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3, yakni pengamatan, wawancara, dan dokumentas. Adapun analisisnya terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bertahap, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN A. Tinjauan tentang Pendidikan Kesetaraan

1. Pengertian Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah layanan pendidikan melalaui jalur non-formal bagi peserta didik yang karena beberapa faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat SD/MI, SMP/ MTs, dan SMA/MA. Program ini diselenggarakan oleh lembaga satuan non-formal dan diharapkan mampu membekali peserta didiknya dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SD/MI, SMP/ MTs, dan SMA/MA (Perbup Bondowoso). Dalam pengertian lain, pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan non-formal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal.

Bahwa pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan non-formal salah satunya disebutkan dalam UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 26 Ayat (3). UU tersebut berbunyi "pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik".

Pendidikan kesetaraan dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), PKBM, Lembaga Pelatihan Kursus, (LPK), Organisasi Sosial (Orsos), Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pondok Pesantren (Ida Kintamani, Dewi Hermawan: 68).

2. Tujuan Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan bertujuan untuk: (1). Memperluas pendidikan dasar sembilan tahun melalui pendidikan non-formal program Paket A (setara SD/ MI) dan Paket B (setara SMP/MTs) yang menekankan pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. (2). Memperluas akses pendidikan menengah melalui jalur pendidikan non-formal program Paket C (setara SMA/MA) yang menekankan pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. (3). Meningkatkan mutu daya saing lulusan serta relevansi program dan daya saing pendidikan kesetaraan program Paket A, Paket B dan Paket C. (4). Menguatkan tata kelola, akutanbilitas dan citra publik terhadap penyelenggara dan penilaian program pendidikan kesetaraan.

3. Progam Pendidikan Kesetaraan

Program pendidikan kesetaraan terdiri dari 3 paket, yakni Paket A, B dan



C. *Pertama*, Program Paket A adalah progam pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal setara SD/MI. Pemegang ijazah Program Paket A memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD/MI. Kedua, Program Paket B adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal setara SMP/MTs. Pemegang ijazah Program Paket B memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMP/MTs. Ketiga, Program paket C adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal setara SMA/MA. Pemegang ijazah Program Paket C memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMA/MA.

4. Sasaran Pendidikan Kesetaraan

Sasaran pendidikan kesetaraan terdiri dari penduduk yang berusia tiga tahun di atas usia wajar SD/MI (13-15 tahun) untuk Paket A dan tiga tahun di atas usia SMP/MTs (16-18 tahun) untuk Paket B. Selain itu, penduduk usia sekolah juga berasal dari mereka yang tergabung dalam komunitas *e-learning*, sekolah rumah, dan sekolah alternatif, serta komunitas dengan potensi khusus seperti pemusik, atlet, pelukis dan lain-lain. Termasuk juga ke dalam kategori ini adalah mereka vang terkendala untuk mengakses pendidikan ke jalur formal karena berbagai hal berikut: (a). Ekonomi, seperti penduduk miskin dari kalangan petani, nelayan, penduduk kumuh dan miskin perkotaan, pekerja rumah tangga, tenaga kerja wanita, pengrajin, buruh dan pekerja lainnya. (b). Kondisi geografis, etnik minoritas, suku terasing dan terisolir. (c). Keyakinan seperti warga pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal. (d) Mengalami masalah sosial/hukum seperti anak jalanan, korban NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya), anak Lapas, serta penduduk usia 15-44 tahun yang belum tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. (e). Penduduk usia SMA/MA yang berminat mengikuti program Paket C terutama karena masalah ekonomi. (f) Penduduk di atas usia 18 tahun yang berminat mengikuti program Paket C karena berbagai alasan.

5. Dasar Hukum Pendidikan Kesetaraan

Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan, Instruksi Presiden: No. 1 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, Keputusan Mendikbud Nomor 0131/U1994 tentang Program Paket A dan Paket B, Keputusan Mendiknas No 0132/U/2004 tentang Program Paket C, dan Surat Edaran Mendiknas No:107/MPN/MS/2006 tentang Eligibilitas Program Kesetaraan.

B. Tinjauan tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Berdasarkan PERMENSOS RI Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 1, Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin di bawah manajemen Pusat Data dan Informasi esejahteraan Sosial. Program ini dengan demikian merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau sejenisnya.

2. Tujuan PKH

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Kelu-



arga Harapan, tujuan PKH adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; (2). Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; (3). Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; (4). Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

3. Sasaran, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan PKH

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial (PERMENSOS RI Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 3). Sementara itu, hak Keluarga Penerima Manfaat PKH adalah: (1). Bantuan Sosial PKH; (2). Pendampingan PKH; (3). Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan (4). Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

4. Dasar Hukum PKH

Dasar hukum pelaksanaan pemberian PKH adalah: (1). Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (2). Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. (3). Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke-46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersayarat bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

5. Kondisi Pendidikan Peserta PKH di Kecamatan Batuputih

Jumlah penerima program PKH di kecamatan Batuputih pada tahap 4 tahun 2021 adalah sebanyak 2.512 KPM yang tersebar di 14 desa di Kecamatan Batuputih dengan rincian sebagai berikut; Desa Aengmerah 328 KPM, Badur 139 KPM, Bantelan 135 KPM, Batuputih Daya 117 KPM, Batuputih Kenek 168 KPM, Batuputih Laok 156, Bullaan 265 KPM, Gedang-Gedang 189 KPM, Juruan Daya 202 KPM, Juruan Laok 200, Larangan Barma 233 KPM, Larangan Kerta 171 KPM, Sergang 174 KPM, dan Tengedan 125 KPM.

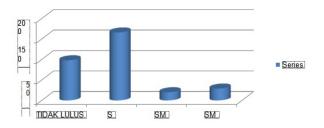
Desa Larangan Barma merupakan desa yang terletak di ujung barat Kecamatan Batuputih. Jumlah KPM PKH di desa ini adalah sebanyak 233 orang. Mayoritas KPM PKH Desa Larangan Barma tidak lulus sekolah dasar atau yang sederajat dengan rincian tidak lulus SD sebanyak 137 orang atau 59%. KPM, lulus SD atau yang sederajat sebanyak 73 orang atau 31%, lulus SMP atau yang sederajat sebanyak 19 KPM atau 8% dan yang lulus SMA atau yang sederajat sebanyak 4 KPM PKH atau 2% seperti tampak dalam tabel berikut;



6. Kondisi Pendidikan Peserta PKH di Kecamatan Dungkek

Sementara itu, di Desa Bancamara Dungkek, dari 313 penerima bantuan PKH, 98 (31%) di antaranya tidak tidak tamat Jenjang Sekolah Dasar (SD), 166 lain (53%) lulusan Sekolah Dasar, 20 (6%) lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 29 (9%) lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut kuantifikasi kondisi tingkat pendidikan KPM PKH Desa Bancamara Kecamatan Dungkek dalam tabel.





Keterangan dalam tabel di atas menunjukan bahwa tingkat pendidikan KPM PKH Desa Bancamara Kecamatan Dungkek masih dalam kategori rendah. Banyak KPM PKH yang belum lulus SMP dan SMA sederajat. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di 2 desa tersebut disebabkan beberapa faktor. Salah satu di antaranya adalah faktor pernikahan dini, faktor ekonomi, faktor geografis yang jauh dari lembaga pendidikan dan faktor-faktor lainnya.

7. Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket di Kabupaten Sumenep

Pendidikan kesetaraan kejar paket di Kabupaten Sumenep dilaksanakan oleh PKBM. Secara teknis, pelaksanaan 3 program tersebut di setiap PKBM sangat variatif. Ada yang terlaksana dengan baik, ada juga yang kurang efektif dalam pelaksanaannya. Namun demikian dari tinjauan instruksional (pembelajaran), pendidikan kesetaraan kejar paket yang diselenggarakan oleh PKBM di Kabupaten Sumenep sudah berjalan dengan baik mulai dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. PKBM yang ada sudah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan mengikuti pedoman penyelenggaraan dan melakukan pengembangan serta modifikasi yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing- masing penyelenggara.

Meski demikian ada beberapa kendala dan hambatan yang dialami PKBM sebagai penyelenggara pendidikan kejar paket di Kabupaten Sumenep. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: 1). Minimnya bantuan dari pemerintah sehingga sarana dan prasarana pembelajaran serta sarana penunjang lainnya kurang memadai, 2). Minimnya peminat dan jumlah warga belajar, 3). Minimnya tingkat kehadiran warga belajar yang sudah mengikuti PKBM karena warga belajar mempunyai kegiatan yang bervariasi sesuai profesinya mulai dari petani, nelayan, pedagang dll. 4). Batasan usia warga belajar (maksimal 21 tahun) yang bisa diajukan untuk mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sementara kebanyakan warga belajar pendidikan kesetaraan kejar paket adalah berusia di atas 21 tahun.

8. Model Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket Berbasis Komunitas PKH

Pendidikan Kesetaraan Keiar Paket Berbasis Komunitas PKH adalah sebuah model yang dirancang untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket di Kabupaten Sumenep. Model pendidikan kesetaraan ini mengkombinasikan dan mengitegrasikan program bantuan PKH dengan Pendidikan Kesetaraan. Penerima Bantuan PKH yang kondisi pendidikannya sangat rendah dapat diwajibkan oleh pemerintah untuk mengikuti pendidikan kesetaraan kejar paket berbasis komunitas PKH. Model ini bertujuan memudahkan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mendongkrak IPM dengan menjadikan peserta PKH di Kabupaten Sumenep sebagai sasaran kebijakan peningkatan pendidikan masyarakat. Kondisi pendidikan penerima bantuan PKH masih tergolong sangat rendah karena sebagian besar di antaranya adalah tamatan SD dan SMP/sederajat bahkan banyak juga yang tidak lulus SD/sederajat.

Secara konseptual, pendidikan berbasis komunitas juga disebut dengan pendidikan berbasis masyarakat (community-based education), yaitu sebuah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip "dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat." Artinya, pendidikan berbasis komunitas dilaksanakan berdasarkan kebutuhan komunitas dengan memposisikan komunitas



sebagai subyek dan bukan sebagai obyek pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Kondisi pendidikan KPM PKH di Kabupaten Sumenep masih tergolong sangat rendah. Berdasarkan data di lapangan, peserta PKH dengan pendidikan terakhir SMA/sederajat masih sangat minim. Kondisi pendidikan peserta PKH di Kabupaten Sumenep masih banyak yang hanya lulusan SD dan SMP bahkan yang tidak lulus SD/sederajat juga jauh lebih banyak.
- 2. Dari segi pelaksanaan, pendidikan kesetaraan kejar paket yang diselenggarakan oleh PKBM di Kabupaten Sumenep sudah berjalan dengan baik mulai dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan diantaranya adalah: 1). Minimnya jumlah peminat warga belajar, 2). Motivasi belajar masyarakat sangat rendah dibuktikan dengan tingkat kehadiran warga belajar dalam proses pembelajaran yang tidak sampai 100%. 3). Minimnya bantuan dari pemerintah sehingga sarana dan prasarana pembelajaran dan sarana penunjang lainnya kurang memadai. Minimnya bantuan ini karena adanya batasan usia warga belajar yang bisa diajukan untuk mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang mensyaratkan warga belajar harus berusia maksimal 21 tahun sementara kebanyakan warga belajar pendidikan kesetaraan kejar paket adalah berusia di atas 21 tahun.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian di atas, ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumenep. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut;

- 1. Rendahnya tingkat pendidikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep mengharuskan Pemerintah Kabupaten Sumenep membuat program pendidikan kesetaraan kejar paket berbasis komunitas PKH. Model program ini adalah mengintegrasikan program pendidikan keseteraan kejar paket dengan program PKH dn dikhususkan bagi KPM PKH di Kabupaten Sumenep.
- 2. Belum efektifnya pelaksanaan pendidikan kejar paket yang diselenggarkan oleh PKBM di Kabupaten mengharuskan pemerintah Kabupaten Sumenep merevitalisasi dan mengoptimalkan kembali PKBM yang sudah ada atau memperbanyak lembaga-lembaga yang bisa menyelenggarakan pendidikan kesetaraan kejar paket.
- 3. Pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat segera menginstruksikan kepada penyelenggara PKBM agar bersinergi dengan komunitas PKH untuk melaksanakan pendidikan kesetaraan kejar paket program A,B dan C. Teknis pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket berbasis Komunitas PKH bisa dilaksanakan dengan beberapa cara/model di antaranya: Pertama, kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan kejar paket program A, B dan C dilaksanakan di lokasi komunitas PKH berada. Kedua, KPM PKH mendatangi PKBM terdekat untuk mengikuti kegiatan pendidikan kesetaraan kejar paket program A, B dan C. Model yang pertama sangat dianjurkan karena ini sesuai dengan keinginan KPM PKH.
- 4. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan BOP khusus atau bantuan khusus lainnya kepada PKBM sebagai



pelaksana pendidikan kejar paket dan juga kepada warga belajar, khususnya KPM PKH yang tidak tercatat sebagai penerima BOP karena faktor usia (> 21 Tahun) mengingat angka atau jumlah peserta PKH yang melebihi usia 21 tahun sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Berlian, N. Faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Jurnal pendidikan dan kebudayaan, vo. 17, nomor 1. 2011.
- Cohen, Louis, et. all. 2007. *Research Meth-od in Education (Six Edition)*. New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Creswell, John W. 2012. Educational Research: Planing, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. USA: Pearson Education Inc.
- David E. Gray. 2004. *Doing Research in the Real World*. London: Sage Publication.
- Fraenkel, Jack R. and Wallen E Norman. 2009. *Design and Evaluate Research in Education*. New York: Beith Mejia.
- Fatmawati, Erma, dkk. Kompilasi Hasil Penelitian Sosial Keagamaan. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, 2013.
- Gray, David E. 2004. *Doing Research in the Real World*. London: Sage Publication.
- Handayani, R. *Pengelolaan Program Pen-didikan Kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Citra Ilmu*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. From: http://lib.unnes.ac.id/29723/1/1201413059.pdf
- Kintamani, Ida, Dewi Hermawan, Kinerja Pendidikan Kesetaraan sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012.

- Kamil, M, Pendidikan Nonformal Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Kementerian Sosial RI. 2019. *Apa Itu Pro-gram Keluarga Harapan*. https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangp-kh-1.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitataif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mandiri, Asa, *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta : Asa Mandiri, 2006.
- Permendiknas nomor 20 tahun 2003 tentang sisem pendidikan nasional. From: http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf
- Raharjo, Tri Joko. *Model Pengembangan Tenaga Kependidikan Tutor Kes etaraan Kejar Paket A, B, dan C,* Semarang: UNNES Press. 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:
 Remaja Rosdakarya.
- Tirani, O. Implementasi Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Poso.
- Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017.
- Utomo, D,. Hakim, A & Ribawanto, H., Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, 2014.
- Umaroh, F., Sutjiatmi, S., Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Pancasakti Government Journal. Vol 2 No 2, 2019.

Pembangunan Berorientasi *Li Maslahati al-Ummah* (Menuju Kabupaten Sumenep *Thayyibah Warabbun al-Ghafur*)

Abdul Basid¹, Syamsuri²
(¹INSTIKA Guluk-Guluk, ²Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep)

ABSTRAK

Program pembangunan bagi setiap instansi di kabupaten Sumenep setidaknya mengarah kepada kebaikan untuk masyarakat. Konsep ini Peneliti bahasakan dengan pembangunan berorientasi li maslahil al-Ummah. Kebijakan dan semua program yang memiliki target kepada perbaikan demi kebaikan semua warga di kawasan Sumenep setidaknya bisa dirancang sedemiian baik dan maksimal. Desain rancangan program dan kebijakan tersebut diantaranya perlu menggali dari khazanah lokal di Kabupaten Sumenep. Kedua, acuan dari semua kebijakan dan program pembangunan bisa mempertimbangkan kebaikan bagi masyarakat yang berada di daerah kepulauan dan daratan. Ketiga, evaluasi dari setiap kebijakan dan program pembangunan Sumenep bisa dilakukan secara baik. Supaya bisa mengukur setiap capaian dan temuan yang ada di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif tulisan ini mencoba menelaah realitas potensial di daerah Sumenep untuk menjadi dalil progressif membuat rancangan program pembangunan Sumenep yang li maslahatil al-Ummah.

Kata Kunci: Pembangunan, Sumenep, Li Maslahatil al-Ummah

A. Pendahuluan

Kabupaten Sumenep menjadi salah satu kawasan yang saat inimenarik banyak simpati warga di luar daerah. Alasannya sangat sederhana, karena kabupaten Sumenep memiliki potret keindahan alam yang ditengarai tidak ada di luar daerah Madura. Salah satu objek wisata yang saat ini sedang viral adalah pulau dengan kandungan oksigen dengan nilai taraf internasional. Selain ini ada sekian potensi lainnya yang menjadi kekayaan luar biasa bagi Sumenep. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tepatnya, pulau Madura. Pulau Madura sendiri memiliki empat kabu-

paten. Pada ujung barat adalah kabupaten Bangkalan, disusul kabupaten Sampang, lalu kabupaten Pamekasan, dan ujung paling timur adalah kabupaten Sumenep. Data Diskominfo Sumenep, kabupaten Sumenep telah mencapai usia 750 tahun. Usia ini secara secara sepintas menjadi modal penting bagi tanah Adipati Aria Wiraraja ini untuk terus hadir berkompromi dengan segala kemajuan pada setiap generasi. Dibanding sejumlah kabupaten di provinsi jawa Timur seperti Banyuwangi (245 tahun), Lamongan (447 tahun) dan Kota Surabaya (724 tahun) usia kabupaten Sumenep masih lebih tua dari. Rentang usia yang lumayan tua ini menuntut ka-



bupaten Sumenep mampu berkiprah pada setiap kemajuan dalam setiap zamannya. Termasuk, di abad 21 ini.

Perjalanan antargenerasi ke generasi dalam masa pemerintahan Sumenep, sudah ada sekian prestasi/kemajuan yang ditorehkan. Kemajuan yang digarap oleh setiap generasi dalam kurun waktu tertentu sesuai masa pemerintahan sudah mampu mengakomodir sejumlah potensi yang ada di tanah kabupaten Sumenep. Mulai dari potensi laut, pertanian, air, hasil bumi bumi, seni ukir, dan objek wisata. Lain hal lagi, kabupaten Sumenep masuk dalam daftar kabupaten yang memiliki potensi kilang minyak terbesar di Indonesia. Bahkan, sumber pendapatan hasil minyak dari sumur minyak yang ada di sejumlah titik di kabupaten Sumenep selama ini dinilai sebagai penyuplai pendapatan terbanyak di tanah air ini (Busyro, 2015:5).

Dari sederet data yang ada, usia vang sudah tua dalam tahapan pemerintahan di Kabupaten Sumenep sudah berganti banyak penguasa. Mulai dari raja sampai istilah bupati. Data yang dirilis salah satu media lokal Sumenep, ada 36 raja (1269-1929) dan 16 bupati (1929-sekarang). Ada tiga indikator utama yang sudah menopang perjalanan kabupaten Sumenep menapaki sejumlah titik kemajuannya. *Pertama*, berjalannya arus investasi dan bisnis serta nilai investasi vang maksimal, realisasi investasi di Sumenep dalam dua tahun terakhir mencapai Rp. 1,322 triliun. Sehingga kabupaten Sumenep masuk dalam 100 kabupaten di Indonesia yang memiliki pendapatan investasi besar dalam setiap tahunnya. (KH. A Busyro Karim, "Kebangkitan Ekonomi Sumenep", Tabloid Mata Sumenep, 2014: 3).

Kedua, perkembangan perekonomian di kabupaten Sumenep dalam perjalanannya berkembang sangat baik. Laporan BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Sumenep hanya 4,44 %, lalu semakin meningkat, yaitu: tahun 2010 menjadi 5,64 %, meningkat

menjadi 6,24 % di tahun 2011, dan 6,44 % di tahun 2013. Indikator ketiga dari keberhasilan Sumenep menghadapi Otoda adalah semakin tingginya daya beli masyarakat, bahkan tertinggi dari ketiga kabupaten di Madura. Daya beli masyarakat Sumenep pada tahun 2011 di kisaran 66,67 % meningkat menjadi 68,03 % pada tahun 2013. Jadi, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Sumenep yang semula Rp. 644.190 (enam ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) pada tahun 2012 menjadi Rp. 649.290 (enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) di tahun 2013.

Akan tetapi dari setiap tahapan kemajuan dan prestasi yang sudah dicapai oleh setiap periode pemerintahan di kabupaten Sumenep ada sekian persoalan yang kemasyarakatan, tata kelola ruang, dan sekian administrasi lainnya yang membutuhkan pembenahan. Wajar saja, karena setiap kemajuan tidak selamanya sempurna. Diantara sekian kekurangan dari setiap kemajuan yang sudah diraih oleh setiap periode pemerintahan di kabupaten Sumenep adalah pergerakan ekonomi rakyat kelas bawah. Seperti pedagang dengan modal kecil dan dengan pengetahuan manajerial pemasaran yang masih minim. Realitas potensi yang luar biasa dengan nasib pengusaha tape yang tidak sejahtera ini menjadi ancaman serius bagi masa depan usaha tape di kabupaten Sumenep. Minimnya keterampilan dan kemampuan dalam niaga tape, pengetahuan IT, dan jaringan akan menjadikan usaha rakyat di bidang tape ini tak menutup kemungkinan akan tinggal namanya saja. Ada banyak hal yang menjadi menjadi kendala di tingkatan pengusaha tape. Selain disebutkan di awal sulitnya jaringan pemasaran karena kondisi tempat tinggal yang berada di kawasan pedalaman juga semakin mengancam masa depan pengusaha tape di Sumenep. Apabila kondisi dibiarkan, maka jaringan kemiskinan di Sumenep bisa semakin bertambah. Sehingga pem-



binaan untuk peningkatan kesejahteraan para pengusaha tape di Sumenep ini sangat dibutuhkan dan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Salah satu konsep yang juga bisa dihadirkan untuk membuat program pembangunan di Sumenep yang baik program dan kebijakan berorientasi *li Maslahil al-Ummah*.

B. Substansi Dalil li maslahatil al-Ummah

Kabupaten Sumenep selain kaya dengan potensi alam dan sumber daya manusianya, kawasan ini termasuk daerah dengan jumlah pondok pesantren banyak. Bahkan selain pondok pesantren juga berdiri sekian lembaga pendidikan agama di daerah dan kepulauan. Realitas ini menjadi alasan untuk menyimpulkan kabupaten Sumenep sebagai daerah relegius, kawasan santri, tempat penuh dengan energi pengetahuan. Tentu sebagai daerah dengan jumlah lembaga pendidikan agama yang lumayan banyak, maka menggali dasar pada setiap kegiatan pembangunan di Sumenep sesuatu yang sangat wajar. Asumsinya bahwa dalam setiap materi ilmu agama yang dipelajari di sujumlah lembaga pendidikan termaktub ajaran penuh kearifan. Setidaknya ajaran tersebut nanti akan menjadi referensi penuh nasehat dalam mengawal setiap kebijakan dan program yang ada di kabupaten Sumenep.

Dunia pendidikan (agama) kental dengan nasehat-nasehat kebaikan yang dicetuskan oleh ulama. Ulama terkemuka mengisi setiap ruang kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan agama Islam di kabupaten Sumenep. Para ulama menulis aneka kitab dengan model dan variasi kajian. Sebut saja para ulama tersebut diantaranya imam al-Ghazali yang kitab-kitabnya diantaranya ayyuha al-Walad, Miskatu al-Anwar, Ihya Ulumiddin. Karya imam al-Ghazali secara umum berisi tentang sajian nasehat-nasehat kebaikan. Kebaikan bagi diri sendiri dan akan memiliki efek manfaat kepada orang di sekitarnya. Selain imam al-Ghazali ada juga ulama

bernama imam Nawai al-Bantani. Karyakarya beliau sering dipelajari dan dikaji di sejumlah lembaga pendidikan Islam di kawasan Sumenep, khusunya pondok pesantren. Karya beliau yang sering dikaji oleh pada santri dan pelajar di Sumenep adalah *al-Muraqi al-Ubudiyah*. Sama dengan kajian karya imam al-Ghazali, karya syekih Nawawi al-Banteni juga berisi sekumpulan nasehat kebajikan bagi diri dan orang lain.

Secara umum sebagian besar kajian di dalam karya ulama yang dipelajari dan dikaji di sejumlah Lembaga Pendidikan Islam (LPI) memiliki orientasi kebaikan dunia dan akhirat. Yang substansial juga, kebaikan tersebut apabila dilaksanakan secara baik memiliki target kebaikan bagi semua orang (li Maslahati al-Ummah). Konsep kebaikan bagi semua orang di dalam al-Our'an juga pada akhirnya akan membentuk pribadi yang khairu ummah/ generasi terbaik. Islam memiliki sekian konsep mencerahkan, mencerdaskan, memakmurkan, dan berorientasi bagi kebaikan semesta. Maka atas realitas tersebut agama Islam disebut sebagai agama rahmatan lil alamin. Agama dengan segenap ajaran hukum, akhlak, dan perihal lain yang baik dan benar.

Jika menelaah kajian ilmu pengetahuan agama di dalam Islam, maka bangunan agama Islam diantaranya adalah menyempurnakan kebaikan diri dengan cara menjaga jiwa raga secara baik dan benar (hifdzun nafs). Menjaga diri dalam Islam bisa diwujudkan dalam banyak cara dan kegiatan. Contoh yang sederhana seperti bersedekah. Kegiatan ini oleh sebagian ulama dengan merujuk kepada dalil hadis bisa dilakukan dengan aneka cara. Mulai dari memberikan materi berupa harta benda, uang, makanan dan sebagainya. Namun, apabila belum mampu bisa dengan cara berbuat baik kepada orang lain. Apabila belum mampu, maka setidaknya kita mencegah membuat perilaku yang mengganggu orang lain. Sedekah dalam



ajaran Islam juga tidak harus berupa material, namun pekerjaan yang dilakukan untuk kebaikan kelurga juga menjadi sedekah dan bernilai kebaikan. Bahkan di dalam sejumlah kajian, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa buah-buahan yang kita tanam dan dimakan oleh hewan menjadi sedekah kebaikan bagi pemiliknya (Al-Nawawi, 1964: 82).

Dasar kajian yang digali dan dikembangkan dari ajaran kebaikan di dalam Islam ini secara prinsipil bisa dilanjutkan dalam program sosial dan kemanusiaan dalam konteks lebih riil. Ajaran kebaikan berlandaskan dan berorientasi bagi kebaikan bagi semesta akan mempercepat semua kegiatan yang dirancang secara formal. Ajaran-ajaran adiluhur berupa konsep berbuat (beramal) li maslahati al-Ummah ini secara akademik memiliki muatan nilai signifikan. Nilai-nilai tersebut dalam kajian ini akan menjadi salah satu komponen yang memperkuat konsep li maslahati al-Ummah ini bisa dijadikan landasan dalam menggarap mega program bagi pembangunan suatu kawasan, seperti kabupaten Sumenep.

C. Integerasi Konsep Agama dan Program Pembangunan

Pemerintahan identik dengan program dan sederet progam Pembangunan (development). Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan jangka pendek dan jangka panjang yang direncanakan secara baik dan terukur. Pembangunan yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh setiap masa pemerintahan ditargetkan mencapai perubahan kea rah yang lebih baik. Sehingga capaian pembangunan dengan temuan pembangunan bisa sinergis agar pada setiap tahapan pelaksanaan program pembangunan tersebut bisa sempurna. Setidaknya, setiap kelebihan dan kekuranan dari agenda program yang dibuat bisa dianalisis dan dievaluasi secara tepat dan cepat. Program pembangunan di kabupaten Sumenep selama ini memang sudah lumayan berjalan baik. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah kemajuan dari setiap tahapan pelaksanaannya, sebegaimana Penulis gambarkan di awal pembahasan.

Program kerja yang berorientasi pada prubahan dan sektor riil pembangunan kawasan Sumenep diantarnya meliputi; pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai jenis dan metodenya, pengembangan dan peningkatan sumber daya alam dan manusia, penyempurnah jaringan IT dan akses informasi publik, infrastruktur di kawasan perkotaan dan pedesaan, serta program sosial lainnya yang memiliki kaitan dengan penataan administrasi dan tata kelola ruang di Sumenep. Semua kemajuan dari program pembangunan dimaksud setidaknya dalam setiap masa pemerintahan bisa dijaga dan dikembangkan menjadi lebih maksimal. Program pembangunan yang sudah terencana, baik program pembangunan yang sifatnya jangka pendek dan jangka panjang secara maksimal akan menjadi sangat paripurna ketika landasan teoritis dan praktisnya bisa disinergikan dengan khazanah lokal yang ada di kabupaten Sumenep. Hal ini penting dibangun dan digencarkan untuk menciptakan kebiasaan sadar akan sanksi moral pada setiap kegiatan yang dilakukan. Islam menegaskan, bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia akan mendapat ganjaran dari sang Maha Pencipta.

Tujuan dari setiap agenda pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dalil-dalil yang digali dari ajaran Islam yang li maslahati al-Ummah seperti *al-ta'awun* (tolong menolong), *al-Musyawarah* (diskusi), *Al-Musyarakah* (koordinasi), dan nilai penting lainnya yang bertujuan kebermanfaat bagi sekalian masyarakat (Rahem, 2019:60). Penting dibaca, bahwa kehebatan suatu masa pemerintahan salah satunya karena keterlibatan aktif dari semua komponen masyarakat. Masyarakat yang baik ada-



lah mereka yang meluagkan kesempatan untuk menuangkan dan menyampaikan gagasannya untuk membantu program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah setempat. Kabupaten Sumenep selama ini dikenal sebagai kawasan dengan daerah yang masih mempertimbangkan segala kebermanfataan bagi masyarakat di kawasan pulau dan daratan. Program pembangunan Sumenep di daratan dan kepulauan terus berjalan. Sehingga kehadiran masyarakat dalam berbagai program kegiatan pembangunan bisa disakssikan langsung dan masyarakat bisa menilai secara objektif. Integerasi dalil yang digali dari ajaran agama Islam dengan setiap program yang direncanakan dan dilaksanakan di kabupaten Sumenep secara prinsipil agar bisa terukur secara baik. Rasionalisasinya, nanti setiap capaian pembangunan dan temuan pembangunan bisa dilacak secara ilmiah.

D. Implementasi Konsep Li Maslahati al-Ummah di Sumenep

Kabupaten Sumenep merupakan kawasan dengan kekayaan alam, kebudayaan, dan arsitektur seninya yang luar biasa (Bouvier, 2002:87). Salah satu daerah yang dikenal memiliki empu pembuat keris berlevel nasional ada di kabupaten Sumenep. Daerah itu bernama desa aeng ton tong dan sejumlah desa di kecamatan Saronggi Sumenep. Produk berupa keris yang digarap oleh para empu mampu menyihir banyak pecinta benda pusaka. Hasil keris dengan tekstur khas Sumenep selama ini dianggap sudah mampu menyelamatkan warisan penting dari lelulur Indonesia. Sebagai negeri dengan fase kerajaan di masa awal, maka keberadaan penghasil keris ini sudah menahbiskan kabupaten Sumenep sebagai salah satu warisan dunia yang akan selalu dibaca banyak orang. Ini fakta bahwa kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang potensial dan bisa berkompetisi dalam pentas bergengsi dunia.

Selain kekayaan seni keris, kabupaten Sumenep juga memiliki sekian objek wisata yang terhampar di daerah darat dan kepulauan. Kekayaan alam tersebut selama ini sudah terpantau banyak turis internasional. Bahkan obiek wisata relegius juga terdapat di kabupaten Sumenep, berupa keraton Raja dan pemakanan para Raja di kabupaten Sumenep. Potensi-potensi ini menjadi nilai tawar tersebut bagi kabupaten Sumenep untuk tampil dan menjadi daerah favorit di Jawa Timur. Maka setiap program pembangunan dengan konsep li maslahati al-Ummah seperti gambaran di atas bisa diimplementasikan melalui banyak cara sebagai berikut: pertama, penyebaran lewat lembaga pendidikan dalam berbagai tingkat satuan. Sosialiasi tentang rancangan program pembangunan sumenep yang baik perlu disampaikan kepada semua masyarakat terdiri dari semua level. Anak didik di sejumlah lembaga pendidikan yang ada akan mengetahui program penting Sumenep, terutama yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan di Sumenep. Gerakan menggandeng lembaga pendidikan dan insan akademik ini akan mempercepat sajian program pembangunan Sumenep. Setidaknya manfaat yang akan didapat, keterlibatan insan akademik dalam rancangan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan Sumenep bisa mendapat pengawalan dan pengawasan secara terukur.

Kedua, program pembangunan Sumenep ke depan lebih mengedepankan keberpihakan kepada rakyat bawah. Seperti pengembangan ekonomi masyarakat dengan tekstur tradisional. Harus disadari kabupaten Sumenep selama ini memeliki sejumlah potensi berupa profesi warga dengan sektor usaha lokal. Sebut saja misalkan di kecamatan Guluk-guluk terdapat warga di dua desa menekuni usaha produktifitas tape. Tape yang ditekuni warga berdasarkan observasi dari Penulis memiliki kualitas yang lumayan khas. Tape tersebut



diproduksi oleh warga di desa Payudan Dungdang dan Desa Pordepor. Akan tetapi dari setiap tahapan kemajuan dan prestasi yang sudah dicapai oleh Sumenep pada setiap pemerintahannya, nasib pengusaha tape di sejumlah kecamatan sebagai bagian penting dari ritme perekonomian Sumenep masih berjalan tidak maksimal. Masyarakat yang bergerak di usaha olahan singkong menjadi tape seperti berperang tak pernah menemukan kata kemenangan. Hasil yang mereka dapat dari penjualan tape sebatas mampu memodali pengolahan dalam jumlah berikutnya. Padahal, olahan tape khas kabupaten Sumenep selama sudah dikenal banyak warga di luar kabupaten Sumenep.

Maka realitas ini memerlukan kehadiran pemeirntah dan semua komponen masyarakat dalam menyempurnakan setiap program pembangunan yang sudah dicanangkan dan dilaksanakan. Aktualiasi dari penyempurnaan tersebut melalui jawaban kongkrit dengan memberikan akses layanan pasar dan bantuan material kepada semua pelaku ekonomi. Jika berkaitan dengan profesi lainnya, program yang dibutuhkan bisa menyentuh warga bersangkutan. Semua butuh kekompakan dari semua pihak di kabupaten Sumenep. Sebab, pemerintah dan masyarakat adalah komponen yang satu sama lainnya saling menyempurnakan. Sinergitas pemerintah dan warga ini dengan desain program yang baik pada akhirnya akan menciptakan Suansa kabupaten Sumenep yang semakin sejahtera, makmur; sakinah wa rahman tahoyyibah wa rabbun ghafur.

E. Penutup

Mendesain perubahan kabupaten Sumenep ke arah yang lebih baik membutuhkan usaha yang terus menerus. Kemajuan satu masa tidak bisa berhenti begitu saja, namun memerlukan tahapan lanjutan dari masa sesudahnya. Program pembangunan pada periode sebelumnya sudah baik, dan saat ini pada pemerintahan yang baru program yang akan menjadi lebih baik lagi. Kesadaran semua pihak di kabupaten Sumenep untuk bersatu mewujudkan kabupaten yang ramah dan makmur harus dalam satu irama. Salah satunya, irama program pembangunan tersebut dengan selalu mempertimbangkan khazanah kebudayaan lokal yang ada. Sebab, meski kemajuan sudah membumi keberadaan buaya lokal yang menjadi warisan nenek moyang di Sumenep tidak akan punah.

Al-hasil, artikel konseptual ini mencoba menyegarkan secara simultan kesadaran semua pihak di kabupaten Sumenep untuk bersatu membangun Sumenep. Kesadaran menjadi bagian dari program pembangunan Sumenep merupakan salah satu kekayaan tersebut yang tak kalah dengan kekayaan lainnya. Menata kesadaran ini membutuhkan jangka waktu yang lama. Selain itu, juga membutuhkan komitmen tinggi dari semua warga di Sumenep. Kesadaran untuk bangkit dan membangun Sumenep akan menjadi awal dan pilar utama menjaga Sumenep sema-Semoga kabupaten Sumenep kin baik. dengan pemerintahaan yang baru ini akan semakin lebih baik dan lebih maju. *Amin*.

Daftar Pustaka

Jonge, Huub de. *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, Dan Islam Suatu Studi Antropologi Ekonomi.* Jakarta: Gramedia, 1989.

______, Garam, Kekerasan, Dan Aduan Sapi: Esai-Esai Tentang Orang Madura Dan Kebudayaan Madura. Yogyakarta: LKIS, 2011.

Helena Bouvier, 2002. *Lebur, Seni Musik* dan Pertunjukan Masyarakat Madura, Jakarta: Yayasan Obor.

Karim, KH. A Busyro. 2014. "Kebangkitan Ekonomi Sumenep", Tabloid Mata Sumenep.

Menzies, Allan, 2014. Sejarah Agama-Agama. Yogyakarta: FORUM, 2014.



- M.C. Ricklefs, 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (terj.)*, Jakarta: Serambi.
- Moleong, Lexy J., 2007. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda, 2007 Nasution, Metode Researh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rendra, 2010. *Mempertimbangkan Tradisi*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Rifai, 2007. *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan Dan Pandangan Hidupnya*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Sunarti, Euis. 2006. Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan,

- *Evaluasi, dan Keberlanjutan*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, IPB.
- Tim. Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2009, Sumenep Regency In Figure 2009. Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2009.
- UU No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Wiyata, A. L., 2002. Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura. Yogyakarta: LKiS.
- Rahem, Zaitur, 2019. *Jejak Intelektual Pen-didikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.



Strategi Pengembangan Kualitas Pendidikan (Studi Multisitus di Sekolah Unggulan SDN Pangarangan 1 dan SMPN 1 Sumenep)

Ahmad Shiddiq, Asmoni, Jamilah, Agusriyanti Puspitorini, Mulyadi (Tim Peneliti LPPM STKIP PGRI Sumenep)

ABSTRAK

Upaya pengembangan menuju sekolah unggulan di Kabupaten Sumenep menghasilkan beberapa prestasi baik di tingkat daerah, regional maupun nasional. Untuk itu, penelitian ini fokus pada strategi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi program sekolah unggulan di SDN Pangarangan I dan SMPN I Sumenep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multi kasus dan metode fenomenologis naturalis. Penelitian ini mengungkap tiga kesimpulan: Pertama, strategi sekolah unggulan dilaksanakan dengan melakukan perencanaan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sementara itu, implementasinya adalah melalui agenda mewujudkan tujuan dan sasaran sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain: (1) perumusan visi, misi dan tujuan sekolah, (2) evaluasi diri sekolah, (3) optimalisasi peranan kepala sekolah, dan (4) peningkatan mutu guru. Kedua, implementasi program Sekolah Unggulan dilakukan dengan menjadi sekolah model atau sekolah rujukan baik sebagai Sekolah Penggerak, Sekolah Ramah Lingkungan, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Ketiga, proses monitoring dan evaluasi Sekolah Unggulan dilakukan dengan melakukan kontrol terhadap standarisasi kompentensi guru, pendampingan, dan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang membidangi.

Kata Kunci: Strategi Pengembangan Sekolah, Sekolah Unggulan, Mutu Pendidikan, Kabupaten Sumenep

A. PENDAHULUAN

Problem pokok sistem pendidikan turut menyumbang terhadap rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Problem tersebut terlihat dari aspek manajemen pendidikan, disparitas sarana dan prasarana pendidikan antarkota dan desa, dorongan pemerintah yang rendah, *mindset* masyarakat, lemahnya kualitas sumber daya pendidik, dan standarisasi evalua-

si pembelajaran yang minim (Fitri, 2021: 1617). Tercatat ada kurang lebih 148.244 Sekolah Dasar (SD), 24.560 Madrasah Ibtidaiyah, 16.934 Madrasah Tsanawiyah dan 38.960 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jumlah satu pendidikan yang banyak tersebut hingga kini menyisakan banyak persoalan pendidikan, terutama peningkatan kualitas satuan Pendidikan Dasar. Kuantitas tanpa kualitas tersebut



menyebabkan banyak sekolah ditinggalkan masyarakat, sementara angka kelulusan hanya menjadi indikator pembangunan semu (Arifin, 2004 : 4-5).

Dalam hal ini, Beeby melakukan asessment terhadap kondisi pendidikan di Indonesia (Beeby, 1981:3). Menurutnya ada dua hal yang menjadi problem pendidikan di Indonesia; pertama adalah kekurangan biaya serta sarana-prasarana sementara yang kedua adalah persoalan non-material. Bahkan, menaikkan anggaran pendidikan menjadi 20 % dari total APBN Indonesia sebagaimana amanat undang-undang ternyata tidak mampu menjadi solusi. Hingga kini, temuan Beeby masih relevan dijadikan rujukan mengingat makin kompleksnya problem di lapangan meliputi minimnya kesejahteraan guru honorer, rendahnya tingkat SDM guru, minimnya kualitas peserta didik, minimnya pendidikan agama, moral dan akhlak, tingginya tingkat persaingan antarsekolah, tuntutan yang tinggi bagi guru, kurikulum yang berubah-ubah, rendahnya profesionalitas guru, dan seterusnya. Dari beberapa persoalan tersebut, Afrita Angrayni memetakan persoalan pendidikan menjadi empat aspek, yakni rendahnya layanan, mutu, kualitas pendidikan tinggi, dan kemampuan literasi anak-anak Indonesia (Angrayni, 2).

Senada dengan itu, Mohammad Ali juga melihat persoalan pendidikan di Indonesia pada tiga aspek berikut. *Pertama*, sulitnya akses pendidikan bagi anak-anak dari daerah terpencil serta kesenjangan antara anak desa dan kota terhadap akses pendidikan yang berkualitas. *Kedua*, rendahnya kualitas pendidikan berdasarkan kajian internasional PISA dan TIMS dengan indikator akademik dan non akademik yang didukung oleh masih tingginya pengangguran. Ketiga, buruknya tata kelola dan akuntabilitas yang disebabkan belum berkembangnya prakarsa kreatif untuk memperkuat kualitas pendidikan serta pertanggungjawaban dalam proses pendidikan maupun pembiayaan (Ali, 2009: 238-270).

Untuk mengatasi problem tersebut. diperlukan berbagai langkah pengembangan sekolah melalui berbagai upaya-kebijakan strategis oleh Dinas Pendidikan dan lembaga satuan pendidikan. Di Sumenep, lembaga satuan pendidikan sekolah dasar yang dianggap sebagai unggulan di antaranya adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pangarangan 1 dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pajagalan 1. Sementara itu, Sekolah Unggulan pada lembaga satuan pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 1 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Kota Sumenep. Lembaga-lembaga di atas telah melakukan berbagai upaya pengembangan untuk menjadi sekolah unggulan dan menorehkan beberapa prestasi baik di tingkat regional maupun nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah: (1). Strategi Sekolah Unggulan di SDN Pangarangan I dan SMPN I Sumenep. (2). Implementasi program Sekolah Unggulan di SDN Pangarangan I dan SMPN I Sumenep. (3). Monitoring dan evaluasi Sekolah Unggulan di SDN Pangarangan I dan SMPN I Sumenep.

B. METODE PENELITIAN

Dengan pendekatan kualitatif dan rancangan studi multisitus, penelitian ini menggunakan dengan metode fenomenologis naturalis. Kehadiran peneliti sejak 2021 dilakukan secara intensif. Sumber data yang berupa manusia dan bukan manusia digali dengan observasi lapangan, wawancara mendalam dan dukumentasi. Sementara itu, analisis data menggunakan teori Mile Huberman Saldana melalui tiga tahap yaitu kondensasi data (pengembunan), penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengecekan keabsahan data yang diperoleh dilakukan dengan meununjukkan derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), keter-



gantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengembangan Sekolah Unggulan 1. Sekolah Unggulan

Sekolah Unggulan adalah sekolah yang mampu membawa setiap siswanya mencapai kemampuan masing-masing secara terukur dan menunjukkan prestasinya. Sekolah unggulan umumnya dianggap sebagai sekolah bermutu meski dalam penerapannya, banyak kalangan menganggap bahwa dalam kategori unggulan, tersirat harapan mengenai apa saja yang dapat diberikan kepada siswa vang telah lulus. Harapan tersebut sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang tua siswa, pemerintah, masyarakat bahkan siswa sendiri, utamanya terkait output dan outcome yang diberikan sekolah meliputi kemampuan intelekual, moral dan keterampilan yang dapat berguna bagi masyarakat, negara dan agama. Banyak pihak mendeskripsikan sekolah unggul sebagai lembaga pendidikan yang memiliki keunggulan dalam berbagai sisi, termasuk unggul dalam jumlah siswa. Semakin banyak jumlah siswa yang mampu direkrut, maka sebuah sekolah akan dianggap unggul. Padahal, sekolah unggul pada prinsipnya memiliki ciri-ciri khusus yang sekaligus menjadi dasar utama dalam menentukan unggul tidaknya sebuah lembaga pendidikan.

Secara teoretis, ciri-ciri sekolah unggul adalah sebagai berikut: (1) memiliki siswa dengan bakat khusus dan kemampuan serta kecerdasan yang tinggi; (2) memiliki tenaga pengajar yang profesional dan handal; (3) memiliki kurikulum yang diperkaya (eskalasi); (4) memiliki sarana dan prasarana yang baik seperti ruang kelas, taman bermain, laboratorium, ruang komputer, perpustakaan, dan lapangan olah raga yang dapat meningkatkan prestasi siswa. Selain itu, sekolah unggul juga dicirikan dengan media belajar yang

cukup lengkap meliputi buku pelajaran dengan perbandingan 1 buku untuk setiap mata pelajaran untuk 1 siswa, ruang ibadah yang bersih dan rapi, tenaga konseling dan ruang konseling yang dilengkapi dengan kotak P3K, tempat tidur, dan peralatan lainnya. Jumlah siswa dalam kelas maksimum 30 orang.

Sementara Kurniasih itu. menyebutkan bahwa sekolah unggul harus mampu mengelola siswa untuk menjadi pribadi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik individual masing-masing (Kurniasih, 2009: 49). Sekolah unggul juga dicirikan sebagai lembaga yang mampu dan sanggup mendidik sisiwanya menguasai sains dan teknologi. Staf pengajar di sekolah unggul diharuskan memiliki kriteria tersendiri sebagai seorang pendidik. Kriteria tersebut mencakup: (1) guru profesional yang memiliki kompetensi tinggi dalam menguasai kurikulum, materi pembelajaran, metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang berkualitas; (2) berprestasi, menguasai teknik-teknik evaluasi pembelajaran dan strategi pembelajaran yang unggul; (3) memiliki disiplin dan berdedikasi tinggi, setia terhadap tugas, inovatif; kreatif dalam mendidik, mengasuh, dan membimbing siswa yang memiliki bakat dan potensi unggul; (4) sehat jasmani dan ruhani, energik, berpenampilan baik, berbudi pekerti luhur, dan senior dalam jenjang pangkat atau pengalamannya; (5) memiliki kelebihan khusus dibanding guru lainnya baik dalam bidang keterampilan, mengampu suatu mata pelajaran khusus, dan membimbing siswa dalam ekstrakurikuler (Kurniasih, 2009: 70).

Guru dalam sekolah unggul juga diharuskan berinovasi dan penuh inisiatif dalam menciptakan model dan metode pembelajaran sendiri sesuai kebutuhan siswa yang dihadapinya. Mereka juga diharuskan mengajar atau mengampu mata pelajaran sesuai disiplin ilmu yang dimiliki, berpengalaman, dan memiliki rasa



humor yang tinggi untuk menghindari kebiosana siswa. Rasio jumlah siswa dan guru juga merupakan faktor penting lain yang harus dipenuhi sekolah unggul.

Lain dari itu, Sekolah Unggul juga harus memiliki komponen-komponen kelengkapan pendukung lain yang membedakannya dengan sekolah non-unggulan. Komponen-komponen tersebut di antaranya adalah letak dan kondisi sekolah yang nyaman dan asri serta jauh dari jalan raya untuk menghindari terhambatnya proses pembelajaran.

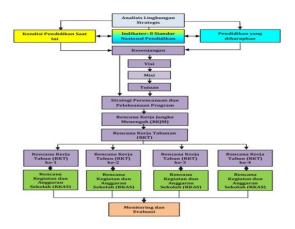
2. Pengembangan Sekolah Unggulan

Pengembangan sekolah adalah keniscayaan suatu lembaga pendidikan yang telah mempunyai visi, misi, dan tujuan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendididikan di sekolah. Program tersebut hendaknya dilakukan melalui penahapan yang sistematis melalui langkah-langkah yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karenanya, dalam pengembangan pendidikan melalui RPS, ada beberapa hal yang harus diperhatikan (Rohiat, 2008: 84):

- Secara ideal, RPS (Rencana Pembangunan Sekolah) memiliki dua jenis, yaitu RPS jangka panjang (di atas lima tahun) yang disebut dengan rencana strategis dan RPS jangka pendek yang dikenal dengan detail operasional.
- 2. Prosedur pembuatan RPS mengacu pada langkah-langkah yang digunakan dalam pembuatan RPS, demikian juga dalam proses pembuatannya.
- Secara subtansi, isi perencanaan program yang dikembangkan dalam RPS disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah masing-masing tetapi tetap mengacu pada aspek-aspek SNP.

Sementara itu, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah adalah upaya untuk mengubah kondisi nyata menjadi kondisi yang diinginkan (ideal) dengan mencapai prestasi siswa, membawa perubahan yang lebih baik, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, tanggap terhadap perubahan, demand driven (berdasarkan kebutuhan), berbasis partispasi, keterwakilan, data driven (berdasarkan data), realistis, sesuai dengan hasil analisis swot (sterength, weakness, opportunity dan threat) serta mendasarkan pada hasil review dan evaluasi. (Rohiat, 2008: 96) Visualisasi dari proses tersebut tampak pada gambar berikut:

Gambar : 2.1. Langkah-langkah penyusunan pengembangan sekolah (diadopsi dari Rohiat, 2008)



Praktik Pengembangan Sekolah Unggulan di Sumenep

1. Pengembangan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pangarangan 1

Perencanaan pengembangan sekolah unggulan di SDN Pangarangan 1 dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 1) Mengkaji kebijakan yang relevan untuk menghindari pertentangan atau irrelevansi program dengan kebijakan yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun daerah 2) Menganalisis kondisi lembaga dengan metode SWOT dalam rangka mengetahui keadaan, kekuatan, kelemahan, dan kekurangan untuk kemudian mencari jalan keluar yang tepat. 3) Merumuskan tujuan pengembangan berdasarkan kebijakan yang berlaku dan analisis kondisi lembaga. Dari sini, dirumuskan tujuan pengembangan baik yang sifatnya jang-



ka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 4) Mengumpulkan seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. 5) Menganalisis data dan informasi secara komprehensif. 6) Merumuskan dan memilih alternatif program untuk kemudian dikembangkan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 7) Menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan melalui penjabaran secara terperinci sampai pada tahap pelaksanaan (Tuala, 2018:82-83).

Tujuan dan sasaran yang dibidik oleh SDN Pangarangan 1 ditentukan oleh faktor-faktor berikut: (1) proses perumusan visi, misi dan tujuan sekolah, (2) evaluasi diri sekolah, (3) peranan kepala sekolah, dan (4) peningkatan mutu guru (Raharjo. Dkk, 2019:18). Di luar itu, salah satu bentuk akuntabilitas kinerja sekolah adalah melaporkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan rencana sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Tuala, 2018:138).

Dalam proses pengembangan sekolah, kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong upaya-upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah. Ini utamanya dapat dilihat melalui program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Dengan demikian dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa mutu tidak mungkin dihasilkan oleh kepemimpinan yang tidak berkualitas (Tuala, 2018:73). Padahal, mutu adalah jalan untuk mencapai kepuasan *customer* baik dalam menghasilkan produk atau jasa (Raharjo. Dkk, 2019:16).

Dalam konteks SDN Pangarangan 1, komponen pendidikan yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan mutunya adalah tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, dan pendanaan pendidikan. Standar PTK berkaitan dengan kriteria pendidikan penjabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Semen-

tara itu, standar sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Adapun standar pembiayaan berkaitan dengan kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan vang berlaku selama satu tahun (Raharjo. Dkk, 2019:56-59). Kompoenen di atas ternyata berpengaruh signifikan dalam peningkatan kualitas sikap siswa. Selain komponen pengelolaan, komponen yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sikap siswa adalah sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas sikap siswa (Fatimah, 2018:62)

Secara teoretis, proses pendidikan dikatakan bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Sementara itu, mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya ulangan umum atau ujian akhir nasional) dan dapat pula di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah-raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya komputer, beragam jenis teknik, jasa dan sebagainya (Tuala, 2018: 64).

Penjaminan mutu pendidikan di SDN Pangarangan 1 dilakukan dengan beberapa program pengembangan sekolah seperti peningkatan kemandirian guru dalam pengembangan profesional dan



peningkatan kompetensi murid melalui kegiatan evaluasi pengembangan pembelajaran PAIKEM. Peningkatan kompetensi murid utamanya menjadi penting karena hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu (Raharjo, 2019:11).

Selain itu, pengembangan sekolah juga dilakukan dengan mengontrol standarisasi kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan guru. Pengawasan dilakukan sebagai upaya mengamati secara sistematis, terukur dan berkesinambungan, merekam, memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat serta memperbaiki kesalahan. Sementara itu, quality control merupakan sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output (lulusan) yang tidak sesuai dengan standar. Quality control memerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi sekaligus penilaian yang wajar pada hasil kerja dari proses tersebut. (Tuala, 2018:98).

2. Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sumenep

Kegiatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Sumenep berjalan secara efektif dan efisien dengan dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sebagai media pembelajaran. Selain itu, keterpaduan antara komponen pengelolaan sekolah (terdiri dari perangkat pembelajaran, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian sesuai kompetensi, teknik penilaian, penilaian ditindaklanjuti, instrumen penilaian, perencanaan pengelolaan, program pengelolaan, kinerja kepala sekolah, dan sistem informasi) dengan komponen sarana dan prasarana pendidikan (terdiri dari kurikulum sekolah, daya tampung sekolah, dan sarana prasarana pendukung) dapat mempengaruhi kualitas keterampilan siswa. Variabel sarana dan prasarana pendidikan serta pengelolaan sekolah secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kualitas ketrampilan siswa (Fatimah, 2018:64).

Pada praktiknya, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, kepala sekolah SMPN 1 Sumenep bersama seluruh stakeholders telah merumuskan perencanaan pengembangan dan target pencapaian prestasi (mutu) sekolah dalam bentuk rencana strategis sekolah. Menurut Sowiyah dalam Raharjo, mutu pendidikan dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis maupun prestasi di bidang lain seperti di cabang olahraga, seni, keterampilan, dan lain-lain. Bahkan, prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible), seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya (Raharjo, 2019:12).

Beberapa predikat yang mengantarkan SMPN 1 Sumenep sebagai sekolah model di Sumenep adalah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), Sekolah Adiwiyata Mandiri, Sekolah Ramah Anak dan terakhir pada 2021 ini adalah Sekolah Penggerak. Sekolah Model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam hal penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model dipilih dari sekolah yang belum atau yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penentuan sekolah ini bertujuan mengetahui progress sekolah yang bersangkutan pada waktu yang akan datang, utamanya apakah sekolah mengalami



peningkatan dari sebelumnya (Jamaluddin, 2017: 100). Sekolah model biasanya dibebani banyak program yang harus dilaksanakan seperti Sekolah Adiwiyata, Sekolah Literasi, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan lalu lintas, karakter, kegiatan gugus dan KKG. Program-program di sekolah tersebut cukup menyita waktu, sementara kemampuan SDM di sekolah (PTK) juga terbilang terbatas (Rahorjo, 2019:73).

Untuk menjaga kualitas pengembangan sekolah, SMPN 1 Sumenep menetapkan visi "cerdas, terampil, berbudaya, religius dan berwawasan lingkungan." Visi tersebut mengandung indikator yang jelas dari setiap diksi dan kata yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang sehat mempunyai indikator dan data yang sesuai, teratur dan dapat dimonitor untuk menjejaki prestasi, rencana-rencana dan target-targetnya (Prasojo,2016: 34). Hal serupa juga dibutuhkan dalam melaksanakan *quality control* terhadap visi sehingga indikator kualitas yang jelas dan pasti mutlak diperlukan untuk dapat menentukan penyimpangan kualitas yang terjadi serta penilaian pada hasil kerja dari proses tersebut (Tuala, 2018:74).

Pengembangan profesional kurikulum 2021 atau kurikum Sekolah Penggerak pada prinsipnya merupakan pengembangan dari Kurikulum 2013 yang disusun mengacu kepada Tujuan Pendidikan Nasional dan berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya dalam menjawab tantangan yang dihadapi bangsa di masa depan. Pengembangan Kurikulum 2013 khususnya menyasar pada aspek, *pertama*, keseimbangan pengetahuan-sikap-keterampilan, kedua, pendekatan saintifik dalam pembelajaran, ketiga, model pembelajaran (penemuan, berbasis proyek dan berbasis masalah), dan *keempat*, penilaian otentik (Belen, 2017:97). Implementasinya merupakan proses penerapan ide, konsep dan kebijakan dalam bentuk tindakan praksis sehingga memberikan dampak cukup besar baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Ini senada dengan ungkapan bahwa kurikulum yang telah didesain optimal harus diimplementasikan dan memberi dampak bagi pembelajaran melalui rencana perubahan dalam keseluruhan suatu sistem pendidikan (Rouf, 2020: 36).

SMPN 1 Sumenep menerapkan model pengembangan pembelajaran dan melakukan inovasi pembelajaran dengan menerapkan digital school. Ia merupakan bagian dari inovasi, yakni keberhasilan memperkenalkan suatu hal atau sebuah metode baru (Brewer and Tierney, 2012). Di bidang pendidikan, inovasi ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas pembelajaran melalui berbagai pembaharuan dalam teori pedagogi, pendekatan metodologis, teknik mengajar, alat pembelajaran, proses pembelajaran maupun struktur institusional (Serdyukov, 2017).

SMPN 1 Sumenep melakukan berbagai upaya penjaminan mutu pendidikan melalui pendampingan dan evaluasi pembelajaran. Pendampingan difokuskan pada perubahan *mindset*, integrasi pendekatan saintifik, dan penilaian otentik yang berpusat pada penilaian sikap. Guru dibiasakan untuk mengunakan pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan aspek kognisi, afeksi, dan psikomotor (Yaumi, 2014:293).

3. Multi Situs Pengembangan Mutu Pendidikan di Sumenep

Kategori	Situs 1	Situs 2
Strategi Seko- lah Unggulan	Program Rencana Pengemban- gan Sekolah (RPS) meliputi jangka pendek, menengah dan jangka panjang	Program Rencana Pengemban- gan Sekolah (RPS) meliputi jangka pendek, menengah dan jangka panjang



Γ.		T	T
	olementasi colah Ung- an	Dalam pengembangan sekolah, SDN Pangarangan 1 menetap- kan tujuan dan sasaran sekolah dalam meningkatkan mutu melalui: (1) perumusan visi, misi dan tujuan sekolah, (2) evaluasi diri sekolah, (3) peranan kepala sekolah, dan (4) pen- ingkatan mutu guru. Adapun predikat yang mengantarkan SDN Pangaran- gan 1 sebagai Sekolah Ung- gul adalah: 1. Sekolah Penggerak 2. Sekolah Ramah Lingkungan 3. Sekolah Berprestasi di bidang ak- ademik dan non akade- mik	Dalam pengembangan sekolah, SMPN 1 Sumenep menetap- kan tujuan dan sasaran sekolah dalam meningkatkan mutu pen- didikannya melalui: (1) perumusan visi, misi dan tujuan sekolah, (2) evaluasi diri sekolah, (3) peranan kepala sekolah, dan (4) peningkatan mutu guru Beberapa predikat yang mengantarkan SMPN 1 se- bagai Sekolah Unggul: 1. Rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), 2. Sekolah Adiwiyata Mandiri 3. Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Penggerak
eva	nitoring dan luasi Seko- Unggulan	Kontrol Standarisasi kompetensi guru dilaku- kan melalui kegiatan pengembangan kompetensi guru, pelatihan pendampingan guru.	SMPN 1 Sume- nep melakukan upaya – upaya penjaminan mutu pendi- dikan melalui pendampingan dan evaluasi pembelajaran

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut;

1. Strategi Sekolah Unggulan di dua situs dimaksud adalah dengan perencanaan program jangka pendek, program jangka menengah dan jangka panjang. Prosesnya dilakukan dengan (1) perumusan visi, misi dan tujuan sekolah,

- (2) evaluasi diri sekolah, (3) optimalisasi peranan kepala sekolah, dan (4) peningkatan mutu guru.
- Sekolah Unggulan adalah sekolah model dengan berbagai predikat, semisal Sekolah Penggerak, Sekolah Ramah Lingkungan, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), Sekolah Adiwiyata Mandiri, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Penggerak, dan Sekolah Berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
- 3. Monitoring dan evaluasi Sekolah Unggulan adalah melalui kontrol Standarisasi kompentensi guru, pendampingan, dan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin dengan penanggung jawab kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang membidangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. 2009. Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi. (Bandung: IMTIMA).
- Angrayni, Afrita. *Problematika Pendidikan Di Indonesia*, (Padang: Universitas Negeri Padang)
- Arifin, Imron, dkk. 2010. Kepemimpinan Kiai dalam Perubahan manajeman Pondok Pesantren: Kasus Ponpes Tebuireng Jombang. Malang: Aditya Media.
- Arifin, Imron. 1993. *Kepemimpinan Kiai, Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasahada Press.
- Arifin, Imron. 1996. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press.
- Aryawan, I Wayan. 2019. Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Di Era Revolusi Industri 4.0 Berlandaskan Pada Konsep Panca Upaya Sandhi. (Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 5, Number 2)

Beeby, C.E.1982. Pendidikan Di Indone-



- sia,Penelaian dan Pedoman Perencanaan. (Jakarta: LP3ES)
- Bogdan, Robert L. Sari Knoop Biklen. 1998. *Qualitative Research for Education: An Intriduction to Theory and Methods.* Boston: Aliyn and Bacon.
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Pe-nelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. 2002. *Desain Penelitian*. Jakarta: KIK Press.
- David, F. R. 2006. *Strategic Management* (10th ed.). (Jakarta: Salemba Empat).
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011.

 Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Efferi, Adri. 2014. *Dinamika Persaingan Antar Lembaga Pendidikan* (Kudus: journal.iainkudus.ac.id Vol 2, No 1).
- Fatimah, Khusnul.2018. Pengelompokan Mutu Pendidikan SMP Dan Pengaruh Indikator Standar Nasional Pendidikan Terhadap Mutu Kelulusan SMP NEGERI di Jawa Timur. Surabaya, tugas Akhir ITS.
- Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi. Malang: YA3.
- Fitri, Siti Fadia Nurul. 2021. *Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai.
- Gibson, James L. 1997. *Organisasi, Perilaku Struktur Proses*. Jakarta : Binarupa Aksara
- Hariyanto, Sugeng. 2012. Persepsi Santri Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren (Studi Interaksionesme Simbolik di Pondok Pesantren Sidogiri). Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Jamaluddin, dkk. 2017. *Desain Sekolah Model: Studi Penjaminan Mutu Pendidikan Available* online at: http://edujurnal.iainjambi.ac.id/index.php/ijer IJER, 2 (2), 2017, 99 107
- Khodijah, Siti dan Mohammad Syahidul Haq. 2021. *Jurnal Inspirasi Manaje*-

- men Pendidikan. Volume 09 Nomor 01. Lincoln, Yvonna S. Dan Egon G. Guba. 1985. Naturalistic Inquiry. California: Sage Publications.
- Mardiyah, 2012 . *Kepemimpinan Kiai Dalam Memelihara Budaya Organisasi*. Yogykarta ADITYA MEDIA Publishing,
- Miles, Huberman & Saldana, 2014. *Qualitatife Data Analysis, A methods A Sourcebook.* (USA: 4 SAGE Publications, Inc)
- Miles, M.B., dan Huberman, A.M.1984. *Qualitative Data Analysis:A Source Book of New Methods*. Baverly Hill, CA: Sage Publication, Inc
- Muhajir, Noeng. 2007. *Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Natu*ralistik Kualitatif. Bandung: Tarsito
- Patton, Micahel Quinn. Tanpa Tahun. How To Use Qualitative Methods In Evaluation. Terjemahan Budi Puspo Priyadi. 2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasojo, Lantip Diat. 2016. *Manajemen Mutu Pendidikian*, Yoyakarta: UNY Press
- Raharjo, Sabar Budi, dkk. 2019. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rouf, Muhammad. 2020. *Pengembangan Kurikulum Sekolah: Konsep, Model Dan Implementasi*. Bangkalan: Jurnal Al-Ibrah|Vol.5 No.2.
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. 2009. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Rajawali Press.
- Rivai, Veithzal. 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rivai, Veithzal. 2009. Education Of Management Analisis teori dan praktik.



- Jakarta: Rajawali Press
- Rivai, Veitzal. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Robbin, Stephen P, dkk. 2009. *Perilaku Or*ganisasi, Organizational Behavior, Jakarta: Salemba Empat
- Robbin, Steppen P, dkk. 2008. *Perilaku Organisasi, Organizational Behavior*. Jakarta: Salemba Empat
- Rohiat, 2008. *Manajeman Sekolah teori dan praktik.* (Bandung: Aditama)
- Rohiat. 2008. *Manajeman Sekolah, Teori dasar dan prkatik*. (Bandung : Refika Aditiya)
- Silalhi, Gabriel Amin. 2003. *Metodolo-gi Penelitian Studi Kasus*. Sidoarjo: Citramedia.
- Spradley, James P. 1997. *The Ethnography-ic Interview*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta:
 Refika Aditama
- Tuala, Riyuzen Praja. 2018. *Manajeman Peningkatan Mutu Sekolah*, Yogyakarata Lintang Rasi Aksara Books.

- Wibowo, A., & Subhan, A. Z. (2020). Strategi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Indonesian Journal of Islamic Educational Management, 3(2), 108–116
- Yaumi, Muhammad. 2014. Evaluasi Program Pendampingan Guru SD dalam Implementasi Kurikulum 2013. Lentera Pendidikan, Vol. 17, 281-295.
- Yin, Robert K. 1996. *Case Study Research: Design and Methods. Terjemahan M. Djauzi Mudzakir.* Jakarta: PT. Raja

 Grafindo Persada.

Sumber Online:

- https://www.mandandi.com/2020/10/ pengertian-mutu-pendidikan-menurut-para.html
- https://disdik.bekasikab.go.id/berita-pengertian-dan-tujuan-pendidikan-di-sekolah-dasar.html
- https://www.tanotofoundation. org/id/news/inovasi-pendidikan-di-era-pandemi/diakses oleh ahmad shiddiq,

Peningkatan Pendapatan Pengrajin Batik Tulis Melalui Pengembangan Motif dan Perbaikan Proses Membatik di Kabupaten Sumenep Tahun 2021

Budi Suswanto, Abu Tholib, Agung Firdausi Ahsan, Moh. Iqbal Bachtiar, Achmad Zain Nur, Nita Selvia Rohmayati (Tim Peneliti LPPM Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura)

ABSTRAK

Industri batik merupakan salah satu bentuk industri yang hanya dimiliki oleh Negara Indonesia, Batik merupakan salah satu kerajinan asli Indonesia yang memiliki corak khas sebagai cerminan dari kekayaan budaya nasional Indonesia. Di Kabupaten Sumenep, daerah yang menjadi sentra kerajinan batik ada di Desa Pakandangan Barat Kecamatan. Batik Pakandangan Barat merupakan hasil dari olah cipta, rasa, dan karsa serta kristalisasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Sumenep dari masa Pemerintahan Keraton Sumenep hingga Pemerintahan Kabupaten Sumenep yang sudah mengakar

Penelitian yang dilaksanakan termasuk kedalam penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Variabel penelitian yang digunakan adalah strategi pengembangan, alternatif strategi pengembangan, dan analisis SWOT. Analisa faktor tingkat kepentingan internal berisi 5 indikator antara lain pemasaran, produksi, sumber daya manusia, keuangan, dan akuntansi dimana masing-masing indikator terdapat beberapa item pernyataan. Analisa faktor tingkat kepentingan eksternal digunakan untuk mengetahui berbagai faktor kepentingan yang berasal dari luar usaha yang terdiri dari 4 indikator yaitu kondisi sosial dan ekonomi, teknologi, pembeli, dan pesaing.

Hasil yang diperoleh dalam pengolahan data, akan digunakan sebagai strategi peningkatan pendapatan pengrajin batik di Kabupaten Sumenep. Strategi pengembangan dianalisis dengan menggunakan analisa deskriptif eksploratif dan alternatif strategi pengembangan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT.

Kata Kunci: Batik, Strategi Pengembangan, Peningkatan Pendapatan Analisa SWOT

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk yang besar dan padat. Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia merupakan masalah utama sejak zaman penjajahan. Cara untuk memecahkan masalah-masalah tersebut bisa dilakukan dengan pelaksanaan pembangunan secara

sadar, nyata, dan efektif yang diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan serta meratakan pendapatan seluruh masyarakat (Suroto, 1983).

Dalam menjalankan usaha baik dalam skala mikro, kecil dan menengah, dibutuhkan strategi agar dapat bersaing dengan yang lainnya. Menurut Purwanto (2008) analisis strategi meliputi "segit-



iga strategi", yaitu: Pelanggan, Pesaing dan Perusahaan. Industri yang dikatakan berkembang apabila memiliki pelanggan tetap, mampu bersaing dan bertahan diantara banyaknya pesaing- pesaing yang ada, dan memiliki perusahaan yang dikelola dengan baik. Kebanyakan perusahaan/unit usaha melakukan kegiatan produksi dan operasinya hanya sampai berkonsentrasi pada pembuatan produk saja, termasuk perusahaan berskala kecil hingga menengah. Perusahaan seharusnya juga memperhatikan strategi usaha guna mempertahankan dan mengembangkan usaha yang sudah ada, agar tetap dapat bersaing.

Industri batik merupakan salah satu bentuk industri yang hanya dimiliki oleh Negara Indonesia, Batik merupakan salah satu kerajinan asli Indonesia yang memiliki corak khas sebagai cerminan dari kekayaan budaya nasional Indonesia. Proses pembuatan batik dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli dalam ilmu membatik dan biasanya ilmu membatik yang dimiliki tersebut didapatkan secara turun temurun dari keluarga mereka.

Di Kabupaten Sumenep, daerah yang menjadi sentra kerajinan batik ada di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto berada tidak jauh dari pusat kota atau sekitar 30 km arah barat Kota Sumenep, Batik yang ada di Pakandangan Barat merupakan hasil dari olah cipta, rasa, dan karsa serta kristalisasi nilai- nilai kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Sumenep dari masa Pemerintahan Keraton Sumenep hingga Pemerintahan Kabupaten Sumenep yang sudah mengakar. Dalam kehidupan masyarakat dan dijunjung tinggi sebagai sebuah wahana bernilai normanorma kehidupan yang luhur dan batik juga merupakan sebuah produk warisan budaya oleh para leluhur kita yang adiluhung.

Perkembangan Industri batik yang ada di Sumenep memang dikatakan sudah berkembang pesat. Namun masih menemukan kendala yang dihadapi oleh industri batik yang ada di Pekandangan Barat yaitu terkait dengan terbatasnya akses pasar, bahan baku (pewarna) membeli dari luar kota, terbatasnya tenaga pembatik, serta sarana dan prasarana produksi yang kurang optimal. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri yang ada di Pakandangan memiliki dua problema yaitu berkaitan dengan permasalahan internal dan eksternal.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat suatu penelitian Peningkatan Pendapatan Pengrajin Batik Tulis Melalui Pengembangan Motif Dan Perbaikan Proses Membatik di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh industri batik tulis yang ada di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen lainnya, dan dideskripsikan dalam bentuk narasi.

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Industri Kerajinan Batik Tulis di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Kriteria sampel yang akan dipilih adalah Industri Kerajinan Batik Tulis di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. yang memiliki karyawan minimal 2 (dua) orang, dan jenis batik yang diproduksi adalah batik tulis. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dan kuesioner. Wawancara akan dilakukan dengan pemilik dan karyawan Industri



batik tulis. Kuesioner akan diberikan kepada pemilik batik tulis berkaitan dengan strategi pengembangan yang digunakan, alternatif strategi yaitu berkaitan dengan kekuatan-kelemahan (faktor internal) dan peluang-ancaman (faktor eksternal).

Variabel penelitian ini yaitu strategi pengembangan, alternatif strategi pengembangan, dan analisis SWOT.

- 1. Strategi Pengembangan
 Variabel strategi dalam penelitian ini
 diukur dengan menggunakan *checklist*untuk mengetahui strategi dan alternatif strategi yang digunakan industri
 batik tulis yang ada di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten
 Sumenep.
- 2. Alternatif Strategi Pengembangan Variabel alternatif strategi pengembangan diukur dengan menggunakan chekclist untuk mengetahui alternatif strategi pengembangan yang digunakan industri batik tulis yang ada di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Pengukuran alternatif strategi pengembangan dilakukan dengan melakukan identifikasi faktor tingkat kepentingan internal dan faktor tingkat kepentingan eksternal.

3. Analisis SWOT

Variabel analisis SWOT dalam penelitian ini diukur dengan *chekclist* untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam strategi pengembangan. Pengukuran analisis SWOT dilakukan dengan menentukan bobot tiap variabel, menentukan nilai atau score tiap variable (Rangkuti, 2008).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dalam pengolahan data, selanjutnya akan dibahas untuk mengetahui strategi pengembangan yang sedang digunakan dianalisis dengan menggunakan deskriptif eksploratif dan alternatif strategi pengembangan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Observasi dilakukan di Desa Pekandangan Barat berkaitan dengan strategi pengembangan yang digunakan oleh pengrajin batik tulis, selanjutnya peneliti memberikan beberapa pertanyaan dalam kuesioner berkaitan dengan strategi pengembangan yang digunakan oleh pelaku pengrajin batik tulis yang berada di Desa Pekandangan Barat. Tujuan dari kuesioner adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pelaku pengrajin batik tulis yang berada di Desa tersebut. Kuesioner diberikan kepada 30 pelaku pengrajin batik tulis dan terdapat 3 strategi yang sedang digunakan oleh pelaku pengrajin batik tulis yang berada di Desa Pekandangan Barat, yaitu Cost Leadership, diferensiasi, dan fokus strategis (kombinasi Cost Leadership dan strategi diferensiasi).

Analisa faktor tingkat kepentingan internal digunakan untuk mengetahui berbagai macam item faktor kepentingan yang dimiliki oleh pelaku pengrajin batik tulis yang berada di Desa Pekandangan Barat. Analisa faktor tingkat kepentingan internal menggunakan kuesioner yang berisi 5 indikator antara lain pemasaran, produksi, sumber daya manusia, keuangan, dan akuntansi dimana masing-masing indikator terdapat beberapa item pernyataan.

Analisa faktor tingkat kepentingan eksternal digunakan untuk mengetahui berbagai macam item faktor kepentingan yang berasal dari luar usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM batik tulis yang berada di Desa Pekandangan Barat. Menggunakan kuesioner yang berisi 4 indikator yaitu kondisi sosial dan ekonomi, teknologi, pembeli, dan pesaing.

Analisa faktor kekuatan dan kelemahan merupakan analisa yang menggunakan kuesioner dan juga menggunakan wawancara yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dirasakan atau dimiliki oleh pelaku pengrajin batik tulis yang berada di Desa Pekan-



dangan Barat. Kuesioner Faktor kekuatan dan kelemahan ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah responden (minimal terdapat 5 responden) yang memilih masing-masing faktor baik kekuatan ataupun kelemahan.

Setelah faktor-faktor strategi internal dan eksternal pengrajin batik tulis diidentifikasi, suatu tabel IFAS (Internal Factor Analysis Summary) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka Strenghts dan Weaknesses. Sedangkan faktor-faktor strategis eksternal disusun dalam kerangka Opportunities dan Threats. Faktor internal dan eksternal diperoleh dari kuesioner faktor kekuatan dan kelemahan dan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik pengrajin batik tulis yang berada di Desa Pekandangan Barat.

Analisa faktor peluang dan ancaman merupakan analisa yang menggunakan kuesioner dan juga menggunakan wawancara yang berkaitan dengan peluang dan ancaman yang dirasakan atau dimiliki oleh pelaku pengrajin batik tulis yang berada di Desa Pekandangan Barat. Kuesioner Faktor peluang dan ancaman ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah responden (minimal terdapat 5 responden) yang memilih masing-masing faktor baik peluang ataupun ancaman.

Alternatif strategi diperoleh berdasarkan dari kombinasi kekuatan dan peluang, kelemahan dan peluang, kekuatan dan ancaman, serta kelemahan dan ancaman. Dari hasil kombinasi tersebut diperoleh 19 (sembilan belas) alternatif strategi pengembangan. Berikut adalah tabel penentuan strategi matriks SWOT.

INTERNAL

STRENGTHS (S)

- 1. Memiliki pelanggan tetap;
- 2. Harga batik yang terjangkau;
- 3. Memiliki tempat distribusi yang tetap;
- 4. Melakukan promosi dengan menggunakan media elektronik
- 5. Melakukan penjualan secara langsung;
- 6. Produk batik yang berkualitas;
- 7. Memiliki motif batik tulis yang khas dan unik;
- 8. Kemasan produk menggunakan Paper Bag;
- 9. Pengrajin yang berpengalaman
- 10. Produk yang dihasilkan continue;
- 11. Dukungan pemerintah yang bersinergi.

WEAKNESS (W)

- 1. Terbatasnya pengrajin yang dapat membuat sketsa batik;
- 2. Waktu pengerjaan sketsa yang relatif lama;
- Belum ada sistem pembukuan (pencatatan kas masuk dan kas keluar);
- Jenjang pendidikan yang dimiliki karyawan rendah;
- 5. Pembinaan karyawan pemula tidak terstruktur;
- 6. Modal terbatas:
- Masih menggunakan alat membatik tradisional;
- 8. Pemasaran dilakukan secara pasif;
- 9. Proses gambar motif dilakukan secara manual;
- 10. Proses membatik yang belum tersentralisas;
- 11. Minimnya inovasi pembuatan pewarna batik;
- 12. Kurangnya tingkat kesadaran pengrajin batik dalam memanfaatkan teknologi;
- 13. Jam kerja pengrajin yang tidak menentu;
- Teknik pencampuran warna masih berdasarkan prediks pribadi.



OPPORTUNITIES (O)

- 1. Penyerapan tenaga kerja muda:
- 2. Dukungan akademisi;
- 3. Perubahan gaya hidup pelanggan/ konsumen;
- Teknologi baru;
- 5. Perbaikan Produktivitas;
- 6. Minat pelanggan terhadap batik:
- 7. Inovasi kemasan produk;
- 8. Batik menjadi kebutuhan;
- Akan dibangun tol Madura dan Pengembangan Desa Wisata;
- 10. Dukungan pemerintah untuk HAKI.

STRATEGI SO

- a. Memanfaatkan teknologi untuk melakukan promosi di media sosial (FB, instagram, WA, Line);
- Memanfaatkan teknologi baru dalam membatik (kompor gas dan canting elektrik) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk batik;
- Menghasilkan produk batik yang lebih berkualitas dengan harga yang terjangkau dipasaran sehingga menambah pelanggan dan meningkatkan pemberian upah kepada karyawan;
- d. Mengadakan dan/atau mengikuti pameran batik nasional maupun internasional;
- e. Memiliki kemasan produk batik yang menarik sehingga terlihat mahal dan layak dijadikan souvenir untuk acara-acara tertentu;
- f. Mempertahankan dan mengembangkan ciri khas dengan mendaftarkah Hak Cipta, Hak Merk, dan Hak Paten.

STRATEGI WO

- a. Menyusun aturan baku tentang manajemen kinerja pengrajin batik yang lebih optimal;
- Memperbanyak kerjasama dan promosi untuk mengenalkan produk batik khas sumenep dan meningkatkan omset;
- c. Menghasilkan produk batik tulis yang beraneka ragam motif dan dikemas rapih dan bagus;
- Melakukan pembinaan secara berkala mengenai pemanfaatan teknologi dalam proses membatik;
- e. Melatih pengrajin batik menggunakan perangkat lunak pengolah gambar untuk memudahkan dan mempercepat proses pembuatan sketsa batik.

THREATS (T)

- 1. Kenaikan harga bahan baku;
- 2. Adanya produk batik printing;
- 3. Pesaing berasal dari pengrajin sejenis;
- 4. Perkembangan teknologi yang tinggi;
- 5. Toko batik di Sumenep didominasi batik luar;
- 6. Motif batik yang diminati konsumen bervariatif.

STRATEGI ST

- Menciptakan inovasi batik terus menerus untuk dapat bersaing secara sehat dengan UMKM yang sejenis;
- Menghasilkan batik tulis dengan ciri dan motif yang unik sehinggan pelanggan dapat membedakan batik tulis asli dengan batik printing;
- Menyediakan stok bahan baku misalnya kain dan jenis pewarnaan batik untuk mengatisipasi kenaikan harga bahan baku;
- d. Menambah regulasi dan/atau tendensi tentang distribusi batik khas sumenep di tokotoko batik yang ada di wilayah kab. Sumenep.

STRATEGI WT

- a. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan pemerintah mengenai manajemen pengelolaan usaha batik dengan baik;
- Melakukan kerjasama dengan pihak lembaga keuangan dan pemilik toko batik di wilayah Kab. Sumenep tentang permodalan dan kemudahan akses penjualan;
- c. Inovasi penggunaan teknologi dan pembuatan bahan baku sendiri secara berkala.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan motif dan perbaikan proses membatik pada pengrajin batik tulis yang berada di Desa Pekandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk batik yang dihasilkan oleh pengrajin batik sudah berkualitas, harga yang terjangkau, dan memiliki pelanggan tetap. Tapi masih ada kekurangan yang terjadi di desa Pakandangan Barat seperti masih belum memanfaatkan teknologi dalam proses membatik, manajemen kinerja yang tidak efektif, serta minimnya inovasi dan kreatifitas pembuatan bahan baku sendiri untuk mengatasi kenaikan harga bahan baku. Juga perlu adanya kerjasama yang lebih aktif dengan pemerintah, toko-toko



- batik yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep, dan antar pengrajin batik.
- 2. Strategi pengembangan yang digunakan pada industri pengrajin batik tulis yang berada di Desa Pekandangan Barat ialah fokus strategi (kombinasi strategi cost leadership dan strategi diferensiasi). Alasannya karena kombinasi strategi ini disamping memperhatikan keragaman jenis produk tetapi juga memperhatikan biaya produk dari batik tulis. Walaupun biaya rendah merupakan fokus utama dari strategi kombinasi ini akan tetapi keragaman dari produk batik tulis menjadi hal yang diunggulkan agar dapat bersaing sesuai dengan segmentasi dan pasar sasaran yang diharapkan oleh masing-masing pelaku pengrajin batik tulis.
- 3. Kondisi dan posisi pengrajin batik tulis yang berada di Desa Pekandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep berdasarkan analisis SWOT, diperoleh hasil bahwa pengrajin batik tulis yang berada di desa tersebut berada dalam posisi pertumbuhan (konsentrasi melalui integrasi vertikal).

E. REKOMENDASI

- 1. Untuk Pemerintah Kabupaten Sumenep:
 - a. Hendaknya pemerintah membuat papan nama di pinggir jalan area Pakandangan Barat sebagai sentra pengrajin batik tulis Kabupaten Sumenep;
 - b. Memberikan dan/atau memfasilitasi kegiatan pelatihan-pelatihan/ pendampingan-pendampingan terkait pengembangan kapasitas & kualitas produksi, juga manajemen pengelolaan usaha batik yang efektif;
 - c. Membuat regulasi dan/atau tendensi (dorongan) kepada pihak terkait (pemilik toko batik, lembaga keuangan, dan lainnya) untuk mensuport perkembangan batik tulis khas Kabupaten Sumenep baik

- dari segi promosi maupun penjualannya.
- d. Mengadakan dan merekomendasikan pengrajin batik untuk mengikuti pameran atau festival batik

2. Untuk pengrajin batik tulis:

- a. Pelaku usaha harus lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk melakukan promosi di media sosial (FB, instagram, WA, Line & tiktok);
- Memanfaatkan teknologi baru dalam membatik (kompor gas, canting elektrik, dll) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk batik;
- c. Menghasilkan produk batik yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dipasaran sehingga menambah pelanggan dan meningkatkan pemberian upah kepada karyawan;
- d. Membuat kemasan batik yang lebih menarik sehingga terlihat mahal dan layak dijadikan souvenir untuk acara-acara tertentu;
- e. Mengikutsertakan SDM (karyawan) yang dimiliki ke dalam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam membatik;
- f. Memperbanyak jumlah pesanan batik tulis sekaligus melatih kemampuan karyawan untuk dapat membatik lebih baik lagi;
- g. Menghasilkan produk batik tulis yang beraneka ragam motif dan dikemas rapih dan bagus supaya bisa dijadikan sebagai souvenir;
- Menciptakan inovasi batik terus menerus untuk dapat bersaing secara sehat dengan pengrajin yang sejenis;
- i. Menghasilkan batik tulis dengan ciri dan motif yang unik sehinggan pelanggan dapat membedakan batik tulis asli dengan batik *printing*;



- j. Menyediakan stok bahan baku misalnya kain dan jenis pewarnaan batik untuk mengatisipasi kenaikan harga bahan baku;
- k. Mengikuti pelatihan antar sesama pelaku pengrajin yang diadakan pemerintah untuk memahami dalam pembuatan pembukuan agar dapat mengelola keuangan secara baik;
- Pelaku usaha memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menghasilkan batik yang unik yang sesuai dengan ciri khas masing- masing usaha agar dapat bersaing dengan sesama pengrajin batik yang lain;
- m. Meningkatkan manajemen kinerja pegawai dengan menetapkan aturan baku tentang proses pembuatan batik;
- n. Membuat pembukuan akuntansi keuangan dengan memanfaatkan teknologi (aplikasi pencatatan keuangan/kas);
- Mengadakan pelatihan penggunaan perangkat lunak pengolah gambar dalam membuat sketsa;
- p. Mengadakan pelatihan pembuatan pewarna batik baru.
- q. Membuat buku panduan tentang pembuatan pewarnaan dan cara mencampur warna (RGB)

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Alfi. Wahyu Hidayat. *Agung Budiatmo*. 2012. *Analisis Strategi Pengembangan Usaha Pada UKM Batik Semarangan Di Kota Semarang*. Jurnal Ilmu Administrasi. Ejournal–S1.undip.ac.id
- Bonita, Farah. 2013. Strategi Pengembangan Industri Kecil Kerajinan Batik Di Kota Semarang. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Indonesia
- Christensen, C. Roland and others, *Business Policy: Text and Cases* (Homewood, Illionis: Richard D. Irwin, Inc., 1973), pp. 107-108.
- Clark, Jay B. Barney Delwyn N. 2007. *Resource Based Theory: Creating and Sustaining Competitive Advantage.*(OXFORD UNIVERSITY PRESS) 11/24/2014 1.
- David, Fred R., 2006. *Manajemen Strate-gis. Edisi Sepuluh*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Fuad, M. Christine H. Nurlela. Sugiarto. Paulus. 2009. *Pengantar Bisnis*. PT Gramedia PustakaJakarta.
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Alfabeta. Munawir, S.2014. Analisa Laporan Keuangan (Edisi 4). Jakarta : Liberty.
- Glueck, William F., *Business Policy and Strategic Management* (Tokyo: Mc-Graw Hill Kogakusha, Ltd., 1980), p. 4.
- Hafsah, M.J. 2004. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, Infokop, No. 25 Tahun XX. Smecda. com



Konsep *Smart City* Sebagai Alternatif Pembangunan di Kabupaten Sumenep

Zainul Wahid, Imam Syafi'i (Dosen Prodi PBSI dan Prodi PPKn STKIP PGRI Sumenep)

ABSTRAK

Smart city merupakan penerapan konsep kota cerdas dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Konsep smart city juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam penggunaan aplikasi tersebut, sehingga memudahkan untuk masukan dan kritik. Konsep kota pintar yang menjadi topik hangat di kota-kota besar di seluruh dunia, menggunakan pendekatan citizen-centric untuk mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola kota, memungkinkan interaksi yang lebih dinamis dan lebih dekat antara penduduk dan layanan. produsen. , dalam hal ini pemerintah daerah. Empat pilar pengembangan kota pintar adalah: Pilar pertama adalah people (pengguna), meliputi karakter dan moralitas, kepatuhan kebijakan (compliance), dan pilar kedua adalah mekanisme dan standar layanan, termasuk model hubungan antar pemangku kepentingan. Mengintegrasikan layanan publik dan data. Pilar ketiga adalah infrastruktur ICT yang menggabungkan layanan dan data (informasi) untuk menyediakan media otomatis seperti semua akses online. infrastruktur jaringan, akses broadband, pusat data/cloud, platform pertukaran data/biq data, aplikasi, pengawasan video, dan lainnya. Pilar keempat adalah struktur kelembagaan kota pintar yang melakukan analis, integrator, dan evaluator serta menyelaraskan manajemen TI dengan proses bisnis. Lembaga kota pintar memantau keberlanjutan program pembangunan yang digagas oleh pemerintah daerah. Efektivitas pemerintah dalam melayani masyarakat semakin meningkat dan memuaskan. Dengan kemajuan globalisasi, peserta hubungan internasional tidak lagi hanya negara, tetapi semua komponen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, dapat menjadi peserta dalam hubungan internasional. Peran pemerintah daerah sebagai aktor semakin ditekankan, dan kemampuan mereka untuk mempromosikan kerjasama internasional semakin ditekankan.

Kata Kunci: Smart City, Kinerja Pemerintah Kabupaten, Kebijakan Pemerintah Daerah



Pendahuluan

Arus urbanisasi yang semakin meningkat menciptakan tantangan baru bagi suatu kota atau kawasan perkotaan. Mulai dari sampah, pendidikan, transportasi, pembangunan sosial ekonomi, bencana alam, dan kesehatan. Sementara itu, masyarakat yang semakin modern dan mapan memiliki banyak harapan: lingkungan yang nyaman untuk tinggal dan bekerja, ruang publik yang memadai, dan kemudahan pengelolaan segala bentuk pelayanan publik. Kota pintar adalah tren nyata di Indonesia. Smart city bukan hanya sebuah status yang bisa disebut sebagai smart city, tetapi juga merupakan langkah besar dalam perkembangan kota-kota di Korea berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

Secara harfiah "Smart City" didefinisikan sebagai "kota pintar", sebuah konsep yang dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat lokal, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya yang rasional dan efisien. Dalam paparannya, Kemendagri mendefinisikan smart city sebagai konsep tata kota yang komprehensif yang dipadukan dengan berbagai perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatkan perencanaan dan pembangunan, produktivitas daerah dan daya saing ekonomi, serta membangun landasan nasional Indonesia yang cerdas.

Sedangkan aspek utama pembangun smart city menurut Frost dan Sullivan pada tahun 2014 yaitu smart governance, smart technology, smart infrastructure, smart healthcare, smart mobility, smart building, smart energy dan smart citizen. Tujuan dari smart city itu sendiri adalah untuk membentuk suatu kota yang nyaman, aman, serta memperkuat daya saing dalam perekonomian. Kota menjadi entitas yang menarik perhatian banyak peneliti. Tidak hanya karena kota memiliki dinamika perubahan yang begitu cepat, tetapi juga karena dalam banyak prediksi

yang didasarkan pada hasilhasil penelitian bahwa hampir 50% penduduk dunia akan memadati kota (Senate Department for Urban Development and the Environment, 2015; Bakıcı, et.al., 2013; Chourabi, et.al., 2012).

Akibatnya kota semakin menghadapi tantangan yang luar biasa besar dan kompleks terkait dengan fasilitas yang diberikan kepada warganya. Kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti kesehatan, pendidikan, transportasi umum, sehingga warga kota merasakan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan tinggal di kotanya harus dipenuhi oleh pengelola kota (Neirottia, et.all., 2014; Nam and Pardo, 2011; Washburn and Sindhu, 2010).

Kemajuan teknologi kota pintar yang semakin pintar memungkinkan konsep pintar diterapkan tidak hanya pada perangkat lain, tetapi juga pada sistem atau perangkat lain. Konsep smart city merupakan konsep smart city yang dapat berperan dalam memudahkan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Konsep smart city dihadirkan sebagai respon terhadap pengelolaan sumber daya yang efisien. Dalam arti, konsep kota pintar adalah mengintegrasikan informasi secara langsung dengan masyarakat perkotaan.

Konsep Smart City dipandang sebagai solusi dari masalah pembangunan perkotaan lokal. Kota pintar diciptakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yang tinggal di dalamnya, yang dalam segala hal bermuara pada penataan dan pengelolaan kota yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan digital secara optimal. Dimulai dengan sistem manajemen gedung, manajemen kualitas lingkungan dan utilitas. Singkatnya, kota telah menjadi mesin ekonomi dan produktivitas, yang pada gilirannya membuat masyarakat menjadi sehat, produktif, dan sejahtera. Program pemerintah yang sukses memiliki berbagai strategi dan metode untuk mendapatkan



penerimaan dan kepercayaan publik bahwa kota memiliki keunggulan atas wilayah yang ada. Pemerintah terus berupaya menciptakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk menjadikan kota lebih cerdas.

Konsep *Smart City* untuk Kabupaten Sumenep

Sumenep merupakan salah satu nama kabupaten yang terletak di pulau Madura. Penyebutan nama Sumenep dalam bahasa Maduranya lebih populer dikenal dengan istilah "Songenep". Luas wilayah kabupaten ini yaitu 2.093,47 km2 dengan jumlah populasi sebanyak 1.100.711 jiwa. Secara etimologi, nama Sumenep diambil dari bahasa kawi atau jawa kuno. Nama tersebut merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata "sung" dan "eneb". Kata sung memiliki arti sebuah relung/cekungan/lembah, sedangkan kata eneb memiliki arti endapan yang tenang. Jadi nama Songenep kalau diartikan berdasarkan gabungan dua kata di atas memiliki arti lembah/cekungan yang tenang (Iskandar Zulkarnaen: 2003).

Hal ini sebagaimana disinggung dalam kitab Pararaton bahwa penyebutan kata Songenep sebenarnya sudah populer sejak kerajaan Singasari dimana pada saat sang Prabu Kertanegara mendelegasikan Arya Wiraraja (penasehat kerajaan dalam bidang politik dan pemerintah) sebagai penguasa diwilayah Sumenep, Madura Timur pada tahun 1269 M mengucapkan: "Hanata wongira, babatangira buyuting Nangka, aran Banyak Wide, sinungan pasenggahan Arya Wiraraja, arupa tan kandel denira, dinonaksen, kinun adipati ring Sungenep, anger ing Madura wetan." (Iskandar Zulkarnaen: 2003).

Kabupaten Sumenep juga memiliki semboyan yang dikenal dengan sebutan "Sumekar". Semboyan ini merupakan akronim dari dua suku kata "Sumenep" dan "Karaton". Dengan semboyan tersebut mengisyaratkan bahwa secara historis kabupaten Sumenep memiliki hubungan yang cukup erat dengan sistem kerajaan. Hal ini wajar mengingat sejarah Sumenep merupakan daerah yang terdapat banyak Karaton dan sebagai pusat pemerintahan sang Adipati waktu dulu.

Lebih jauh, bahwa Smart City didasarkan pada upaya mereka untuk memecahkan berbagai tantangan yang dihadapi setiap kota. Jadi ada harapan untuk masa depan di mana kota dapat hidup, menciptakan hubungan yang harmonis untuk semua, dan memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Kota berkembang dan berkembang dicirikan oleh tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi, penduduk yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, pemanfaatan teknologi di berbagai bidang, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai modal utama bagi pembangunan daerah.

Beberapa ahli mendefenisikan *smart city*, bahwa *Smart City* didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. (Caragliu, A., dkk dalam Schaffers, 2010).

Lain dari definisi di atas, *Smart City* merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Kemunculan *Smart City* merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia, modal infrastruktur, modal social dan modal entrepreuneurial. Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktifitas lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kota. (Kourtit & Nijkamp: 2012).



Evolusi konsep smart city telah membawa pada pemahaman konsep smart city yang beragam namun belum jelas dan koheren. Yang disebut kota pintar pertama kali membuat terobosan baru dalam memecahkan masalah kota, dan kemudian berhasil meningkatkan kinerja kota. Pembangunan kota menuju smart city umumnya diawali dengan pemanfaatan sebagian teknologi informasi dan komunikasi sebagai prioritas. Misalnya, kota Amsterdam yang menggunakan TIK untuk mengurangi polusi, atau Talim, ibu kota Estonia, memulai pengelolaan kota pintar dari sudut pandang pemerintah menggunakan e-government, kartu identitas untuk layanan bagi penduduk yang didirikan untuk berkembang menjadi pusat.

Berkat sentuhan teknologi, beberapa kota besar tersebut telah mampu menerapkan *e-government, e-procurement, budgeting, e-delivery, e-control* dan *e-government.* e-pemantauan. Berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), garis besarnya dapat diturunkan dengan memaknai konsep *smart city* sebagai konsep yang telah menyempurnakan konsep yang ada dengan melengkapi kekurangan yang ada dan mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin belum ada dalam konsep tersebut. yang terjadi sebelumnya.

Bagaimanapun, konsep ini tidak hanya mendukung pengembangan dan pengelolaan kota pada tingkat teknis, tetapi juga mencakup tingkat manusia dan tingkat kelembagaan. Klasifikasi diimensi konsep smart city juga menyebutkan tiga dimensi, yaitu Aspek teknologi menuntut pengembangan kota digital dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur fisik, teknologi cerdas, perangkat yang sangat mobile dan jaringan komputer yang sesuai. Pengukuran sumber daya manusia, kreativitas, pengetahuan, pendidikan dan pembelajaran diperlukan sebagai motor penggerak utama terbentuknya *smart* city dimana permasalahan pasif ditransformasikan menjadi model sistem digital melalui kreativitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran, dan dalam agar dapat direalisasikan Itu harus benar-benar konsisten. Dalam aspek kelembagaan, diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan tata kelola sebagai dasar perancangan dan implementasi kota pintar.

Faktor Pendukung Smart City

Smart City cenderung mengintegrasikan informasi ke dalam kehidupan penduduk kota. Definisi lain Smart city juga didefinisikan sebagai kota yang dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi dengan menggunakan sumber daya manusia, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern. Sumber daya dikelola secara bijaksana melalui pemerintah melalui pelibatan masyarakat.

Ada beberapa indikator atau faktor pendukung implementasi smart city:

- 1. Kualitas untuk menciptakan inovasi ekonomi cerdas dan memenangkan persaingan. Semakin besar jumlah inovasi yang ditingkatkan, semakin besar peluang bisnis baru dan semakin besar persaingan antara bisnis dan pasar modal. Smart economy juga mengacu pada ekonomi yang baik, kota pintar yang menggunakan potensi sumber daya alam atau kepemilikan kota secara efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan mengukur tingkat perkembangan suatu wilayah selama periode tertentu.
- 2. Kemungkinan untuk mengembangkan transportasi dan infrastruktur berupa penguatan sistem perencanaan infrastruktur perkotaan mobilitas cerdas. Penataan infrastruktur kota yang akan berkembang ke depan difokuskan pada pemenuhan kepentingan publik dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi.
- 3. Smart Environment Sustainability and



- Resources, Smart Environment adalah lingkungan yang dapat memberikan kenyamanan visual atau tidak, kelestarian sumber daya, keindahan fisik dan non fisik bagi komunitas lokal dan publik, lingkungan yang bersih dan tertata.
- 4. Orang Cerdas Kreativitas, modal sosial, dan pembangunan selalu membutuhkan modal, dan baik modal ekonomi (ekonomi modal), modal usaha (modal manusia) dan modal sosial (modal sosial) diperlukan.
- 5. Smart living (gaya hidup cerdas atau kualitas hidup); Budaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup (budaya) yang terukur. Kualitas hidup itu dinamis karena kami selalu berusaha untuk meningkatkannya.
- 6. Tata Kelola Cerdas (Smart Governance): Kunci utama keberhasilan pemerintahan adalah tata pemerintahan yang baik, sebuah paradigma, sistem dan proses pemerintahan dan pembangunan yang menghormati prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas, dikombinasikan dengan komitmen. Pemerintahan terdesentralisasi. yang efisien, efektif, bersih, bertanggung jawab dan berdaya saing dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya.

Landasan Membangun Smart City

Ada beberapa fondasi yang dianggap sebagai prasyarat membangun *smart city*, yaitu :

a. Peran pemerintah berarti pemerintah berperan penting dalam mewujudkan implementasi *smart city* melalui perencanaan, penetapan regulasi *(rules)* yang diperlukan, perencanaan pembiayaan, pembangunan sistem dan infrastruktur berbasis teknologi, dan tata kelola. Pemerintah harus memiliki mimpi dan cita-cita untuk menciptakan kota cerdas,

- memberikan kehidupan yang berkualitas bagi warganya, dan memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada setiap orang yang tinggal di kota tersebut.
- b. Community support, artinya masyarakat berperan penting dalam mengimplementasikan smart city melalui dukungan masyarakat terhadap program, kebijakan, regulasi dan komitmen pemerintah terhadap smart city. Dukungan masyarakat ini dapat berupa partisipasi langsung sebagai aktor dalam penciptaan kota pintar, menyampaikan ide atau usulan inovatif untuk meningkatkan kota pintar yang ada dan mengelola sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah untuk mendukung implementasi kota pintar. Setiap masyarakat sangat peduli dan peduli terhadap lingkungan, setiap individu dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam lingkungannya, serta memiliki sikap dan perilaku yang baik terhadap sesama.
- c. Pembiayaan, teknologi canggih dinilai sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Berbagai kehidupan dapat diperoleh melalui teknologi. Namun, menciptakan teknologi yang kompleks membutuhkan biaya vang sangat tinggi. Pemerintah daerah yang ingin membangun kota pintar berbasis teknologi informasi dan komunikasi perlu memikirkan, merencanakan, dan menjelaskan biayanya. Biaya ini harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan, jika memungkinkan, pemerintah daerah dapat meminta bantuan keuangan dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan infrastruktur teknologi.
- d. Teknologi; Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan administrasi publik membuat sektor pelayanan publik pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, sederhana dan murah. Kami percaya



bahwa dukungan teknis sangat penting untuk pelayanan yang baik. Pemanfaatan teknologi dapat memberikan kemudahan sebagai pendorong dalam mengembangkan hasil, menghasilkan hasil yang berkualitas, meningkatkan kecepatan dan bersaing.

Strategi Awal dalam Mendukung Terwujudnya *Smart City*

Untuk mewujudkan *smart city*, setiap pemerintah daerah terlebih dahulu harus menjadikan kota tersebut sebagai kota yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera dengan visi, misi, strategi, tujuan dan program pembangunan yang mengedepankan *smart city*. Kota Metropolitan adalah kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat kehidupan politik lokal, pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pusat partisipasi sosial, pusat seni dan budaya masyarakat, dan pusat pemukiman maju. Hal ini ditandai dengan semakin terintegrasinya kegiatan sosial ekonomi, terciptanya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan, hadirnya prasarana dan sarana terpadu yang maju dan berkualitas, serta penataan ruang kota dan lingkungan yang efektif.

Daya Saing berarti bahwa suatu kota memiliki keunggulan kompetitif, komparatif dan bersama di tingkat lokal, nasional dan global, yang meliputi produktivitas sumber daya manusia yang tinggi, pengembangan industri, perdagangan dan jasa keuangan, infrastruktur sosial ekonomi yang lengkap, keamanan, keamanan sosial dan stabilitas politik, terselenggaranya manajemen profesional dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kenyamanan berarti kota yang aman, tenang, damai, tertib, beradab, dan suasana pedesaan yang bebas dari rasa takut dan cemas, kota yang layak huni bagi seluruh warga negara yang berekspresi dan melakukan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Peduli berarti bahwa suatu

kota melalui pemerintah daerahnya dapat memberikan pelayanan dan kepedulian yang tulus, empatik, adil dan merata kepada semua penduduknya tanpa diskriminasi atas dasar ras, ras, agama, asal usul atau golongan yang ditentukan oleh sikap warganya.

Urgensi Mewujudkan Kota Cerdas

Teknologi informasi tidak lagi digunakan di komputer pribadi atau smartphone, tetapi sudah mencapai level pemerintahan. Kota pintar dikenal sebagai layanan kota yang dilakukan dengan menggunakan peran teknologi informasi. Kini konsep *smart city* mulai diterapkan dan menjadi dambaan setiap kota di Indonesia. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah kesamaan konsep smart city yang sebenarnya. Pasalnya, selama ini belum ada regulasi langsung terkait smart city. Selama ini, pemerintah daerah terus menerapkan regulasi terkait *smart* city, seperti UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 11 Tahun 2008, dan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik dan Pemerintah Daerah Tahun 2009.

Relevansi kota pintar di kota-kota di Indonesia harus menjadi perhatian utama. Pikirkan kota metropolitan sebagai magnet urbanisasi. Masalah serius masyarakat perkotaan, seperti peningkatan konsentrasi penduduk, tidak diselesaikan dengan kecepatan yang sebanding dengan perkembangan industrialisasi. Masalah ini pada akhirnya menyebabkan urbanisasi berlebihan (Harahap: 2013).

Urbanisasi yang berlebihan akan menimbulkan masalah tidak hanya di kota-kota tujuan, tetapi juga di desa-desa terlantar. Misalnya, jumlah daerah miskin, kumuh dan kriminalitas perkotaan sema-kin meningkat. Membangun kota pintar memang tidak mudah. Masalah muncul di



banyak daerah.

Kabupaten Sumenep seringkali memiliki beberapa permasalahan terkait infrastruktur, koordinasi, dan sumber dava manusia. Misalnya dari segi infrastruktur, masalah kabel di jalan-jalan kota masih ada yang bermasalah dan layanan internet untuk masyarakat juga belum maksimal. Padahal, infrastruktur adalah yang paling mendasar, karena begitu infrastruktur ada, bisa berkembang pesat. Masalah koordinasi merupakan masalah klasik yang sering muncul di berbagai sektor, baik pemerintah, bisnis, akademisi maupun masyarakat. Koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa semua elemen yang berpartisipasi dan berkolaborasi dalam pembangunan kota pintar dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya.

Menggunakan teknologi informasi pada generasi sekarang bisa sangat mudah. Berbeda dengan generasi sebelumnya. Sebagai Kementerian Dalam Negeri, Kementerian memiliki visi berikut untuk menciptakan kota pintar di kawasan. Payung hukum smart city adalah UU No. 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lebih spesifik lihat bagian Inovasi Lokal Pasal 386-388. Penjelasan umum adalah bahwa pembangunan suatu negara didorong terutama oleh inovasi. dibuat oleh rakyat. Perlu dicatat bahwa bagian 386 memuat semua bentuk reformasi pemerintahan daerah.

Inovasi mengacu pada ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. Inovasi dapat berupa produk atau layanan baru, teknologi proses manufaktur baru, struktur dan sistem manajemen baru, atau inisiatif baru untuk anggota organisasi. Inovasi sektor publik merupakan cara atau terobosan dalam mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor publik.

Sifat sistem sektor publik yang kaku dan stagnan harus dilemahkan dengan menyampaikan budaya inovasi. Inovasi biasanya hanya dikenal di lingkungan yang dinamis seperti sektor bisnis yang semakin diperkenalkan ke sektor publik. Untuk alasan ini, melindungi inovasi masyarakat sangat penting. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah, dan diperlukan standar objektif yang dapat dijadikan pedoman inovasi bagi pejabat publik daerah.

Strategi Mewujudkan Kota Cerdas (Smart City)

Kawasan ini akan didukung sebagai kota cerdas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan pada akhirnya akan mendukung terciptanya ekonomi cerdas, mobilitas cerdas, lingkungan cerdas, masyarakat cerdas, gaya hidup cerdas, dan tata kelola yang cerdas. Tahap penentu merupakan tahap penting vang berfungsi sebagai jembatan antara dunia konsep dan dunia realitas. Dunia konsep tercermin dalam kondisi ideal yang harus dilaksanakan sebagaimana dirumuskan dalam dokumen kebijakan. Di sisi lain, dunia nyata merupakan realitas di mana masyarakat sedang bergelut dengan berbagai objek politik, baik sosial, ekonomi, politik, bahkan hukum. Tahap kritis digambarkan sebagai kondisi kritis bagi pemerintah daerah untuk menerapkan layanan publik yang cerdas melalui pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Tonggak penting yang disebutkan dalam komentar ini termasuk pemahaman konsep kota pintar, kerangka pengembangan kota pintar, paradigma pembangunan, dan komponen kota pintar.

Konsep kota pintar merupakan pendekatan cerdas terhadap teknologi informasi dan layanan publik sekaligus membangun kota impian yang "terintegrasi atau terintegrasi" untuk memecahkan masalah perkotaan seperti pertumbuhan penduduk, infrastruktur ICT, ekonomi, politik, masalah budaya dan pe-



rubahan paradigma pemerintah.

Berdasarkan konsep tersebut, peran negara sebagai faktor kunci dalam implementasi kota pintar. Empat pilar pengembangan kota pintar meliputi: Pilar pertama adalah people (pengguna), meliputi kepribadian dan moralitas, kepatuhan kebijakan (compliance), pilar kedua adalah model hubungan antar pemangku kepentingan, layanan publik dan integrasi data. Pilar ketiga adalah layanan dan data (informasi) infrastruktur TIK yang menggabungkan semua akses online, infrastruktur jaringan, akses broadband, pusat data/cloud, platform pertukaran data/big data, aplikasi, dan media otomatis seperti pengawasan video. Pilar keempat adalah struktur kelembagaan kota pintar untuk melakukan analis, integrator, dan evaluator, serta menyelaraskan manajemen TI dengan proses bisnis. Lembaga Smart City memantau keberlanjutan program pembangunan yang digagas oleh pemerintah daerah.

Paradigma pemerintahan dapat menentukan arah pembangunan pilar smart city. Paradigma pemerintahan yang berkembang saat ini menganut sistem terbuka seperti: 1) kelembagaan inklusif yaitu sikap terbuka dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang kuat (sound), 2) Collaborative Governance vaitu adanya sebuah forum deliberatif, di mana para stakeholder yang terlibat dapat melakukan proses dialog hingga mencapai sebuah konsensus terkait permasalahan publik, 3) Integrated governance menggambarkan struktur hubungan formal dan informal, untuk mengelola urusan melalui pendekatan kolaboratif (join-up) antar instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, 3) Open Governance adalah inisiatif melaksanakan integrasi layanan, keterbukaan akses informasi ke publik, keterlibatan warga dalam kebijakan pemerintah.

Bridging smart city dapat juga dikonotasikan melakukan proses kematangan (maturity) IT gobernance, se-

cara bertahap meliputi 1) *ad-hoc*, adanya kesadaran yang kuat pada pimpinan dan stakeholder, 2) *Repeatable*, tahapan pemanfaatan dasar IT dengan proses sederhana, 3) *Defined network process*, semua proses dapat didefenisikan dengan jelas dalam kerangka kerja terintegrasi, 4) *Managed*, managemen proses secara *real time*. 5) *Integrated*, terintegrasinya layanan antar organisasi (*interorganizational*) dan antar sistem operasional (interoperasional), dan 6) tingkat *smart* yaitu semakin efektif dan efisien pelayanan kepada warganya.

Ketidakmampuan menyeleraskan konsep kota cerdas, pilar pembangunan *smart city,* paradigma pemerintahan serta visi dan misi pemda menjadi salah satu penyebab tidak terarah dan tidak terukurnya pembangunan *smart city.*

Penutup

Untuk mewujudkan *smart city* di Kabupaten Sumenep, diperlukan paradigma bersama untuk mewujudkan smart city sejati. Selain perlu adanya regulasi langsung terkait *smart city*, juga diperlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang ingin menjadikan smart city sebagai bentuk pelayanan publik bagi masyarakat. Secara konseptual, karena smart city masih merupakan hal baru dalam penataan ruang di Indonesia, hanya beberapa daerah Kabuapten/Kota, misalnva Bandung, Surabaya dan kota-kota lain yang telah menerapkan konsep *smart city*. Untuk mewujudkan *smart city*, setiap pemerintah daerah Kabupaten Sumenep terlebih dahulu harus menjadikan kota tersebut sebagai kota yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera dengan visi, misi, strategi, tujuan dan program pembangunan yang mengedepankan smart city. Kabupaten Sumenep harus mampu berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat kehidupan politik lokal, pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pusat partisipasi sosial, pusat seni dan budaya masyarakat, dan pusat pemukiman maju.



Daftar Pustaka

- Alawadhi, S., Aldama-Nalda, A., Chourabi, H., Gil-Garcia, J. R., Leung, S., Mellouli, S., Walker, S., 2012, Building Understanding of Smart City Initiatives. International Conference on Electronic. Government. Heidelberg: Springer Berlin.
- Airaksinen, Miimu, et.al., 2015, *Smart City- Research Highlights. Miimu Airaksinen and Matti Kokkala (ed.)*. Grano: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.
- Al-Hader, Mahmoud and Ahmad Rodzi, 2009, *The Smart City Infrastructure Development and Monitoring*, CCSAP, Number 2.
- Griffinger, R., dkk, 2007, *Smart cities Ranking of European medium-sized cities*. Final report October.
- Government of India, Ministry of Urban Development, 2015, *Smart Cities Mission Statement & Guidelines*. Official Report of Smart City Mission Transformation on June.
- Hall, R. E., 2000, The vision of a smart city. In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop, Paris, France.
- Harrison, C. dkk., 2010, Foundations for Smarter Cities. IBM Journal of Research and Development.
- Iskandar Zulkarnaen. 2003. *Sejarah Sume-nep*. Sumenep: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi asional Pengembangan E-Government.
- Hitachi, 2013, *Hitachi's Vision for Smart Cities*.

- Kementerian Kominfo RI., 2016, Permenkominfo RI No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika. Jakarta: Kementerian Kominfo RI.
- Nugroho, Eko, 2008, Sistem Informasi Manajemen, Konsep, Aplikasi dan Perkembangannya, Yogyakarta, penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.
- Shah, M. N., et al., 2017, Assessment of Ahmedabad (India) and Shanghai (China) on Smart City Parameters Applying the Boyd Cohen Smart City Wheel. Proceedings of the 20th International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate. Y. Wu, S. Zheng, J. Luo et al. Singapore, Springer Singapore: 111-127.
- Schaffers, Hans, et.al., 2011, Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation". Future Internet Assembly, LNCS 6656.
- Sudaryono, 2014, Konsep Smart City untuk Kota-Kota di Indonesia. MPKD UGM.
- Washburn, Doug and Usman Sindhu, 2010, Helping CIOs Understand "Smart City" Initiatives: Defining The Smart City, Its Drivers, And The Role Of The CIO. Research Report for CIOs. February 11, 2010.



Sinergitas Masyarakat dalam Membangun Pendidikan Menuju Sumenep Cerdas

Musleh Wahid ¹, Dainori ² (¹Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan, ² STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep)

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia sudah cukup banyak melakukan terobosan dalam memperbaiki kualitas pendidikan, salah satunya ditandai dengan perubahan kurikulum pendidikan mengalami perubahan dari tingkat istilah sampai isi kurikulum. Masyarakat berperan sangat penting pada perkembangan pendidikan anak. Masyarakat memiliki peran strategis dan harus berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, baik langsung atau tidak langsung dalam semua kondisi (keluarga dan masyarakat). Masyarakat harus berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan anak baik langsung atau tidak langsung. Karena lingkungan dalam keluarga, dan sekolah serta masyarakat sangat memiliki keterikatan. Kualitas masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya, semakin baik pendidikan anggotanya, semakin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Sinergitas, Masyarakat, Pendidikan, Sumenep Cedas

Latar Belakang

Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama mulai dari pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Masyarakat berperan sangat penting dalam perkembangan pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat punya tanggungjawab yang sama dan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, baik langsung ataupun tidak langsung. Pelaksanaan pendidikan tentu akan berdampak terhadap masyarakat itu sendiri, dengan begitu terdapat korelasi positif yang bersifat timbal-balik antara masyarakat dan pendidikan. Semakin baik pendidikan yang diselenggarakan maka akan semakin berkualitas

masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya, semakin berkualitas masyarakatnya, semakin baik dan berkualitas pula pendidikan yang diselenggarakan.

Salah satu prasarat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera adalah lebih ditentukan oleh sejauh mana kualitas sumber daya masyarakatnya. Kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh peran serta mutu pendidikan yang dipergunakan oleh bangsa tersebut. Masyarakat yang berperadaban adalah masyarakat yang berpendidikan. Dalam hal ini Muhammad Tidjani (2008 : 48) menyatakan, pendidikan dalam Islam itu menduduki posisi urgen, prinsipil dan merupa-



kan sesuatu yang tidak boleh tidak harus dimiliki oleh setiap insan yang mengaku muslim, karena itulah pendidikan dalam Islam disebut juga dengan *tarbiyah* yang berasal dari kata *rabba-yurabby* yang berarti mengembangkan dan menumbuhkan.

Gambaran serupa juga dikemukakan oleh seorang pendidik besar Prancis yang hidup pada sekitar abad ke-19 dalam sebuah buku yang terkenal "Aqeuitient Superiorite de Anglo Saxons" (Superiornya bangsa Inggris) yang terbit tahun 1897, dalam salah satu bab terpentingnya berjudul "New Education" menyatakan:

Kalau kita hendak menyimpulkan jawaban tentang persoalan masyarakat dalam suatu patah kata, maka kata itu ialah "Pendidikan" (Ahmad, 1970 : 15).

Sesungguhnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat adalah bertujuan supaya membiasakan diri untuk mengantisipasi setiap peristiwa baru di dunia ini, agar manusia mampu berjuang dengan tenaganya sendiri. Di sam¬ping itu, pendidikan juga dimaksudkan sebagai proses yang direncanakan dan diarahkan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan (a goal-directed learning).

Dick, Carey & James (1990: 241) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang sistematis di mana setiap komponen memiliki arti yang sangat penting untuk keberhasilan pendidikan. Pandangan tentang proses pendidikan sebagai sistem inilah yang kemudian mendasari rancangan pendidikan (instructional design) sebagai sebuah sistem. Rancangan pendidikan tersebut terdiri atas sejumlah komponen, komponen-komponen tersebut saling beker-ja sama atau berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Dunia pendidikan kita sudah berkali-kali mengalami perubahan kurikulum. Namun, apa dampaknya terhadap kemajuan peradaban bangsa? Sudahkah pendidikan di negeri ini mampu melahirkan anak-anak bangsa yang visioner; yang mampu membawa bangsa ini berdiri sejajar dan terhormat dengan negara lain di kancah global? Sudahkah "rahim" dunia pendidikan kita melahirkan generasi bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial?

Jawaban terhadap semua pertanyaan itu agaknya membuat kita sedikit gerah. Jutaan generasi datang silih-berganti memasuki tembok sekolah. Namun, kenyataan yang kita rasakan, nilai kesalehan, baik individu maupun sosial, nyaris tidak dapat dihayati dan teraplikasikan dalam panggung kehidupan nyata. Yang kita saksikan, justru kian merebaknya kasus korupsi, kolusi, manipulasi, kejahatan krah putih, atau perilaku anomali sosial lain yang dilakukan oleh orang-orang yang notabene sangat kenyang "makan sekolahan". Yang lebih memprihatinkan, negeri kita dinilai hanya mampu menjadi bangsa "penjual" tenaga kerja murah di negeri orang. Kenyataan empiris semacam itu, disadari atau tidak, sering dijadikan sebagai indikator bahwa dunia pendidikan kita telah "gagal" melahirkan tenaga-tenaga ahli yang memiliki kompetensi untuk bersaing di pasar kerja, meskipun berkali-kali terjadi perubahan kurikulum.

Sebenarnya, pemerintah Indonesia sudah cukup banyak berbuat. Ditandai dengan beberapa kali kurikulum pendidikan mengalami perubahan dari tingkat istilah sampai isi kurikulum itu sendiri. Dalam catatan sejarah, Indonesia telah beberapa kali merubah, mengganti, merevisi dan mengembangkan kurikulum pendidikan nasional. Mulai dari tahun 1947 (rentjana pembeladjaran), 1952 (penyempurnaan rentjana pembeladjaran terurai), 1964 (rentjanca pendidikan), 1968 (subject matter oriented), 1975 (output oriented), 1984 (penyempurnaan output oriented), 1994 (content oriented yang berorientasi dan memuat kurikulum nasional 80% dan muatan lokal 20%), 1999 (suplemen



kurikulum 1994), 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi / KBK), 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan / KTSP) (Tuhusetya, 1980 : 74), setelah ini sudah siap di depan kita kurikulum 2013. Namun, istilah apa lagi yang akan dipakai? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Perubahan tersebut biasanya merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dan masyarakat harus mendapat perhatian khusus dan serius dalam sistem dan penyelenggaraan pendidikan di wilayah kabupaten Sumenep. Karena peran masyarakat dapat meningkatkan pendidikan dalam hal kualitas dan keunggulan.

Teorisasi Masyarakat dan Pendidikan 1. Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu atau orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan *society* yang artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin "*socius*" yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Beberapa ahli berpendapat tentang pengertian masyarakat, yaitu:

- a. Emile Durkheim, dia berpendapat bahwa masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan Ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.
- b. Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu system dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelom-

- pok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.
- c. Menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
- d. Sedangkan menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan (Prasetyo, 2020:164–165).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu yang cukup lama, mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, dan tradisi sehingga menghasilkan suatu adat istiadat. Sehingga kebersamaan ini harus bersama-sama dijaga. Apalagi untuk wilayah Sumenep yang sampai saat ini ketentraman, keamanan, dan kenyamanan tetap terjaga. Sehingga sangat mendukung untuk pengembangan dan perkembangan kualitas pendidikan yang ada di wilayah kabupaten Sumenep.

2. Pengertian Pendidikan

Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Sedangkan pendidikan berarti membina, mendidik, tidak



hanya sekedar mentransfer ilmu. Pendidikan bertujuan membentuk pribadi yang sempurna. Secara umum, ilmu dalam pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara dan usaha untuk menuju berhasilnya pembentukan kepribadian yang sempurna.

Para Ahli didik Islam, banyak yang berbeda pendapat tentang pengertian pendidikan Islam itu sendiri. Sebagian, ada yang menitik beratkan pada segi pembentukan akhlaq, sebagian lagi menuntut pendidikan teori dan praktik, dan sebagian lainnya menghendaki terwujudya kepribadian dan lain-lain. Berikut ini pendapatpendapat para ahli didik mengenai Pendidikan:

- a. Menurut Drs. Ahmad D. Marimba. Pendidikan adalah Bimbingan Jasmani, rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju pada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.
- b. Burlian Somad berpendapat bahwa Pendidikan adalah sesuatu yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, berderajat tinggi,
- c. Prof. Dr. Hasan Langgulung berpendapat bahwa Pendidikan memiliki 4 (empat) macam fungsi : pertama, menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat di masa datang. Kedua, memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan tersebut, dari generasi tua, ke generasi muda. Ketiga, memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat. Keempat, mendidik anak agar dapat beramal baik didunia, dan dapat memetik hasilnya di akhirat.
- d. Ahmad Tafsir menjelaskan pendidikan Islam adalah proses tranformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.

Dari uraian tersebut, dapat disim-

pulkan bahwa pengertian ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan persoalan-persoalan pokok pendidikan dan kegiatan mendidik anak untuk ditujukan ke arah terbentukya kepribadian seseorang (Hamdanah, 2017: 4–6).

Dengan dermikian kerjasama semua pihak; orang tua, pemerintah, dan stakholder lainnya sangat diharapkan dalam membangun kualitas pendidikan yang ada. Demi terwujudnya cita-cita Sumenep cerdas dan berkualitas.

3. Problematika Pendidikan

Problematika adalah berasal dari akar kata bahasa Inggris "problem" artinya, soal, masalah atau teka-teki. Juga berarti problematic, yaitu ketidak tentuan (Wojowasito, t.th: 259),. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata problem berarti masalah, persoalan. *Problema*tik berarti masih menimbulkan masalah, hal vang masih belum dapat dipecahkan, permasalahan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:1103). Jadi, maksud dari problem atau problematik adalah segala sesuatu persolalan atau permasalahan yang perlu dicari akar persoalannya untuk dicarikan solusi pemecahan agar dapatnya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Tentang makna dari pendidikan banyak definisi dan berbagai macam, namun secara umum ada yang mendefinisikan bahwa; pendidikan adalah suatu hasil peradaban sebuah bangsa yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri, sebagai suatu pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan mereka berkembang (Meichati, 1980:6). Definisi pendidikan secara lebih khusus sebagaimana di kemukakan oleh Ali Saifullah, bahwa pendidikan ialah suatu proses pertumbuhan di mana seorang individu dibantu mengembangkan dayadaya kemampuannya, bakatnya, kecakapannya dan minatnya (Saifullah, t.th:



135). Sehingga dapat di simpulkan disini bahwa pendidikan adalah, suatu usaha sadar dalam rangka menanamkan dayadaya kemampuan, baik yang berhubungan dengan pengalaman kognitif (daya pengetahuan), affektif (aspek sikap) maupun psikomotorik (aspek ketrampilan) yang dimiliki oleh seorang individu.

Usaha meningkatkan mutu pendidikan di tanah air ini sebenarnya sudah cukup banyak diupayakan, antara lain dengan melakukan perubahan kurikulum, penataran guru, dan sebagainya. Namun demikian, sekalipun berbagai upaya tersebut dilakukan secara intensif, tetapi jika pengemasan pendidikan tidak diniatkan untuk dalam rangka ibadah kepada Allah, yang akan terjadi adalah bencana moral yang berkepanjangan dan takm kunjung selesai. *Imam Al-Ghazal*y dalam kitab Siraju at-Thalibin karya Syikh Muhammad Dahlan menyatakan bahwa Ilmu dan Ibadah merupakan dua mutiara yang tak dapat dipisahkan. Untuk keduanyalah diutusnya para rasul dan dalam rangka kedua hal tersebut pula langit dan bumi berikut isinya diciptakan (Dahlan, 1973:71).

Aristoteles memandang bahwa pendidikan merupakan tugas negara yang secara langsung merupakan bagian dari politik, sehingga negara harus bertanggungjawab dan memiliki tugas utama untuk menyediakan pendidikan yang layak secara umum. Dia mengakui hubungan yang diperlukan dan timbal balik antara negara dan individu di mana pendidikan adalah melayani kebutuhan negara, tetapi disisi lain negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa individu-individu harus berkembang, yaitu, mencapai kebaikan teknis dan moral dan kebahagiaan (Tan, 2008:22).

Rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan apalagi tanpa mendapatkan hidayah dari Allah, tampaknya terus saja melahirkan persoalan-persoalan mendasar yang menampakkan keterpurukan pendidikan baik dilihat dari segi proses maupun hasilnya. Dalam hal ini, patut pula diduga bahwa persoalan tersebut belum juga teratasi karena masih saja para penanggungjawab pendidikan seolah-olah abai dan terkadang kurang bertanggungjawab, di antaranya adalah peran guru yang seakan kurang perhatian terhadap tingkah laku siswa. Kondisi pendidikan yang cukup memprihatinkan tersebut menuntut penelaahan kembali penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta membutuhkan perhatian serius dari berbagai kalangan guna mencari alternatif pemecahan masalah secara tepat.

Adapun yang dimaksud dengan problematika pendidikan Islam adalah, persoalan-persoalan atau permasalah-an-permasalahan yang di hadapi oleh dunia pendidikan khususnya Islam. Persoalan-persoalan pendidikan tersebut secara garis besar menurut *As'aril Muhajir* yang utama dan sangat dirasakan dampaknya pada saat ini adalah demoralisasi dan pergeseran nilai (Muhajir, 2011:22).

Muzayyin Arifin dalam buku Mohammad Tidjani mengangkat tantangan-tantangan pendidikan Islam yang harus segera dibenahi adalah sebagai berikut (Djauhari, 2008:35-36):

a. Krisis nilai

Hampir setiap hari kita dapatkan berita tentang fenomena yang ada di negeri ini, dimana kadang sesuatu yang sudah jelas salah malah diputar balikkan menjadi benar, dan sesuatu yang benar menjadi salah. Bahkan, seseorang yang sudah benar-benar salah masih dibela, dan orang yang benar dipenjara karena memperjuangkan yang haq, sementara yang salah bisa bebas berbuat dan berjalan bebas seperti orang yang tak punya masalah. Sepertinya nilai-nilai kebajikan sudah tidak berharga lagi. Yang ada malah seperti slogan "maju tak gentar membela yang bayar". Yang tak punya malah binasa.

b. Krisis konsep tentang pandangan arti hidup yang baik.

Kehidupan yang glamor sudah



nampak di mana-mana. Sepertinya cara hidup yang ada sekarang sudah keluar dari yang seharusnya bagaimana hidup itu sendiri. Para pelajar sepertinya bangga dengan sesuatu yang berpenampilan norak dan berbeda dengan yang lain dan layak pandang.

c. Krisis kesenjangan kredibilitas.

Para penghuni negeri ini sepertinya sudah mendewakan dan mengelu-elukan selain dari yang harus mereka panuti. Kiyai, ustadz, dosen/guru, pemuka agama, bahkan orang tua sudah sepertinya tidak ada lagi wibawa bagi mereka. Sehingga ada yang sebagian orang tua murid harus berurusan dengan pihak berwajib (polisi) yang karena menegur anak kandungnya sendiri karena berprilaku tidak pantas, malah dilaporkan kepada polisis dengan alasan HAM (Hak Asasi Manusia). Yang mereka kagumi dan bahkan mereka banggakan malah seperti artis-artis yang kredibilitasnya sudah kurang baik dalam hal moral, yang seharusnya mendapat sanksi moral malah dibela mati-matian.

d. Krisis sikap idealisme.

Masa sekarang yang paling mengkwatirkan adalah ketika para pelajar sudah lebih mementingkan unsur materialistis dari pada pengetahuan. Segalanya diukur serba uang. "ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang".

Menurut *Zahara Ideris* (1982) yang dikutip oleh Subandijah (1993:77) mengemukakan masalah-masalah yang menuntut adanya inovasi pendidikan dan kurikulum di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan yang menghasilkan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan kebudayaan.
- b. Laju pertambahan penduduk yang cukup pesat, yang menyebabkan daya tampung ruang dan fasilitas pendidikan sangat tidak seimbang.
- c. Mutu pendidikan yang dirasakan se-

- makin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Kurang adanya relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun
- e. Belum berkembangnya alat organisasi yang efektif serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang.

Sementara menurut *Burlian Somad*, persoalan-persolan pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini belum teratasi meliputi hal sebagai berikut (Somad, 1978: 101):

a. Adanya ketidak jelasan tujuan pendidikan.

Dalam undang-undang nomor 4 tahun 1950, telah disebutkan secara jelas tentang tujuan pendidikan dan pengajaran yang pada intinya, ialah untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air berdasarkan pancasila dan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan seterusnya (Meichati, t.th : 73). Namun dalam kenyataan yang terjadi terhadap tujuan pendidikan yang begitu ideal tersebut belum mampu menghasilkan manusia-manusia sebagaimana yang dimaksud dalam tumpukan kata-kata dalam rumusan tujuan pendidikan yang ada, bahkan terjadi sebaliknya, yakni terjadi kemerosotan moral, kehidupan yang kurang demokratis, terjadi kekacauan akibat konflik di masyarakat dan lain lain, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa tujuan pendidikan selama ini belum dikatakan berhasil, mungkin disebabkan adanya ketidak jelasan atau kekaburan dalam memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya.

b. Ketidak Serasian Kurikulum.

Kebanyakan kurikulum yang dipergunakan di sekolah-sekolah masih berisi



tentang mata pelajaran yang beraneka ragam, sejumlah jam-jam pelajaran dan nama-nama buku pegangan untuk setiap mata pelajaran.

Sehingga pengajaran yang berlangsung kebanyakan menanamkan teori-teori pengetahuan melulu, akibatnya para lulusan yang di hasilkan kurang siap pakai bahkan miskin ketrampilan dan tidak mempunyai kemampuan untuk berproduktifitas di tengah-tengah masyarakatnya, karena muatan kurikulum yang di terima di sekolah-sekolah memang tidak di persiapkan untuk menjadikan lulusan dari peserta didik untuk dapat mandiri di masyarakatnya.

c. Ketiadaan tenaga pendidik yang tepat dan Cakap.

Masih banyak di jumpainya suatu slogan yang berbunyi "tak ada rotan akarpun jadi", menunjukkan suatu gambaran betapa rendahnya kualitas tenaga kependidikan yang ada, karena harus di pegang oleh tenaga-tenaga pendidikan yang bukan dari ahlinya. Padahal menugaskan dan mendudukkan seseorang sebagai pendidik yang tidak dibina atau dibekalinya ilmu kependidikan dan yang bukan dalam bidangnya, sangatlah menimbulkan kerugian yang sangat besar, diantaranya terjadinya pemborosan biaya, terjadinya pemerosotan mutu hasil pendidikan, lebih jauh lagi akan mempersiapkan warga masyarakat di masa mendatang dengan pribadi-pribadi berkualitas rendah sehingga tak mampu bersaing dalam kehidupan yang serba problematis.

d. Adanya pengukuran yang salah ukur.

Dalam masalah pengukuran terhadap hasil belajar yang sering di sebut dengan istilah ujian atau evaluasi, ternyata dalam prakteknya terjadi ketidak serasian antara angka-angka yang di berikan kepada anak didik sering tidak obyektif, di mana pencantuman angka-angka nilai yang begitu tinggi sama sekali tidak sepadan dengan mutu riil pemegang angka-angka nilai itu. Ketika mereka di terjunkan ke masyarakat, tidak mampu berbuat apa-apa yang setaraf dengan tingkat pendidikannya. Jelasnya tanpa adanya pengukuran yang obyektif dapat di pastikan tidak akan pernah terwujud tujuan pendidikan yang sebenarnya.

e. Adanya kekaburan landasan tingkat-tingkat pendidikan.

Selama bertahun-tahun nampaknya tidak ada yang meninjau kembali tentang penjenjangan tingkat pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga ke tingkat perguruan tinggi. Apakah hasil penjenjangan selama ini di dasarkan atas tingkat perkembangan pisik dan psikis anak didik ataukah sekedar terjemahan saja dari tingkat-tingkat pendidikan yang dipakai umum di seluruh dunia, kalau itu masalahnya, kondisi anak didik kita jelas jauh berbeda dengan kondisi negara – negara lain di dunia, sehingga mustahil apabila harus diadakan persamaan. Ataukah didasarkan atas hasil penelitian empiris, apakah benar bahwa untuk menjadi seorang yang bercorak diri bernilai tinggi itu cukup memerlukan pembinaan selama masa waktu beberapa tahun. Inilah permasalahan-permasalahan di sekitar pendidikan kita yang selama ini belum diketemukan jawabannya.

Dari sekian banyak problem dan persoalan pendidikan ini, penulis dapat simpulkan bahwa, semakin bertambah umur dunia pendidikan kita ini khususnya di negeri kita Indonesia, nampaknya semakin komplek dan beragam persoalan-persoalan baru yang lahir.

PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Kita semua tahu bahwa yang di maksud dengan manusia yang utuh dan insya Allah sempurna dan merupakan idaman setiap orang yang mukmin muslim adalah manusia yang sehat jasmani



dan rohani, manusia yang mempunyai hubungan secara vertikal (dengan Tuhan), horizontal (dengan lingkungan dan masyarakat), dan konsentris (diri sendiri) yang selalu berimbang antara duniawi dan ukhrawi. Jadi secara konsep tujuan tersebut sudah sangat baik.

Confusius mengatakan bahwa belajar pada hakikatnya adalah bagian integral dari memperoleh kebajikan moral dan sipil, untuk mencintai kebajikan tanpa belajar mencintai kewajiban akan mengarah pada kebodohan. Untuk cinta kepintaran tanpa belajar mencintai lingkungan sekitar mengarah ke penyimpangan dari jalan yang benar (Tan, 2008:11).

Pendidikan yang baik harusnya kembali ke *khitthah* dan dasar pendidikan Islam yang telah digariskan sejak lahirnya Islam, yang sepertinya problem-problem pendidikan Islam pada saat itu belum banyak muncul ke permukaan. Sehingga apa yang terjadi saat ini menjadi kegelisahan hampir semua umat Islam karena menjadi pemandangan yang tak elok dan tak layak ditonton.

Yusuf Qordlawi dalam buku Muhamad Tidjadi menyatakan tentang karakteristik Islam yang tidak boleh dikesampingkan khususnya di dunia pendidikan adalah (Djauhari, 2008 : 9):

a. Karakter *Rabbaniyyah* (Ketuhanan)

Segala bentuk dan jenis kegiatan pendidikan harusnya berpedoman kepada apa yang deperintah Tuhan. Segalanya harus dikembalikan kepada Tuhan. Sudah sesuaikah dengan yang dimaui Tuhan? Atau terjadi kontradiktif dengan apa yang dimaui Tuhan? Atau malah mungkin sudah dan telah terjadi pembangkangan terhadap Tuhan yang sudah jelas menciptakan kita?

b. Karakter *Insaniyah* (Kemanusiaan)

Manusia adalah *Khalifah* Allah di bumi, manusia adalah sasaran utama dari perintah Allah. Alam dan isinya diperuntukkan untuk mereka.

c. Karakter asy-Syumul (Universal)

Karakteristik Islam adalah sesuatu yang cocok untuk semua zaman. Tak dapat dipungkiri bahwa di dalam Islam segala sesuatu itu ada dan tidak ada yang bertentangan dengan perkembangan zaman.

d. Karakter *Al-washitiyah* (Moderat) dan *at-tawazun* (Kesinambungan)

Di dalam islam selalu terjaga perimbangan antara spritualisme/ruhiyah, materialisme/maddiyah, individualisme/ fardliyah, kolektifisme/jama'iyah, idealisme/mitsaliyah, konsistensi/tsabat, perubahan/taghayyur, dll.

e. Karakter *Al-waqi'iyah* (Kontekstual)

Ikrar bahwa realitas kehidupan manusia dan makhluk hidup itu selalu berubah-ubah. Dunia dicipta untuk berubah dan diubah oleh manusia.

f. Karakter Al-wudhuh (Kejelasan)

Islam sudah jelas dengan hukum yang diturunkan bersamanya. Kejelasan Islam nampak dalam bidang *ushul* dan *qawa'id*, atau yang berhubungan dengan *ushuluddin* (sumber hukum), sasaran, tujuan, *manhaj* (metodologi), maupun sarana (sarana).

g. Paduan antar *Tathowwur* (Transformasi) dan *Tsabat* (Konsistensi)

Keabadian Islam nampak dari sumber kitab sucinya yaitu Alqur'an dan hadis, keluesannya jelas dari sumber hukumnya berupa *ijtihad*. Islam mampu mampu memadukan aspek konsisitensi, keabadian syariat dan ajarannya, dengan keluesan dan fleksibilitasnya (muruah).

Umar Tirtaharja (2005:249) menyatakan bahwa, kecenderungan pendidikan sekarang lebih mengutamakan pada aspek pengembangan kognitif. Pendidikan agama dan pendidikan moral Pancasila misalnya, yang semestinya mengutamakan penanaman nilai-nilai bergeser kepada penguasaan materi dan



pengetahuan. Pengembangan daya pikir anak didik dinomorsatukan, sedangkan pengembangan pada segi nilai dan tingkah laku terabaikan. Padahal pengembangan nilai dan tingkah laku jauh lebih penting dan lebih berguna dari pada sekedar penguasaan materi. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut mampu untuk menumbuhkan kepercayaan diri, kemandirian, keyakinan dan ketaqwaan yang kuat, penghargaan terhadap waktu kerja, kegairahan belajar, kedisiplinan, kesetiakawanan sosial, dan semangat kebangsaan kepada peserta didik.

Aspek spiritual, moral intelektual dan imajinatif dari peserta didik harus dipertimbangkan sesuai dengan pertumbuhan kemampuan pikirannya, untuk menyusun subyek dan rangkaian pelajaran dalam tahapan yang bertingkat. Perkembangan kepribadiannya juga dilihat dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan dan alam dengan cara menanamkan atau menyadari dalam dirinya sifat-sifat Tuhan (dalam dimensinya yang tak terbatas), maka kemajuan moral, intelektual manusia secara potensial tidak terbatas pula (Ashraf, 1996: 50). Secara teoritis filosofis penyusunan sebuah kurikulum harus berdasarkan asas dan orientasi tertentu, yang meliputi asas filosofis, sosiologis, psikologis, organisatoris dan psikologios. Asas filosofis berperan sebagai penentu tujuan umum pendidikan (Nata, 1997:125). Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Yang menjadi sumber masalah adalah bagaimana system pendidikan mampu membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja (bagi yang tidak melanjutkan sekolah) dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk ke perguruan tinggi (bagi mereka yang ingin melanjutkan). Kedua macam bekal tersebut seharusnya sudah mulai diberikan sejak dini.

Adanya tarik menarik dari segi peran dan orientasinya antara kurikulum yang bercorak humanistik, rekonstruksi sosial, teknologis dan akademis. Kelompok yang punya orientasi pada humanistik berpendapat bahwa kurikulum seharusnya memberikan pengalaman kepada setiap pribadi secara memuaskan. Pendukung humanistik ini melihat kurikulum sebagai proses yang memberikan kebutuhan bagi pertumbuhan dan integritas pribadi seseorang secara bebas dan betanggungjawab (McNeil1988: 5). Secara teoritis kurikulum lebih merupakan kendaraan, daripada materi. Karenanya sebagai sebuah kendaraan ia dapat digunakan oleh siapa saja yang menghendakinya (al-Syaibany, 1979: 476). Pendidikan Islam sepanjang masa kegemilangannya memandang kurikulum pendidikan sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik dan menolong mereka untuk membuka dan mengembangkan kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, kekuatan-kekuatan, dan ketrampilan mereka yang bermacam-macam dan menyiapkan mereka dengan baik untuk melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi.

Islam menggunakan kata manhaj untuk kata kurikulum yang diartikan jalan yang terang atau jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya (Qurah,1975:96) Jalan terang tersebut adalah jalan yang dilalui oleh pendidik atau guru latih dengan orang-orang yang dididik atau dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka.

Kurikulum pendidikan harus memiliki ciri-ciri khusus, seperti yang disampaikan oleh *Husen Quroh*. Antara lain adalah (Qurah,1975:80):

- Menonjolkan tujuan pendidikan perilaku sesuai dengan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungan-kandungan, metodemetode, alat-alat dan tekniknya bercorak agama.
- Meluas cakupannya dan menyeluruh kandungannya. Yaitu kurikulum yang betul-betul mencerminkan se-



mangat, pemikiran dan ajaran yang menyeluruh. Di samping itu ia juga luas dalam perhatiannya. Ia memperhatikan pengembangan dan bimbingan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologis, sosial dan spiritual.

- 3) Bersikap seimbang di antara berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum yang akan digunakan. Selain itu juga seimbang antara pengetahuan yang berguna bagi pengembangan individual dan pengembangan sosial.
- 4) Bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang diperlukan oleh anak didik.
- 5) Kurikulum selalu disesuaikan dengan minat dan bakat anak didik.

Menurut riwayat yang sering penulis ketahui seperti halnya pesantren, sebuah sekolah sudah dapat beroperasi jika ada murid, guru, dan ruangan tempat belajar dengan beberapa sarana seperlunya. Guru merupakan satu-satunya sumber belajar, ia menjadi pusat tempat bertanya. Tugas guru memberikan ilmu pengetahuan kepada murid. Cara demikian dipandang sudah memadai karena ilmu pengetahuan guru belum berkembang, cakupannya masih terbatas. Kebutuhan hidup dewasa ini sudah lebih dari sederhana. Dewasa ini berkat perkembangan iptek yang demikian pesat bahkan merevolusi, bagi seorang guru tidak mungkin lagi menguasai seluruh khazanah ilmu pengetahuan walau dalam bidangnya sendiri yang ia tekuni. Dia tidak mungkin menjadikan dirinya gudang ilmu dan oleh karena itu juga tidak satu-satunya sumber belajar bagi muridnya. Tugasnya bukan memberikan ilmu pengetahuan melainkan terutama menunjukkan jalan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan, dan mengembangkan dorongan untuk berilmu. Dengan kata lain menumbuhkankembangkan budaya membaca dan budaya meneliti untuk menemukan sesuatu pada diri muridnya. Dengan singkat dikatakan tugas guru adalah "membelajarkan pelajar".

Guru mendudukkan dirinya hanya sebagai bagian dari sumber belajar. Beraneka ragam sumber belajar yang hanya justru dapat ditemukan di luar diri guru seperti perpustakaan, taman bacaan, museum, toko buku, berbagai media massa, lembaga-lembaga sosial, orang-orang pintar, kebun binatang, alam dan lingkungan sekitar, dan lain-lain. Sebagaimana *Comenius* pernah mengingatkan bahwa alam ini adalah buku besar yang sangat lengkap isinya.

Dalam menghadapi masalah ketidak jelasan tujuan pendidikan selama ini, perlu segera di rumuskan secara jelas variabel-variabel yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dalam arti penerapan hasil secara realistis yang dapat di rasakan dampaknya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dalam wacana pencapaian tujuan secara idialistis.

Untuk mengatasi ketidak serasian kurikulum, perlu di hilangkan kesan adanya pengindentikan sekolah hanyalah menanamkan teori-teori ilmu melulu, perlu menghilangkan kesan bahwa pendidikan itu identik dengan pengajaran, perlu meminimalisir kekeliruan langkah dalam pembuatan kurikulum yang kurang berorientasi terhadap kondisi riil pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Demikian pula dalam mengatasi ketiadaan tenaga pendidik yang berkualitas dan yang profesional, perlu merekrut sebanyak-banyaknya tenaga – tenaga dari lulusan lembaga pendidikan dengan keharusan memiliki kecakapan menguasahi ilmu-ilmu yang di perlukan bagi pembuatan standard kualitas minimal, tenaga yang menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan menejement pendidikanyang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih maju.

Syarat lainnya yang harus ada pada



diri pendidik minimal, memiliki kedewasaan berfikir, kewibawaan, kekuatan kepribadian, memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang cukup, kekompakan sesama pendidik dalam satu team. Dan lain sebagainya.

Pengukuran dalam bidang pendidikan sangat menetukan berkualitas atau tidaknya individu peserta didik, hal itu tergantung bagaimana alat ukur yang di pergunakan. Dalam kenyataannya masih banyak alat ukur yang di buat secara sembarangan tanpa melalui proses standardisasi, sehingga alat ukur tersebut tidak bisa diandalkan, karena tidak valid dan tidak reliabel. Oleh sebab itu perlu membuat alat ukur yang valid dan reliabel, disertai dengan pemberian nilai-nilai angka seobyektif mungkin tanpa terpengaruh oleh subvektifitas dan rekayasa, hanya dengan cara pengukuran seperti inilah yang dapat menjamin mutu hasil pendidikan yang diharapkan.

Pada akhirnya, untuk mencari solusi terhadap penjenjangan pendidikan, haruslah di dasarkan pada apa saja yang harus di bentukkan pada anak didik, perlu melakukan perhitungan secara seksana dengan melakukan experimen yang matang untuk menemukan fakta-fakta kebenaran baru dalam rangka meninjau kembali penjenjangan tingkat pendidikan yang selama ini di pedomani.

Seharusnya prinsip dan nilai pendidikan Islam kembali ke sumber aslinya. Yaitu: Qur'an, Hadis, Ijtihad Ulama, Fuqaha dan Mujahidin. Dengan hal ini semua, dunia pendidikan tidak akan keluar dari rel-rel dan nilai-nilai yang sudah digariskan. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Muhamad Tidjani (2008: 60). Yaitu:

a. Nilai-nilai Ideologis Psikologis/ I'tiqodiyah wa an-nafsiyah

Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam tidak boleh keluar dari rel dan landasan keimanan kepada Allah, Malikat, Kitab-kitab para rasul, qadla' dan qadar Allah. b. Nilai-nilai Penghambaan / Ta'abbudiyah Manusia dicipta hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah adalah merupakan tujuan final dari dicitakannya manusia.

c. Nilai-nilai *Tasyri'iyyah*

dari ilmu.

Iman yang kuat pasti berdasar syari'at, karena syariat berfungsi sebagai pemberlaku ajaran Islam, penjelas kaidah yang harus diimami.

d. Nilai-nilai Etika/khuluqiyah Etika dan akhlaq karimah adalah ciri khas Islam yang karena itu pulalah Muhammad diutus ke dunia ini. Bahkan dalam Islam, derajat etika berada di posisi lebih atas

e. Nilai-nilai Epistemologi/*Fikriyah* dan *Ma'rifah*

Menuntut ilmu wajib dalam Islam. Bahkan di perintahkan oleh Allah sejak manusia dilahirkan sampai manusia itu sudah menemui ajalnya.

Apabila nilai-nilai tersebut diatas dapat diejawantahkan dengan baik oleh pelajar-pelajar Indonesia khususnya yang beragama Islam. Penulis yakin haqqul yakin, indikator kesuksesan tujuan pendidikan pendidikan Islam seperti yang diungkapkan *Hasan Basri* akan tercapai insya Allah seiring ridla Allah (Basri, 2009:189). Yaitu:

- 1. Tercapainya anak didik yang cerdas. Anak cerdas impian semua insan. Cerdas akan sanggup menjaga jati dirinya dari anasir-anasir yang merusak. Cerdas muslim dan mukmin sanggup menyelesaikan segala permasalahan yang datang dari dalam dan dari luar dirinya. Bermanfaat bagi dirnya dan juga bagi orang lain.
- 2. Tercapainya anak didik yang sabar dan saleh emosional.

Kesabaran akan menyelesaikan segala persoalan dengan baik dan optimal. Apalagi seseorang yang sabar dan saleh secara agama. Terpatri dalam jiwanya nilai-



nilai Islami yang slalu dijaganya sampai akhir hayatnya, menghadadpi semua persoalan dengan penuh kedewasaan.

3. Tercapainya anak didik yang memiliki kesalehan spiritual.

Hidupnya secara otomatis berjalan di rel-rel Tuhan yang telah digariskan. Semua perintah-Nya dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, semua larangan-Nya dijauhi. Menjauhi maksiat dan selalu menghindari hal-hal syubhat.

Berdasarkan tantangan yang akan dihadapi di dalam masyarakat secara umum, khusunya di wilayah kabupaten Sumenep. Terutama peran pendidikan dalam undang-undang sisdiknas nomer 20 tahun 2003, maka bentuk peran serta masyarakat dalam rangka ikut serta meningkatkan pembelajaran pendidikan adalah:

- a. Revitalisasi serta reorientasi di dalam pendidikan terutama pada keluarga dan anggota keluarga merupakan bagian tak terpisahkan dari individu-individu masyarakat, serta memiliki peran dalam masyarakat yang strategis di dalam memberikan dorongan terhadap pendidikan. Tanggung jawab orang tua sangatlah penting untuk keberlangsungan pendidikan terutama dalam bidang pendidikan keagamaan terhadap semua anggota keluarga dan akan memberikan dampak yang sangat nyata dalam peran meningkatan pendidikan dengan memberi contoh atau uswah yang baik terutama berperilaku yang benart di dalam keluarga, akan menjadi lebih efektif pada proses tercapainya tujuan pendidikan yaitu untuk menjadi pribadi yang paripurna dan menjadi dambaan masyarakat Sumenep.
- b. Penguatan *learning society*, salah satu tempat yang potensial pada penguatan *learning society* yaitu dengan menguatkan dan mengfungsikan fasilitas yang ada di masyarakat. Pada kontek ini tempat ibadah seperti Masjid dan fasilitas umum lainnya juga telah berfungsi se-

- bagai tempat pembelajaran masyarakat digunakan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pendidikan.
- c. Berpartisipasi aktif dalam Komite Madrasah/Sekolah, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana diatur di pasal 56 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, bahwa masyarakat juga dapat ikut berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap program pendidikan.
- d. Mendorong dan mendukung semua program Pendidikan di madrasah/sekolah; Peran serta masyakat dalam meningkatkan mutu pendidikan juga bisa dapat dilakukan dengan cara mendorong dan mendukung semua kebijakan yang dilakukan Sekolah/madrasah terkait dalam peningkatan suatu mutu pendidikan, baik melalui program kegiatan kurikuler, misal dengan adanya jam tambahan khusus untuk jam pelajaran agama. Tentunya dapat mendukung program-program ekstra lainnya.
- e. Ikut membangun lembaga pendidikan yang berbasis mutu. Masalah ini juga yang dapat menjadikan perhatian para pengamat pendidikan. Wujud nyata peran serta dalam masyarakat sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan (Sada, 2017: 121–123).

KESIMPULAN

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu yang cukup lama, mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, dan tradisi sehingga menghasilkan suatu adat istiadat. Hal ini harus kita pertahankan demi terciptanya Sumenep cerdas yang menjadi dambaan semua. Dengan bersama meyakini bahwa pendidikan adalah tanggung jawab semua warga yang ada di wilayah kabupaten Su-



menep.

Sedangkan ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan persoalan-persoalan pokok pendidikan dan kegiatan mendidik anak untuk ditujukan ke arah terbentukya kepribadian yang paripurna. Akan tercapat semua anak menjadi manusia paripurna bila semua merasa punya tanggung jawab dalam menjaga kualitas pendidikan yang baik dan berusaha meningkatkannya menjadi lebih baik dan unggul untuk Sumenep ke depan.

Masyarakat berperan sangat penting pada perkembangan pendidikan anak. Oleh karenanya masyarakat hendaknya ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan anak baik langsung atau tidak langsung. Karena lingkungan dalam keluarga, dan sekolah serta masyarakat sangat memiliki keterikatan. Kualitas suatu masvarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya, semakin baik pendidikan anggotanya, semakin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Oleh karenanya semua pihak harus bersinergi dalam rangka Sumenep cerdas dan berkualitas menuju era yang semakin canggih ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin, Memperkembang dan Mempertahankan Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1970.
- Al-Attas, Muhammad Naquib, Konsep Pendidikan Dalam Islam, Suatu Rangka PikirPembinaan Filsafat Pendidikan Islam; Terjemahan Haidar Bagir, Bandung; Mizan, 1992.
- Al-Syaibany, Omar Muhammad al-Toumy, Falsafah Pendidikan Islam, terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Ashraf, Ali, Horison Baru Pendidikan Is-

- *lam*, Jogjakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Basri, Hasan, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Carey, Walter Dick, Lou Carey, & James O., *The Systematic Design of Instruction. Second Edition. Glenview*, Illionis: Scott, Foresman, and Company, 1990.
- Dahlan, Syeh Ihsan Muhammad, *Siraju* at-Thalibin. Beirut: Daru Iyha' Kutub, 1973.
- Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, Pusat Bahasa, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Djauhari, Mohammad Tidjani, *Masa Depan Pesantren, Agenda yang belum terselesaikan*, Jakarta: TAJ Publishing, 2008.
- -----, *Pendidikan Untuk Kebangkitan Islam,* Jakarta: TAJ Publishing, 2008.
- Hamdanah. *Bunga Rampai Ilmu Pendi-dikan Islam*. Banjarmasin: Pustaka Buana, 2017.
- Juabdin Sada, Heru. "Peran Masyarakat dalam Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam." At-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, vol.8, no. 1 (2017).
- McNeil, John D., Kurikulum: *Sebuah Pengantar Komprehensif, terj. Subandijah* Jakarta: Wirasari, 1988.
- Meichati, Siti, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: FIP-IKIP, 1980.
- Muhajir, As'aril, Ilmu Pendidikan, *Perspektif Kontekstual*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Nata, Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Prasetyo, Donny, dan Irwansyah. "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya." Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, vol.1, no. 1 (2020).
- Poerwadarminta, S.Wojowasito-W.J.S., Kamus Lengkap Inggris - Indone-



- sia, Bandung: Penerbit Bintang, 1998.
- Qurah, Husain, al-Ushul al-Tarbawiyyah fi Bina'i al-Manahij, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1975.
- Saifullah, Ali. Antara Filsafat dan Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional. 2005
- Somad, Burlian, Beberapa Persoalan Dalam Pendidikan Islam; Bandung: Al-ma'arif, 1978.
- Subandijah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Tan, Charlene, Philosophical Reflections For Educators, Singapore: Cengange Learning, 2008
- Tirtahardja, Umar, Pengantar Pendidikan, Jakarta: Rineka Caipta, 2005.
- Tuhusetya, Sawali, Perubahan Kurikulum di Tengah Mitos Globalisasi, Yogyakarta: FIP-IKIP, 1980.

Filsafat Manajemen Pemasaran Syari'ah (Dalam Kajian Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi)

Faizatul Fitriyah¹ (¹ Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura)

ABSTRAK

Kajian kepustakaan ini berusaha mengeksplorasi filsafat manajemen pemasaran syari'ah dalam kajian ontologi, epistimologi dan aksiologi. Manajemen pemasaran syari'ah berpedoman kepada prinsip-prinsip manajemen secara islami yaitu perilaku, struktur organisasi dan sistem yang berlandaskan kepada al-Our'an dan as-Sunnah tentunya sesuai dengan prinsip syari'ah. Pemasaran syari'ah dalam kajian ontologi menjelaskan bahwa ajaran islam mengharuskan seorang muslim untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk yang toyyib (baik) saja. Produk yang menawarkan mashlahah dan berkah untuk kehidupan tentu jauh lebih baik di bandingkan dengan produk yang dapat mendatangkan keburukan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakannya. Dimensi produk seperti itulah yang di kaji pada konsep manajemen pemasaran syari'ah. Dalam kajian epistimologi pemasaran syari'ah menjadi tiga level yaitu: islam sebagai sebuah agama atau keyakinan, syari'ah sebagai aturan atau hukum, halal sebagai aspek operasional atau teknis. Konsep kajian aksiologi berbicara nilai-nilai dan etika dari suatu bidang ilmu. Dalam aksiologi pemasaran syariah ini akan di bahas tentang konsep nilai pelanggan, magashid syari'ah dan pemasaran, riba dan prinsip pemasaran syari'ah.

Kata Kunci: Pemasaran, Ontologi , Epistimologi, Aksiologi

PENDAHULUAN

Setiap menjalankan dunia usaha, manajemen pemasaran merupakan kunci serta ujung tombak dari bisnis itu sendiri, manajemen pemasaran tidak hanya berurusan dengan perusahaan saja akan tetapi juga berurusan dengan citra dan cara bagaimana bisa mengambil hati dan menarik pelanggan. Dunia usaha di dalam sebuah perusahaan akan berjalan lancar apabila manajemen pemasarannya dikelola dengan baik dan bisa membaca peluang yang ada. Tingkat persaingan dalam

dunia bisnis menuntut setiap perusahaan untuk lebih dapat mengunggulkan segala kemampuannya dalam memasarkan produk dan jasa yang di tawarkan. Menurut Buchari Alma (2009: 25) kegiatan dalam sebuah usaha tersebut memerlukan suatu konsep pemasaran yang mendasar agar efektif dan efisien sesuai dengan orientasi perusahaan terhadap pasar. Tentunya konsep pemasaran yang di rencanakan harus dipikirkan secara matang agar rencana dan penerapan pemasaran berjalan sesuai yang di harapkan.



Pemasaran dapat di artikan sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan pada proses penciptaan, penawaran dan perubahan dari nilai dari satu inisiator kepada stakeholdernya. Kegiatan pemasaran sebenarnya merupakan suatu kegiatan yang sangat mulia karena pada kegiatan tersebut selalu memunculkan ide dan kreativitas untuk melakukan approach, inovatif, perubahan dan pembaharuan dalam banyak hal. Namun, ketika kegiatan tersebut mengalami disorientasi dan cenderung mengejar keuntungan yang instan, maka terkadang kegiatan pemasaran yang mulia dan penuh etika itu telah berubah dengan penipuan dan manipulasi. Fenomena itulah yang seringkali di temui di lapangan. Para marketer dalam melakukan entertaint marketing selama ini banyak sekali melakukan penyimpangan secara etika dan moral. Apabila fenomena itu terus dipertahankan maka akan merusak dunia peradaban pemasaran.

Saat ini bisnis syariah sedang banyak digandrungi, ada beberapa pendapat yang mengatakan pasar syariah adalah pasar yang emosional (emotional market) sedangkan pasar konvensional adalah pasar yang rasional (rational market). Maksudnya orang tertarik untuk berbisnis pada pasar syariah karena alasan-alasan keagamaan (dalam hal ini agama Islam) yang lebih bersifat emosional, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan financial yang bersifat rasional. Sebaliknya, pada pasar konvensional atau non-syariah, orang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa terlalu peduli apakah bisnis yang digelutinya tersebut mungkin menyimpang atau malah bertentangan dengan ajaran agama (Islam).

Pernyataan ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena membuat seolah-olah ada dikotomi antara pasar emosional dan pasar rasional. Cara berpikir seperti itu dilandasi oleh teori pemasaran konvensional yang berpaham kapitalis-sekuler, dimana segala hal yang berlandaskan cara berpikir keagamaan serta-merta akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak rasional. Memang praktisi bisnis dan pemasaran sebenarnya bergeser dan mengalami transformasi dari level intelektual (rasional) ke emosional dan akhirnya ke pasar spiritual.

Spiritual pemasaran merupakan tingkatan tertinggi. Orang tidak semata-mata menghitung untung atau rugi, tidak terpengaruh lagi dengan hal yang bersifat duniawi. Panggilan jiwalah yang mendorongnya, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai spiritual. Selain itu dalam pemasaran syari'ah, bisnis yang disertai keikhlasan semata-mata hanva untuk mencari keridhaan Allah SWT, maka seluruh bentuk transaksinya insya Allah SWT menjadi ibadah dihadapan Allah SWT. Ini akan menjadi bibit dan modal dasar baginya untuk tumbuh menjadi bisnis yang besar, yang memiliki spiritual brand, yang memiliki karisma, keunggulan, dan keunikan yang tak tertandingi. Suatu bisnis, sekalipun bergerak dalam bisnis yang berhubungan dengan agama, jika tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada semua pihak, berarti belum melaksanakan spiritual pemasaran. Sebaliknya jika dalam berbisnis kita sudah mampu memberikan kebahagiaan, menjalankan kejujuran dan keadilan, sesungguhnya kita telah menjalankan spiritual pemasaran, apapun bidang yang kita geluti.

PEMBAHASAN 1. Filsafat Pengetahuan Manajemen Pemasaran Syari'ah

Menurut Mary Parker Follett (dalam Hidayat, 2010 : 273), manajemen adalah seni untuk melakukan suatu kegiatan melalui orang lain (the art of getting things done through people). Menurut Ali Muhammad Taufiq, manajemen adalah menginvestasikan manusia untuk mengerjakan kebaikan atau mengerjakan perbuatan yang bermanfaat melalui perantara ma-



nusia. Pemikiran manajemen dalam Islam yaitu mengatur segala sesuatu agar dilaksanakan dengan baik, tepat dan terarah. Bersumber dari *nash-nash* al-Qur'an dan hadist yang berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu itu.

Perbedaan dengan manajemen konvensional yang merupakan suatu sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai dan hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata. Manajemen konvensional ini berusaha diwarnai dengan nilainilai, namun perjalanannya tidak mampu sebab ia tidak bersumber dan berdasarkan petunjuk syari'ah yang bersifat sempurna, komprehensif, dan syarat dengan kebenaran (Hidayat, 2010:274). Negara islam pada masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasvidin, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen; yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling). Manajemen dalam islam bersandar pada ijtihad pemimpin dan umatnya, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan konsep dasar dan prinsip hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist.

Prinsip-prinsip manajemen Islami ada tiga yaitu (Hidayat, 2020 : 275); Pertama: Perilaku, sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Qur'an, surat az-Zalzalah, ayat 7-8 yang berbunyi: "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya) pula." (OS. Az-Zalzalah: 7-8). Kedua: Struktur organisasi, yang sudah di jelaskan dalam al-Qur'an, Surat al-An'am, ayat 165 yang berbunyi:"Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'am:165). Ketiga: Sistem (Hidayat, 2010:276), sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur'an, Surat An-Nisaa', ayat 58 yang berbunyi: "Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha mendengar lagi maha melihat." (QS. An-Nisaa': 58).

Pemasaran merupakan filsafat bisnis yang mengatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup organisasi. Penggunaan konsep pemasaran yang jitu dapat ikut menunjang berhasilnya pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Pemasaran berarti aktivitas manusia yang berkaitan dengan pasar. Sedangkan pasar merupakan tempat atau wadah dimana terjadi transaksi antara pembeli dan penjual. Pengertian pemasaran menurut Basu Swastha (1995:214) adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa, dan ide-ide yang dapat memuaskan keinginan pasar sasaran dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

Menurut Philip Kotler (dalam Teguh, Rusli dan Molan 2002:265), mendefinisikan Marketing sebagai suatu proses sosial dan manajerial dan melalui proses tersebut individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta inginkan lewat penciptaan, dan pertukaran timbal balik produk- produk dan nilai dengan orang lain. Sementara menurut masyarakat umum pemasaran hanya merupakan penjualan dan periklanan seperti melalui surat kabar, televisi, selebaran, dan lain sebagainya. Secara definitif kon-



sep pemasaran menurut Angiopora Marius (1999:38) menjelaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah pada penentuan kebutuhan dan keinginan dari pada pasar sasaran dan pada pemberian kepuasan yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien dari pada para pesaing. Hermawan kertajaya (2006) memberikan sebuah definisi tentang marketing svari'ah. Sebenarnya definisi ini adalah tambahan atau perubahan dari definisi marketing yang telah ia berikan dalam buku sebelumnya. Bahwa marketing adalah merupakan strategi bisnis yang harus memayungi seluruh aktifitas dalam sebuah perusahaan yang meliputi seluruh proses, menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai dari seorang produsen atau satu perusahaan, perorangan yang sesuai dengan ajaran islam. Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat beribadah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri. Rasulullah SAW telah mengajarkan pada umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman. Dalam beraktivitas ekonomi, umat Islam dilarang melakukan tindakan bathil. Namun harus melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan saling ridho.

Filsafat adalah aktivitas untuk berpikir secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia (apa tujuan hidup, apakah Tuhan ada, bagaimana menata organisasi dan masyarakat, serta bagaimana hidup yang baik), dan mencoba menjawabnya secara rasional, kritis, dan sistematis. Filsafat sangat di perlukan untuk memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengkomunikasikan ide secara efektif, dan mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah ke-

hidupan yang selalu tak terduga. Filsafat mengajarkan kita untuk melakukan analisis, dan mengemukakan ide dengan jelas serta rasional. Dengan belajar filsafat semakin menjadikan orang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar manusia yang tidak terperangkap dalam wewedang metode-metode khusus. Filsafat membantu manusia mendalami pertanyaan asasi manusia tentang makna realitas dan ruang lingkupnya (Adib, 2018:40).

2. Tinjauan Ontologi Pemasaran Syari'ah

Kata Ontologi berasal dari Yunani, yaitu *onto* yang artinya ada dan *logos* yang artinya ilmu. Dengan demikian, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang keberadaan. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Menurut istilah, Ontologi adalah ilmu hakekat yang menvelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya (Jalaluddin, 1998:69). Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum, atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Obyek telaah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada satu perwujudan tertentu, ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya (Syafi'i, 2004:9).

Dapat kita analisis dari bauran pemasaran yang menjadi taktik manajemen pemasaran. Bauran pemasaran tradisional yang sudah kita ketahui bersama tersusun dari 4p, yaitu *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat), *promotion* (promosi). 4p bauran pemasaran ini di istilahkan oleh Kotler dan Amstrong (2014) sebagai sebuah program pemasaran untuk mengantarkan nilai yang di inginkan kepada konsumen. Program pemasaran tersebut jika dilakukan dengan tanpa adanya sentuhan nilai, maka implementasinya bisa jadi ku-



rang maksimal atau bahkan merusak(Aji, 2019:18).

mendefinisikan Kotler sebagai sesuatu baik barang maupun jasa yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Sebagai konsekuensinya dari definisi tersebut adalah pemasar ataupun perusahaan bebas membuat atau menjual produk (barang dan jasa) apapun asal dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Definisi tersebut jelas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Ajaran islam mengharuskan seorang muslim untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk yang toyyib (baik) saja. Produk yang menawarkan mashlahah dan berkah untuk kehidupan tentu jauh lebih baik di banding produk yang dapat mendatangkan keburukan bagi orang vang mengkonsumsi atau menggunakannya. Dimensi produk seperti itulah yang di kaji pada konsep manajemen pemasaran syari'ah.

Seperti contoh, konsumen mulai dari usia muda sampai usia tua banyak yang mengkonsimsi rokok. Rokok itu sendiri adalah barang yang inelastis. Rokok termasuk barang inelastis maksudnya adalah perubahan harga pada rokok tidak terlalu berpengaruh besar pada besarnya permintaan rokok. Maknanya, jika harga rokok di naikkan sampai batas tertinggipun akan ada saja konsumen yang membelinya. Jika kita melihat pada sudut pandang manajemen pemasaran konvensional yang sekuler, hal ini akan di tangkap sebagai sebuah peluang pasar. Namun tidak bagi pemasar muslim yang mengedepankan nilai-nilai syari'ah (kemaslahatan dan berkah).

Memang penjualan rokok untuk memenuhi kebutuhan perokok akan mendatangkan keuntungan penjualan, akan tetapi di satu sisi dapat mendatangkan kerusakan bagi manusia. Semua orang sudah tahu dan tidak menyangkal bahayanya rokok bagi kesehatan, namun pemasar masih saja menjualnya dan konsumen masih saja mengkonsumsinya. Apa istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan keadaan ini selain kerusakan moral? Inilah salah satu penjelas statemen kami sebelumnya dimana ajaran dalam buku manajemen pemasaran sekulerdapat menciptakan suatu pasar yang tidak bermoral (Aji, 2019:19).

Masalah tidak terhenti sampai dimensi produk saja, konsep manajemen pemasaran sekuler pada tiga bauran pemasaran lainnyapun dapat mengakibatkan rusaknya moral. Satu bauran pemasaran setelah produk adalah harga. Harga dapat menentukan besarnya keuntungan yang di dapat oleh perusahaan atau pemasar, relatif kepada biaya yang di hasilkan. Semakin rendah biaya keseluruhan dari satu unit produk dan semakin mahal harga vang di jual, maka semakin besar margin keuntungan yang di dapatkan. Mahal atau murahnya harga yang di berikan oleh perusahaan tergantung pada beberapa hal, malah satunya adalah merek.

Islam sendiri tidak menyebutkan secara spesifik larangan untuk memberikan hargayang lebih tinggi atau lebih murah dari harga pasar. Namun jika harga tersebut berpotensi merusak pasar (manusia), maka sepatutnya untuk dihindari seperti contoh, sebuah tas yang bermerek (banded) dapat di jual seharga sebuah mobil baru, yaitu kisaran Rp.100 jutaan. Konsekuensinya dalam hal ini berpengaruh pada gaya hidup seorang muslim menjadi lebih hedonis dan glamour, sehingga hilanglah kesederhanaan.

Masalah di atas tidak berhubungan dengan mampu atau tidak mampu, namun berhubungan dengan masalah etis atau tidak etis, moral atau tidak bermoral. Etiskah bagi seorang muslim atau muslimah untuk menghabiskan uang sampai Rp. 100 juta hanya untuk membeli sebuah tas meskipun ia adalah seorang yang mampu? Padahal disekelilingnya masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Padahal uang tersebut dapat



digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian jelas pemberian harga yang terlalu mahal dapat merusak seseorang dalam hal gaya hidup, sehingga ia dilalaikan dengan gaya hidup yang hedonis dan glamour (Aji, 2019:19). Allah SWT telah memperingatkan terkait gaya hidup seperti itu dalam al-Qur'an surat At-Takatsur ayat 1-8 yang artinya, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk kedalam kubur. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu)".

Pada masa para sahabat Rasulullah masih hidup kondisi ekonomi para sahabat Rasulullah SAW beragam, ada yang miskin juga ada yang kaya. Mereka yang kaya raya tidak lantas memanfaatkan kepentingan mereka untuk kepentingan hedonistis, namun untuk kepentingan manusia. Tidak asing bagi kita kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang rela menghabiskan seluruh hartanya untuk membebaskan budak muslim. Begitu pula konstribusinya untuk setiap kegiatan dakwah islam. Sudah umum juga kisah Utsman Bin Affan yang menggunakan hartanya untuk membeli sumur dari seorang Yahudi. Satu indikasi keberkahan atas keputusan pembelian yang dilakukan Utsman Bin Affan Pada saat itu adalah masih eksisnya sumur tersebut sampai saat ini dan masih bermanfaat bagi manusia. Semoga Allah merahmati para sahabat Rasulullah Radhiyallahu'anhum(Aji, 2019:20).

Pada masa saat ini, umat islam masih belum kehilangan sosok yang dapat dijadikan figure dalam kesederhanaan meskipun bergelimang harta. Sulaiman Ar-Rajhi, seorang billioner pendiri Bank

Islam Ar-Rajhi yang praktiknya murni tanpa riba di Saudi Arabia memiliki kehidupan yang kontras dengan rekening hartanya. Dilaporkan bahwa kekayaan Sulaiman Ar-Rajhi mencapai US\$ 6 miliar atau setara Rp.73 triliun. Namun, di usianya yang menginjak 93 tahun ia memilih untuk hidup miskin. Seperti dilansir dilaman Forbes, seluruh kekayaanya didonasikan untuk kegiatan amal, baik dalam hal pemberantasan kelaparan maupun maupun perbaikan pendidikan.ia berkeyakinan bahwa seluruh kekayaan hanyalah milik Allah. Kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan darinya sehingga tidak pantas di timbun sehingga tidak memikirkan kemaslahatan umat. Perilaku seperti itulah yang seharusnya di pelajari dan dimiliki oleh para pebisnis dan pemasaran islam. Nilai kesederhanaan dan kezuhudan seperti itu tidak di ajarkan dalam buku-buku manajemen pemasaran konvensional vang bersifat bebas nilai.

Penulis meyakini bahwa nilai-nilai syari'ah itu dapat berlaku universal tidak lagi ekslusif tetapi inklusif. Maknanya, manfaat yang didapatkan dari implementasi nilai-nilai syari'ah bukan hanya dirasakan oleh masyarakat atau komonitas beragamaislam saja, tetapi juga oleh masyarakat dan komunitas non islam. Konsep seperti itu dikenal dengan konsep "Islam rahmatan lil'alamin" (Aji, 2019:20-21).

3. Tinjauan Epistemologi Pemasaran Syari'ah

Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pemgetahuan dan cara memperolehnya (Adib, 2018:82). Epistemologi juga di sebut sebagai teori ilmu pengetahuan yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang men-



yoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Epistemologi derivasin-ya dari bahasa Yunani yang berarti teori ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang menjelaskan masalah-masalah filosofis yang mengitari teori ilmu pengetahuan (Adib, 2018:73).

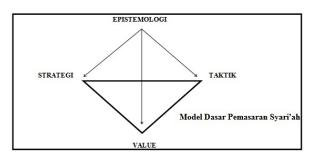
bertalian Epistemologi definisi dan konsep-konsep ilmu, ragam ilmu yang bersifat nisbi dan niscaya, dan relasi eksak antara 'alim (subjek) dan ma'lum (objek). Dengan kata lain epistelologi bagian filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menanyakan apa yang dapat kita ketahui sebelum menjelaskannya. Pertanyakan dulu secara kritis, baru di yakini, ragukan dulu bahwa sesuatu itu ada, kalau terbukti ada, baru di jelaskan. Berpikir dulu baru di yakini atau tidak. Ragukan dulu baru di yakini atau tidak.

Pertanyaan utama epistemologi jenis ini adalah, apa yang benar-benar sudah kita ketahui dan bagaimana cara kita mengetahuinya? Epistemologi ini tidak peduli apakah batu di depan mata kita adalah penampakan atau bukan. Yang ia urus adalah bahwa ada batu di depan mata kita dan kita teliti secara sainstifik, kemudian menentukan sebuah filsafat. Metode ilmu yang saat ini di dominasi oleh empirisme dan positivisme merupakan kebosanan pada metode Graco-Roman (Yunani dan Romawi) di pelopori oleh aristoteles vang berdasarkan rasionalisme (deduktif) yang hanya di dominasi oleh perdebatan-perdebatan sia-sia. Filosof islam antara lain Al-Kindi (809-873), Al-Farabi (881-961), Ibnu Sina (980-1037), dan Ibnu Rush (1126-1198) mengkritik ini serta memperkenalkan metode empiris (induktif) dengan memberikan tempat kepada Tuhan. Kemudian metode ini di bawa 700 Tahun oleh Francis Bacon (1561-1626) ke Eropa dan menjadi metode ilmiah yang kita ikuti sekarang, tetapi minus nilainilai metafisika, moral, dan etika (Harahap, 2011:161).

Aspek pemasaran syari'ah dalam kajian epistemologi perlu dibahas, karena untuk mengetahui perbedaan pemasaran syari'ah dengan pemasaran konvensional dari segi akarnya, bukan dari aspek operasionalnya. Sejauh ini yang kita ketahui buku pemasaran syari'ah lebih cenderung berfokus pada aspek operasional, yaitu terkait dengan halal haram (Aji, 2019:59).

4. Model dasar pemasaran syari'ah

Pemasaran itu terbentuk dari strategi, taktik, juga pembentukan nilai (value). Model dasar pemasaran konvensional tersebut berjalan atas kerangka epistemology dan juga aksiologi barat yang sekuler dan juga melepaskan nilainilai keagamaan dari kehidupan. Hal itulah yang menjadi kekurangan. Berbicara tentang pemasaran syari'ah tidak cukup hanva membahas tentang halal haram. Halal ataupun haram sifatnya hanyalah operasional. Jika membahas tentang model pemasaran syari'ah harus dimulai dengan kerangka epistemologinya, yakni berbicara bagaimana ia di turunkan (Aji, 2019:60).

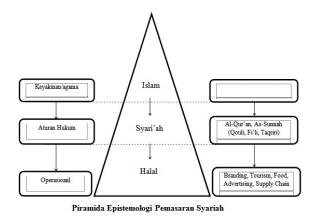


Jika ditelisik kembali, epistemologi sekuler berasal dari dua hal, yaitu akal dan empiris (pembuktian). Maknanya sesuatu dapat dikatakan sebagai ilmu jika sesuai dengan akal dan dapat di buktikan dengan empiris. Dalam epistemologi sekuler juga diyakini bahwa tidak ada kebenaran abadi. Semua kebenaran bersifat relatif. Sedangkan epistemologi syari'ah berfokus



pada pemberi ilmu dan pencari ilmu. Pemberi ilmu dalam hal ini adalah Allah melalui kalamnya di dalam al-Our'an dan di sampaikan kepada Rasulullah dalam hadist yang shohih. Pencari ilmu dalam konteks ini adalah akal untuk memahami al-Qur'an dan Sunnah dari pemberi ilmu. Dengan demikian ilmu diturunkan tidak dari akal manusia, tetapi diturunkan dari Allah ta'ala sebagai pemberi ilmu. Kemudian dikaji secara akal dan empiris oleh pencari ilmu, yaitu manusia(Aji, 2019:60-61). Maka, seharusnya epistemologi ini menjadi landasan paling awal dalam menentukan strategi, taktik dan juga penciptaan nilai pemasaran seperti di tampilkan dalam gambar model dasar pemasaran syari'ah. Dengan landasan epistemologi inilah strategi, taktik dan nilaiyang diberikan kepada konsumen dapat sesuai syariah (Aji, 2019:61).

Sekarang pertanyaannya adalah, apa dan bagaimana epistemologi syari'ah? Bagaimana ilmu itu diturunkan menurut perspektif syari'ah? Kami membagi epistemologi pemasaran syari'ah menjadi tiga level, seperti ditampilkan dalam gambar piramida epistemologi pemasaran syari'ah di bawah ini yaitu: *Pertama*; Islam sebagai sebuah agama atau keyakinan. *Kedua*; Syari'ah sebagai aturan atau hukum. *Ketiga*; Halal sebagai aspek operasional atau teknis.



Pembagian aspek epistemologi pemasaran syari'ah seperti ini dapat

memudahkan dalam membedakan perbedaan antara pemasaran islam, islami, syari'ah dan halal. Istilah pemasaran halal jatuh pada level operasional saja, sehingga pemasaran konvensional pun dapat dikatakan sebagai pemasaran halal. Sedangkan pemasaran syari'ah berada pada level aturan dan hukum yang jelas menjadi dasar pembeda dengan pemasaran konvensional. Diatas semua ada islam pada level agama atau keyakinan (Aji, 2019:62).

Islam sebagai agama atau keyakinan

Islam sebagai agama dan keyakinan menjadi landasan paling awal dalam piramida epistemologi pemasaran syari'ah. Level ini yang lebih krusial, yang membedakan antara pemasaran syari'ah dengan pemasaran konvensional. Pemasaran konvensional jelas tidak mengakui agama apapun. Karena mereka meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu di dapatkan dengan menggunakan akal dan pembuktian empiris. Mereka juga meyakini bahwa tidak ada kebenaran mutlak, kebenaran menurut mereka bersifat relatif. Ajaran agama islam mengajarkan sebaliknya. Yakni, kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya bersifat mutlak. Akal atau pembuktian empiris datang mengikuti.

Islam secara bahasa dapat bermakna selamat, damai, suci, atau berserah diri. Sedangkan secara istilah Syaikh Muhammad bin Sulaiman mendefinisikan islam dengan berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Sehingga seorang muslim adalah seorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala untuk taat dan patuh terhadap aturannya serta meninggalkan larangannya. Seorang muslim juga adalah seorang yang cinta damai.

Dalam islam itu sendiri terdapat beberapa dimensi lagi, yaitu dimensi aqidah, iman dan tauhid. Aqidah secara bahasa maknanya adalah "Al-'Aqdu" yang berarti



kokoh, kuat dan erat. Secara istilah aqidah maknanya adalah keyakinan yang kokoh terhadap sesuatu tanpa adanya keraguan. Aqidah yang benar di dalam agama islam adalah aqidah yang bersumber dari al-Our'an dan as-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Para Ulama' membagi perkara aqidah menjadi 8 cakupan agar lebih mudah membedakan antara aqidah islam yang lurus dengan aqidah islam yang menyimpang, yaitu berkaitan dengan: 1. Rukun iman, 2. Cakupan iman, 3. Takfir (pengkafiran), 4. Ketaatan kepada pemimpin, 5. Larangan mencela sahabat Rasulullah SAW, 6. Mencintai keluarga nabi (Ahlul Bait), 7. Mengimani karomah para Waliyullah, 8. Berdalil dengan al-Our'an dan as-Sunnah berdasarkan pemahaman para pendahuluh yang sholeh (Aji, 2019:63).

Delapan poin diatas membedakan seseorang dengan aqidah yang lurus dan yang menyimpang. Misalnya banyak orang yang aqidahnya menyimpang dalam perkara takfir (pengkafiran). Yakni terlalu mudah mengkafirkan orang lain yang masih muslim secara dhohir. Orang orang yang terlalu mudah dalam perkara takfir sudah ada benih-benihnya pada zaman dahulu, orang-orang jenis ini di namakan oleh Rasulullah sebagai kelompok Khawarij, Rasulullah menyebutnya sebagai "kilabunnar" atau anjing neraka. Maka, orang-orang yang saat ini terlalu mudah mengkafirkan orang lain yang masih muslim secara dhahir maka mereka menyimpan pemikiran dan agidah khawarij. Orang-orang yang mencela kepada para sahabat yang mulia adalah orang-orang yang aqidahnya sesat dan menyimpang. Orang-orang yang seperti ini hampir di pastikan memiliki aqidah Syiah Rafidhah. Aqidah seorang muslim yang lurus adalah menghormati para sahabat Rasulullah SAW.

Setelah aqidah, perkara lainnya adalah iman. Iman dapat di definisikan menjadi tiga, yaitu: *pertama*; Membe-

narkan dengan hati (tashdigun bil qalbi), kedua; Mengikrarkan dengan lisan (igrarun bil lisan), ketiga; Mengamalkan dengan anggota badan ('aamalun bil arkan). Sedangkan secara istilah iman adalah pembenaran, penetapan, pengamalan, serta ketundukan terhadap kebenaran yang berasal dari wahyu (al-Qur'an dan al-Hadist). Para ulama' sepakat bahwa iman mencakup perkataan, dan perbuatan, perkataan hati dan lisan, perbuatan hati dan anggota badan. Di dalam islam iman terbagi menjadi enam, yaitu (Aji, 2019:63): 1. Iman kepada Allah SWT, 2. Iman kepada para Malaikat-Nya, 3. Iman kepada Kitab-Kitab-Nya, 4. Iman kepada para Rasul-Nya, 5. Iman kepada hari akhir, 6. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dapat dilihat sebelumya, bahwa perkara iman ini masuk kedalam perkara aqidah, dengan demikian seseorang yang menyimpang kepada perkara iman, maka aqidahnya juga menyimpang.

Perkara selanjutnya adalah Tauhid. Tauhid secara bahasa arab merupakan bentuk masdar dari fi'il, wahhada yuwahhidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Untuk memahami manusia dalam memahami tauhid, para ulama' membagi tauhid menjadi tiga, yaitu: 1. Tauhid rububiyah, uluhiyyah, dan asma' wa shifat (Aji, 2019:64).

Tauhid *rububiyah* adalah mengesakan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan Pencipta semua makhluk, dan Allahlah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Mengimani tauhid rububiyah berarti mengimani bahwa Allahlah yang maha mengatur alam semesta ini, yang memberi rezeki, yang mendatangkan bencana dan seterusnya. Allahlah yang maha kuasa atas segala sesuatu. dalil tentang rububi-



yah dalam firman Allah sebagai berikut yang tercantum dalam QS. Al-An'am:1 yang berbunyi: "segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang" (OS. Al-An'am:1). Tauhid rububiyah ini juga di imani oleh orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal dan kawan-kawannya. mereka beriman bahwa Allahlah yang maha kuasa. Hanya Allahlah yang mendatangkan rezeki dan mendatangkan bala bencana. Dalilnya adalah sebagai berikut: "sungguh jika kamu bertanya kepada mereka (orang-orang kafir jahiliyah), 'siapa yang telah menciptakan mereka?', niscaya mereka akan menjawab Allah'". (QS. Az-Zukhruf: 87). "Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka (orang-orang kafir jahiliyah), 'siapa yang telah menciptakan langit dan bumi serta menjalankan matahari juga bulan?', niscaya mereka akan menjawab 'Allah'". (OS. Al-Ankabut:61). Yang menjadi pertanyaan adalah, jika orang kafir Ouraisy beriman bahwa Allah ta'ala adalah tuhan yang maha kuasa, lantas mengapa Allah dan Rasulnya masih memerangi mereka? Maka jawabannya adalah karena mereka tidak beriman dengan tauhid yang berikutnya, yaitu Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Ibadah (Aji, 2019:65).

Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Ibadah adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan baik yang dhohir (nampak) maupun yang bathin (tidak nampak). Ibadah bermakna segala sesuatu yang di cintai oleh Allah maknanya adalah segala sesuatu yang di perintah oleh Allah dan Rasulnya untuk dikerjakan dan dijanjikan balasan berupa pahala jika melakukannya. Sehingga jika ada seseorang yang mengerjakan suatu amalan yang di yakini mendatangkan keberkahan atau kemaslahatan tanpa adanya perintah dari Allah SWT dan Rasulnya, maka ia tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Dalil untuk tauhid uluhiyah adalah firman Allah SWT: "hanya engkau yang kami sembah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan" (QS.Al-Fatihah:5). "sungguh telah kami utus Rasul untuk setiap umat dengan tujuan untuk mengatakan: 'Sembshlah Allah Saja dan jauhilah Thagut" (OS.An-Nahl:36).

Di antara ketiga tauhid, tauhid uluhiyah adalah tauhid yang paling di tekankan karena tauhid ini adalah misi semua Rasul yang Allah utus ke dunia. Di samping ada tauhid yang juga harus di jadikan perhatian, yaitu tauhid asma' wa shifat. Tauhid asma' wa shifat adalah mentauhidkan Allah SWT dalam penetapan nama (asma') dan sifat Allah, yaitu sesuai yang ia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Our'an dan Hadist Rasulullah SAW. Cara bertauhid asma wa shifat Allah ialah dengan menetapkan nama dan sifat Allah sesuai yang Allah tetapkan bagi dirinya dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya, dengan tanpa tahrif, takyif, tasybih dan tafwidh.

Tahrif maknanya adalah memalingkan makna ayat atau hadist tentang nama dan sifat Allah dari makna aslinya menjadi makna lainyang batil. Contoh tahrif adalah dengan memalingkan makna "istawa" (bersemayam) menjadi "istaula" (menguasai). *Ta'thil* adalah mengingkari dan menolak sebagian sifat-sifat Allah. Contoh dari ta'thil adalah dengan menolak bahwa Allah berada diatas dan percaya Allah Ta'ala ada dimana-mana. *Takyif* adalah menggambarkan hakikat wujud Allah. Contohnya adalah dengan mencoba membayangkan tangan dan kaki Allah Ta'ala. Tasybih adalah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Misal yang baru-baru ini sedang hangat dengan adanya oknum ustadz yang mensifati Allah dengan sifat maha keren dan gaul. Sifat keren dan gaul adalah sifat makhluk (manusia). Maha suci Allah dari penisbatan sifat dengan tasybih seperti itu. Yang terakhir adalah tafwidh, yaitu tidak menolak nama atau sifat Allah namun enggan menetapkan maknanya. Contoh dari tafwidh adalah dengan meyakini bahwa



Allah Ta'ala ber istiwa di atas arsy, tetapi tidak boleh menetapkan makna istiwa itu sendiri (Aji, 2019:66).

Ketiga perkara yang sudah di sebutkan, yaitu aqidah, iman dan tauhid adalah perkara-perkara dasar dalam agama islam yang jika dilanggar maka kualitas keislamannya pun menjadi berkurang. Salah dalam perkara dasar ini, dapat juga berdampak pada praktik atau operasional aktivitas pemasaran. Misalnya orang yang sudah rusak aqidahnya dalam perkara pencelaan kepada sahabat Rasulullah SAW. Kemudian membuat program program wisata ke iran yang merupakan pusat kaum Sviah Rafidhah, para pencela sahabat Rasulullah yang mulia. Contoh lainnya adalah dengan menjual jimatjimat.mereka menganggap hal tersebut halal, sedangkan orang vang lurus islamnya menganggap hal tersebut haram.

5. Syari'ah sebagai aturan atau hukum

Pada level berikutnya dalam piramida epistemologi pemasaran syari'ahadalah syari'ah sebagai aturan atau hukum. Secara bahasa kata syari'ah sering dimaknai sebagai aturan atau hukum islam. Syari'ah sebagai aturan atau hukum dalam epistemologi pemasaran syari'ah adalah konsekuensi dari islam sebagai sebuah agama atau keyakinan. Sumber aturan atau hokum dalam islam secara umum berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. al-Qur'an sebagai sumber primer dan as-Sunnah sebagai sumber sekunder.

Al-Qur'an menjadi sumber primer dalam aturan syari'ah adalah karena al-Qur'an adalah kalamullah (firman Allah), bukan makhluk Allah Ta'ala. Telah disebutkan sebelumnya bahwa perbedaan antara pemasaran konvensional dan syariah yaitu dimana pada epistemologi pemasaran konvensioanal yang dijadikan rujukan adalah akal dan empiris. Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak atau absolut. Sedangkan dalam epistemologi pemasaran syari'ah, ilmu itu di turunkan

dari Allah Ta'ala kemudian dikaji dengan akal dan empiris oleh manusia.

As-Sunnah itu sendiri secara etimologi atau bahasa maknanya adalah metode atau jalan, kebiasaan, syari'at, dan adat. Adapun secara istilah syari'ah, makna As-Sunnah perlu di bedakan berdasarkan konteksnya. Dalam konteks ilmu fiqih. Sunnah bermakna amal atau perbuatan yang dianjurkan oleh syari'at namun tidak mencapai derajat wajib dan harus, yang apabila di kerjakan mendapat pahala dan jika di tinggalkan maka tidak berdosa.

Adapun dalam konteks ilmu hadist, as-Sunnah memiliki makna lain, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan, maupun sifat perangai atau sifat fisik, baik sebelum di utus menjadi nabi atau Rasul, atau setelahnya. Makna as-Sunnah yang di maksudkan dalam epistemologi pemasaran syari'ah adalah makna dalam konteks ilmu hadist (Aji, 2019:67).

6. Halal sebagai operasional atau teknis

Halal secara bahasa artinya adalah di bolehkan, sedangkan haram adalah tidak diperbolehkan. Secara istilah halal bermakna segala sesuatu yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya melalui al-Qur'an dan As-Sunnah. Agar mudah dipahami hukum halal dan haram (fikih) harus di bedakan konteksnya. Antara konteks muamalah dan konteks ibadah.untuk lebih mudah membedakan, para Ulama' kemudian membuat kaidah untuk keduanva. Kaidah dalam konteks ibadah adalah, "hukum asal semua ibadah adalah haram, sampai ada dalil yang memerintahkannya". Sehingga dia ditanya apa hukum asal dari sholat dzuhur? Jawabannya adalah haram. Namun karena adanya perintah untuk melaksanakan sholat dzuhur, maka perkara tersebut jadi diperbolehkan.

Dalam konteks muamalah, kaidahnya adalah "hukum asal segala hal (termasuk perkara muamalah) adalah



boleh dilakukan (halal), sampai ada dalil yang melarangnya". Manajemen pemasaran, bisnis, serta fungsi manajemen lainnya dalam hal ini termasuk perkara muamalah, sehingga hukum asalnya adalah di bolehkan, sampai ada kasus tertentu yang membuat perkara menjadi haram.

Kita ambil contoh misalnya perusahaan *Walls* yang menjual ice cream. Pada poin ini kita katakan bahwa menjual ice cream hukum asalnya adalah dibolehkan, asalkan ice cream tersebut tidak mengandung bahan yang di haramkan dan di jual dengan cara yang tidak diharamkan. Sehingga dapat kita katakana, juga *Walls* dalam hal ini telah melakukan pemasaran halal, namun belum tentu melakukan pemasaran syari'ah. Kenapa? Karena untuk dapat dikatakan melaksanakan pemasaran syari'ah, prinsip inti pemasaran suatu perusahaan harus berjalan di atas jalan atau aturan syari'ah.

Namun belum tentu juga perusahaan yang berjalan di atas prinsip pemasaran syari'ah otomatis melakukan pemasaran halal. Karena halal atau haram sifatnya adalah operasional, sebagai konsekuensi dari syari'ah itu tadi. Bisa jadi perusahaan yang berjalan di atas konsep pemasaran syari'ah melakukan pemasaran non halal karena keterbatasan ilmu yang di miliki. Misalnya dalam perkara rantai pasok atau *supply chain*. Ada keadaan tertentu dimana pengusaha atau perusahaan tidak mengetahui daging yang di beli dari pemasok ternyata daging bangkai (tidak di sembelih dengan cara syari'ah), atau tercampur dengan daging yang diharamkan misalnya seperti babi. Untuk itulah, pembahasan pada level ini sifatnya luas dan sangat teknis. Dari sinilah kemudian ada beberapa istilah, misalnya halal branding, halal advertising, halal supply chain, halal food, halal tourism dan seterusnya.

7. Tinjauan Aksiologi Pemasaran Syari'ah

Aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orienta-

si atau nilai yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Aksiologi di sebut juga teori nilai, karena ia dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, yakni bagaimana manusia harus hidup dan bertindak? (Adib, 2018: 76) Teori aksiologi ini kemudian melahirkan etika dan estetika. Dengan kata lain, aksiologi adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan itu. Secara moral dapat di lihat apakah nilai dan kegunaan ilmu itu berguna untuk kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan manusia atau tidak. Landasan aksiologi adalah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, apa yang dapat di sumbangkan ilmu terhadap pengembangan ilmuitu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.

Ilmu pengetahuan ini hanya alat (means) dan bukan tujuan (ends). Subtansi ilmu itu bebas nilai (value-free), tergantung pada pemakaiannya. Karena itu sangat di hawatirkan dan berbahaya jika ilmu dan pengetahuan yang sarat muatan negatif di kendalikan dan jatuhnya ke orang-orang yang berakal picik, sempit, sektarian; berjiwa kerdil, kumut dan jahat, bertangan besi dan kotor. Sekarang coba kita lihat di berbagai bidang terjadi krisis, kemiskinan dan lain sebagainya. Tujuan dasarnya adalah menemukan kebenaran atas fakta yang ada atau sedapat mungkin sada kepastian kebenaran ilmiah. Konsep aksiologi berbicara nilai-nilai dan etika dari suatu bidang ilmu. Dalam aksiologi pemasaran syariah ini akan di bahas tentang konsep nilai pelanggan, magashid syari'ah dan pemasaran, riba dan prinsip pemasaran syari'ah.

8. Nilai pelanggan (Costumer Value)

Nilai dalam pemasaran berbeda dengan nilai ilmu pasti. Dalam ilmu pasti, nilai dari 1+1 itu sudah pasti 2, jika di



jawab 3 maka salah. Sedangkan dalam pemasaran, nilai disini bersifat perseptual yang sangat bergantung pada persepsi konsumen. Nilai suatu produk bisa tinggi atau rendah tidak bisa di tentukan dengan pasti. Bisa jadi ada suatu produkyang rasanya enaktapi tidak lebih laku dari produk yang rasanya relative tidak enak. Bisa jadi juga ada produk yang harganya murah namun tidak lebih laris dari produk yang harganya lebih mahal. Mengapa bisa seperti itu? Jawabannya karena semua bergantung dari persepsi konsumen (Aji, 2019:88).

Maka kalau kalau di rumuskan nilai vang dipersepsikan konsumen itu adalah persepsi manfaat dari suatu produk dikurangi dengan persepsi biaya yang di bebankan kepada konsumen. Maknanya, suatu produk dapat dikatakan bernilai jika konsumen menpersepsikan manfaat dari produk tersebut lebih besar di banding biayanya. Sehingga, jika ada makanan yang rasanya enak tapi tidak lebih laku di banding makanan yang tidak enak, hal tersebut bisa saja terjadi karena makanan yang relative tidak enak menawarkan nilai yang lenih. Oleh karenanya, konsumenpun akan mempersepsikan manfaat yang lenih dibanding makanan yang relatif lebih enak.

Nilai pelanggan = manfaat yang di persepsikan – biaya yang dipersepsikan

Contoh: kopi dan roti. Jika kita beli segelas kopi di Burjo atau warkop (warung kopi) harganya kurang lebih Rp.2000 dan harga sebungkus roti kurang lebig Rp.5000, total harganya Rp.7000 . total harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga produk serupa yang ditawarkan kafe ekologi, di condongcatur, Yogyakarta. Harga secangkir kopi di sana kisaran Rp. 25.000-30.000, dan harga roti kisaran Rp.

28.000. total seharga Rp. 55.000. Namun jika ditanya lebih memilih mana antara beli kopi dan roti di warung kopi dan di ekologi? Banyak yang kemudian lebih memilih di ekologi (tergantung segmen pasarnya). Konsumen mempersepsikan nilai yang lebih jika membeli kopi dan roti di ekologi jika di bandingkan dengan membeli di warung kopi. Nilai apakah itu? Jawabannya adalah nilai dari pengalaman. Yakni pengalaman merasakan suasana yang cozy, nyaman untuk menvendiri atau hangout. Bahkan kecepatan wifi bisa mencapai 50 Mbps. Konsumen mempersepsikan Rp. 55.000 adalah harga yang lebih murah dibandingkan dengan manfaat yang mereka dapatkan.

Maqashid syari'ah dan Manajemen pemasaran

Setiap aturan baik berupa anjuran maupun larangan di dalam agama islam pasti memiliki tujuan dan maksud. Tujuan dan maksud dari adanya aturan dalam hukum islam tersebut di istilahkan dengan Maqashid Syari'ah. Maqashid syari'ah inilah yang kemudian menjadikan nilainilai islam dapat diterapkandan berlaku secara universal kepada seluruh makhluk hidup tanpa memandang latar belakang. Hukum-hukum dalam syari'at islam dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok besar (Alserhan, 2011):

Pertama; Halal (dibolehkan), Sesuatu yang dihalalkan maknanya adalah sesuatu yang secara syari'at (aturan agama islam) dibolehkan dengan mempertimbangkan dalil al-Qur'an dan al-Hadist shahih (valid). Istilah halal juga dapat di sematkan pada pemasaran sehingga menjadi manajemen pemasaran halal, namun karena pertimbangan standarisasi, buku ini menggunakan istilah manajemen pemasaran islami. Halal itu sendiri dapat di klasifikasikan menjadi tiga tingkat, berdasarkan tingkatan terendah sampai tertinggi, yaitu: a. makruh b. mandub c. wajib.

Kedua; Makruh secara bahasa ada-



lah di benci, tidak di inginkan, tidak di anjurkan dalam agama. Mandub artinya disukai namun tidak di wajibkan, atau dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang diperintahkan oleh syari'ah secara tidak tegas, jika seseorang tidak mengerjakan sesuatu yang bersifat mandub maka tidak mendapatkan dosa. Tingkatan paling tinggi dari halal adalah wajib yang artinya harus dikerjakan. Berbeda dengan kedua klasifikasi halal sebelumnya, pada perkara wajib, jika seseorang tidak mengerjakannya maka akan mendapatkan dosa. Inilah inti dari halal, tanpa ini suatu perusahaan tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan yang mengikuti syari'ah. Sebagai konsekuensinya, perusahaan harus melakukan perkara yang wajib dalam aktivitasnya seperti mengedepankan kejujuran, transparasi, keadilan dan seterusnya.

Musytabih adalah perkara yang masih meragukan. Yang diragukan adalah status halal dan haramnya. Oleh karena sifatnya yang masih diragukan tersebut, maka setiap individu harus menghindari untuk mengerjakan sesuatu yang Musytabih. Secara lebih luas perusahaan harus menghindari diri agar tidak mengerjakan sesuatu yang Musytabih. Misalnya, perkara-perkara yang berkaitan dengan keuangan. Perusahaan tidak boleh bermudah-mudahan didalamnya. Seringnya sesuatu yang berkaitan dengan keuangan erat berkaitan dengan kedzaliman.

Haram yang artinya tidak diperbolehkan atau seluruh perkara yang dilarangdalam agama islam. Jika dikerjakan mendapatkan dosa. Besar kecilnya dosa tergantung pada jenis perkara haram yang dilakukan. Dosa paling besar adalah melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dosa ini dapat mengakibatkan pelakunya keluar dari agama islam. Maka dalam konteks bisnis, perusahaan harus menjaga diri dari setiap aktivitas yang mengarah kepada kesyirikan.

Ketiga klasifikasi hukum dalam

syari'ah ini berdampak signifikan pada praktik dalam suatu perusahaan, terkhusus dalam kaitannya dengan pemasaran kepada konsumen beragama islam. Perusahaan meskipun bukan berlatar belakang islami harus memperhatikan status produk yang ingin di jual kepada konsumen muslim, staus tempat transaksi berjualan, penetapan harga yang diberikan serta cara-cara dalam melakukan promosi kepada konsumen muslim.

Konsumen beragama islam sangat memperhatikan status hukum (halal, musytabih dan haram) dari suatu produk atau jasa. Produk yang haram tidak akan mendapat tempat pada pasar muslim. Sebaliknya jika perusahaan menjual produk yang halal, sebuah produk tidak hanya akan mendapat tempat pada pasar muslim namun jiuga pasar non muslim. Di Malaysia, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rezai, Mohamed dan Shamsudin (2012) menunjukkan bahwa non muslimmemahami bahwa produk-produk dengan label halal berkaitan dengan kesehatan produkdan keramahan terhadap lingkungan. Maknanya, bagi non muslim di Malaysia produk halal adalah produk yang sehat dan ramah lingkungan (hijau).

Tidak hanya pada masalah makanan, konsumen muslim juga memperhatikan status halal haram suatu produk pada industry pariwisata. Banyak Negara non muslim yang mulai mengalihkan strategi pariwisata mereka kea rah halal Tourism agar dapat menarik turis beragama islam. Di area asia tenggara ada Singapura, kemudian Jepang dan New Zeland yang memiliki keseriusan dalam mengembangkan halal Tourism.

Produk dan status hukumnya makruh dan musytabih secara umum akan sulit dipasarkan kepada konsumen muslim. Meskipun semuanya bergantung pada tingkat pemahamandan relegiusitas konsumen muslim itu sendiri. Faktanya saat ini khususnya di Indonesia barang yang makruh dan musytabih seperti rokok ada



juga yang meyakini statusnya haram namun permintaan ini tidak surut.

Jika kita kembalikan kepada kepada maqashid syari'ah akan dapat terlihat hikmahnya. Sesuatu dianjurkan atau dilarang dalam agama islam itu ada maksudnya. Dengan memasarka produk halal masyarakat memiliki peluang lebih besar terhindar dari penyakitdan kerusakan lingkungan. Dengan konsep maqashid syari'ah pada pemasaran dapat tercipta sebuah pasar yang lebih beretika dan berkeadilan terutama dalam hal bagaimana sebuah produk dipasarkan.

9. Prinsip pemasaran syari'ah

Sebuah sistem tidak akan berjalan efektif tanpa kontrol orang yang menjalankan sistem tersebut. Agar dapat mengontrol sistem di butuhkan prinsip-prinsip yang melandasi sebuah system tadi. Alserhan (2011) menuliskan enam prinsip yang mengatur sistem etika islami yaitu: kesatuan, keimanan dan kewalian (Aji, 2019:97).

Kesatuan adalah prinsip utama yang membedakan antara sistem etika islam dan etika sekularisme. Dalam etika sekularisme moral ditentukan dengan tanpa standar yang sama. Standar moral bersifat kontekstual bergantung pada berbagai macam faktor, seperti rasionalitas, perasaan dan budaya. Agama tidak bpleh dijadikan sumberkeputusan karena sekulerisme adalah paham yang meyakini bahwa kehidupan harus dipisahkan dari nilai agama. Maka tidak heran jika standar moral (benar atau salah) dalam perspektif sekularisme berbeda-beda.

Melakukan hubungan seksual antara dua pasangan yang tidak memiliki legalitas hubungan pernikahan dipandang bermoral di Negara barat jika menggunakan system etika sekulerisme. Namun di saat yang bersamaan juga dapat dipandang sebagai tidak bermoral dan tidak dapt diterima dinegara lain. Sistem etika sekulerisme tidak memiliki kesatuan

standar yang jelas sehingga kesimpulan moralnya tidak sama.

Termasuk pada prinsip kesatuan didalam agama islam adalah tidak diperbolehkannya perlakuan diskriminatif antara sesame pelaku pasar.tidak boleh membeda-bedakan dalam suku, warna kulit, jenis kelamin bahkan agama, dalam hal perlakuan yang berkaitan dengan kejujuran. Kejujuran diterapkan kepada semua pelaku pasar tanpa pandang latar belakang, perbedaan latar belakang adalah suatu keniscayaan, sehingga tidak boleh membeda-bedakan dalam urusan bisnis pada konteks tersebut. Manusia adalah satu kesatuan, yang membedakan adalah ketagwaan di mata Allah SWT.

Tanpa prinsip keimanan juga tidak mungkin seorang pelaku bisnis mau menghindari diri dari godaan dan kesulitan. Sesuai dengan sifat naluriahnya, manusia akan lebih suka pada sesuatu yang dekat kepada hawa nafsuh. Maknanya, manusia akan lebih suka dan lebih mudah mengerjakansesuatu yang mudah dan menggoda. Oleh karena sifat naluriah manusia yang seperti itu, maka untuk terlepas dari sifat naluriah itu dibutuhkan keimanan yang kuat.

Prinsip selanjutnya yang harus ada agar system etika islam dapat berjalan adalah prinsip kewalian/khilafah. Istilah ini mungkin terdengar asing bagi telinga masyarakat kita. *Trusteeship* asal kata dari *Trustee* yang bermakna seseorang atau pihak yang di percaya untuk memegang wewenang terkait apapun untuk di distribusikan manfaatnya kepada masyarakat banyak.

Sumber daya yang menjadi pemberian Allah tidak boleh di sia-siakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Manusia di muka bumi ini bukanlah pemilik dari sumber daya yang ada di bumi. Manusia adalah wali yang yang dititipkan sumber daya, sehingga wali ini wajib menjaga sumber daya sehingga dapat di manfaatkan oleh



masyarakat sekitar.

Berbicara tentang keseimbangan, Islam tidak melarang seorang pebisnis untuk mengambil keuntungan dalam perniagaan. Namun hal tersebut tidak boleh dijadikan sebagai motivasi paling utama dalam berbisnis. Motivasi utama dalam berbisnis vang harus dimiliki adalah motivasi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Tanpa prinsip keseimbangan system etika islam juga sulit di implementasikan. Ketiadaan prinsip ini membuat seseorang berlebih-lebihan atau bermudah- mudahan dalam mengerjakan sesuatu. bermudah-mudahan dalam meninggalkan al-Qur'an dan al-Hadist atau mungkin terlalu kaku dan ekstrim dalam mengamalkan tanpa mempertimbangkan konteks.

Prinsip selanjutnya yang di butuhkan sebagai kontrol sistem etika islami adalah prinsip keadilan. keadilan adalah tema utama dalam agama islam. Seseorang yang beriman diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu berlaku adil. Prinsip keadilan di dalam agama islam berlaku kepada seluruh manusia tanpa memandang latar belakang apapun, termasuk agama. Seorang muslim tidak diperbolehkan berlaku tidak adil kepada rekan bisnisnya yang non muslim. Jika kepada non muslim saja di perintahkan berlaku adil, maka terlebih lagi kepada sesame muslim. Dalam menuntukan nilai harga suatu barang misalnya ilmu sekuler melalui ekonomi konvensioanal mengatakan harga yang adil adalah harga yang terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Tetapi menurut pemasaran islami harga biarlah ditentukan oleh interaksi di dalam pasar. Justru ketika harga suatu barang ditetapkan bukan dari interaksi pasar, aka nada pihak yang mendzalimi. Pirinsip keadilan adalah di mana tidak ada satupun pihak yang terdzalimi, maka jika ada satu pihak yang terdzalimi meskipun pihak lainnya di untungkan hal ini melanggar prinsip keadilan dalam islam.

Prinsip yang terakhir adalah prinsip kebebasan. Seoramg muslim bebas melakukan apapun sebagai kholifah di muka bumi ini. Namun kebebasan yang dimaksudkan bukanlah kebebasan seperti hewan didalam hutanyang tidak memiliki aturan. Kebebasan yang di maksudkan adalah kebebasan dalam koridor aturan syari'ah. Seorang pebisnis atau pemasar bebas melakukan atau membuat keputusan apapun dalam bisnis selama tidak melanggar aturan syariah. Islam tidak pernah melanggar seorang muslim untuk berbisnis dengan non muslim. Agama islam adalah agama yang mudah dan aturannya dapat diterima secara rasional oleh semua kalangan, meskipun oleh kalangan non muslim. Dengan mengimplementasikan aturan Allah seseorang tidak akan kehilangan kebebasannya, namun justru aturan Allah akan mengurangi keegoisannya dan meningkat motivasinya untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Setiap kebebasan selalu berkaitan dengan akuntabilitas. Apapun yang dikerjakan seseorang nanti akan di pertanggung jawabkan di akhirat di hadapan Allah SWT.

Kesimpulan

Manajemen pemasaran syari'ah lebih tepat di gunakan karena mengandung makna luas secara epistemologi sehingga dapat terbedakan dengan konsep pemasaran konvensional. Konsep pemasaran manajemen syari'ah tidak ekslusif untuk konsumen atau produsen yang beragama islam saja. Dengan memahami konsep syari'ah pada pemasaran, diharapkan praktik pemasaran dapat memberikan tambahan nilai yang baik kepada konsumen rumah tangga berupa produk dan harga yang adil. Kepada produsen berupa optimalisasi pangsa pasar. Begitu pula kepada pemerintah yakni untuk menciptakan pasar yang sehat secara kompetisi yang bermoral dan berkeadilan universal.

Dengan memahami epistemologi syari'ah dapat dipahami perbedaan an-



tara pemasaran islam yang identik dengan pemasaran islam sebagai agama dan keyakinan, pemasaran syari'ah yang yang levelnya pada aturan atau metode, dan pemasaran halal yang berada pada level operasional. Pemasaran yang halal belum tentu syari'ah. Kemudian dapat di simpulkan juga bahwa orientasi utama dari pemasaran syari'ah adalah syari'ah itu sendiri, bukan pasar (market). Selanjutnya, nilai bagi pelanggan syari'ah adalah nilai bagi pelanggan yang sesuai dengan etika bisnis syari'ah. Nilai adalah selisih antara persepsi manfaat atau biaya dalam hal ini harus di sesuaikan dengan sesuatu vang di anggap manfaat dan biava sesuai etika bisnis syari'ah.

Daftar Pustaka

- Abdullah Idi , Jalaluddin. 1998. *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Gaya Media
 Pratama.
- Adib H. Mohammad. 2018. Filsafat Ilmu Ontologi Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Aji Hendy Mustiko Aji. 2019. *Manajemen Pemasaran Syari'ah Teori Dan Praktik*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Alma H. Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: ALFABETA.
- Hidayat Mohammad. 2010. *An Introduction The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Inu Kencana Syafi'i. 2004. *Pengantar Fil-safat*. Bandung: Refika Aditama.
- Marius, Angipora. 1999. *Dasar- dasar Pe-masaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusli, dan Benjamin Molan. 2002. *Manajemen pemasaran jilid dua edisi milennium. Terjemahan oleh Hendra Teguh, Ronny, dari Marketing Management. 10th ed. (2000)*, Jakarta: Penhallindo
- S. Harahap, Sofyan. 2011. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Jakarta: Salemba Empat.
- Swastha, Basu. 1995. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta : Liberty.



Model Pengembangan Sekolah Ramah Lingkungan di Kabupaten Sumenep

Damanhuri, Ah. Syamli, Tatik Hidayati, Mohammad Takdir, Paisun (Tim Peneliti LP2M INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi model pengembangan sekolah ramah lingkungan di SMA 3 Annugayah Guluk-Guluk Sumenep. Ada tiga rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini, yakni landasan filosofis pengembangan sekolah ramah lingkungan, strategi pengembangan sekolah ramah lingkungan, dan implementasi program nol sampah plastik yang diterapkan di SMA 3 Annugayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk field reseach (penelitian lapangan), yang difokuskan di SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus-fenomenologis untuk mengungkap implementasi program nol sampah plastik yang diterapkan di SMA 3 Annugayah dengan melibatkan komunitas Pemulung Sampah Gaul (PSG). Untuk memperoleh data tentang model pengembangan sekolah ramah lingkungan di SMA 3 Annugayah, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan penting. Pertama, landasan filosofis pengembangan sekolah berwawasan lingkungan di SMA 3 Annugayah adalah meneruskan visi Annuqayah di bidang lingkungan, pengembangan pendidikan antroposentrisme, pengembangan pendidikan karakter dan etika ramah lingkungan. Kedua, strategi SMA 3 Annugayah dalam mengembangkan sekolah berwawasan lingkungan adalah visi lingkungan annugayah diintegrasikan dengan visi sekolah mengembangkan kegiatan ektrakulikuler melalui Pemulung Sampah Gaul, keterlibatan alumni PSG dalam proses kaderisasi, membangun jejaringan dengan komunitas pendidikan lingkungan, mendelegasikan guru dan siswa dalam kegiatan lingkungan, dan memasukkan materi pendidikan lingkungan pada kurikulum sekolah. Ketiga, implementasi program sekolah nol sampah plastik adalah membangun kesadaran tentang bahaya sampah plastik, membuat panganan tradisional (Lab Rasa), menyiapkan kantin tanpa plastik sekali pakai membentuk polisi dan srikandi lingkungan.

Kata Kunci: Model, Pengembangan, Sekolah Ramah Lingkungan



A. Pendahuluan

Permasalahan isu lingkungan di berbagai belahan dunia, menjadi perhatian penuh para aktivis dan pemerhati lingkungan yang merasa khawatir dengan masa depan bumi yang mengalami masa-masa suram, akibat pencemaran lingkungan, pembakaran hutan, maupun global warming. Kondisi ini patut dijadikan sebagai spirit luar biasa dalam merefleksikan diri secara kritis tentang kondisi lingkungan hidup yang sangat memprihatinkan. Persoalan lingkungan, merupakan masalah global yang memerlukan perhatian semua pihak. Oleh karena itu, isu dan problem lingkungan tidak mungkin teratasi tanpa adanya pendekatan strategis bervisi global- holistik di tingkat pengambil kebijakan dan tersedianya solusi-solusi lokal pada tataran pelaksanaan praktis.

Permasalahan dan pencemaran lingkungan karena penumpukan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan sebagai potensi sumber daya alam, menjadi penyebab semakin merajalelanya isu lingkungan dalam masyarakat. Di era sekarang, permasalahan penumpukan sampah menjadi hal utama yang harus diperhatikan, karena menyangkut masa depan keindahan dan kebersihan hidup sebagai manusia yang tidak lepas dari alam dan lingkungan. Isu pencemaran lingkungan karena penumpukan sampah plastik yang tidak teratasi, belakangan menjadi perhatian dari beberapa lembaga pendidikan berbasis pesantren yang mulai menggarap isu ini sebagai langkah strategis dalam memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan organik.

Permasalahan peningkatan dan penggunaan sampah plastik dan kurangnya ruang yang terbuka hijau di kawasan pesantren adalah hal yang sangat penting untuk cepat diatasi. Permasalahan penumpukan sampah dan tingginya mayoritas santri menggunakan bahan berplastik adalah karena rendahnya kesadaran mereka akan keramahan lingkungan. Sampah menjadi permasalahan krusial yang be-

lum tertangani dengan baik. Pesantren merupakan salah satu tempat yang di dalamnya terdapat para santri yang mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga penumpukan sampah tidak bisa dihindari. Jika hal ini dibiarkan, maka kerusakan lingkungan akibat penumpukan sampah yang tidak dikelola akan mengakibatkan bencana terjadi. Kehidupan pondok pesantren sangat beragam, karena dibentuk oleh sosial budaya yang berbeda dan lingkungan fisik yang berbeda pula.1 Bahkan, masih banyak pesantren yang belum maksimal dalam mengelola sampah sehingga perlu adanya gerakan untuk mengampanyekan peran pesantren dalam menjawab isu lingkungan.²

Dalam realitasnya, pesantren masih sering memperoleh stigma negatif sebagai tempat orang kumuh, kampungan, dan tidak mengerti persoalan ilmu pengetahuan umum. Pesantren dianggap tidak mampu mengelola lingkungan dengan baik akibat penumpukan sampah yang sangat banyak dari para santri. Dengan demikian, volume sampah yang masuk ke TPA tiap harinya tidak akan menurun jika tidak ada inisiatif dari pengurus pesantren untuk mendaur ulang sampah menjadi produk yang bermanfaat seperti menjadi produk pupuk. Secara umum, di pesantren pemilahan sampah biasanya dilakukan oleh pemulung setelah sampah di buang ke bak sampah pesantren. Mereka mengumpulkan sampah yang dikira dapat didaur ulang lalu menjualnya. Kegiatan ini hanya dapat mereduksi sampah dalam jumlah yang kurang signifikan karena kurangnya perhatian dari pihak pengelola. Santri dengan jumlah yang berskala besar juga tidak jauh berbeda dengan jumlah masyarakat, dan secara mayoritas kesadaran santri dalam menilai manfaat sampah

^{1.} Muh. Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 45,

^{2.} Ahmad Muhaddam Fahham, "Sanitasi dan Dampaknya Bagi Kesehatan: Studi dari Pesantren", *Aspirasi: Jurnal-Jurnal Masalah Sosial*, Vol. 10. No.1, 2019, 34.



masih sangat minim sehingga keramahan lingkungan juga tidak begitu diperhatikan. Maka, di sini pesantren harus menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari gerakan untuk memasyarakatkan hidup bersih sesuai landasan dalam ajaran agama.

Belakangan ini, kepedulian pesantren pada isu lingkungan sudah semakin besar seiring dengan permasalahan sampah yang menjadi benalu dalam kehidupan pesantren. Salah satu pesantren di Madura yang sangat konsen pada isu lingkungan adalah Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep. Jika dilihat dari aspek historis, Pondok Pesantren Annugayah sejak tahun 1978-1988 telah melakukan pengembangan air bersama masyarakat, serta membangun instansi terkait (UNICEF) dalam hal pengadaan air bersih yang terus menyebar ke desa- desa yang lain. Di samping itu juga, terdapat kegiatan pembibitan jenis tanaman, yang dilaksanakan pada tahun 1979.3

Kepedulian dan keterlibatan pondok pesantren Annugayah dalam isu lingkungan pada awalnya diinisiasi oleh Biro Pengabdian Masyarakat (BPM) yang fokus perhatiannya di sekitar masyarakat pesantren. Keberadaan BPM-PPA yang fokus pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bidang, termasuk bidang lingkungan hidup yang awalnya digarap di sekitar masyarakat agar memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga kebersihan dan lingkungan. Tidak heran bila Pondok Pesantren Annuqayah memperoleh penghargaan kalpataru dari Presiden Republik Indonesia, yang dinilai berjasa dalam menyelamatkan lingkungan masyarakat dan menjadi sekolah berwawasan lingkungan di pesantren.⁴ Di lingkungan pesantren, masih banyak santri yang kurang memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan dan 3. Fachruddin Mangunjaya, Ekopesantren: Bagaimana Merancang

3. Fachruddin Mangunjaya, *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan?* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 208.

4. Bahri Ghazali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan:*Kasus Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2001), 48-49.

mengurangi penggunaan sampah plastik. Jumlah santri yang sangat banyak, tentu semakin menambah beban penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sebagaimana diketahui bahwa sampah terbanyak rata-rata di pesantren adalah sampah anorganik yakni sekitar 75% dari keseluruhan, sedangkan persentase jumlah sampah organik adalah 25%. Untuk mengurangi sampah plastik, maka diperlukan daur ulang sampah dan tentu keterlibatan santri dalam memanfaatkan sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Di antara strategi mengurangi sampah plastik adalah mendorong santri untuk membawa tas sendiri ketika berbelanja perlengkapan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Di lingkungan Pondok Pesantren Annugayah, salah satu lembaga pendidikan yang aktif dan berperan dalam mendorong isu lingkungan adalah SMA 3 Annuqayah. Sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah pesantren Annugayah, SMA 3 mulai fokus pada pengembangan sekolah berwawasan lingkungan hidup melalui kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa dilakukan oleh siswa sebagai pihak yang terlibat langsung dalam menciptakan kepekaan dan kepedulian pada lingkungan di sekitar sekolah, pesantren, dan masyarakat secara umum. Di antara bentuk kegiatan yang pertama kali digerakkan oleh pihak SMA 3 melalui kegiatan ekstrakuler adalah melakukan penataan pada artistik sekolah, penanaman pohon-pohon rindang, tanaman hias di sekitar sekolah, pemilahan sampah kering, basah, dan plastik.

Gerakan peduli lingkungan oleh SMA 3 Annuqayah, kemudian diimplementasikan dengan melaksanakan aksi memulung sampah plastik di sekitar TPA PP. Annuqayah, tepat pada Peringatan Hari Bumi tahun 2008. Kegiatan ini diikuti oleh para siswa SMA 3 Annuqayah dan siswa lain yang memiliki perhatian pada isu lingkungan dengan tetap berpegang teguh pada komitmen awal untuk meningkatkan kesadaran santri dan masyarakat



pada kebersihan lingkungan. Dari serangkaian kegiatan yang dilakukan, maka dibentuklah komunitas peduli lingkungan yang diberi nama Pemulung Sampah Gaul (PSG), yang menjadi bagian dari program ekstrakulikuler di SMA 3 Annuqayah. Sampai sekarang, Pemulung Sampah Gaul (PSG) telah banyak berkontribusi dalam kegiatan peduli lingkungan dan mendorong terbentuknya komunitas lain di lembaga-lembaga sekolah untuk aktif menyuarakan dan mengampanyekan nol sampah plastik dalam setiap aktivitas sehari-hari.

Keterlibatan pesantren sebagai bagian dari lembaga pendidikan tentu menjadi angin segar bagi penanganan masalah lingkungan yang menjadi isu global di tengah perkembangan dunia digital yang tak terkendali. Kemunculan sekolah berbasis wawasan lingkungan, seperti SMA 3 Annuqayah, patut mendapatkan apresiasi karena bukan hanya sekadar fokus pada gerakan peduli lingkungan secara *an-sich*, namun juga muncul keterlibatan dengan komunitas lain yang memiliki kepedulian sama dalam masalah lingkungan.

Penelitian tentang sekolah ramah lingkungan ini, penting dilakukan karena tidak banyak sekolah berbasis pesantren yang memiliki perhatian dan fokus pada pendidikan lingkungan sebagai ciri khas dan karakter sekolah. Untuk wilayah Madura, SMA 3 Annuqayah dengan komunitas PSGnya bisa menjadi prototipe bagi sekolah berwawasan lingkungan. Maka penelitian ini berusaha mengetahui landasan filosofis pengembangan sekolah ramah lingkungan di sma 3 annugayah. Selain itu, berusaha mengetahui upaya sma 3 annuqayah dalam mengembangkan sekolah ramah lingkungan dan bagaimana implementasi sekolah nol sampah plastik yang dilaksanakan di SMA 3 Annugayah Guluk-Guluk Sumenep.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Pendidikan Lingkungan

a. Pengertian Pendidikan Lingkungan

Pendidikan lingkungan hidup adalah pengetahuan tentang pentingnya ke-

sadaran setiap orang terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud syukur atas anugerah Tuhan kepada manusia. Pendidikan lingkungan dapat diartikan sebagai segala upaya, metode, dan operasional untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan sikap positif masyarakat terhadap situasi kebencanaan dan krisis lingkungan sehingga memunculkan kesadaran dan sikap proporsional dalam menghadapi bahaya bencana alam, Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai berikut adalah pembangunan yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang.⁵

Jika dilihat secara global, pendidikan lingkungan adalah bagian dari proses unuk menumbuhkan kesadaran manusia agar memiliki kepedulian secara total pada isu lingkungan. Pendidikan lingkungan mencerminkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, dan komitmen bersama untuk senantiasa mengatasi masalah-masalah lingkungan, baik secara langsung atau tidak langsung.6 Sebagai isu global, pendidikan lingkungan hidup tidak hanya mendapatkan perhatian dari satu negara, melainkan dari beberapa negara merespon isu lingkungan sebagai upaya membuka mati hati para pemimpin dunia untuk bersama-sama melestarian lingkungan melalui pendidikan.

Ada penjelasan lain yang terkait dengan pendidikan lingkungan yang diartikan sebagai bagian dari pendidikan seumur hidup yang komprehensif dan integratif serta responsif pada perubahan dan permasalahan global yang berkaitan dengan isu lingkungan. Pada isu lingkungan ini, pendidikan merupakan wadah penting yang bisa memberikan kesadaran kepada setiap orang agar memiliki kepedulian untuk menjaga lingkungan secara berkelan-

^{5.} A. Gilpin, *Dictionary of Environment and Sustainable Development*, (Chichester: John Wiley & Sons, 1996), hlm. 45.
6. Pengertian pendidikan lingkungan hidup ini berdasarkan UNE-SCO yang terjadi pada Deklarasi Tiblisi pada tahun 1977.



jutan. Setiap orang harus didorong agar aktif dalam melindungi lingkungan sendiri dan menjaga lingkungan orang lain dari tindakan destruktif yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran bagi keindahan alam sekitarnya.

Pendidikan ekologis bertujuan untuk mengasah sensibilitas ekologis serta menumbuhkan kesadaran akan keberadaan lingkungan hidup sebagai bagian dari ekosistem yang berpengaruh pada kehidupan manusia. Dalam dan melalui pendidikan ekologis, semua orang digiring kepada pembiasaan mentalitas hidup ekologis yang senantiasa sadar bahwa keberadaan dirinya hanya bisa berarti kalau ia ada bersama dengan ciptaan lain. Hal ini berimplikasi pada pemahaman tentang betapa bernilai dan berharganya alam bagi kehidupan manusia, sehingga betapa pentingnya untuk menjaga dan melestarikan kehidupan yang selaras dan seimbang.⁷ Pengetahuan tentang pendidikan lingkungan merupakan aspek penting bagi segenap elemen bangsa, terutama kalangan anak didik dalam menghadapi situasi yang mendebarkan dan membutuhkan penanganan terkait masa depan lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup sangat penting untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada semua anak bangsa agar tidak mengabaikan kebersihan dan keindahan tempat tinggal atau lingkungan secara umum. Banyaknya korban jiwa dalam setiap bencana di tanah air semestinya mendorong pemerintah untuk segera menerapkan pendidikan lingkungan sebagai bagian dari kurikulum di lembaga- lembaga sekolah. Tanpa pendidikan lingkungan, anak-anak akan terjebak dengan tindakan melawan hukum, termasuk melakukan pencemaran lingkungan maupun pembuangan sampah sembarangan.

Prinsip dasar pendidikan lingkungan hidup adalah terciptanya kesadaran dan kepedulian terhadap segala ekosistem di muka bumi. Prinsip kesadaran 7. Khaliq Setya Yasida, "Eco-Pedagogi", *Historika*, Vol. 23, No. 1, 2020, 72-76.

dan kepedulian menjadi langkah strategis dalam memberikan bekal pengetahuan bagi mereka agar sadar akan pentingya memahami krisis lingkungan yang terjadi dan mengancam keselamatan masyarakat luas, seperti pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, pembuangan limbah industri, pembuangan sampah sembarangan, maupun bentuk permasalahan lain terkait dengan lingkungan. Pendidikan lingkungan berupaya menanamkan kesadaran kepada anak didik tentang bahayanya pencemaran lingkungan maupun penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik.

Pendidikan lingkungan hidup akan diarahkan untuk mendorong anak didik yang berada masih belajar di lembaga pendidikan agar memberikan pemahaman terkait kesiagapan sekolah dalam menghadapi bencana alam akibat krisis lingkungan yang terjadi di beberapa daerah. Masyarakat harus disadarkan bahwa mereka hidup di lingkungan hidup yang tidak selalu sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Cara paling efektif untuk menyadarkan itu adalah melalui pendidikan sejak usia dini yang bisa diterapkan di lembaga-lembaga sekolah. Dengan pengetahuan lingkungan yang kuat, anak-anak Indonesia akan mampu memanfaatkan potensi alam untuk kesejahteraan serta menjaga alam sebaik- baiknya guna mencegah terjadinya bencana atau kerugian yang lebih besar dari fenomena alam.8

Sejalan dengan perkembangan pendidikan karakter yang bisa diintegrasikan melalui aspek-aspek kesadaran lingkungan, kurikulum pendidikan di Indonesia sejatinya dapat diimplementasikan dalam materi pelajaran yang dekat dengan lingkungan si anak. Materi pelajaran yang berkaitan dengan dampak lingkungan hidup sebisa mungkin diarahkan untuk memperoleh suatu bekal pengetahuan dasar tentang urgensi pengenalan wilayah bencana yang mengancam daerah-daerah yang memang sangat

^{8.} Kompas, 4/10/2010.



potensial terkena imbas bencana alam akibat krisis lingkungan yang terjadi. Jika sudah masuk pada aspek kognitif, materi tentang pendidikan lingkungan diarahkan pada tindakan tanggap bencana yang meluas ke masalah yang lebih umum, seperti kesadaran buang sampah pada tempatnya, penanaman pohon, pentingnya menjaga lingkungan dari penebangan hutan tanpa terkendali.⁹

Pendidikan lingkungan hidup menjadi sangat vital, karena selama ini masyarakat hanya diberikan *warning* jika ada isu darurat datang tanpa ada edukasi memadai mengenai langkah-langkah kesiapan dan prosedur menghadapi masalah lingkungan, termasuk bencana alam. Pendidikan lingkungan hidup juga memiliki peranan yang amat signifikan bagi kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana yang datang secara tiba-tiba. Itulah sebabnya, penerapan pendidikan atau pelatihan tentang lingkungan hidup diharapkan dapat membantu penyiapan mental dan kesadaran publik dalam melakukan tindakan antisipatif pada saat dan sesudah bencana terjadi. Selain itu, edukasi tentang kebencanaan dan bahaya krisis lingkungan juga dapat meminimalisir korban jiwa karena masyarakat akan memperoleh pemahaman tentang penyelamatan jiwa saat bencana itu terjadi.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan lingkungan sejak usia sekolah memang menjadi mutlak untuk diterapkan agar semua komponen masyarakat bisa terlibat langsung dalam membantu pelestarian lingkungan dan keindahan alam secara lebih luas. Pendidikan lingkungan bila diterapkan dengan baik, maka akan mampu merekatkan solidaritas sosial yang selama ini menjadi jarang di lingkungan masyarakat kota yang individualistik. Dengan edukasi lingkungan dan kebencanaan dimunculkan rasa tanggung jawab sosial bersama tanpa harus melihat

kelas dan strata sosial maupun kesenjangan hidup masing-masing individu.

b. Sejarah Perkembangan Pendidikan Lingkungan: Konteks Lokal dan Global

Kehadiran pendidikan lingkungan hidup dapat dilihat dari aspek sejarah awal kemunculan dan perkembangannya. Untuk mengetahui bagaimana awal munculnya perkembangan pendidikan lingkungan hidup, maka penting dijelaskan secara bertahap bagaimana gejala awal perintisannya sampai kemudian menjadi isu bersama di kalangan para pemerhati lingkungan. Di bawah ini akan dijelaskan sejarah perkembangan awal perbincangan tentang pendidikan lingkungan hidup, baik dalam tataran tingkat global maupun lokal.

Sejarah awal perbincangan tentang pendidikan lingkungan hidup pertama kali dilakukan melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 5- 16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi tingkat dunia ini dihadiri oleh banyak negara, yaitu sekitar 110 negara vang ikut serta dalam mensukseskan kegiatan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Kehadiran delegasi dari berbagai negara merupakan bentuk keperihatinan terhadap permasalahan lingkungan yang menjadi isu global. Kegiatan konferensi ini yang diadakan di Stockholm ini, berawal dari kegiatan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melakukan peninjauan terhadap gerakan pembangunan Dunia 1 (1970) dengan tujuan merumuskan agenda strategis pembangunan Dunia (1980).

Dari awal mula perbincangan tentang permasalahan lingkungan hidup, maka diputuskan untuk melaksanakan sebuah konferensi tingkat dunia yang bertujuan untuk menampung aspirasi dari masyarakat dunia untuk mengatasi masalah lingkungan yang sangat darurat. Pada perkembangannya, konferensi internasional pertama kali dilaksanakan

^{9.} A. Sugandhydan Hakim. R, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangu-nan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 123.



pada 5-16 Juni 1972 di Stockholm- Swedia. Dengan adanya konferensi tersebut, maka dibuatkan deklarasi yang menjadi langkah strategis dalam menuntaskan masalah lingkungan di beberapa negara yang mempunyai persoalan dengan krisis lingkungan dan bencana global. Menurut Philip Kristanto, sebenarnya ada beberapa alasan yang mendasari mencuatnya persoalan hutan dan lingkungan hidup, sehingga PPB mengadakan Konferensi tentang Lingkungan Hidup di Stockholm. Pertama, dapat kita lihat pada tahun 1953, di Jepang, terjadi malapetaka yang mengerikan yang menimpa sebagian nelayan dan keluarganya di sekitar Teluk Minamata yang makanan utamanya adalah ikan. Di daerah tersebut telah terjadi wabah neurologis yang disebut dengan penyakit Minamata. Pada penderita secara progresif mengalami lemah otot, hilangnya penghilatan hingga menyebabkan kematian.

Kedua, pada tahun 1963 Amerika Serikat Mengeluarkan Undang-Undang Tentang Lingkungan Hidup (National Environmental Policy Act, NEPA) sebagai reaksi atas kerusakan lingkungan oleh aktivitas manusia yang meningkat, antara lain dengan tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limba industri dan transportasi. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri ini menjadi malapetaka bagi keberlangsungan hidup manusia. Isu lingkungan dalam tingkat global ini, tidak hanya mengancam kehidupan manusia, melainkan semua ekosistem lingkungan, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan-hewan. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang tentang lingkungan ini dilakukan untuk menyelamatkan semua ekosistem lingkungan agar terhindari dari bahaya dan malapetaka yang lebih besar di masa depan. Ketiga, terjadinya penipisan lapisan ozon (03) sebagai dampak dari rumah kaca dan meningkatnya suhu permukaan bumi akibat penebalan lapisan C02, yang akan mengancam terhadap kesehatan dan keselamatan ummat manusia,

karena ozon menjadi tameng dari pancaran sinar matahari yang sangat menyengat.

Persoalan lingkungan hidup bukan hanya menjadi isu global, tetapi juga menjadi isu lokal dan nasional yang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama para pemerhati lingkungan. Mencuatnya persoalan lingkungan hidup semacam kerusakan hutan, sebenarnya bukan merupakan yang baru dalam konteks wacana nasional, akan tetapi sudah muncul sejak diciptakannya bumi dengan hiasan-hiasannya yang mampu memberikan ketertarikan (interesting) pada manusia. Bahkan, ada asumsi yang mengatakan bahwa, universalnya persoalan lingkungan, termasuk kerusakan hutan sejatinya banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan terjadi bencana alam dan kerusakan lingkungan yang sangat parah.

Persoalan lingkungan hidup di Indonesia juga turut mendapatkan perhatian, terutama dari beberapa kampus vang mempunyai inisiatif untuk menyelenggarakan konferensi sebagaimana yang dilakukan di Swedia. Di Indonesia sendiri, penyelengaraan pendidikan lingkungan dimulai pada tahun 1975 di IKIP Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta). Pada konferensi tersebut, dirintis pengembangan pendidikan lingkungan dengan menyusun program pengajaran pendidikan lingkungan hidup yang diterapkan di beberapa sekolah dasar di Jakarta pada tahun 1978-1979.

Untuk mempertegas komitmen dan perhatian pada pendidikan lingkungan, maka dibentuklah Pusat Studi Lingkungan di beberapa kampus, baik swasta maupun negeri. Dan pada saat yang sama, dikembangkan pendidikan AMDAL oleh semua PSL yang berada di bawah kordinasi Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Meneg-PPLH). Saat ini jumlah PSL yang menjadi anggota BKPSL telah berkembang menjadi 87 PSL, di samping itu berbagai perguruan



tinggi baik negeri maupun swasta mulai mengembangkan dan membentuk program khusus pendidikan lingkungan, misalnya di Jurusan Kehutanan IPB.

c. Pengembangan Sekolah Berwawasan Lingkungan

Setiap pengembangan sekolah, pasti dilandasi oleh kerangka pemikiran untuk mencapai visi misi lembaga pendidikan dalam mengarungi persaingan di masa depan. Dari berbagai jenjang pendidikan, baik tingkat dasar sampai perguruan tinggi, terdapat ciri khas atau karakter yang menunjukkan keunggulan dari sebuah sekolah. Jika sebuah lembaga pendidikan fokus pada bidang tertentu, maka di dalamnya terdapat landasan filosofis yang melatarbelakangi model pengembangan sekolah, termasuk lanudasan filosofis pengembangan sekolah berwawasan lingkungan.

Pertama, landasan filosofis pengembangan sekolah berwawasan lingkungan adalah bahwa edukasi lingkungan penting diajarkan sejak usia dini kepada anak didik agar memiliki pemahaman dalam mencintai lingkungannya. Secara filosofis, anak didik yang belajar di lembaga sekolah bukan hanya bertujuan untuk menghilangkan kebodohan dan mengembangkan kreativitas atau potensi yang dimiliki sejak lahir, melainkan juga agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dari segala bentuk pengrusakan dan pencemaran. Ini karena, sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga tempat untuk mengasah kepekaan dan kepada sesama dan lingkungan sebagai ekosistem yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia.

Kedua, seluruh ekosistem di alam semesta adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu sama lain. Manusia adalah bagian dari alam dan lingkungan yang menyertai kehidupan umat manusia. Pengembangan sekolah berwawasan lingkungan adalah bahwa anak didik di sekolah adalah bagian dari

alam sehingga harus senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan dengan penuh tanggung jawab dan amanah sebagai mahluk ciptaan Tuhan.

d. Upaya Lembaga Pendidikan dalam Mengembangkan Sekolah Berwawasan Lingkungan

Dalam mengembangkan sekolah lingkungan, lembaga pendidikan baik tingkat dasar sampai perguruan tinggi perlu menanamkan eco-literacy yaitu melek lingkungan. Eco-teracy perlu ditanamkan sejak usia dini kepada anak didik agar memiliki kecintaan dan kesadaran dalam menjaga lingkungan. Hal ini bisa dimulai dari hal-hal kecil yang memungkinkan anak bisa mempraktikkan sendiri untuk tidak mencemarkan dan merusak lingkungan, semisal mengajarkan kepada anak untuk tidak membuang sampah di tempat umum atau secara sembarangan. Melek lingkungan ini juga menjadi bagian dari cara yang paling efektif untuk mengantisipasi sikap destruktif manusia terhadap alam dan lingkungan sekitar.

Diantara upaya lembaga pendidikan dalam mengembangkan sekolah berwawasan lingkungan adalah mendirikan komunitas pecinta lingkungan atau komunitas ekologis yang menampung segala aspirasi dari kelompok anak muda agar lebih mencintai lingkungan. Komunitas ekologis adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian pada lingkungan dan segala ekosistem yang ada. Pembentukan komunitas ekologis ini bertujuan untuk memperkuat rasa kecintaan pada lingkungan yang dipraktikkan secara bersama-sama dengan mengusung visi dan misi dari lembaga sekolah yang sudah punya karakter atau ciri khas.

Setiap lembaga pendidikan yang memiliki program lingkungan, perlu melaksanakan kegiatan ekstra yang berkaitan dengan pelestarian dan keindahan lingkungan, seperti penanaman tanaman hias, pot bunga, daur ulang sampah, dan



lain sebagainya.

C. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai way of doing anything, yaitu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu agar sampai tujuan yang diinginkan. Dedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, sampai menyusun sebuah laporan dari hasil yang sudah dilakukan. Metode penelitian adalah cara yang dilakukan peneliti untuk merumuskan dan memecahkan permasalahan yang diteliti sesuai dengan pendekatan maupun teori yang dipakai di lapangan. Metode penelitian sendiri digunakan untuk merumuskan sebuah teori atau konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.

Penelitian "Model berjudul, Pengembangan Sekolah Ramah Lingkungan di Kabupaten Sumenep" ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk field reseach (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena sifat penelitian ini penuh dengan nilai (value-laden) yang termanifestasi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan yang menekankan bagaimana fenomena dan pengalaman sosial diciptakan dan diberi arti. 12 Sebuah penelitian kualitatif berusaha menjelaskan dan memahami fenomena sosial atau kondisi masyarakat-sebagaimana masyarakat itu sendiri mempersepsikan diri mereka (to learn from the people) atau bersifat emik (emic-factors).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, dengan teknik pengambilan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplorasi fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses langkah suatu aktivitas, pengertian tentang konsep yang beragam, dan lain sebagainya. Dengan demikian, penelitian deskriptif adalah suatu metode dengan meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu hal kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹³

Sebagai penelitian lapangan (field research), 14 penelitian ini fokus pada pengembangan sekolah ramah lingkungan di Kabupaten Sumenep dengan studi kasus pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep. Pemilihan SMA 3 Annuqayah didasari oleh upaya sekolah yang memang secara konsisten, sistematis, dan komprehensif menerapkan sekolah ramah lingkungan yang tidak hanya sekadar slogan, namun diaplikasan secara baik dan terukur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus-fenomenologis untuk mengungkap gejala atau fenomena (peristiwa atau fakta) yang menyita banyak perhatian masyarakat secara luas berkaitan dengan keunikan dan keunggulan dari sebuah komunitas (Pemulung Sampah Gaul) SMA 3 Annugayah, yang memberikan kontribusi penting pemeliharaan lingkungan di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap model pengembangan sekolah ramah lingkungan yang diterapkan di SMA 3 Annuqayah sebagai subjek dalam penelitian ini. Ini karena, di SMA 3 Annuqayah sudah merintis ko-

^{10.} A.S Hornbay, Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English (tp: Oxford University Press, 1963), hlm. 533.

^{11.} Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 1.

^{12.} Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Dari Denzin Guba dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 11.

^{13.} Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 23.

^{14.} Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 423-43.



munitas pencinta lingkungan yang dikenal dengan nama Pemulung Sampah Gaul (PSG) yang melibatkan siswi-siswa SMA sebagai penggerak kegiatan memulung sampah plastik dengan target nol sampah plastik dalam melaksanakan aktivitas apa pun.

Penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus dilakukan secara terinci, mendalam, dan intensif pada salah satu lembaga, organisasi, atau gejala-gejala tertentu. Pada intinya, penelitian studi kasus berusaha melacak suatu peristiwa, hubungan antar pribadi atau kelompok, dan menemukan fenomena-fenomena kunci yang merangkai suatu peristiwa atau gejala tertentu. Isu-isu yang muncul dalam penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif meliputi pada struktur kelompok, organisasi, lembaga, dan struktur lingkungan sosial dalam masyarakat. Penelitian dalam studi kasus ini mengarah pada satu lembaga pendidikan di lingkungan pesantren, yaitu SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk, yang memiliki keunikan dan ciri khas sebagai sekolah berwawasan lingkungan dengan adanya komunitas yang diberi nama Pemulung Sampah Gaul (PSG).

Penelitian tentang model pengembangan sekolah ramah lingkungan ini akan difokuskan 3 aspek, yakni landasan filosofis pengembangan sekolah ramah lingkungan, strategi pengembangan sekolah ramah lingkungan, dan implementasi program nol sampah plastik di SMA 3 Annuqayah. Dengan studi kasus di SMA 3 Annuqayah ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi sekolah lain di Kabupaten Sumenep untuk mereplikasi program pengembangan sekolah ramah lingkungan yang ada di SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep.

Penelitian ini difokuskan di salah satu lembaga pendidikan di Annuqayah, yaitu SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep. Lokasi SMA 3 Annuqayah sendiri berada di daerah PP. Annuqayah Daerah Sabajarin. Penelitian ini secara khusus dilakukan di satuan lembaga pendidikan

Pondok Pesantren Annuqayah, yaitu SMA 3. Secara struktur kelembagaan, SMA 3 Annuqayah berada di naungan Direktorat Madaris III Annuqayah sebagai salah satu lembaga semi-otonom di lingkungan pondok pesantren Annuqayah. SMA3 Annuqayah sendiri berdiri pada tahun 2001 dan sampai sekarang tetap eksis lembaga pendidikan yang fokus pada pendidikan lingkungan.

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pesantren ini dikenal sangat konsen pada isu lingkungan, yaitu sejak pertama kali memperoleh Kalpataru dari Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Prof. Dr. Ir. Emil Salim pada tahun 1981. Selain itu, SM 3 Annuqayah dianggap sebagai satu-satunya lembaga di Madura yang mendeklarasikan sebagai sekolah berwawasan lingkungan.

Penelitian ini akan dilaksanakan sesuai dengan deadline waktu yang ditentukan Tim Pelaksana Swakelola Penelitian Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep. Adapun rencana kegiatan penelitian lapangan tentang "Model Pengembangan Sekolah Ramah Lingkungan: (Studi atas Penerapan Sekolah Nol Sampah Plastik di SMA 3 Annuqayah Guluk- Guluk Sumenep)" sebagai berikut:

No	Minggu	Jenis Kegiatan
1	Minggu I-II Bulan September	Pelaksanaan persiapan penelitian: a. Perizinan dengan lembaga pesantren b. Pertemuan awal tim penelitian c. Penetapan Jadwal Penelitian d. Persiapan penentuan rancangan penelitian e. Persiapan penyusunan instrumen Penelitian
		Pelaksanaan pra penelitian a. Penetapan survei lapangan pra penelitian b. Pertemuan anggota pra penelitian c. penyusunan laporan pra penelitian



2	Minggu II Bulan September	Presentasi Proposal Penelitian	
3	Minggu III-IV Bulan September	Pelaksanaan obeservasi, interview dan pengum- pulan dokumentasi	
4	Minggu I-III Oktober	Analisa data	
5	Minggu IV Oktober - Minggu II Nopember 2021	Penulisan data dalam bentuk laporan peneli- tian sebagai rekomenda- si dari model pengem- bangan sekolah ramah lingkungan	

Data merupakan sumber penting yang dapat menjadi bahan dalam mengumpulkan informasi dan keterangan terkait dengan suatu hal yang dianggap mendukung terhadap terlaksananya sebuah penelitian. Data dapat juga didefinisikan sebagai sebuah informasi maupun fakta yang digambarkan dengan angka, simbol, kode, dan lain sebagainya. Data diambil dan dikumpulkan melalui instrumen pengumpulan data, berupa observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Sumber data secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu data prime dan data sekunder. Pertama, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen lain yang dirancang sebelumnya.¹⁵ Dengan kata lain, bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan kepada orang-orang yang dianggap sebagai inform atau sumber utama dalam mengumpulkan data.16

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip lainnya. Data ini berasal dari laporan-laporan atau keterangan yang berkaitan dengan subjek penelitian, semisal dari dokumen, arsip,

buku, jurnal, dan data lain yang masih relevan dengan program pengembangan sekolah ramah lingkungan di kabupaten Sumenep. Dengan kata lain, bahwa data sekunder ini adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari orang-orang yang sudah pernah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya.¹⁷

Penelitian tentang Model Pengembangan Sekolah Ramah Lingkungan di Kabupaten Sumenep ini mengambil sumber data/ informan penelitian dari pihak- pihak terkait yang secara langsung memiliki hubungan dengan adanya program ini, diantaranya adalah:

- 1. Direktur Madaris 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, K M Faizi
- 2. Kepala SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Muhammad Khatibul Umam
- 3. Pencetus Program Sekolah Ramah Lingkungan/Mantan Kepala SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, K M Mushthafa
- 4. Wakil Kepala bidang Kesiswaan SMA 3 Annuqayah, Mus'idah Amin
- 5. Pengurus Pemulung Sampah Gaul (PSG) SMA 3 Annuqayah
- 6. Guru
- 7. Siswa

Melalui beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan prosedur atau teknik pengumpulan data berkaitan dengan Model Pengembangan Sekolah Ramah Lingkungan di Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

Pertama, metode observasi. Dalam pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan observasi sebagai metode untuk mengamati sebuah peristiwa atau kondisi subjek atau tempat yang menjadi lokasi penelitian. Sebagai instrumen pengumpulan data, observasi berupaya segenap alat indra untuk mengatasi objek yang sedang diteliti. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak dalam

^{15.} Victorianis Aries Siswono, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 58.

^{16.} Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 19-20.

^{17.} Ibid., hlm. 20.

^{18.} Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 128.



objek penelitian¹⁹ atau terhadap gejala atau fenomena yang menjadi objek penelitian.²⁰

Metode observasi ini memungkinkan peneliti untuk lebih mencermati tentang implementasi program sekolah ramah lingkungan di SMA 3 Annuqayah, misalnya meliputi perilaku siswa, guru, penjual makanan dalam memperlakukan sampah, proses penyetoran sampah melalui bank sampah, penegakan disiplin terhadap yang melanggar, proses pemilahan sampah plastik, dan juga daur ulang sampah plastik, serta kegiatan-kegiatan sekolah yang menerapkan program nol sampah plastic. Observasi juga untuk mengamati fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sekolah ramah lingkungan di SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep.

Kedua, wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara langsung di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi atau keterangan yang diberikan.²¹ Wawacana digunakan untuk memastikan dan mengecek informasi yang diperoleh melalui hubungan tatap muka yang berbentuk tanya jawab kepada seseorang atau komunitas yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti untuk kelengkapan data di lapangan. Maka wawancara dilakukan untuk menggali data dari informan secara lebih mendalam (indept interview), 22 misalnya kepada kepala sekolah, penggagas sekolah ramah lingkungan, waka kesiswaan, Pembina PSG, pengurus PSG, siswa, guru, dan juga pedagang.

Ketiga, metode dokumentasi. Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui data yang tersedia, biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto. Dengan kata lain, dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karyakarya monumental dari seseorang. Data ini bersifat tak terbatas pada ruang dan waktu.²³ Metode ini berasal dari buku-buku, jurnal, dokumen tertulis, gambar, maupun bentuk dokumentasi lain yang bisa memperkuat data di lapangan berkaitan dengan nilai- nilai kearifan dalam kehidupan masyarakat.

Studi dokumen merupaka metode pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara agar penelitian yang dilakukan berjalan optimal dan sesuai dengan harapan. Dengan menggunakan metode dokumentasi, peneliti mengharapkan banyak tambahan data berkaitan langsung dengan pengembangan sekolah ramah lingkungan di Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh sejarah pribadi, atau bentuk lain dari metode observasi,²⁴ sehingga memungkinkan analisis data yang dilakukan lebih mudah dan berjalan lancar sesuai harapan.

Menurut Spradley, teknik analasis data dibagi menjadi empat tahap. Tahapan tersebut adalah analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural.

1. Analisis Domaian (Domaian Analysis)

Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. Pada tahap ini peneliti belum perlu membaca dan memahami data secara rinci dan detail karena targetnya hanya untuk memperoleh domain atau ranah. Hasil analisis ini masih berupa

^{19.} V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 11.

^{20.} Arsyad Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2008), hlm. 84-85.

^{21.} Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 28.

^{22.} Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 144.

^{23.} Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

^{24.} Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 82.



pengetahuan tingkat "permukaan" tentang berbagai ranah konseptual.Dari hasil pembacaan itu diperoleh hal-hal penting berupa domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.

2. Analisis Taksonomi

Pada tahap analisis taksonomi, peneliti melakukan analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, domain yang telah ditetapkan dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini.

3. Analisis Komponensial

Pada tahap ini peneliti mencoba mengkontraskan antar unsur dalam ranah yang diperoleh. Unsur-unsur yang kontras dipilah-pilah dan selanjutnya dibuat kategorisasi yang relevan. Kedalaman pemahaman tercermin dalam kemampuan untuk mengelompokkan dan merinci anggota sesuatu ranah, juga memahami karakteristik tertentu yang berasosiasi. Dengan mengetahui warga suatu ranah, memahami kesamaan dan hubungan internal, dan perbedaan antar warga dari suatu ranah, dapat diperoleh pengertian menyeluruh dan mendalam serta rinci mengenai pokok permasalahan.

4. Analisis Tema Kultural

Analisis tema kultural adalah pada dasarnya adalah analisis untuk mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Analisis ini mencoba mengumpulkan sekian banyak tema, fokus budaya, nilai, dan simbol-simbol budaya yang ada dalam setiap domain. Selain itu, analisis ini berusaha menemukan hubungan-hubungan yang terdapat pada domain yang dianalisis, sehingga akan membentuk satu kesatuan yang holistik, yang akhirnya menampakkan tema yang dominan dan mana yang kurang dominan. Pada tahap ini yang dilakukan oleh peneliti adalah: (1) membaca secara cermat

keseluruhan catatan penting, (2) memberikan kode pada topik-topik penting, (3) menyusun tipologi, (4) membaca pustaka yang terkait dengan masalah dan konteks penelitian. Berdasarkan seluruh analisis, peneliti melakukan rekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi dan argumentasi.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Profil SMA 3 Annuqayah sebagai Sekolah Ramah Lingkungan

Di lingkungan Pondok Pesantren Annuqayah, salah satu lembaga pendidikan yang aktif dan berperan dalam mendorong isu lingkungan adalah SMA 3 Annuqayah. Sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah pesantren Annuqayah, SMA 3 mulai fokus pada pengembangan sekolah berwawasan lingkungan hidup melalui kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa dilakukan oleh siswa sebagai pihak yang terlibat langsung dalam menciptakan kepekaan dan kepedulian pada lingkungan di sekitar sekolah, pesantren, dan masyarakat secara umum.

Sebagai bagian lembaga pendidikan semi-otonom di lingkungan pondok pesantren Annuqayah, SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk sendiri berdiri sejak tahun 2001 yang berada di lembaga semi-otomom di Pondok pesantren Annuqayah. Di lingkungan Madaris 3 Annuqayah terdapat tiga jenjang pendidikan,yaitu MI 3, MTs 3, dan SMA 3 Annuqayah. Masing-masing saling terintegrasi satu sama lain, di mana MTs 3 Annuqayah ada di bagian paling depan, kemudian ada MI 3 Annuqayah dan SM 3 Annuqayah yang berada di bagia paling belakang dari madaris 3 Annuqayah.

Sejak berdiri pada tahun 2001, SMA 3 Annuqayah telah melakukan pembenahan di berbagai sektor, mulai pembenahan secara kelembagaan, peningkatan prestasi siswa, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, maupun peningkatan profesionalisme guru di lingkungan SMA 3 Annuqayah. Berdasarkan hasil dokumentasi yang terdapat di sekolah, pada



tahun 2010, SMA 3 Annuqayah memperoleh akreditasi B sebagai pencapaian dalam bidang pengembangan mutu lembaga. Sebelumnya, pada tahun 2007, SMA 3 Annugayah sudah membuka beberapa jurusan, diantara jurusan Ilmu Pengetahuan Alama (IPA) dan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).²⁵

Sejak berdiri pada tahun 2001, SMA 3 Annuqayah telah menetapkan visi sekolah sebagai bagian dari usaha untuk mengembangkan lembaga pendidikan secara profesional sesuai dengan arah dan tujuan dari berdirinya sekolah tersebut. Meskipun tergolong sebagai lembaga pendidikan baru, SMA 3 Annuqayah telah mampu mengembangkan diri, baik dari sisi pengembangan mutu pendidikan maupun dalam aspek pengembangan kegiatan-kegiatan yang mendorong prestasi anak didik. Hal ini sesuai dengan visis SMA 3 Annuqayah, yaitu Menjadi sekolah vang berhasil mengembangkan kualitas manusia seutuhnya, berakhlakul karimah, dan mampu berkompetisi di era global.

Dari visi tersebut, kemudian diturunkan menjadi misi utama dari berdirinya SMA 3 Annuqayah sebagai bagian dari lembaga pendidikan di bawah naungan pesantren Annugayah Guluk-Guluk-Guluk Sumenep. Adapun misi SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan lembaga pendidikan yang mamacu prestasi peserta didik untuk menguasai ilmu dan teknologi dengan dilandasi iman dan takwa.
- 2. Mengembangkan dan melaksanakan pelatihan proses pendidikan dan melalui pembelajaran berkualitas yang mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada peserta didik sesuai dnegan bakat dan kemampuannya.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan di Annuqayah, SMA 3 Annuqayah memiliki banyak kegiatan yang mendukung pengembangan potensi dan

25. Dokumentasi profil SMA 3 Annuqayah

keterampilan siswa. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan ekstrakulikuler yang mendapatkan perhatian dari sekolah secara langsung. Ada beberap bentuk kegiatan yang menjadi rutinitas atau kegiatan penting yang difasilitasi sekolah sebagai pemegang kebijakan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah seminar managemen sekolah, workshop peningkatan profesionsime guru, dan kerjasama kelembagaan dengan sekolah lain. Kedua, kegiatan yang berkaitan dengan kulikuler dan aktivitas pembelajaran. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah program tahfidz Juz 'Amma, strategi pembelajaran kreatif, dan perpustakaan masuk kelas, olimpiade sains, dan kegiatan- kegiatan lainnya. Ketiga, kegiatan vang berkaitan dengan kesiswaan. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan Pemulung Sampah Gaul (PSG). Kegiatan dari komunitas PSG sebagian besar merupakan sosialisasi kesadaran cinta lingkungan dan juga berupa kaderisasi bagi siswa di sekolah. Diantara bentuk kegiatan yang digerakkan oleh pihak SMA 3 melalui kegiatan ekstrakulikuler adalah melakukan penataan pada artistik sekolah, penanaman pohon-pohon rindang, tanaman hias di sekitar sekolah, pemilahan sampah kering, basah, dan plastik.

2. Profil Komunitas Pemulung Sampah Gaul sebagai Implementasi Program Sekolah Ramah Lingkungan

Secara historis, pendirian sebuah komunitas merupakan aspek penting bagi keberlanjutan program di lembaga pendidikan mana pun, termasuk di lembaga pendidikan sekolah. Komunitas menjadi wadah dan tempat belajar bagi siswa dalam menempa diri menjadi pribadi yang tidak hanya mementingkan visi sendiri, melainkan juga bisa menjadi pribadi yang mampu bekerjasama dan saling memban-



tu dalam merealisasikan cita-cita bersama. Kehadiran komunitas di lingkungan pendidikan bukan berarti akan menghambat kegiatan belajar mengajar siswa, justru keberadaannya bisa menjadi wadah belajar bagi anak didik untuk belajar berorganisasi dan bekerjasama dalam merealisasikan visi misi sekolah ke arah yang lebih baik di masa depan.

Terbentuk komunitas ini awalnya memang berasal dari siswa sendiri dan kemudian difasilitasi oleh pihak sekolah untuk dibentuk pengurus dan diberi nama Pemulung Sampah Gaul. ²⁶ Komunitas PSG berdiri sejak tahun 2008, yang merupakan siswa sekolah di lingkungan SMA 3 Annuqayah. Komunitas ini memiliki banyak anggota yang tertarik dengan isu lingkungan dan melaksanakan aktivitas sesuai dengan program peduli lingkungan.

Sejak berdiri, komunitas Pemulung Sampah melakukan banyak kegiatan peduli lingkungan. Salah satu kegiatan pertama yang dilakukan adalah memulung sampah secara bersama-sama di lingkungan TPA Annuqayah yang dilaksanakan pada Hari Bumi. Kemudian mendirikan bank sampah sebagai bentuk kepedulian seluruh siswa untuk mengumpulkan setiap sampah sebagai upaya membentuk kesadaran lingkungan bagi siswa. Komunitas Pemulung Sampah Gaul (PSG) yang berdiri sejak tahun 2008, terus melakukan kegiatan secara konsisten dan masih istiqamah dalam memberikan kontribusi terhadap sekian persoalan yang berkaitan dengan isu lingkungan di masyarakat luas, bukan hanya di lingkungan pesantren Annuqayah.

Harus diakui bahwa pada awalnya sebelum PSG ini dirintis, terdapat komunitas yang sudah terbentuk berkaitan dengan pelestarian dan gerakan peduli lingkungan. Komunitas tersebut dinamakan "Duta Lingkungan". Komunitas ini didirikan pertama kali oleh K. Muhammad Affan (Dewan Masyaikh Pondok Pesantren

26. Wawancara dengan Kiai Mushthafa pada 29 Oktober 2021.

Annuqayah Daerah Sawajarin) pada tahun 2006. Duta lingkungan di sini merupakan wadah bagi pesantren dalam membicarakan dan melaksanakan kegiatan peduli lingkungan yang cakupnya antar daerah di lingkungan pesantren Annuqayah. Beberapa diantara elemen pemerhati lingkungan di masing-masing daerah pesantren kemudian dikumpulkan dan secara rutin mengadakan kegiatan- kegiatan peduli lingkungan secara bersama-sama.

Sementara, komunitas Pemulung Sampah Gaul sendiri baru berdiri pada tahun 2008, yang cakupannya adalah di lingkungan SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep. Dengan berdirinya PSG sebagai komunitas pecinta lingkungan, maka semakin banyak kegiatan-kegiatan lingkungan yang dilaksanakan bersama siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Eksistensinya secara rutin istigamah mengadakan kegiatan dan advokasi-sharing capacity—dengan beberapa instansi lain yang juga memiliki orientasi pada ekologi. Pada perkembangan selanjutnya, PSG ini mulai menata organisasinya dengan lebih sistematis seiring perkembangan teknologi yang semakin tidak terkendali. Beberapa pembina dan pendamping PSG ini mengklasifikasi tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan mata rantai persoalan di lingkungan SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep.

Tim Sampah Plastik. Pertama. Tim ini fokus pada bagaimana mengelola sampah—utamanya sampah yang berbahan plastik sekali pakai—untuk kemudian didaur ulang menjadi bahan aksesoris yang apabila dipakai kembali layak dan menjadi menarik. Hal ini dilakukan tentu untuk meminimalisir sampah yang semakin banyak, khususnya di lingkungan Annuqayah. Kegiatan Tim sampah plastik adalah mengadakan pelatihan menjahit (untuk menjahiit tas, tempat pensil, dompet, dll dari bahan plastik), memproduksi, sosialisasi ke setiap kelas dalam bentuk pemetakan tempat sampah untuk sampah



yang berbeda, kemudian seminar.

Kedua, Tim Pupuk Organik. Tim ini lebih fokus pada mendaur ulang sampahsampah organik supaya bisa bermanfaat untuk bidang pertanian, yang nantinya akan didstribusikan dalam skop kecil di Annuqayah. Semisal, mengolah jerami yang ada di masyarakat sekitar lingkungan sekolah yang biasanya tiap selesai panen hanya dibakar menjadi pupuk yang bisa digunakan masyarakat.

Ketiga, Tim Pangan Lokal. Tim ini berorientasi pada bagaimana ketahanan pangan terus dikembangkaan agar tetap bersaing dengan produk makanan dari luar. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir ketergantungan konsumen terhadap perusahan-perusahan besar yang menyediakan banyak pangan berkualitas. Maka, tim ini mengadakan pameran pangan lokal agar siswa bisa belajar dan mempertahankan kearifan lokal masyarakat.

Meskipun dibagi dalam tiga tim komunitas, namun PSG tetap menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tiga tim sebagaimana yang disebutkan di atas menurut salah satu alumni dan mantan Ketua PSG Tahun 2012, Annisa Busthami, memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sebagai contoh, ketahanan pangan, yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil pertanian dan meminimalisir kadar kimia yang terkadung dalam tanaman maka pupuk disuplay dari tim pupuk organik. Hal ini tentu menjadi kesempatan emas untuk terus digalakkan.

3. Analisis Landasan Filosofis Pengem-Sekolah bangan Berwawasan Lingkungan di SMA 3 Annuqayah **Guluk-Guluk Sumenep**

Analisis tentang pengembangan sekolah berwawasan lingkungan menunjukkan bahwa SMA 3 Annuqayah sebagai bagian dari satuan pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Annugayah memiliki landasan filosofis yang mendasari urgensitas pendidikan lingkungan bagi siswa. Ini karena, sangat jarang lembaga pendidikan di Madura, baik berbasis pesantren maupun non-pesantren yang menerapkan program pendidikan lingkungan sebagai kurikulum yang diajarkan kepada siswa. Di bawah ini adalah hasil analisis tentang dasar filosofi pengembangan sekolah berwawasan lingkungan yang diterapkan di SMA 3 Annugayah Guluk-Guluk Sumenep:

a. Mengikuti Visi Annuqayah di Bidang Lingkungan

Prinsip landasan dan utama pengembangan program sekolah berwawasan lingkungan di SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep tidaklah berangkat dari pemikiran yang kosong, melainkan ada visi yang hendak dicapai dalam rangka meneruskan program peduli lingkungan vang telah dilaksanakan oleh Biro Pengabdian Masyarakat (BPM) Pondok Pesantren Annuqayah. Salah satu diantara visi Annuqayah dalam bidang lingkungan adalah konservasi alam dan lingkungan sebagai bagian tugas keagamaan yang bernilai ibadah bagi Allah.²⁷ Sebagai salah satu pesantren tertua di Madura, Annugavah memiliki komitmen tinggi dalam pelestarian lingkungan melalui konservasi dan penyelamatan lingkungan dari berbagai ancaman yang menyertainya.

Melalui visi Annuqayah di bidang lingkungan dan konservasi alam ini, maka SMA 3 Annugayah memiliki inisiatif untuk melakukan gerakan peduli lingkungan dari hal-hal kecil yang bisa menggerakan siswa agar memiliki keterampilan dan kapasitas dalam bidang lingkungan hidup. Dari visi lingkungan Annuqayah, SMA 3 Annuqayah memiliki komitmen untuk melanjutkan program lingkungan yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya di lingkungan pesantren Annuqayah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kiai Abdul Basith, sebagaimana yang diceritakan Kiai Musthafaha bahwa ketika Annuqayah menerima penghar-27. Wawancara dengan Kiai Mushthafa, salah satu kiai Muda yang bergiat dalam eco-green pada 28 Oktober 2021.



gaan Kalpataru pernah ditanya oleh Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim. Salah satu poin yang ditanyakan adalah mengapa Annuqayah tertarik dan terdorong aktif dalam kegiatan lingkungan hidup? Maka Kiai Abdul Basith memberikan jawaban yang bersifat metafor bahwa sebagai umat Islam kalau mau salat harus berwudu' dan kalau berwudu' harus menggunakan air.²⁸

Landasan filosofis pengembangan sekolah ramah lingkungan yang diterapkan di SMA 3 Annuqayah adalah meneruskan visi Annuqayah di bidang lingkungan. Lalu kenapa Annuqayah masuk pada tema lingkungan sebagai salah satu program pesantren? Salah satunya adalah berusaha memperluas makna agama pada masalah sosial dan kemasyarakatan. Dan kiai Annuqayah dulu berbicara lingkungan karena dilandasi oleh agama yang menuntut semua umat manusia untuk tergerak dalam menjaga lingkungan agar terhindar dari pencemaran dan lain sebagainya. Kiai Annugayah mempunyai pandangan bahwa agama bukan hanya berbicara tentang masalah ritual dan eskatalogis, melainkan harus berkontribusi secara kongkrit pada permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk mencapai itu semua, pesantren tidak cukup mengajarkan santri ilmu agama dan tidak semua santri di pesantren harus didorong menjadi kiai. Yang terpenting dari tujuan pendidikan berbasis agama di pesantren adalah bahwa setelah santri lulus dapat berkontribusi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui nilai-nilai agama.

b. Mengembangkan Pendidikan Antroposontrisme

Visi pendidikan apa pun yang diterapkan bukan hanya fokus pada teosentrisme, melainkan visi yang dikembangkan harus bersifat antroposentrisme, bahkan eco-antroposentrisme. Kiai M. Mushthafa memaparkan bahwa selama ini pendidikan yang diajarkan di sekolah han-

28. Wawancara dengan Kiai Mushthafa pada 29 Oktober 2021.

ya sekadar transfer ilmu, dari guru ke murid, tanpa adanya upaya melakukan feedback secara berkelanjutan terkait dengan penerapan pendidikan yang membumi dan dirasakan secara mendalam siswa sebagai subjek pendidikan. Rasa empati dan sikap altruistik bukan hanya pada sesama manusia, lebih dari itu, dapat diwujudkan dengan sikap peduli pada lingkungan, minimal tidak menyebarkan pencemaran atau merusak lingkungan untuk kepentingan pribadi, atau melakukan gerakan yang lebih nyata bagi terciptanya harmoni dan keindahan lingkungan.

Landasan filosofis dari pengembangan sekolah berwawasan lingkungan di SMA 3 Annuqayah tentu bukan sekadar bersifat tekstual atau diskursus yang tidak mewujud pada tindakan riil berkaitan dengan internalisasi pendidikan lingkungan bagi segenap masyarakat, khususnya santri di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep. Ini karena, iniasi munculnya gerakan peduli lingkungan dan konservasi alam adalah berawal dari visi lingkungan pesantren melalui Biro Pengabdian Masyarakat (BPM) untuk mengajak masyarakat sekitar agar lebih peka pada persoalan lingkungan yang sekarang ini telah menjadi isu global dan menjadi perhatian bagi negara-negara di berbelahan dunia.

Pengembangan sekolah berwawasan lingkungan di SMA 3 Annuqayah tidak lepas dari inspirasi kegiatan yang dilaksanakan oleh British Council Indonesia yang diberi nama Scholl Climate Challenge (SCC) Competition. Menurut Kiai Mushtafa yang saat itu bertindak sebagai pendamping, kegiatan ini merupakan bagian dari proyek peduli lingkungan yang bertujuan untuk mendorong siswa dan guru dalam memanfaatkan komunitas yang ada agar lebih giat dalam mengkampanyekan pelestarian lingkungan. Kegiatan ternyata menjadi pelecut semangat bagi siswa di SMA 3 Annuqayah untuk terlibat aktif dalam kegiatan peduli lingkun-



gan, terutama setelah berkembangnya komunitas Peduli Lingkungan, yang diberi nama Pemulung Sampah Gaul (PSG).

Pengembangan sekolah lingkungan di SMA 3 Annuqayah tiada lain bertujuan untuk membumikan proses pembelajaran dalam aktivitas sehari-sehari secara sederhana. Siswa bukan hanya difokuskan pada materi pelajaran yang setiap hari diterima, melainkan juga bisa belajar bagaimana menjaga lingkungan sesuai dengan kapasitas dari masing-masing siswa. Menurut Kiai Musthafa, penguatan pendidikan lingkungan merupakan aspek penting yang dapat mendorong kegiatan sekolah secara lebih kontekstual, membumi, dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi siswa agar apa yang diajarkan di sekolah benar-benar dipraktikkan langsung.

Selama ini, iklim pendidikan formal terkesan kaku dan tekstual serta jarang sekali dikontekstualisasikan dengan kehidupan riil anak didik dengan segenap persoalan dan tantangan yang dihadapi di masa depan. Kiai Mushthafa secara tegas menyampaikan bahwa pengembangan sekolah berwawasan lingkungan di SMA 3 Annuqayah merupakan wujud nyata dari implementasi kegiatan pendidikan lingkungan yang dianggap lebih bermanfaat dan bernilai bagi pembentukan karakter generasi muda secara lebih luas, khususnya pembentukan karakter santri agar memiliki sikap peduli dan empati pada kondisi lingkungan sekitar serta dapat merawatnya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

c. Mengembangkan Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan

Penerapan sekolah berwawasan lingkungan ini dimaksudkan untuk mengembangkan pendidikan karakter dengan cara membentuk karakter pribadi yang bertanggung jawab, bersyukur atas nikmat alam, dan peduli dan cinta dengan masa depan kehidupan bersama tanpa

merasa ada jarak dengan lingkungan sebagai tempat tinggal manusia di dunia.

Landasan filosofis dari penerapan sekolah berwawasan lingkungan di sini, sebagaimana yang dipaparkan Kiai Mushthafa bahwa siswa membutuhkan pembinaan secara mental dalam menerima tanggung jawab dalam proses belajar di sekolah.²⁹ Pribadi yang bertanggung jawab di sini adalah bahwa siswa dibimbing bukan hanya pada aspek individu semata, melainkan juga dituntut bisa belajar bertanggung jawab pada orang lain atau secara sosial ketika berinteraksi dengan lingkungan lain dalam aktivitas sehari- harinya. Melalui program sekolah berwawasan lingkungan yang diterapkan pada kegiatan ekstrakulikuler, siswa dapat belajar menerima tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah dilakukan bersama dengan komunitasnya sendiri atau ketika menjalin kerjasama dengan komunitas lain.

Selain daripada itu, siswa diajak untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang sangat melimpah dengan lingkungan yang sangat kondusif seperti ini. Bersyukur kepada Allah bukan dalam bentuk ucapan, melainkan harus disertai dengan perbuatan untuk menunjukkan rasa syukur yang mendalam. Salah satu bentuk rasa syukur, sebagaimana yang disampaikan K. M. Mushthafa adalah minimal membuang sampah pada tempatnya, karena pengabaian terhadap larangan membuang sampah secara sembarangan adalah bentuk pengingkaran dan bertentangan dengan keindahan.³⁰ Jika membuang sampah saja dilakukan secara sembarangan, jangan harap kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan akan muncul dengan sendirinva.

Salah satu bentuk pendidikan karakter yang diharapkan dari program pengembangan sekolah berwawasan

^{29.} Wawancara dengan Kiai Mushthafa pada 3 November 2021 di Guluk-Guluk Sumenep.

^{30.} Wawancara dengan Kiai Mushthafa pada 4 November 2021 di Kediamannya.



lingkungan adalah bagaimana siswa memiliki rasa peduli dan cinta pada lingkungan. Landasan filosofinya sebenarnya sederhana dan tidak membenahi siswa dengan tanggung jawab yang berat dengan penerapan sekolah berwawasan lingkungan ini. Kiai Mushthafa memiliki pandangan bahwa siswa harus memiliki rasa cinta pada lingkungan di tengah perkembangan dunia digital yang tidak terkendali. Penanaman cinta lingkungan di sini merupakan salah satu faktor penting pengembangan sekolah berwawasan lingkungan, karena siswa diajak bukan untuk terbebani dengan tugas-tugas berat, melainkan diarahkan agar memiliki karakter peduli dan rasa cinta bukan hanya kepada sesama, melainkan juga kepada lingkungan. Penanaman karakter cinta lingkungan merupakan bagian dari karakter emas yang harus diimplementasikan dalam konteks sehari-hari, karena program sekolah ramah lingkungan membutuhkan generasi muda yang mampu mengintegrasikan harmoni dan cinta pada lingkungan.

Secara filosofis, karakter peduli dan cinta mencerminkan sikap memerhatikan dan melestarikan lingkungan dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing siswa. Pendidikan cinta lingkungan merupakan bagian dari proses yang memberdayakan dan mengayomi siswa agar memiliki rasa empati dan peduli pada alam sekitar dengan tidak melakukan tindakan destruktif yang menimbulkan kemarahan semesta. Semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menanamkan rasa cinta pada lingkungan, karena berpengaruh pada perilaku dan sikapnya dalam menyikapi persoalan lingkungan. Maka, setiap siswa perlu didorong untuk bersikap persuasif dalam menyikapi setiap persoalan dengan mengedepankan rasa cinta.³¹

d. Menerapkan Etika Ramah Lingkungan

Penerapan sekolah ramah lingkungan di lingkungan SMA 3 Annuqayah 31. Djohar, *Pendidikan Strategik: Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 106.

dilandasi oleh semangat untuk menanamkan etika bukan hanya kepada sesama manusia, melainkan juga agar siswa memiliki sikap yang ramah terhadap lingkungan. Sikap ramah terhadap lingkungan adalah sesuatu yang sulit dipraktikkan, karena siswa belum memiliki pemahaman yang utuh tentang lingkungan. Melalui program sekolah berwawasan lingkungan ini, siswa mulai diberikan bekal pengetahuan tentang bagaimana menjaga lingkungan dengan komunitas peduli lingkungan yang sudah dibentuk di SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk.

Nilai filosofis dari pendidikan lingkungan di Annuqayah adalah mengacu pada etika dan moral sebagai nilai penting yang terinternalisasi pada siswa dalam setiap aktivitas di sekolah maupu di rumah sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Nilai etik dan moral di sini menjadi penekanan pada pengembangan sekolah berwawasan lingkungan agar siswa mampu menentukan tindakan yang baik atau tidak baik dalam segala aktivitasnya. Jika nilai filosofis pendidikan lingkungan menggunakan dimensi etika normatif- praktis, maka nilai-nilai penting yang perlu diinternalisasi secara integratif adalah kejujuran, keikhlasan, tanggung jawab, dan sikap saling menghormati pada setiap mahluk di dunia ini. Nilai-nilai tersebut menjadi penting untuk diterapkan karena siswa seringkali mengalami masa labil dan kurang peduli dalam memahami tugasnya sebagai pembelajar.

Nilai filosofis pendidikan lingkungan di SMA 3 Annuqayah pada gilirannya menjadi bagian dari kurikulum untuk dipraktikkan sebagai bahan pelajaran dalam memberikan warna baru bagi siswa agar selalu mengedepankan nilai-nilai kebaikan, interaksi positif, dan etika pada setiap dimensi kehidupan, termasuk pada lingkungan sendiri. Ini karena, pendidikan karakter peduli lingkungan sebagaimana yang disampaikan Kiai Mushthafa tidak hanya diterima dari transfer ilmu secara an-sich, melainkan siswa dapat belajar memahami kondisi lingkungannya den-



gan merawat segala sesuatu yang ada sebagai bagian dari anugerah dan kekayaan yang melimpah dari Tuhan.³² Pada intinya, filosofi pendidikan yang diterapkan pada sekolah berwawasan lingkungan di SMA 3 Annuqayah adalah bagaimana nilai-nilai yang diajarkan dapat berpengaruh pada perilakunya dan memiliki sikap tanggung jawab bukan hanya pada dirinya sendiri atau sesama, melainkan juga kepada lingkungan sebagai bagian dari alam semesta.

Nilai-nilai filosofis yang terpatri dalam pendidikan lingkungan memang bertujuan untuk membentuk perilaku moral³³ dan juga etika siswa dalam memahami kondisi lingkungan sebagai tempat tinggal yang nyaman untuk menjalankan segala aktivitas. Untuk menanamkan pendidikan karakter peduli lingkungan bagi siswa tidak semudah sebagaimana yang dibayangkan, karena harus dimulai sejak usia dini, mulai jenjang pra-sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Penanaman karakter peduli lingkungan sejak usia dini, memang harus dimulai dan tidak boleh diabaikan oleh peran orangtua, karena ia merupakan faktor penting yang dapat mendorong siswa dalam memahami situasi dan kondisi lingkungan secara keseluruhan.

Landasan filosofis sekolah ramah lingkungan yang diterapkan di SMA 3 Annuqayah bukan fokus pada transfer pengetahuan semata, melainkan lebih penting daripada itu adalah penanaman etika, estetika, dan budi pekerti yang menyentuh aspek terdalam bagi siswa. Artinya, siswa diberikan bekal dalam bentuk penanaman moral dan etika yang dapat dipraktikkan langsung dalam menjalani kehidupannya, baik di rumah atau di sekolah. Hal ini sesuai dengan pandangan Mochtar Buchori bahwa penanaman pendidikan karakter bukan hanya fokus pada aspek kognitif dan psikomotorik, melainkan juga masuk pada aspek afektif yang sangat penting bagi pembentukan karakter siswa di masa depan.³⁴

- 4. Analisis Strategi SMA 3 Annuqayah dalam Mengembangkan Sekolah Berwawasan Lingkungan Berbasis Pesantren
- 1. Visi Lingkungan Annuqayah Diintegrasikan dengan Visi Sekolah

Sebelum mematangkan konsep sekolah berwawasan lingkungan, SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep terlebih dahulu mengintegrasikan visi Annuqayah di bidang lingkungan dengan visi dan misi sekolah yang mendasari pengembangan program sekolah ramah lingkungan. Ini karena, visi sekolah tentang pendidikan lingkungan tidak lepas dari visi Annuqayah yang dikenal sejak lama sebagai salah satu pesantren di Madura yang memiliki komitmen tinggi dalam program peduli lingkungan dan konservasi alam. Dengan kata lain, SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep dengan segenap program lingkungan yang telah dirancang, menghubungkan visi sekolah dengan visi Annuqayah tentang pendidikan lingkungan.

Integrasi visi lingkungan Annuqayah dengan visi misi sekolah sangat penting untuk dilakukan, mengingat inspirasi kegiatan peduli lingkungan di SMA 3 Annuqayah tidak lepas dari kontribusi Annuqayah dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui Biro Pengabdian Masyarakat (BPM) yang banyak bergerak dalam bidang penyelamatan lingkungan dan konservasi alam. Jika dilihat dari salah satu aspek dari fokus kegiatan yang ada di SMA 3 Annuqayah, maka visi lingkungan Annuqayah sudah sejalan dan sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan pesantren sejak memperoleh penghargaan Kalpataru dalam bidang penyelamatan lingkungan.

Sampai saat ini, gerakan peduli lingkungan di sekolah tetap berjalan sebagaimana mestinya, bahkan bisa dikatakan sebagai berkembang pesat, karena 34. Mochtar Buchori, Pendidikan Budi Pekerti dan Masalah Regenerasi Bangsa, (Jakarta: Forum Pembaca Kompas, 2007), 123.

^{32.} Wawancara dengan Kiai M. Musthafa di Guluk-Guluk pada 5

^{33.} Zuchdi, Humanisasi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 39.



komunitas pecinta lingkungan di sini, semakin dikenal oleh masyarakat luas, terutama di kalangan komunitas pecinta lingkungan, dinas pendidikan, maupun dinas lingkungan hidup. Sebagai kepala sekolah, saya akan terus mengembangkan sekolah berwawasan lingkungan sesuai dengan visi Annuqayah di bidang lingkungan dan memastikan siswa tetap melanjutkan program peduli lingkungan baik dalam hal pengelolaan sampah maupun kegiatan-kegiatan peduli lingkungan yang dilaksanakan berbagai instansi.³⁵

b. Mengembangkan Kegiatan Ektrakulikuler melalui Pemulung Sampah Gaul

Pada awalnya, gagasan tentang konsep sekolah berwawasan lingkungan belum menjadi visi sekolah sebagai salah satu misi yang harus dicapai dan direalisasikan oleh lembaga SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep. Akan tetapi, dengan semakin aktifnya komunitas peduli lingkungan di SMA 3 Annuqayah, maka kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler semakin digerakkan dan didukung penuh pihak sekolah sebagai pemegang kebijakan dalam mencapai kemajuan sekolah.

Pengembangan sekolah berwawasan lingkungan dimulai dengan kegiatan ekstrakulikuler di lingkungan sekolah sebagai penggerak utama dalam mendorong kecintaan siswa pada lingkungan. Kegiatan ekstrakulikuler dilakukan untuk memastikan standar wawasan lingkungan di kalangan siswa secara keilmuan dan secara praktik dalam melaksanakan semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemulung Sampah Gaul. Kegiatan ini dimotori oleh Pemulung Sampah Gaul (PSG) yang dibentuk sejak tahun 2008, dan kemudian memiliki banyak program yang mendukung itu semua.

c. Keterlibatan Alumni PSG dalam Proses Kaderisasi Berkelanjutan

Untuk mengembangkan sekolah berwawasan lingkungan, SMA 3 Annuqa-35. Wawancara dengan Kiai Muhammad Khatibul Umam, sebagai Kepala Sekolah pada 8 November 2021.

yah sebagai salah satu bagian lembaga pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Annuqayah, melakukan berbagai strategi dan upaya yang bersifat berkelanjutan bagi kemajuan sekolah di masa depan. Salah satu upaya strategis yang sudah dilakukan adalah keterlibatan alumni Pemulung Sampah Gaul (PSG) dalam proses kaderisasi bagi siswa. Proses kaderisasi ini dilakukan dengan cara melakukan rekrutmen terhadap siswa yang tertarik dengan kegiatan peduli lingkungan dan memberikan pembinaan secara berkelanjutan dalam pengelolaan kegiatan peduli lingkungan melalui komunitas yang sudah terbentuk, yakni Pemulung Sampah Gaul) sebagai bagian ekstrakulikuler di lingkungan SMA 3 Annugayah Guluk-Guluk Sumenep.

Bentuk keterlibatan alumni PSG ini dilakukan dengan pembinaan secara struktural maupun non-struktural bagi rekrutmen siswa baru yang hendak bergabung dengan komunitas pecinta lingkungan ini. Ada beberapa bentuk keterlibatan alumni PSG dalam melakukan pembinaan dan bimbingan khusus bagi adik-adik mereka yang memiliki kepedulian dan perhatian pada isu lingkungan, sebagai berikut:

Pertama, setiap rekrutmen baru bagi siswa yang hendak bergabung dengan komunitas peduli lingkungan, yakni Pemulung Sampah Gaul, dilakukan dengan melakukan pembinaan secara keorganisasian dalam menata organisasi berupa perkumpulan atau kelompok agar dapat menjalankan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan harapan. Pembinaan keorganisasian ini menjadi penting, karena siswa diajak untuk belajar berorganisasi dalam konteks menjalin kerjasama, membangun komitmen, mengelola kegiatan, maupun dalam soal menghadapi persoalan yang terkait dengan komunitas pecinta lingkungan.

Kedua, sebagai komunitas pecinta lingkungan, PSG dianggap miliki citra dan posisi strategis dalam menjalankan kegia-



tan peduli lingkungan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk mempertahankan citra dan posisi strategis itu, SMA 3 Annuqayah melakukan pembinaan kepada komunitas pecinta lingkungan dalam hal pengelolaan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan menjadi program utama dari Pemulung Sampah Gaul. Sebagai contoh, pengurus PSG sering diminta untuk mengisi kegiatan peduli lingkungan di beberapa sekolah untuk memberikan pengetahuan langsung tentang bagaimana mengelola lingkungan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk dalam mengelola sampah plastik sebagai salah satu kegiatan utama dari komunitas Pemulung Sampah Gaul.

Ketiga, pembinaan praktik lapangan. Keterlibatan alumni PSG juga sangat dibutuhkan dalam melakukan pelatihan lapangan bagi siswa-siswa yang baru direktur sebagai kader PSG, terutama ketika melaksanakan program pengelolaan sampah, pembuatan pupuk organik, dan kegiatan ketahan pangan yang menjadi prioritas pada komunitas pecinta lingkungan ini. Alumni PSG berperan juga dalam melakukan pendampingan secara intens pada pengurus PSG agar program-program yang sudah berjalan sebelumnya dapat ditingkatkan, minimal dipertahankan agar senantiasa bertahan dengan komitmen awal dari perintis komunitas pecinta lingkungan.

d. Membangun Jejaringan dengan Komunitas Pendidikan Lingkungan

Untuk mengembangkan itu semua, maka dilakukan jejaring dengan komunitas pecinta lingkungan, baik dari instansi pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup), lembaga sekolah, dan instansi lain, baik memberikan bimbingan kepada sekolah-sekolah tentang pendidikan lingkungan atau kerjasama dalam melaksanakan kegiatan secara bersama. Semisal memberikan bimbingan kepada pesantren Lubangsa Putri, SMK Annugayah, MI 3 Annuqayah, dan lembaga lainnya. Bahkan, dengan Dinas Lingkungan Hidup itu sudah sejak awal kerjasamanya dan sejak tahun 2010 sudah berjejaringan. Bahkan, mereka datang ketika diundang oleh pihak SMA 3 Annugayah, terutama oleh komunitas Pemulung Sampah Gaul.

e. Mendelegasikan Guru dan Siswa dalam Kegiatan Lingkungan

Dalam mengembangkan sekolah rumah lingkungan di SMA 3 Annugayah Guluk-Guluk Sumenep, dilakukan dengan mendelegasikan guru dan siswa ke luar sekolah untuk penguatan kapasitas. Pengembangan sekolah berwawasan lingkungan di SMA 3 Annuqayah penting dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada guru dan siswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan peduli lingkungan yang mendukung program sekolah berwawasan lingkungan.

Sebenarnya banyak kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penguatan kapasitas. Mungkin, salah satunya adalah mengikutsertakan guru dan siswa pada program pendidikan lingkungan untuk penguatan kapasitas. Semisal ajang lomba nasional yang digelar British Council Indonesia yang diberi nama Schol Climate Challenge (SCC) Competition tahun 2008 dan 2010 di Jakarta, kegiatan Environmental Teacher's International Convention (ETIC) tahun 2008, kegiatan pro Fauna di Malang, Yayasan Satu Nama di Yogyakarta, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan peduli lingkungan.

f. Memasukkan Pendidikan Materi Lingkungan pada Kurikulum Sekolah

Program sekolah ramah lingkungan di lingkungan SMA 3 Annuqayah tidak lantas menjadi bagian dari kurikulum yang dipraktikkan dalam materi pelajaran bagi siswa, melainkan ada banyak tahapan yang harus dilalui untuk memperkuat landasan filosofis dari penerapan sekolah ramah lingkungan. Dengan melalui berbagai



kajian dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SMA dengan komunitas Pemulung Sampah Gaul (PSG), maka pimpinan sekolah mulai merancang penerapan kurikulum yang sesuai dengan visi sekolah dalam mengembangkan sekolah berwawasan lingkungan.

Hal ini tertuang dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMA 3 Annuqayah (Putri), sebuah lembaga pendidikan yang sejak awal telah terbiasa dengan tanpa sampah. Bahkan di lembaga pendidikan ini sejak tahun 2014 juga terdapat muatan materi lokal khusus lingkungan hidup. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud secara struktural dijadikan sebagai laboratorium materi lingkungan hidup. Sangat beragam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Pondok Pesamtren Annuqayah dalam penyelesaian persoalan lingkungan.

Materi pendidikan lingkungan sebagai bagian dari kurikulum sebenarnya dipersiapkan sejak awal oleh pihak sekolah sebagai pemegang kebijakan, namun masih belum ada kemantapan untuk memasukkan materi pendidikan lingkungan sebagai salah satu bagian dari kurikulum yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pandangan Kiai Mushthafa yang mempunyai andil besar dalam mengembangan sekolah berwawasan lingkungan di SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep bahwa ide ini sudah dirancang dengan mengikuti berbagai kegiatan tentang pendidikan lingkungan dan konservasi alam. Secara kebetulan, Kiai Mushtafa bercerita bahwa pada Juni 2009, beliau diundang untuk menghadiri British Council Indonesia yang bekerjasama dengan PMPTK Depdiknas dalam rangka mengikuti Lokakarya Penyusunan Modul Pembelajaran, yang mengintegrasikan bebrapa materi pelajaran di sekolah dengan pendekatan pendidikan lingkungan.

36. Wawancara dengan K. Muhammad Khatibul Umam (Kepala SMA 3 Annuqayah Putri, Pengurus BPM-PPA dan pemerhati lingkungan) pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 13:00 WIB.

Pengembangan sekolah berwawasan lingkungan di SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep bukan hanya dilakukan dengan mengaktifkan kegiatan ekstrakuler dengan berdirinya komunitas pecinta di lingkungan, yaitu Pemulung Sampah Gaul (PSG), melainkan dilakukan dengan memasukkan materi pendidikan lingkungan pada kurikulum sekolah. Materi pendidikan lingkungan di SMA 3 Annuqayah pertama kali dipraktikkan sejak tahun ajaran 2014/2015 kepada siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Pemberlakuan materi pendidikan lingkungan ini sebagai langkah strategis dalam pengembangan sekolah ramah lingkungan, meskipun harus dibenahi dari berbagai sisi agar apa yang dicangkan pihak SMA 3 Annuqayah benar-benar sesuai dengan harapan.

5. Analisis Implementasi Sekolah Nol Sampah Plastik yang dilaksanakan di SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep

Implementasi Sekolah Nol Plastik di SMA 3 Annuqayah dilakukan secara sistematis, terstruktur dan bertahap. Sebelum menerapkan sekolah nol plastik, SMA 3 Annuqayah telah berkutat dengan pendidikan lingkungan hidup selama kurang lebih 13 tahun, yakni sejak SMA 3 Annuqayah mendirikan PSG SMA 3 Annuqayah pada tanggal 22 April 2008. Adapun proses implementasi sekolah nol plastik pada SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep adalah sebagai berikut:

Pertama, membangun awarness/kepedulian terhadap bahaya sampah plastik. Proses penyadaran ini dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Yang menarik, sasaran dari membangun kepedulian terhadap sampah plastik ini tidak hanya dilakukan kepada siswa dan keluarga besar sekolah, namun juga kepada tetangga, para penjual di kantin, dan juga lembaga yang bermitra dengan SMA 3 Annuqayah. Upaya membentuk perilaku peduli terha-



dap sampah plastik dilakukan melalui; 1) materi pelajaran pendidikan lingkungan hidup untuk semua siswa SMA 3 Annugayah kelas X, sebagaimana dipaparkan di atas. Dalam hal ini, materi pendidikan lingkungan hidup dijadikan materi pelajaran yang didesain khusus untuk menggugah kesadaran siswa dan juga membentuk perilaku cinta lingkungan;

2) Kemah Lingkungan, yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas siswa di bidang lingkungan dan keorganisasian. Kemah Lingkungan dilaksanakan di Kebun Observasi Assalam Prancak Pasongsongan Sumenep; 3) Peringatan Hari Bumi dan Hari Jadi PSG SMA 3 Annuqayah. Dalam kegiatan ini, tidak hanya melibatkan siswa namun juga masyarakat, pedagang di kantin, dan juga para guru serta mitra pecinta lingkungan di Pondok Pesantren Annugayah; 4) Nobar Film Lingkungan, biasanya juga melibatkan siswa dan masvarakat, pedagang di kantin, dan juga para guru serta mitra pecinta lingkungan di Pondok Pesantren Annugayah; 5) Mulung Akbar di Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Pondok Pesantren Annugayah; 6) Penyebaran informasi tentang sampah dan lingkungan melalui poster dan sejenisnya di lingkungan sekolah. Misalnya, poster yang diletakkan di pintu depan sekolah dengan kata-kata, "Bumi bukanlah hadiah dari Tuhan, melainkan titipan untuk anak cucu tersayang"; 7) Sosialisasi langsung kepada masyarakat, dilakukan untuk membangun kesepahaman tentang aturan penggunaan plastik di lingkungan SMA 3 Annugayah Guluk-Guluk.

Jadi, proses pembangunan kesadaran untuk seluruh stakeholder SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga pada akhirnya siswa benar-benar memiliki pengetahuan dan pada akhirnya kepedulian terhadap sampah plastik. Diharapkan, setelah siswa memiliki kepedulian terhadap sampah plastik, mereka kemudian menularkan perilaku

ini ke lingkungan sekitar tempat di mana ia tinggal, sehingga akan lebih banyak lagi yang memiliki kepedulian terhadap sampah plastik.

Hal *kedua* yang dilakukan oleh SMA 3 Annugayah adalah menyiapkan infrastruktur atau lebih tepatnya lingkunan yang mendukung untuk penerapan nol sampah plastik sekolah. Infrastruktur yang dimaksud adalah:

a. Menyiapkan Kantin tanpa Plastik Sekali Pakai

Upaya menyiapkan kantin tanpa plastik sekali pakai tidaklah mudah. Sebab, pengelola/penjual makanan di kantin dari pesantren itu sendiri, namun milik para tetangga. Jadi, SMA 3 Annuqayah hanya menyediakan tempat jualan yang mana para penjualnya adalah para tetangga sekitar SMA 3 Annuqayah.

Karenanya, yang dilakukan pertama menggugah kesadaran mereka tentang bahaya sampah plastik. Hal ini dilakukan dengan mengajak mereka dalam kegiatan-kegiatan lingkungan di SMA 3 Annuqayah. Upaya ini cukup berhasil karena mereka memang yang pada awalnya tidak peduli terhadap sampah plastik, merasa tergerak juga untuk ikut serta mengendalikan sampah plastik. Selanjutnya, pelan tapi pasti, mereka mau diajak musyawarah secara kekeluargaan, untuk mencari kesepatan bersama. Pihak sekolah menjamin bahwa mereka tetap bisa berjualan dan memberikan solusi bagaimana caranya menyiasati agar tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai. Misalnya, yang menjual nasi harus menggunakan piring, menjual sosis dan pentol menggunakan mangkok, atau menggunakan tusuk sate, tanpa harus ada plastik. Air minum menggunakan gelas, tidak lagi menjual air minum dalam kemasan (AMDK). Awalnya pihak sekolah yang akan belikan piring, mangkok, dan seterusnya, tetapi dengan kesadaran sendiri, akhirnya mereka mau beli sendiri.



b. Membuat Panganan Tradisional (Lab Rasa)

Selain menyiapkan kantin bebas palstik sekali pakai, pihak sekolah juga menyiapkan panganan tradisional yang dilakukan oleh PSG SMA 3 Annuqayah divisi Konservasi Pangan Lokal. Hal ini dilakukan di Lab Rasa yang dimiliki oleh SMA 3 Annuqayah untuk menyiapkan panganan local dalam setiap kegiatan besar sekolah, sehingga tidak ada lagi makanan-makanan berkemasan plastik maupun botol minuman sebagai suguhan dalam kegiatan-kegiatan besar sekolah.

c. Membentuk Polisi Lingkungan

Polisi lingkungan merupakan petugas yang memastikan lingkungan di sekitar SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep selalu bersih dan bebas sampah plastik. Polisi lingkungan ini terdiri dari Pengasuh, yakni Kiai M Faizi; Pembina PSG SMA 3 Annugayah, Ibu Mus'idah Amin dan juga Guru SMA 3 Annugayah, Uswatun Hasanah. Ketiganya ini secara bergantian dan rutin melakukan pengecekan terhadap seluruh lingkungan SMA 3 Annugayah untuk memastikan tidak ada sampah yang tercecer maupun tertinggal di lingkungan sekolah. Polisi lingkungan juga bertugas menegakkan peraturan tentang sampah di lingkungan sekolah.

d. Membentuk Srikandi Lingkungan

Srikandi lingkungan merupakan istilah yang digunakan di SMA 3 Annuqayah untuk siswa yang menjadi penanggung jawab sampah di masing- masing kelas. Srikandi lingkungan ini juga bertanggung jawab untuk memilah sejak dari dalam kelas sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang, untuk kemudian disetorkan ke teller Bank Sampah. Jadi, srikandi lingkungan inilah yang bertanggung jawab terhadap sampah yang ada di kelasnya masing-masing.

Ketiga, Penegakan Aturan. Sebenarnya pembuatan aturan tentang sampah

plastik bukanlah prioritas, karena target utamanya adalah membangun kesadaran dan membentuk perilaku secara alamiah, sehingga kepedulian mereka terhadap sampah plastik bukan didasari oleh ketaatan terhadap peraturan, melainkan memang lahir dari hati yang terdalam. Dengan demikian, mereka akan tetap tidak akan memakai sampah plastik sekali pakai di mana pun mereka berada, tidak hanya saat berada di sekolah.

Ada 3 poin aturan yang dibuat oleh SMA 3 Annuqayah, yakni: 1) Dilarang beli air kemasan baik gelas ataupun botol; 2) Dilarang pakai plastik kresek/sekali pakai kalau ke kantin; 3) Wajib memilah sampah di kelas. Adapun sanksi bagi yamg melanggar untuk poin 1 dan 2 adalah membayar uang denda Rp20.000. Adapun sanksi untuk poin 3 adalah menjaga teller bank sampah pada saat jam istirahat sekolah.

Penegakan peraturan ini dilakukan oleh polisi lingkungan dan juga pengurus PSG SMA 3 Annuqayah. Misalnya ditemukan siswa yang membeli air mineral dalam kemasan, atau bawa plastik ke kantin, maka polisi lingkungan melaporkan ke Bu Musidah dan anak-anak PSG. Mereka yang menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi yang kena denda, maka uang dendanya dimasukkan ke kas PSG untuk dijadikan biaya operasional.

Beda lagi dengan cara Kiai M Faizi sebagai pengasuh sekaligus polisi lingkungan. Beliau jarang sekali marah, tetapi jika menemukan sampah palstik, maka beliau marah dan mengumpulkan pihak-pihak yang diduga menghasilkan sampah, termasuk pihak kantin. Beliau juga langsung membuat pengumuman tentang keharaman sampah plastik di papan pengumuman.

Keempat, pembentukan Bank Sampah. Bank Sampah didirikan untuk menampung sampah-sampah yang dimiliki oleh setiap kelas, khususnya sampah plastik. Bank Sampak didirikan sejak tahun 2019 dan hingga saat ini sudah beroperasi kurang lebih selama 2 tahun. Penge-



lolaan Bank Sampah dipasrahakan kepada PSG SMA 3 Annugayah. Bank Sampah bisa berjalan dengan efektif berkat keberadaan srikandi lingkungan dan juga teller bank sampah oleh pengurus PSG SMA 3 Annuqayah. Setiap hari, bank sampah ini menerima laporan setoran sampah dari srikandi lingkungan dan teller mencatatnva di buku teller.

Keberadaan bank sampah tidak hanya sekadar sebagai tempat penampungan sampah plastik. Namun, dengan adanya bank sampah ini, sekolah dapat mengontrol produksi sampah oleh siswa sehingga dapat terus memonitor jika ada kelas yang menghasilkan sampah lebih besar dibanding dengan lainnya. Dengan demikian, sekolah bisa melakukan pecegahan dini terhadap kelas yang menghasilkan sampah dengan produksi paling besar tersebut.

Berikut adalah rekapitulasi produksi sampah plastik dan kertas yang diterima Bank Sampah pada September 2021, yang dihasilkan oleh siwa SMA 3 Annugayah, MTs. 3 Annuqayah dan juga MI 3 Annuqayah dengan jumlah siswa sekitar 300 orang:

No	Jenis Sampah	Total (da- lam satuan biji)
1.	Sampah Plastik Daur Ulang	523
2.	Sampah Plastik Tidak bisa daur ulang	604
3.	Kertas	155
Total		1.282

Sumber: Buku Teller Bank Sampah SMA 3 Annuqayah

Mengacu kepada data di atas, dapat dianalisis bahwa produksi sampah siswa di lingkungan madaris SMA 3 Annuqayah sangat sedikit. Untuk sampah plastik, yang dihasilkan oleh masing-masing siswa setiap harinya adalah 1.127/20 hari efektif/300 siswa sama dengan 0.19 biji sampah. Artinya dalam sehari, rata-rata setiap siswa hanya menghasilkan 0.19 sampah, atau 5 orang siswa menghasilkan rata-rata 1 buah sampah setiap harinya.

Bagaimana penanganan terhadap sampah di Bank Sampah tersebut? Setelah melakukan pemilahan sampah, pengurus dan anggota PSG kemudian mengubah samapah plastik menjadi kerajinan tangan yang bisa digunakan untuk keseharian, seperti, dompet, hiasan Bunga plastik, kemucing, dan lainnya. Sementara untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang, dibuat ecobrick. Ecobrick adalah metode untuk meminimalisir sampah dengan media sangkar botol plastik yang diisi dengan limbah anorganik (limbah yang tidak dapat diurai atau diurai) hingga benar-benar keras dan padat. Tujuan Ecobrick adalah mengurangi sampah plastik dan mendaur ulangnya dengan botol plastik agar bermanfaat. Contoh penggunaannya adalah produksi meja, kursi, dinding dan benda artistik lainnya yang juga memiliki nilai jual.

Iadi, ada dua bentuk pengolahan sampah plastik yang dilakukan di SMA 3 Annugayah Guluk-Guluk Sumenep. Terhadap sampah yang bisa didaur ulang, maka dijadikan kerajinan tangan berupa tas dan sejenisnya, sementara untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang dijadikan ecobrick yang nantinya bisa dibuat sebagai bahan pembuatan pagar atau bahkan bangunan-bangunan tertentu yang membutuhkan benda padat ramah lingkungan.

Kelima, menginisiasi dan mengampanyekan Kegiatan Tanpa Sampah Plastik (KTSP). KTSP merupakan konsep kegiatan yang tidak hanya tidak meninggalkan sampah, tetapi tidak memproduksi sampah. Dalam setiap kegiatan sekolah di SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk sudah tanpa sampah plastik. Bagaimana menyiasati suguhan kepada para undangan? Di sinilah tim konservasi pangan lokal berperan. Mereka selalu berusaha membuat menu-menu panganan local untuk disuguhkan kepada tamu dan para undangan. Suguhan roti berbalut plastik digantikan dengan panganan local Madura yang mu-



lai ditinggalkan oleh banyak orang. Panganan tradisional ini juga tidak lagi dibungkus plastik, namun diganti dengan daun pisang. Air minum dalam kemasan yang biasanya juga menghiasi setiap kegiatan diganti dengan minuman tradisional Madura seperti "pokak syaripah" yang berbahan dasar gula merah. Dekor yang biasanya berbahan dasar plastik, juga ditinggalkan dan diganti dengan dekor berbahan dasar kain dengan tulisan berbahan dasar kertas dan plastik bekas.

Pelaksanaan KTSP juga merupakan bentuk sikap konsisten untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai, termasuk dalam kegiatan-kegiatan besar yang kami lakukan seperti Temu Wali, Maulid Nabi, Haflatul Imtihan, Pondok Ramadan, dan kegiatan lainnya. Hal ini juga sebagai bentuk kampanye kepada seluruh hadirin agar mereka juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kami berharap lebih banyak orang lagi yang mengikuti jejak kami dalam upaya mengkampanyekan pengendalian sampah plastik di lingkungan masing-masing.

Konsep KTSP yang dilaksanakan di SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep dan beberapa kegiatan lain di lingkungan Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep terbukti benar-benar memberikan dampak positif. Dalam setiap kegiatam tidak hanya sekadar membuang sampah pada tempatnya, namun lebih dari itu, mereka tidak memproduksi sampah. Kalaupun pada akhirnya ada sampah, namun sangat minim jika dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang tanpa konsep KTSP.

E. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang Model Sekolah Ramah Lingkungan di Kabupaten Sumenep, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama. Landasan Filosofis

Sekolah Pengembangan Berwawasan Lingkungan di SMA 3 Annugayah adalah: 1) Melanjutkan visi lingkungan Annuqayah dalam bidang Lingkungan, yakni konservasi alam sebagai bagian dari tugas keagamaan. Annuqayah mempunyai sejarah panjang tentang pendidikan lingkungan; 2) Pengembangan pendidikan antroposentrisme, yakni mengembangkan pendidikan yang membumi melalui pendidikan lingkungan. Visi pendidikan apa pun yang diterapkan bukan hanya fokus pada teosentrisme, melainkan visi yang dikembangkan harus bersifat antroposentrisme, bahkan eco- antroposentrisme; 3) Mengembangkan pendidikan karakter peduli dan cinta lingkungan, vakni dengan cara membentuk karakter pribadi yang bertanggung jawab, bersyukur atas nikmat alam, dan peduli dan cinta dengan masa depan kehidupan bersama tanpa merasa ada jarak dengan lingkungan sebagai tempat tinggal manusia di dunia; 4) Etika Ramah Lingkungan. Penerapan sekolah ramah lingkungan di lingkungan SMA 3 Annuqayah dilandasi oleh semangat untuk menanamkan etika bukan hanya kepada sesama manusia, melainkan juga agar siswa memiliki sikap yang ramah terhadap lingkungan.

Kedua, Strategi SMA 3 Annuqayah dalam Mengembangkan Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut: 1) Visi Lingkungan Annuqayah Diintegrasikan dengan Visi pendidikan Sekolah; 2) Mengembangkan Kegiatan Ektrakulikuler Melalui Pemulung Sampah Gaul (PSG). Bentuk kegiatan dibagi dalam tiga kelompok, yakni tim pupuk organik, tim sampah plastik, dan tim ketahanan pangan local; 3) Keterlibatan Alumni PSG dalam Proses Kaderisasi Berkelaniutan. Bentuk keterlibatan alumni PSG ini dilakukan dengan pembinaan secara struktural maupun non-struktural bagi rekrutmen siswa baru yang hendak bergabung dengan komunitas pecinta lingkungan ini; 4) Memasukkan Materi pendidikan lingkungan pada



kurikulum Sekolah, yakni tepatnya pada siswa Kelas X; 5) Mendelegasikan Guru dan Siswa dalam Kegiatan Lingkungan; 6) Berjejaringan dengan komunitas pecinta lingkungan, baik dari instansi pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup), lembaga sekolah, dan instansi lain, baik memberikan bimbingan kepada sekolah-sekolah tentang pendidikan lingkungan atau kerjasama dalam melaksanakan kegiatan secara bersama.

Ketiga, Implementasi Sekolah Nol Plastik pada SMA 3 Annugayah Guluk- Guluk Sumenep dilaksanakan sebagai berikut: 1) Membangun awarness/kepedulian terhadap bahaya sampah plastik. Proses

penyadaran ini dilakukan secara sistematis dan menyeluruh untuk siswa, guru, penjual di kantin, serta masyarakat; 2) Menyiapkan infrastruktur atau lebih tepatnya lingkungan yang mendukung untuk penerapan nol sampah plastik sekolah melalui kantin tanpa plastik, membuat panganan tradisional sebagai hidangan kegiatan, membentuk polisi lingkungan, membentuk srikandi lingkungan; 3) Penegakan aturan larangan penggunaan sampah plastik sekali pakai; 4) pembuatan Bank Sampah; 5) Menginisiasi dan Mengampanyekan kegiatan tanpa sampah plastik (KTSP).

Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 melalui Assesment Visitasi Akreditasi Berbasis Online Pada Sekolah di Kabupaten Sumenep

Moh. Wardi, Musleh Wahid, Encung Ahmadi, Heri Fadli Wahyudi (Tim Peneliti LPPM Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan)

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang memfokuskan pada kajian terhadap tiga hal. Pertama, mendekripsikan upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan pada masa pandemi covid-19. Kedua, mendeskripsikan layanan lembaga pendidikan di Kabupaten Sumenep pada masa pandemi covid-19. Ketiga, mendeskripsikan relevansi assesment visitasi akreditasi berbasis online dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Sumenep. Dalam prosesnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan beberapa metode, seperti metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini; Pertama, peningkatan mutu pendidikan pada masa pandemi covid-19 di lembaga-lembaga pendidikan senantiasa diupayakan untuk melengkapi ketersediaan dan kesanggupan lembaga dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan updating pengembangan kurikulum yang senantiasa mengikuti perubahan zaman serta kondisi terkini. Kedua, inovasi pembelajaran yang dilakukan pihak lembaga dalam rangka transfer of knowledge agar menuntaskan seluruh ataupun sebagian dari materi pembelajaran, walaupun dalam situasi dan kondisi force majeure seperti saat pandemi ini. Ketiga, relevansi assesment visitasi akreditasi berbasis online dalam peningkatan mutu merupakan ikhtiar lembaga dalam rangka merawat dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan akreditasi lembaga menjadi salah satu acuan pihak dinas pendidikan kabupaten sumenep dan kementerian agama kabupaten sumenep dalam pemberian pelayanan terhadap lembaga.

Kata Kunci: Peningkatan Mutu, Layanan Pendidikan, Covid-19, Akreditasi

A. PENDAHULUAN

Menjelang dua tahun terakhir, pandemi covid-19 telah melumpuhkan seluruh sektor kehidupan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat dalam skala Global, Nasional, dan daerah. Dalam sudut pandang pendidikan, lembaga dari berbagai jenjang PAUD, SD, SLTP dan SMA bahkan jenjang Pergururan Tinggi menerima dampak yang signifikan dengan mengambil kebijakan pembelajaran dilakukan dari rumah (BDR). Beragam formula dan metode yang dilakukan pemangku kebijakan agar transformasi pen-



didikan selama pandemi tetap berjalan, maka terdapat tiga aktivitas utama yang digunakan dalam penerapan pembelajaran yaitu penugasan, Home Visit, Laporan Kegiatan Harian Anak (Nahdi, 2020 :: 177 - 186).

Demikian juga dengan aktivitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya, mereka menyelesaikan segala bentuk kegiatan administrasi dan rencana pembelajarannya melalui bekerja dari rumah (work from home). Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi peraturan tentang pengaturan menjaga jarak sosial atau jarak fisik (social distancing/physical distancing) vang ditetapkan pemerintah, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Implikasi dari kebijakan ini juga dialami oleh orang tua/wali murid dengan kebijakan BDR ini, maka tidak ada pilihan bagi orang tua murid untuk mendampingi anak-anaknya dengan mengambil peran dan tugas guru disekolah dalam mengerjakan tugas dan aktivitas kegiatan pembelajaran lainnya, melakukan kegiatan bersama selama di rumah, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anakanak, menjalin komunikasi yang intens dengan anak, bermain dan belajar bersama anak-anak (Wulandari, 2020: 452-462).

Kegiatan assesment visitasi akreditasi pada masa pandemi ini tidak lagi menggunakan borang dan tanpa kertas (paperless), versi manual berupa hard copy akreditasi diganti dengan online, bahkan assesment visitasinya juga menggunakan sistem virtual/dalam jaringan/online. Dengan demikian, asesor dan satuan pendidikan harus memiliki keterampilan dalam menggunakan aplikasi akreditasi melalui Sispena. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan diharuskan memiliki kemampuan dalam mengoprasionalkan komputer yang terkoneksi dengan jaringan, serta kompetensi lainnya dibidang teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).

Substansi dan orientasi peningkatan mutu tidak hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan pada saat penilaian akreditasi saja. Akreditasi bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan standar minimal pendidikan (compliance), akreditasi harus benar- benar memotret performa satuan lembaga pendidikan (performance) untuk menghasilkan potret performansi satuan pendidikan dalam penerapan budaya mutu dibutuhkan SDM guru dan kepala sekolah yang berkualitas. Fungsi Akreditasi sebagai perlindungan sosial masyarakat dalam jaminan kualitas pendidikan juga sebagai *Qualicy Assuran*ci yaitu akreditasi mengarahkan lembaga untuk menjaga/merawat dan meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan studi pendahuluan sebagaimana informasi awal dari beberapa kolega yang menjadi praktisi dan pengelola lembaga pendidikan, menyampaikan bahwa penilaian assesment akreditasi berbasis virtual/online di Kabupaten Sumenep ini masih menyisakan problem yang perlu dipecahkan bersama, diantaranya: Pertama, paradigma dan pola pandang lembaga satuan pendidikan terhadap assesmen visitasi akreditasi, tidak sedikit lembaga yang masih minder dan takut pada moment ini, dalam pandangan mereka bahwa kegiatan assesment visitasi yang berlangsung satu hari akan menyelamatkan kinerjanya selama lima tahun ke depan. Kedua, ada beberapa lembaga yang masih murni dan an-sich bergantung kepada keberadaan dokumen semata, tanpa mempedulikan pelaksanaan dari bukti dokumen yang dipersiapkan di lembaga yang bersangkutan. Hal ini menjadi rahasia umum, bahwa lembaga mengabaikan substansi mutu, hanya sekedar melengkapi tagihan dan instrumen akreditasi semata. Padahal sejatinya, akreditasi memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah yang dilaksanakannya berdasarkan



Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ketiga, Kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan serta para pemangku kebijakan dalam pengelolaan lembaga pendidikan dalam mengoprasionalkan komputer yang terkoneksi dengan jaringan, serta kompetensi lainnya dibidang teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) masih minim. Keempat, keterbatasan sarana dan prasarana lembaga satuan pendidikan dalam akses internet jaringan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menfokuskan pada beberapa hal, vaitu; Pertama, terkait bagaimana upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan pada masa pandemi covid-19?. Kedua, berkenaan denganbagaimana layanan lembaga pendidikan di Kabupaten Sumenep pada masa pandemi covid-19?. Dan terkahir tentaag bagaimana relevansi assesment visitasi akreditasi berbasis online dalam peningkatan mutu lembaga?

Dengan harapan hasil dari penelitian ini, dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, Khususnya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan serta Kemerntrian Agama Kabupaten Sumenep dalam peningkatan mutu lembaga, layanan pendidikan dan urgensi assesment visitasi akreditasi berbasis online pada masa pandemi covid 19.

B. METODE PENELITIAN

Adapun bentuk pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian dengan format pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: pertama, wawancara yang mendalam (depth interview) dengan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan refresentasi dari TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs, Asesor, dll. Kedua, melalui pengamatan (observation) terhadap segala rangkaian kegiatan tahapan akreditasi. Ketiga, studi dokumentasi melalui media, video, rekaman dan catatan arsip.

Adapun sumber data dalam penelitian ini beberapa pengelola lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Sumenep, yang meliputi, RA Istifadhah Kecamatan Gingging- Bluto, TK Miftahul Ulum dari Kepulauan Sepudi, MIS Assasul Muttaqin Rubaru, Mts Raudlatul Ulum Palongan-Bluto, dan SMPI Al-Lailivah Aeng Panas-Pragaan. Yakni lembaga vang sedang mempersiapkan diri dan atau telah memahami visitasi akreditasi berbasis online. Kemudian, dari data-data vang peroleh peneliti, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data, serta untuk mengujia keabsahannya peneliti menggunakan metode ketekunan dan teknis triangulasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Upaya Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan itu pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: Proses pembelajaran pada satu satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berprestasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; Dalam proses pembelajaran pendidik dituntut dapat memberikan teladan; Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang aktif dan dinamis.

Dari peraturan pemerintah tersebut jelas digambarkan bahwa sebuah pembelajaran di sekolah merupakan suatu proses yang terencana, yang dilaksanakan dengan manajemen yang efektif dan melalui



pengawasan untuk dilakukan tindak lanjut. Dalam peningkatan mutu pendidikan, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus melalui alur proses yang sistematis, sehingga dihasilkan mutu yang baik pula. Alur proses yang dimaksud adalah proses manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. Dalam pendidikan proses manajemen merupakan hal yang sangat penting, agar program dan kurikulum yang diberikan sudah melalui proses. Mulai dari analisis, kemudian dibuat perencanaan, dilanjutkan untuk dilaksanakan dan dievaluasi dan tentunya diawasi apakah sesuai dengan perencanaan ataukah tidak pada saat dilaksanakan.

Penerapan implementasi pembelajaran pada masa lockdown yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 di kabupaten Sumenep terpola menjadi tiga proses pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pertama adalah Online/PII. penugasan, dan laporan kegiatan harian anak didik. Proses implementasi penerapan pembelajaran selama di rumah tidak hanya menggunakan satu kegiatan saja bahkan menggunakan 2 sampai 3 macam implementasi kegiatan pembelajaran. Implementasi tersebut dilaksanakan berdasarkan lokasi sekolah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Misalkan saja dari perkembangan teknologi, ketersediaan tenaga pendidik, peran orang tua dan juga proses kegiatan komunikasi antara guru dan orang tua guna keberhasilan proses implementasi pembelajaran di saat pandemi covid-19 tersebut. menjadi solusi penting dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar anak selama pandemi covid-19 menjadi sebuah keharusan agar semua aspek perkembangan anak bisa berkembang dengan baik sesuai dengan capaian perkembangan anak.

Tentu saja proses peningkatan mutu pendidikan mengalami hambatan, baik dari sisi komunikasi, pemakaian sarana dan prasarana, kesulitan keuangan,

pengetahuan tentang metode daring yang kurang serta kerjasama dengan pihak lain yang tidak optimal. Namun dari hasil penelitian diperoleh bahwa kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya untuk mewujudkan sekolah yang bermutu tetap menjadi prioritas, hal ini menunjukan bahwa dalam situasi apapun seorang pemimpin harus tetap melakukan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya. Karena keberhasilan seorang pemimpin akan terlihat manakala ia dihadapkan kepada situasi yang paling buruk, ia akan berusaha menunjukan kehebatannya dengan serius, penuh inovasi dan kreatifitas sehingga ia mampu membawa organisasi keluar dari mimpi buruk bahkan melebihi expektasi lingkungannya.

Lembaga pendidikan merupakan salah satu tempat persemaian kreativitas dan kapabilitas pemuda untuk menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan berprestasi. Untuk itu lembaga pendidikan harus memiliki sistem acuan yang kredibel guna meraih cita-citanya. Dalam perjalanannya sistem acuan tersebut seringkali harus adaptasi dengan kebutuhan zaman dimana lembaga pendidikan dikembangkan dan dihidupkan. Adaptasi ini terutama bersentuhan langsung dengan tata kelola manajemen sistem kerja administrasi dan layanan kebutuhan pengembangan pendidikan berbasis kualitas unggul. Salah satunya melalui inovasi sistem layanan kependidikan yang sarat dengan muatan keahlian dan *skill* para pemangku kebijakan lembaga utamanya peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM dan sumber daya alam. Khusus untuk sumber daya manusia peningkatan mutu layanan melalui upgrading skill membina mengatur dan mengelola sumber-sumber energi yang menopang peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian literature, bahwa dalam rangka peningkatan mutu lembaga khususnya



pada masa pandemi covid 19 ada beberapa hal yang menjadi titik tekan yang menjadi perhatian dan rekomendasi bagi pengelola lembaga pendidikan dan pemangku kebijakan di Kabupaten Sumenep antara lain adalah:

- 1. Ketersediaan dan kesanggupan lembaga dalam memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) sebagaimana yang sudah menjadi instrumen mutu oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal (BAN PAUD PNF) Untuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA), Serta instrumen mutu yang telah menjadi regulasi dan ketetapan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M) untuk jenjang MI/SD, SMP/MTs, dan MA/SMA sederajat.
- 2. Pengembangan kurikulum yang senantiasa mengikuti perubahan zaman serta kondisi terkini khususnya kurikulum yang mengakomodir situasi dan kondisi darurat covid-19, atas dasar ini perlu perhatian dan kecermatan pihak pengelola serta yayasan dan komite serta juga pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pengawas yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan pengawas PPAI yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Monitoring dan evaluasi kurikulum ini perlu dilakukan secara intensif dan pembinaan secara berkala agar lembaga melakukan beberapa perubahan dan inovasi terkait dengan pembelajaran yang semuanya terangkum dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- 3. Selama ini kita mengenal bahwa kompetensi guru identik dengan 4 komponen yaitu kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. namun dalam perkembangannya situasi dan kondisi menuntut para guru untuk melakukan peningkatan akademik dan

potensi diri melalui peningkatan kompetensi digital, karena bagaimanapun kompetensi ini menjadi kebutuhan primer seorang guru dalam kondisi darurat covid-19.

Dikarenakan situasi menginginkan pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka tetapi pembelajaran dilakukan melalui jarak jauh atau online melalui media Zoom meeting, Google meet, atau Google classroom.

b. Layanan Lembaga Pendidikan di Kabupaten Sumenep Pada Masa Pandemi Covid-19

Orang tua dan guru menjadi aspek penting dalam keberhasilan perkembangan anak selama masa *lockdown* melalui proses kolaborasi pembelajaran di rumah. Peran dari Lembaga sekolah sebagai akomodir pembelajaran harus mengacu kepada proses pelaksanaan, kebutuhan anak dan juga ada kegiatan terstruktur yang diberikan oleh guru melalui aktivitas-aktivitas pembelajaran dan penugasan selama pandemi ini. Pelaksanaan implementasi pembelajaran selama lockdown di kabupaten Sumenep tidak terlepas dari peran serta orang tua, guru, stakeholder sekolah dalam berkomunikasi dan menjamin kebutuhan anak dalam belajar terpenuhi.

Selama pandemi covid-19 ini, penerapan proses pembelajaran melalui proses penugasan *Home Visit*, laporan aktivitas anak ketika di rumah akan mampu menjadi sebuah dasar dalam pelaksanaan kesuskesan belajar anak di rumah. Penugasan dan Home Visit sebagai control dalam mengetahui aktivitas anak selama proses pembelajaran. Peran orang tua selama masa *lock*down ini menjadi peran utama. Orang tua sebagai tempat pertama yang mengetahui perkembangan anak menjadi control dan guru anak selama di rumah. Menjelaskan bahwa orang tua adalah inti dari perkembangan anak dikarenakan orang tua yang paling sering berinteraksi, berkomunikasi, dan memonitoring aktivitas yang dilaku-



kan anak selama proses belajar dan bermainnya di rumah.

Melalui proses laporan aktivitas anak yang dilakukan oleh orang tua kepada pihak sekolah terutama guru kelas menjadikan semua kegiatan anak dapat terlaporkan dan termonitor oleh guru dan orang tua bisa menjadi guru di rumah untuk anak-anaknya. Proses pelaksanaan implementasi pembelajaran dikala pandemi covid-19 ini terdapat 3 aspek penting yang menjadi catatan yang diantaranya adalah:

- 1. Inovasi pembelajaran tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi sehingga proses kegiatan belajar bisa terakomodir dengan baik;
- 2. Pada saat Pandemi covid-19 orang tua membuatkan wadah bermain dan belajar anak agar tidak cepat bosan selama belajar di rumah, terkadang rasa bosan dari anak menjadi sebuah hal yang harus terus didasarkan dalam proses pembelajaran di rumah;
- 3. Anak-anak akan lebih banyak untuk menggunakan handphone/smartphone dalam proses aktivitasnya, oleh karena itu pengawasan orang tua menjadi sebuah kunci untuk dapat melaksanakan aktivitas anak berjalan dengan baik.

Orang tua, guru, stakeholder Lem-PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs memiliki andil besar dalam menciptakan pembelajaran yang positif selama pandemi ini. Kegiatan- kegiatan di rumah dengan koordinasi guru dan orang tua menjadikan kegiatan anak di rumah lebih bermakna. Kebermaknaan anak belajar akan memberikan dampak dalam mengurangi penggunaan *gadget* selama proses *lockdown* ini. Selama masa belajar di rumah, anak akan selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk bermain *gadget*.

Dengan bermain gadget beban orang tua akan semakin berkurang selama anak belajar di rumah, akan tetapi hal inilah yang akan menciptakan kemalasan bagi anak dalam beraktivitas dan belajar

sehingga perkembangan anak akan terhambat. Penerapan gadget atau pemanfaatan teknologi di rumah akan berakibat buruk bagi perkembangan anak tanpa adanya pendampingan dari orang tua, sehingga koordinasi orang tua dan guru dalam pembelajaran serta sistematis guru dalam menyusun aktivitas anak dalam belaiar meniadi kunci utama dalam tujuan untuk mencapai perkembangan anak yang maksimal. Dalam penelitian ini hal yang diungkap adalah bagaimana strategi yang dilakukan beberapa lembaga di Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa Pandemi Covid 19 untuk mencapai sekolah yang bermutu. Pada situasi pandemi Covid 19 dimana proses pendidikan di sekolah dilakukan dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah, sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi di awal terjadinya wabah, yang ditindaklanjuti dengan instruksi menteri pendidikan dan kebudayaan yang kemudian diberlakukanlah proses pembelajaran dengan metode daring dimana komunikasi kepala sekolah dengan pihak lain dilakukan secara daring.

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian literature, bahwasanya dalam rangka peningkatan layanan pendidikan di Kabupaten Sumenep khususnya pada masa pandemi covid-19 ada beberapa hal yang menjadi titik tekan yang menjadi perhatian dan rekomendasi bagi pengelola lembaga pendidikan dan pemangku kebijakan di Kabupaten Sumenep antara lain adalah:

1. Kesiapan pihak lembaga khususnya kepala sekolah, guru dan seluruh stakeholder dalam rangka memberikan layanan yang prima kepada peserta didik, mencari solusi dan langkah-langkah solutif dalam rangka transfer of knowledge menuntaskan seluruh ataupun sebagian dari materi pembelajaran, walaupun dalam posisi dan kondisi force majeure yaitu kejadian luar biasa dan peristiwa di luar kemampuan manusia. Munculnya wabah virus Co-



- rona yang telah melumpuhkan seluruh sektor kehidupan manusia khususnya dalam bidang pendidikan yang sampai saat ini masih kita rasakan bersama
- 2. Adanya support dan kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, bahwa kondisi darurat ini memerlukan regulasi dan kebijakan berupa Perda/edaran lainnya untuk menjadi payung hukum dalam rangka, agar lembaga memberikan pelayanan prima kepada peserta didik bagi seluruh layanan pendidikan di Kabupaten Sumenep.
- 3. Adanya Support sistem oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, berupa akses jaringan internet yang murah dan terjangkau, Tidak menutup kemungkinan ada beberapa lembaga yang terkendala oleh fasilitas laptop dan wi-fi, atas dasar itulah maka diperlukan kehadiran pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada lembaga dan seluruh elemen masyarakat yang membutuhkan support system berupa akses jaringan internet yang murah dan terjangkau.

c. Relevansi Assesment Visitasi Akreditasi Berbasis Online dalam Peningkatan Mutu Lembaga

Akreditasi bertujuan untuk: 1) memberikan informasi tentang kelayakan madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan SNP; 2) memberikan pengakuan peringkat kelayakan; dan 3) memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait. Atas dasar itulah maka lembaga berminat untuk maju dengan mengajukan permohonan akreditasi agar Sekolah dan Madrasah dianggap layak dan sesuai Standar Nasional Pendi-

dikan.

Dalam situasi pandemi, sekolah juga melaksanakan pendidikannya secara daring hal ini dilakukan karena memang mandat kedinasan mengharuskan demikian. Untuk itu ada banyak hal yang harus dipersiapkan dan dibutuhkan. Tetapi yang terpenting sumber daya manusia yang akan mengomandani sistem IT juga harus menguasai media-media yang berbasis IT.

Secara umum layanan pendidikan berbasis IT menjadi ujung tombak untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa situasi tidak menentu karena Indonesia sedang dilanda pandemi. Dengan sistem yang tersusun seksama para pemangku kebijakan lembaga berusaha maksimal untuk tetap melayani dengan baik dan untuk mencapai kwalitas pendidikan seperti yang diharapkan oleh semua pihak baik guru-guru di sekolah maupun para orang tua.

Memang disadari bahwa kendala utama pelaksanaan sistem pengajaran masih terletak pada ketersediaan jaringan internet yang tergolong buruk. Untuk menyiasati kendala demikian pihak sekolah membuat jaringan tambahan atau yang berupa *Antenna Toll*. Dengan sistem ini jaringan internet menjadi lebih baik, sekalipun di masa-masa tertentu kondisi jaringan kembali memburuk. Perlu diketahui bahwa sekolah yang menjadi informan terletak di pelosok desa terpencil dan akses masuknya juga berupa medan-medan berkelok dan terkadang terjal.

Dalam implementasinya, kebijakan akreditasi dalam peningkatkan mutu pendidikan dibagi ke dalam empat tahap yaitu:

- 1. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini termasuk di dalamnya adalah pembuatan kebijakan akreditasi madrasah, mengecek kesiapan berkas, dan lain sebagainya.
- 2. Tahap pemberkasan. Tahap pemberkasan disini diisi dengan kegiatan pemenuhan berkas bukti dan isian baik secara fisik maupun *online* sebagai



- proses evaluasi internal oleh madrasah.
- 3. Tahap visitasi. Tahap ini merupakan tahap evaluasi eksternal yang dilakukan oleh asesor atas pertimbangan laporan evaluasi diri yang telah dilakukan.
- 4. Tahap tindak lanjut. Setelah hasil penilaian akreditas selesai, maka madrasah akan mengetahui kelemahan dan kelebihan madrasahnya.

Akreditasi di lembaga pendidikan Kabupaten Sumenep, dipahami sebagai sebuah bahan untuk evaluasi diri terhadap standar mutu yang diterapkan di madrasah. Akreditasi menjadi salah satu pemicu untuk terus berusaha memenuhi standar yang ditentukan secara nasional dengan sebaik mungkin. Karena mutu menjadi sorotan utama di lembaga, maka begitu juga akreditasi yang benar-benar dijadikan bahan acuan evaluasi mutu di madrasah. Evaluasi yang dilakukan dilakukan secara bertahap dimulai dari EDS dan REN-STRA setelah itu adanya sebuah langkah kongkret yang diwujudkan dalam perencanaan program yang baru.

Jadi, tindak lanjut dari hasil penilaian akreditasi tersebut dijabarkan oleh lembaga menjadi berbagai program yang konkrit. Dimana, setiap program yang dibuat akan terus diupayakan untuk terus meningkat dan terlaksana sesuai dengan target capaian yang telah disepakati bersama. Tindak lanjut hasil akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan dibuatkannya beberapa kebijakan yang meliputi aspek pada bidang kurikulum, bagian kesiswaan, tim labolatorium IPA dan IT, bagian keperpustakaan, bagian tata usaha, hingga ke sisi profesionalisme SDM, dan efisiensi anggaran. Akhir dari segalanya, bahwa akreditasi merupakan perpaduan kata dan tindakan, yaitu "mengerjakan apa yang tertulis, dan menulis apa yang dikerjakan".

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian literature, Bahwa dalam rangka mengukur Relevansi Assesment Visitasi Akreditasi Berbasis Online Dalam Peningkatan Mutu Lembaga di Kabupaten Sumenep khususnya pada masa pandemi covid-19 ada beberapa hal yang menjadi titik tekan yang menjadi perhatian dan rekomendasi bagi pengelola lembaga pendidikan dan pemangku kebijakan di Kabupaten Sumenep antara lain adalah:

- 1. Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lembaga satuan yang telah mendaftarkan diri dan memberanikan diri untuk maju pada tahapan visitasi akreditasi, dipahami bahwa proses dan tahapan ini merupakan bagian dari ikhtiar lembaga dalam rangka merawat dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) amanah undang-undang yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD PNF dan BAN S/M.
- 2. Memberikan informasi secara utuh dan komprehensif kepada pemangku kebijakan dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, bahwa Lembaga yang sudah memiliki sertifikat akreditasi Dinyatakan sebagai lembaga/satuan pendidikan yang mendapatkan pengakuan peringkat kelayakan dari sisi mutu akademik dan sisi pelayanan dari dinas terkait, Dalam hal ini bahwa sertifikat akreditasi lembaga menjadi acuan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep untuk memberikan pelayanan atau pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD/ MI, SMP/MT, sederajat, serta pencairan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk jenjang PAUD/TK/RA/KB.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian dan proses analisis yang telah dilakukan oleh tim peneliti, maka penelitian ini dapat ditarik beberapa benang merah kesimpulan, diantaranya adalah:

1. Dalam rangka peningkatan mutu pen-



didikan pada masa pandemi covid-19 di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Sumenep, sejauh ini, lembaga senantiasa berusaha untuk memenuhi Standar Nasional pendidikan (SNP) sebagaimana yang sudah menjadi instrumen Mutu oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan nonformal (BAN PAUD PNF) dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M). Updating pengembangan kurikulum yang senantiasa mengikuti perubahan zaman serta kondisi terkini, khususnya kurikulum yang mengakomodir situasi dan kondisi yang darurat, agar lembaga melakukan beberapa perubahan dan inovasi terkait dengan pembelajaran. Namun dalam perkembangannya situasi dan kondisi menuntut para guru untuk melakukan peningkatan akademik dan potensi diri melalui peningkatan kompetensi digital seperti penguasaan Zoom meeting, Google meet, dan Google classroom.

- 2. Berkenaan dengan layanan pendidikan di masa pandemi covid-19, inovasi pembelajaran dilakukan pihak lembaga untuk mencari solusi dan langkah-langkah solutif dalam rangka transfer of knowledge agar menuntaskan seluruh ataupun sebagian dari materi pembelajaran di tengah kondisi force majeure. Adanya regulasi dan kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, bahwa kondisi darurat ini memerlukan regulasi dan kebijakan berupa Perda/edaran lainnya akan menjadi payung hukum dalam rangka agar lembaga memberikan pelayanan prima kepada peserta. Adanya Support sistem oleh pemerintah Kabupaten Sumenep.
- 3. Kaitannya dengan Relevansi Assesment Visitasi Akreditasi Berbasis Online Dalam Peningkatan Mutu Lembaga, bah-

wa akreditasi merupakah rangkaian proses evaluasi terkait mutu pendidikan di setiap lembaga untuk mencapai standar mutu nasional, pemerintah hendaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginva kepada satuan lembaga yang telah mendaftarkan diri dan memberanikan diri untuk maju Pada tahapan visitasi akreditasi, dipahami bahwa proses dan tahapan ini merupakan bagian dari ikhtiar lembaga dalam rangka merawat dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP. Lembaga yang sudah memiliki sertifikat akreditasi dan dinyatakan sebagai lembaga/ satuan pendidikan yang mendapatkan pengakuan peringkat kelayakan dari sisi mutu akademik dan sisi pelayanan dari dinas terkait, Dalam hal ini bahwa sertifikat akreditasi lembaga dijadikan acuan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep untuk memberikan pelayanan atau pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA sederajat, serta pencairan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk ienjang PAUD/TK/RA/KB.

Kemudian, berdasarkan kajian di atas, dapat ditulis beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep

a. Pemberian Apresiasis yang tinggi terhadap lembaga yang menyelesaikan tahapan akreditasi. Lembaga yang memiliki sertifikat akreditasi menjadi acuan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep untuk memberikan pelayanan administrasi atau pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sederajat, serta pencairan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk jenjang PAUD/TK/ RA/KB.



b. Supprort sistem oleh pemerintah, berupa peningkatan akses jaringan internet yang murah dan terjangkau, bantuan sarana dan prasarana seperti laptop dan kouta internet maupun media/alat yang diperlukan bagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Sumenep.

2. Bagi Pengelola Lembaga Pendidikan

- Menggalakkan upaya peningkata kwalitas SDM di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya terkait pengembangan (Upgrading) di bidang digital atau Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Inovasi pembelajaran perlu dikembangkan sehingga upaya transfer of knowledge dapat dilaksanakan secara maksimal.
- Updating pengembangan kurikulum yang senantiasa mengikuti perubahan zaman serta kondisi terkini khususnya kurikulum yang mengakomodir situasi dan kondisi yang darurat covid-19.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya berfokus pada jenjang pendidikan TK/RA, MI/SD, dan SMP/MTs dan lembaga yang sederajat yang ada di Kabupaten Sumenep. Maka penelitian selanjutkan perlu menfokuskan pada jenjang pendidikan lainnya lainya seperti SMA/MA dan Perguruan Tinggi, untuk mengetahui terkait peningkatan mutu dan layanan pendidikan di masa pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal," 2018.

Kementrian Agama RI. Panduan Pelaksanaan Program Percepatan Akreditasi Madrasah, Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2011.

Malik, Abdul, Amat Nyoto, Arismunandar, Budi Susetyo, dan Capri Anjaya. Pedoman Akreditasi Sekolah Dan Madrasah Tahun 2021. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. "Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)." Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2021.

Nahdi, Khirjan, Sandy Ramdhani, Riyana Rizki Yuliatin, dan Yul Alfian Hadi. "Implementasi Pembelajaran pada Masa Lockdown bagi Lembaga PAUD di Kabupaten Lombok Timur." Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, vol.5, no. 1 (24 May 2020): 177-186.

Raharjo, Sabar Budi, Subijanto, Idris HM Noor, Meni Handayani, dan Catur Dyah Fajarini. Sinkronisasi Peraturan Dikdasmen: Fokus Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pada Satuan Pendidikan. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud, 2017.

Model Pelayanan Publik Berbasis Kecamatan di Kabupaten Sumenep

Junaidi, Khamsil Laili, Fathorrahman, Lailul Ilham, Sahli, Ainul Yaqin (Tim Peneliti LP3M STIDAR Sumenep)

ABSTRAK

Artikel ini dihasilkan dari Penelitian yang dilaksanakan dalam rangka mengetahui penyelenggaraan pelayanan publik di lembaga Pemerintahan Kecamatan Ganding Sumenep, dan secara spesifik penelitian akan dilakukan di tiga bidang layanan, yaitu bidang pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas), bidang pelayanan kependudukan UPTD Dukcapil, serta bidang layanan perizinan pemerintah Kecamatan Ganding Sumenep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian fenomenologis. Subyek penelitian ini antara lain: 1) Kepala Kecamatan Ganding, 2) Ketua Puskesmas, 3) Pelaksana Pelayanan Kesehatan, 4) Ketua Bagian Pelayanan Kependudukan, 5) Pelaksana Pelayanan Kepenudukan, dan 6) Ketua Bagian Pelayanan Perizinan, 7) Pelaksana Layanan Perizinan, 8) Warga Kecamatan Ganding yang sedang atau pernah mendapat salah satu atau beberapa layanan dari beberapa bidang layanan. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini terdapat tiga cara, yaitu dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Kemudian analisis datanya menggunakan tiga metode, yaitu pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Alhasil, model penyelenggaraan pelayan di UPTD Dukcapil, Puskesmas dan bidang layanan perizinan Kecamatan Ganding, pada masing-masing bidang layanan tersebut terdapat konsep atau metode pelayanan yang dipraktikkan oleh semua petugas layanan sebagai bentuk upaya penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas dan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan di UPTD Dukcapil, Puskesmas dan Perizinan di Kecamatan Ganding sudah dilaksanakan dengan cukup efektif.

Kata Kunci: Layanan Publik, Dukcapil, Puskesmas, Perizinan

Pendahuluan

Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak, ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi) dan dilakukan secara universal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Moenir

(1995: 41) bahwa: "hak atas pelayanan itu sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan".

Pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama penyelenggaraan



administrasi publik dan kajian tentang penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia menjadi isu yang terus strategis karena peningkatan kualitas pelayanan publik yang cenderung lambat sehingga upaya-upaya adaptasi dan perbaikan terus selalu dilakukan. Sebab, pelayanan publik memiliki implikasi sangat luas karena menyentuh seluruh ruang- ruang publik baik di sektor sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Rendahnya kulitas pelayanan publik di masing-masing sektor memiliki dampak dan resiko yang berbeda dan secara umum dampak yang pasti adalah ketidaknyamanan yang diasakan oleh masyarakat, kemudian berdampak pada rendahnya tingkat kepuasan, kemudian membentuk persepsi negatif terkait pelayanan publik yang tidak berkualitas dan akibat lanjutannya adalah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan pelayanan publik.

Definisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik dalam Lembaga Administrasi Negara diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004) menyebutkan bahwa: Pelayanan publik adalah suatu proses ban-

tuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa (Purwanto, dkk., 2017: 8).

Terbentuknya persepsi negatif dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, rendahnya kualitas pelayanan publik juga berdampak pada terganggunya psikologi masyarakat yang dapat dideteksi dari rendahnya partisipasi masyarakat, berkurangnya penghargaan terhadap petugas dan fasilitas layanan, timbulnya rasa curiga, meningkatnya sifat eksklusifitas, sehingga pada akhirnya berujung pada sikap apatis terhadap berbagai pelayanan publik yang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Situasi demikian mendesak birokrasi sebagai tenaga penyelenggara layanan untuk segera melakukan reformasi pelayanan publik karena dengan perbaikan pelayanan dapat mempengarhih tingkat kepuasan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dibangun kembali.

Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik harus selalu dilakukan karena perbaikan pelayanan publik dapat memperbaiki iklim sosial kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap setiap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam berbagai studi yang dilakukan terhadap pelayanan publik didapati informasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang masih belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat umum sebagai penerima layanan. Akibatnya harapan pemerintah terhadap tingginya partisipasi masyarakat dalam merespon berbagai kebijakan dan pelayanan publik masih belum sesuai dengan tingkat yang diharapkan. Dengan demikian, perlu terus dilakukan evaluasi serta upaya perbaikan dan peningkatan



kualitas pelayanan publik untuk menyambut cita-cita dan harapan besar pemerintah.

Upaya perbaikan dan peningkatkan kualitas pelayanan publik dibutuhkan banyak hal, termasuk dibutuhkan kajian-kajian terkait konsep dan proses pelaksanaan pelayanan publik, dibutuhkan diskusi yang serius dan mendalam, dibutuhkan kesamaan pemahaman tentang konsep dan prinsip pelayanan publik serta dibutuhkan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga pelaksana layanan. Selain beberapa upaya di atas, peningkatan kualitas pelayanan publik juga dapat dilakukan dengan pelaksanaan penelitian (riset khusus) terhadap penyelenggaraan pelayanan tersebut. Menggunakan riset sebagai strategi peningkatan kualitas pelayanan publik tentu sangat efektif karena dengan riset pelaksaan pelayanan yang telah dilaksanakan akan diteliti dan dikaji secara serius dan mendalam sehingga ditemukan data-data dan informasi yang komprehensif dan faktual terkait realisasi pelayanan publik tersebut. Sehingga berdasar pada hasil riset akan mempermudah pelaksana layanan dalam mengidentifikasi bagian-bagian pelayanan yang kurang atau tidak memenuhi standar kualitas pelayanan publik yang baik dan juga mempermudah dalam melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek pelayanan yang dianggap kurang maksimal. Sehingga petugas layanan memiliki data yang komprehensif terkait penyelenggaraan pelayanan dan mempermudah dalam merencanakan langkah-langkah baru untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan.

Kemudian sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukanlan penelitian ini sebagai upaya pengkajian mendalam terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada tiga bidang pelayanan di pemerintahan Kecamatan Ganding, yaitu Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan (UPTD Dukcapil Wilayah I), Bidang Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

dan Bidang Pelayanan Perizinan. Pilihan terhadap tiga bidang tersebut berdasarkan pada tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap tiga sektor layanan tersebut, mulai dari kebutuhan pemutakhiran data dan digitalisasi catatan kependudukan yang terus digencarkan, kemudian layanan kesehatan terus meniadi kebutuhan daar masyarakat terlebih sejak masa pandemi yang menyebabkan masyarakat mengalami persoalan kesehatan, kamudian kecenderngan masyarakat sekarang yang mulai beralih ke bidang bisnis sehingga membutuhkan pengurusan perizinan serta keperluan-keperluan lain yang juga membutuhkan administrasi perizinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Lexy J., Moleong, 2012:4), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan yang terdiri dari perilaku-perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian fenomenologis, karena akan mengamati dan meneliti secara holistik dan mendalam terkait fenomena penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan Kecamatan Ganding, khususnya pelaksanaan pelayanan kesehatan (Puskesmas), pelayanan kependudukan, serta pelayanan perizinan pemerintah Kecamatan Ganding Sumenep.

Penelitian pelayanan publik ini dilakukan di Kantor Kecamatan Ganding dengan tiga spesifikasi obyek penelitian terkait metode penyelenggaraan pelayanan di beberapa bagian pelayanan. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 06 September 2021 sampai 15 Nopember 2021.

Penentuan subyek penelitian (informan/narasumber) ini menggunakan beberapa kriteria menurut Spradley (2000: 42), antaran lain: 1) Enkulturasi penuh, 2)



Gangguan langsung, 3) Suasana budaya yang tidak dikenal, 4) Cukup waktu, dan 5) Non- analitik. Berdasarkan kriteria di atas kemudian ditentukan beberapa narasumber penelitian ini antara lain: 1) Kepala Kecamatan Ganding, 2) Ketua Puskesmas, 3) Pelaksana Pelayanan Kesehatan, 4) Ketua Bagian Pelayanan Kependudukan, 5) Pelaksana Pelayanan Kepenudukan, dan 6) Ketua Bagian Pelayanan Perizinan, 7) Pelaksana Layanan Perizinan, 8) Warga Kecamatan Ganding yang sedang atau pernah mendapat salah satu atau beberapa layanan dari beberapa bidang layanan.

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini terdapat tiga cara, yaitu dengan Observasi, Wawancara (dengan informan sesuai ketentuan kriteria)¹, dan Dokumentasi (Hadi, 2000: 74 & 193 dan Basrowi dan Suwandi, 2008: 165). Kemudian metode analisis datanya menggunakan tiga metode, di antaranya: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian terkait model pelayanan publik pemerintah Kecamatan Ganding, khususnya pelayanan yang berkualitas pada tiga bidang pelayanan tersebut diharapkan menjadi model percontohan yang dapat diterapkan oleh petugas-petugas layanan di berbagai birokrasi pemerintahan, khususnya di kecamatan-kecamatan lain di daerah Kabupaten Sumenep. Penjabaran dan penjelasan hasil penelitian model pelayanan publik pemerintah Kecamatan Ganding sebagai berikut:

1. Pelayanan UPTD Dukcapil Kecamatan Ganding

Secara spesifik UPTD Dukcapil Wilayah I Kecamatan Ganding tidak memiliki konsep atau model layanan yang terstuktur dan terencana, sebab dalam metode peneyelenggaraan pelayanannya petugas memberikan pelayanan sesuai

1. Sutrisno Hadi, Metodologi Research..., hlm. 193

aturan atau mekenisme pelaksanaan pelayanan publik secara umum. Berdasarkan beberapa indikator kualitas pelayanan publik, mulai dari aspek tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, penyelenggaraan pelayanan Kantor UPTD Dukcapil Wilayah I sudah memberikan kriteria pelayanan sesuai indikator tersebut. Termasuk fasilitas dan peralatan palayanan yang cukup lengkap kemudian diupayakan secara maksimal dalam memberikan bantuan pelayanan, kemudian kemampuan petugas dalam memberikan penjelasan dan arahan kepada masyarakat kemampuan komunikasi baik dan ramah, kemudian kemampuan menunjukkan kepedulian tinggi dalam membantu penyelesaian kebutuhan masyarakat serta kemampuan memeberikan pelayanan yang cepat dan mudah.

Tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan yang bermuara pada tugas daerah otonom, secara derivatif tugas-tugas pelayanan pemerintah kecamatan kepada masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) pelayanan yang berkaitan dengan kependudukan; (2) pelayanan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ketertiban dan keamanan, (3) pelayanan yang berkaitan dengan perijinan; (4) pelayanan vang berkaitan dengan kesejahteraan; (5) pelayanan yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan masyarakat; (6) pelayanan yang berkiatan dengan pengembangan perekonomian masyarakat; (7) pelayanan yang berkaitan pembinaan pemuda, wanita dan persatuan dan kesatuan bangsa; (8) pelayanan yang berkaitan dengan pembinaan sosial budaya; (9) pelayanan yang berkaitan dengan tugas pembantuan seperti pembayaran PBB; (10) pelayanan admnistrasi surat menyurat bagi kepentingan masyarakat; dan pelayanan lainnya (Nurdin, 2019: 20).

Beberapa hal komitmen UPTD Dukcapil Kecamatan Ganding yang berimplikasi besar terhadap kualitas penyelenggaraan layanan serta kepuasan



masyarakat, yang mulanya merupakan cita-cita Kepala UPTD Dukcapil kemudian dikomunikasikan kepada semua pelaksana layanan untuk bersama-sama mensukseskan komitmen tersebut, vaitu terdiri 3 hal komitmen berikut; 1) Masyarakat harus sebentar di Kantor Dukcapil, komitmen tersebut menunjukkan cara pelayanan yang cepat dan mudah sehingga masyarakat tidak lama-lama berada di kantor, dengan pertimbangan setiap warga memiliki kesibukan yang beragam (terlebih masyarakat pedesaan). 2) Masyarakat harus sekali ke Kantor Dukcapil, komitmen ini menunjukkan upaya pelayanan yang bisa menyelesakan satu persoalan pada waktu pengurusan supaya masyarakat tidak perlu bolak-balik datang ke Kantor UPTD untuk mengurus satu kepentingan tertentu serta supaya masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk kembali ke kantor mengurus kebutuhan yang tidak selesai.

2. Pelayanan Puskesmas Kecamatan Ganding

Penyelenggaraan pelayanan, Puskesmas memiliki satu konsep dasar pelayanan yang disepakati menjadi etika pelayanan oleh semua petugas layanan dalam melaksanakan tugas pelayanan di Puskesmas. Konsep tersebut dikenal dengan "SEHATI", istilah tersebut merupakan singkatan dari beberapa sikap yang harus ditunjukkan oleh petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun singkatan istilah SEHATI adalah; 1) Senyum, 2) Empati, Harmonis, 3) Aman, 4) Tertib. Orientasi konsep SEHATI untuk membangun kultur pelayanan yang ramah dalam memberikan pelayanan, memiliki kepedulian terhadap persoalan klien, membangun komunikasi yang hangat, memberikan kepercayaan kepada klien terhadap kemampuan personal petugas layanan, serta kemampuan menjalankan tugas pelayanan sesuai ketentuan SOP yang telah ditetapkan.

Menurut Pararusman dan kawankawan (dalam Tiiptono, 1996: 70) ada lima dimensi dalam menilai kualitas jasa atau pelayanan, yaitu: a) Tangibles; tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil dan bahan komunikasi. b) Realibility; kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara terpercaya, tepat. c) Responsiveness: kemamuan untuk membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan yang tepat. d) Assurance; pengetahuan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan. e) Emphathy; perhatian individual diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggan.

Lima sikap yang disepakati dan dilaksanakan oleh semua petugas pelayanan di puskesmas merupakan upaya pihak puskesmas dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. Sikapsikap yang terkandung dalam konsep SE-HATI sesuai dengan indikator kualitas pelayanan publik; tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Sehingga dengan komitmen melaksanakan konsep SEHATI, proses penyelenggaraan pelayanan publik di Puskesmas dapat terlaksana dengan maksimal, berjalan secara efektif dan efisien, sehingga memberikan kenyamanan serta tingkat kepuasan yang tinggi terhadap masyarakat yang mendapat pelayanan.

3. Pelayanan Perizinan Kecamatan Ganding

Para pakar administrasi publik menjelaskan bahwa terdapat banyak prinsip yang perlu dipenuhi supaya pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih baik. Namun demikian, sebelum mendiskusikan bagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, terlebih dahulu perlu mengetahui hal-hal fundamental yang mendasari pelaksanaan pelayanan publik. Selain hal-hal mendasar yang perlu dijadikan pegangan dalam memberikan pelayanan publik, perlu



diketahui bahwa pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip vang digunakan untuk merespon berbagai kelemahan yang melekat pada tubuh birokrasi. Dalam pemikiran Erwan Agus Purwanto, dkk. (2017: 30-35), berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah:

- a. Partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnva;
- b. Transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti: persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya;
- c. Responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan;
- d. Tidak diskriminatif. Pelayanan publik tidak boleh membedakan cara pelayanan atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti: status sosial, pandangan politik, enisitas, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya;
- e. Mudah dan Murah. Dalam pelayanan tertentu masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar biaya, maka pemerintah harus memberikan pelayanan yang mudah serta dengan biaya yang terjangkau;
- f. Efektif dan Efisien. Penyelenggaraan

- pelayan publik harus mampu mewujudkan tujuan dan mencapai tujuan strategis negara dalam jangka panjang dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah;
- g. Aksesibel. Pelayanan publik harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan, Misalnya: jarak dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah ditemukan, dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut.
- Penyelenggaraan h. Akuntabel. layanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada masyarakat;
- Berkeadilan. Pelayanan publik memiliki banyak tujuan dan salah satunya adalah untuk melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain, jadi pelayanan publik menjadi alat untuk melindungi masyarakat.

Layanan Perizinan Kecamatan Ganding memiliki dua konsep pelayanan yang sangat familiar dan sudah diimplementasikan sejak beberapa tahun lalu, tepatnya sejak masa pemerintahan bupati sebelumnya (KH. Busyro Karim). Adapun kedua konsep layanan tersebut adalah: *Pertama*; Jargon "DARA PATAS", istilah tersebut singkatan dari "Damuda, Ramura, Pat-cepat, dan Tas-tuntas". Maksud dari istilah tersebut adalah; Pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas dengan semangat muda, Biaya pelayanan yang murah, Pelayanan yang cepat, dan Pelayanan yang selesai/tuntas. Jargon tersebut diresmikan beberapa tahun sebelumnya dan sampai



hari ini jargon tersebut terus dikawal oleh pemerintah Kecamatan Ganding sehingga terus dilaksanakan oleh semua struktur personalia di bawah Pemerintahan Kecamatan Ganding, termasuk dalam metor pelaksanaan pelayanan di bidang Pelavanan Perizinan.

"10 *Kedua*; Prinsip **BUDAYA** MALU". Prinsip tersebut merupakan konsep pelayanan publik di Bidang Pelayanan Perizinan serta bagi pegawai pemerintah Kecamatan Ganding secara umum, yang menjadikan "rasa malu" sebagai landasan dalam melaksanakan tugas-tugas birokrasi secara profesional serta meninggalkan pelanggaran kerja atas dasar rasa malu. Prinsip Budaya Malu tersebut juga ditulis dan ditempelkan di sudut-sudut dinding kantor sebagai warning dan control terhadap kerja pegawai. Adapun 10 Budaya Malu tersebut antara lain: 1) Aku malu jika terlambat masuk kantor, 2) Aaku malu jika tidak ikut apel, 3) Aku malu jika tidak masuk kerja tanpa alasan, 4) Aku malu sering minta izin tidak masuk kerja, 5) Aku malu jika bekerja tanpa program kerja, 6) Aku malu jika pulang sebelum waktunya, 7) Aku malu jika sering meninggalkan kantor tanpa alasan, 8) Aku malu jika bekerja tanpa pertanggung jawaban, 9) Aku malu jika pekerjaan terbengkalai, 10) Aku malu jika sering berpakaian tidak rapi tanpa atribut. Sepuluh budaya tersebut dijadikan sebagai dasar dalam membangun budaya kerja yang positif dan budaya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Kesimpulan

Dalam uraian penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pelayanan di UPTD Dukcapil Wilayah I, Puskesmas dan Perizinan di Kecamatan Ganding sudah dilaksanakan dengan cukup efektif. Indikator cukup efektif tersebut didasarkan pada pemberian layanan tiga sektor pelayanan publik di Kecamatan Ganding telah memeberikan pelayanan yang sesuai dengan beberapa indikator

kualitas pelayanan publik serta dibuktikan dengan kesan dan pernyataan masyarakat (penerima layanan) yang menunjukkan kepuasan terhadap model penyelenggaraan pelayanan yang telah diberikan oleh petugas layanan di tiga sektor tersebut.

Namun penilaian cukup efektif pada penyelenggaraan pelayanan publik (di tiga sektor) juga didasarkan pada beberapa situasi yang menghambat petugas layanan dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Adapun hambatan yang dimaksud mengarah kepada data-data yang muncul dalam indikator Tangibles, vaitu data yang menunjukkan keterbatasan atau kelamahan fasilitas lavanan di sektor bangunan/gedung pelayanan serta perangkat peralatan pelayanan. Keterbatasan tersebut berupa fasilitas gedung vang sempit sehingga mempersulit pegawai dalam melakukan pengelolaan ruang kerja dan pelayanan serta keterbatasan peralatan pelayanan sehingga menghambat penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan mudah.

Berdasarkan paparan data terkait model penyelenggaraan pelayan di UPTD Dukcapil, Puskesmas dan bidang layanan perizinan Kecamatan Ganding, pada masing-masing bidang layanan tersebut terdapat konsep atau metode pelayanan yang dipraktikkan oleh semua petugas layanan sebagai bentuk upaya penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas dan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap masyarakat. Konsep tersebut terbukti efektif dan membantu petugas layanan dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal. Sehingga bagamana jika konsep pelayan tersebut dapat diadaptasi atau dijadikan sebagai model dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan-kecamatan lain di daerah kabupaten Sumenep.



DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Purwanto, Erwan Agus, dkk,. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Pelayanan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Usman, Husain dan Soetady, Purnomo. 2000. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nurdin, Ismail. 2019. Kualitas Pelayanan

- Publik (Perilaku Paratur dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik). Surabaya: Media Sahabat Cendekia Jambi Ekspres, Selasa, 24 Oktober 2000
- Lexy J., Moleong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Miles, Moenir, H.A.S.. Manajemen 1995. Pelayanan Umum. Jakarta: Bumi Aksara
- Hadi, Sutrisno. 2000. Metodologi reserch Jilid II. Yogyakarta: Andi Offset

Pengembangan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumenep Perspektif Hexa Helix

Mohammad Hidayaturrahman, Rillia Aisyah Haris, Imam Hidayat, Miming Indrasatin, Priyo Armaji (Tim Peneliti LPPM Universitas Wiraraja Sumenep)

ABSTRAK

Pembangunan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan memiliki tantangan. Diantara tantangannya adalah, keberlanjutan (sustainability) pembangunan dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan. Pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam menghadapi persoalan ini. Salah satu alternatif pembangunan yang mampu menjawab keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, sekaligus mampu mewujudkan kesejahteraan adalah pembangunan di sektor pariwisata. Banyak negara di dunia yang berhasil membangun ekonominya berbasis pada pariwisata, Arab Saudi dengan wisata religi, dan Singapura dengan wisata belanja. Beberapa daerah di Indonesia juga mampu membangun perekonomian dengan pembangunan sektor pariwisata seperti Kota Batu, Jawa Timur dan Bali. Keberhasilan pembangunan pariwisata di beberapa daerah tersebut dengan keberadaan aspek business.

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana aspek business dalam hal ini industri/ perusahaan dan perbankan di dalam mendorong keberhasilan pembangunan sektor pariwisata. Pembangunan pariwisata yang melibatkan aspek business merupakan bagian dari konsep hexa helix, yaitu academic, business, government, media massa, community, legal or regulation (ABCG-ML). Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif komparatif.

Komparasi antara Kabupaten Sumenep dengan Kota Batu, Jawa Timur. Penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep di sektor pariwisata, kemudian buku panduan model pengelolaan sector pariwisata berbasis hexa helix, publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta, dan publikasi di media massa.

Kata Kunci: *Pembangunan, Pariwisata, Hexa Helix.*



A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir sektor pariwisata khususnya, sebelum pandemi Covid-19 terjadi, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di dunia. Pada tahun 2014, industri pariwisata menjadi industri besar dengan pendapatan mencapai US\$ 7,6 triliun (Setyowati & Octavia, 2016). Di Indonesia, sektor pariwisata juga mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, terutama sebelum covid-19. Beragam industri dan usaha yang berkaitan dengan pariwisata di Indonesia mampu memberi kontribusi nyata bagi peningkatan perekonomian di Indonesia (Hulu, 2018). Sektor pariwisata berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional (Withaningsih et al., 2018). Pada tahun 2015, sektor pariwisata menduduki peringkat keempat dalam pemasukan devisa negara, vaitu sebesar 9,3%. Selain itu, sektor pariwisata membuka setidaknya 9,8 juta lapangan pekerjaan atau 8,4% lapangan kerja nasional (Kriswibowo, 2016). Namun setelah Covid-19 melanda, kegiatan bisnis pada industri pariwisata bagi negara-negara yang bergantung pada industri pariwisata mengalami kesulitan, setidaknya pada saat pandemi masih berlangsung. Untuk kembali ke situasi normal dibutuhkan kerja keras. Sektor pariwisata harus berjuang untuk meningkatkan daya saing yang dimiliki, sehingga industri pariwisata dapat menjadi menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) (Fernandez et al., 2021).

Sektor pariwisata memiliki banyak bidang dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi riil, kecil dan menengah. Seperti usaha kuliner dan beragam kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan. Kondisi ini memberi dampak positif secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat (Musthofa, 2019). Hal tersebut seiring dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang pembangunan pariwisata di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, sumber daya, dan lainnya (Sonder & Yulianie, 2019). Hal ini sejalan pula dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2015-2019, sektor pariwisata menjadi pilar ekonomi negara (Yatmaja, 2019).

Sektor pariwisata hingga kini masih menjadi primadona dalam menggerakan perekonomian di Indonesia. Salah satunya disebabkan karena pariwisata menjadi alternatif dalam peningkatan perekonomian rakyat. Hal ini sekaligus menjadi alternatif dari pengelolaan sumber daya alam berbasis ekstraksi (Yuli, 2011). Maka, pengelola pariwisata perlu mempertimbangan pembangunan pariwisata melalui pendekatan gerakan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan pariwisata berbasis pendekatan pertumbuhan (Sørensen & Grindsted, 2021). Selain itu keberhasilan dari pengelolaan dan pemasaran sektor pariwisata adalah dengan memahami tingkat keterlibatan pengunjung terhadap lokasi wisata (Hogg et al., 2011).

Dalam perkembangannya, sektor pariwisata di berbagai daerah di Indonesia, berhasil membangun perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan warga di daerah. Banyak kota dan kabupaten di Indonesia yang dulunya tertinggal, sekarang berhasil maju setelah pembangunan dengan pemanfaatan lingkungan alam secara bijak, dengan menggalakkan sektor pariwisata, seperti Kabupaten Banyuwangi dan Kota Batu, Jawa Timur. Industri pariwisata perlu melibatkan aspek sosial masyarakat sehingga keberhasilan pembangunan keberlanjutan pariwisata bisa dilihat dari pemanfaatan lingkungan alam yang bertanggung jawab (Farkic et al., 2021).

Pada sisi lain, kemajuan di sektor pariwisata juga menyisakan persoalan,



salah satunya adalah adanya ketimpangan yang terjadi antara pengusaha besar di bidang pariwisata dengan kegiatan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat dan usaha kecil menengah. Dalam pandangan sebagian kalangan, bisnis pariwisata lebih banyak menguntungkan investor, sementara masyarakat lokal hanya mendapat peran sedikit di dalam pengelolaan pariwisata (Yulianti et al., 2019). Padahal dalam beberapa kasus, saat masyarakat diberi kesempatan untuk mengelola wisata, mereka juga berhasil mengembangkannya dengan baik. Sehingga dampak ekonomi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Meski, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kegiatan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat yang tidak terurus dan bahkan tutup (Intan, 2019). Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki persoalan berkaitan dengan pelestarian budaya lokal dan lingkungan hidup (Nyoman, 2019).

Kabupaten Sumenep, Jawa Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak potensi wisata, mulai dari wisata bahari, wisata religi, wisata budaya, wisata alam, dan lain-lain. Pembangunan pariwisata tetap perlu menfokuskan terhadap nilai dan situs warisan, pelestarian sejarah sehingga juga mampu memberi kontribusi besar bagi kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dari pembangunan pariwisata (Li et al., 2022).

Meski begitu, pembangunan di sektor pariwisata yang terus digencarkan di Kabupaten Sumenep belum mampu menjadi daya dorong yang besar terhadap peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan warga. Banyak objek wisata yang telah ada, belum mampu menjadi kantong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Seperti yang terjadi pada wisata Kampung Pasir di Desa Legung Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep sejak ditetapkan sebagai

kampung wisata pasir. Begitu pula dengan wisata Keris di Desa Aeng Tong Tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Hal ini tidak lepas dari belum berpadunya seluruh elemen di dalam menggerakkan sektor pariwisata. Pembangunan pariwisata perlu bersifat integral dan holictic, sehingga berdampak pada pelaku pariwisata dan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Pelibatan seluruh stakeholders untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan pariwisata (Kronenberg & Fuchs, 2021).

B. Pembahasan

1. Unsur Pendidikan (Academic)

Unsur akademik, atau dunia pendidikan dalam pembangunan sektor pariwisata memiliki peran penting (Damayanti, 2019). Unsur akademik yang dimaksud bisa dari sekolah menengah, terutama sekolah menengah kejuruan (SMK) yang memiliki jurusan pariwisata dan sejenisnya, maupun pendidikan tinggi, seperti sekolah tinggi dan perguruan tinggi. Sekolah menengah kejuruan menjadi sumber (resources) bagi tenaga kerja yang dapat bekerja pada berbagai industri dan usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti perhotelan, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. Alumni sekolah menengah kejuruan yang memiliki jurusan pariwisata akan menjadi tenaga terampil yang bekerja di sektor pariwisata.

Perguruan tinggi dapat melakukan penelitian (research) dan kajian yang hasilnya bisa dijadikan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata (Purnaningrum & Ariqoh, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi tidak hanya berupa rekomendasi kebijakan, namun bisa juga dalam bentuk penemuan baru (invention), yang bisa dijadikan bahan oleh para pelaku, untuk membuka kegiatan usaha pariwisata. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat memberi sumbangsih, berupa pelaksanaan kegiatan yang berkai-



tan dengan pariwisata melalui pengabdian kepada masyarakat (PKM), baik yang dilakukan oleh para dosen maupun mahasiswa. Selain itu perguruan tinggi juga dapat menjadi sumber (resources) yang bisa melahirkan para sarjana yang bekerja di berbagai usaha dan industri berkaitan dengan sektor pariwisata pada berbagai kompetensi yang dimiliki.

Keterlibatan unsur akademik dalam pembangunan sektor pariwisata bisa dalam dua model. Pertama, inisiatif dimulai oleh dunia akademis. Sekolah atau perguruan tinggi melakukan kegiatan di sektor pariwisata berdasarkan inisiatif sendiri untuk terjun dan terlibat di dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sektor pariwisata, sesuai dengan keahlian, jurusan dan kemampuan yang dimiliki pihak akademis. Kegiatan penelitian perguruan tinggi dapat diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sektor pariwisata. Begitu pula dengan kegiatan pengabdian (Machfuzhoh et al., 2021).

Kedua, inisiatif dari pemerintah. Model ini bisa berupa inisiatif kegiatan datang dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Pemerintah daerah dapat mengajak keterlibatan dunia akademik dalam kegiatan sektor pariwisata (Umar et al., 2019). Misalnya dengan memperkuat sekolah menengah kejuruan pada jurusan dan keahlian yang berhubungan dengan sektor pariwisata. Bila belum ada jurusan yang berhubungan dengan sektor pariwisata, maka pemerintah melalui dinas pendidikan mengadakan jurusan tersebut. Bila jurusan yang berkaitan dengan sektor pariwisata sudah ada, maka perlu ditambah fasilitas dan laboratorium yang berkaitan dengan hal tersebut. Selain itu tentu saja mengadakan berbagai kegiatan magang industri bagi para siswa yang membuat kompetensi siswa di jurusan pariwisata semakin mumpuni dan ahli. Pelibatan siswa pada kegiatan atau event yang digelar oleh pemerintah daerah, berkaitan dengan sektor

pariwisata. Selain itu, pemerintah desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berhubungan dengan pariwisata mendapat pendampingan dari sekolah menengah kejuruan yang sudah memiliki jurusan pariwisata melalui siswa-siswa yang melakukan kegiatan magang. Begitu pula dengan keterlibatan perguruan tinggi di dalam pengembangan sektor pariwisata, bisa dimulai dari inisiatif pemerintah daerah atau pemerintah desa, berupa kerjasama penelitian dan pengabdian, atau *sharing* program dan lain sebagainya.

Tidak kalah penting dari kedua hal tersebut adalah, keterbukaan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa di dalam menerima berbagai temuan (invention) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, baik berupa riset hasil kebijakan, maupun produk yang berkaitan dengan sektor pariwisata (Setiawan, 2016).

Adapun kegiatan dari perguruan tinggi lebih banyak diterima dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Seperti pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa di berbagai kantor dan instansi pemerintah. Begitu pula dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) para mahasiswa, sangat diterima dengan baik dan difasilitas oleh aparatur pemerintah, baik di tingkat daerah maupun desa (Darmadi & Muhlisin, 2016). Hal ini menunjukkan sudah ada iktikad baik (good will) dari pemerintah daerah dan pemerintah desa di dalam melibatkan kalangan akademis.

2. Unsur Dunia Usaha (Business)

Unsur bisnis dan usaha (business) memiliki peran penting di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata (Ringa et al., 2018). Sekecil apalagi sebesar apapun kegiatan usaha yang dilakukan pada sektor pariwisata, tetap besar artinya untuk pengembangan sektor pariwisata. Pada era demokrasi, dimana pembangunan apapun termasuk pembangunan



sektor pariwisata menuntut adanya partisipasi publik. Semakin besar partisipasi publik, semakin baik bagi pengembangan pembangunan pariwisata. Setiap usaha yang dijalankan pada sektor pariwisata memiliki nilai tambah bagi pembangunan di daerah. Begitu pula dengan pembangunan di desa, sangat besar peranan dunia usaha.

Kenyataannya, meski dana dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki pemerintah daerah terbilang besar, bisa mencapai angka Rp 2 triliun rupiah, namun tetap saja dana tersebut separuhnya dihabiskan untuk membiayai gaji dan honor aparatus pemerintah, tunjangan dan kebutuhan rutin perkantoran dan dinas. Selebihnya baru dipergunakan untuk provek pembangunan. Masalahnya tidak hanya sampai disitu, tidak semua dana yang dianggarkan untuk proyek pembangunan, dapat dialokasikan untuk kegiatan usaha atau membuka lapangan pekerjaan secara langsung, karena memang pemerintah dilarang untuk berbisnis secara langsung. Namun dana tersebut secara umum dipergunakan untuk membangunan sarana dan prasarana juga infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan fasilitas pelayanan. Selain itu dana tersebut dipergunakan untuk proyek atau program pelayanan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Kalaupun dipergunakan untuk prgoram yang berkaitan dengan usaha, tidak lebih dari kegiatan pemberdayaan dan penampingan bagi kelompok yang kurang mampu.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum pemerintah membutuhkan dunia usaha untuk membuka lapangan pekerjaan, termasuk juga menggerakkan sektor pariwisata. Dunia usaha/bisnis yang selanjutnya membuka usaha-usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Lahan yang menjadi milik pemerintah sekalipun juga dapat dikerjasamakan dengan sektor swasta (private sector) yang

terjun langsung dalam pengelolaan usaha di sektor pariwisata. Dunia usaha/ bisnis yang mengelola langsung kegiatan sektor pariwisata perlu mendapat kemudahan di dalam kegiatan usahanya. Sehingga mereka merasa dimudahkan untuk melakukan kegiatan usaha (investasi) di sektor pariwisata. Keberadaan dunia usaha/ bisnis di dalam sektor pariwisata, akan menambah ramai dan semarak kegiatan pariwisata. Suatu daerah/ lokasi wisata yang ramai dan semarak, selanjutnya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan (tourist), baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke suatu daerah/ lokasi wisata.

Tidak berhenti di situ, sektor pariwisata juga secara langsung berdampak pada perekrutan tenaga kerja (Dewi et al., 2019). Banyaknya usaha yang bergerak di sektor pariwisata juga akan memperkejakan banyak tenaga kerja. Pada saat banyak tenaga kerja yang bekerja, maka pengangguran semakin berkurang. Saat pengangguran semakin minim, maka semakin banyak orang yang sibuk dalam pekerjaan masing-masing. Dengan begitu, potensi gangguan sosial juga semakin minim. Minimnya gangguan sosial akan semakin menguatkan kondisi pariwisata yang aman, nyaman dan damai, tanpa tindakan kriminalitas atau premanisme yang mengganggu kelancaran kegiatan wisata.

Secara tidak langsung, pelan tapi pasti dunia usaha/ bisnis yang bergerak di sektor pariwisata juga akan menciptakan efek lanjutan (tricle down effect) terhadap perekonomian suatu daerah (Larasati, 2017). Efek lanjutan ini berupa terbukan-ya peluang usaha baru, dalam skala kecil yang diciptakan oleh para pekerja yang telah memiliki pemasukan, yang sebagian diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagian lagi disimpan untuk diinvestasikan pada kegiatan yang menguntungkan. Misalnya dengan membuka usaha makanan, minuman, jasa layanan, dan lain-lain. Setiap usaha yang



dibuat akan merekrut tenaga kerja baru, selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Begitu seterusnya, sehingga keberadaan dunia usaha/ bisnis dapat menjadi penggerak utama di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata (Bahrudin, 2017). Semakin banyak dan semakin besar kegiatan usaha di sektor pariwisata, maka semakin besar pula manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa, termasuk masvarakat secara umum. Dengan catatan, usaha/ bisnis yang dijalankan merekrut tenaga kerja yang berasal dari daerah dimana kegiatan usaha tersebut dijalankan. Hal ini tentu saja berkaitan langsung dengan unsur pertama, yaitu unsur akademik, yang harus menyiapkan sejak awal sumber daya manusia yang mumpuni, profesional dan memiliki kompetensi di bidang atau pekerjaan yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

3. Unsur Komunitas (Community)

Komunitas (community) memiliki peran tidak kalah penting dengan sektor lain. Komunitas dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang ada di sekitar lokasi wisata. Kelompok masyarakat dalam arti luas. Bisa berupa karang taruna, kelompok pemuda desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), bisa pula kelompok ibu-ibu, atau masyarakat dalam arti umum (Hanajayani & Ariffuddin, 2018). Keberadaan kelompok masyarakat pada pengembangan pembangunan sektor pariwisata memiliki makna penting. Tanpa dukungan kelompok masyarakat kegiatan pariwisata, tidak mudah untuk tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, dukungan penuh dari masyarakat akan memudahkan sektor pariwisata berkembang dan tumbuh maju.

Kesadaran masyarakat terhadap sektor pariwisata akan mempercepat pengembangan pembangunan sektor pariwisata (Rusyidi & Fedryansah, 2018).

Masyarakat yang sadar terhadap sektor pariwisata, tidak pasif, tetapi aktif di dalam mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata. Tidak hanya ikut mendorong tetapi turut serta ambil bagian di dalam kegiatan sektor pariwisata, dalam bentuk kegiatan sekecil dan sebesar apapun. Masyarakat yang sadar terhadap sektor pariwisata tidak akan menghalangi kegiatan usaha dan industri pariwisata di sekitarnya. Sebab dengan menghalangi kegiatan usaha dan industri pariwisata, justeru akan menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat.

Dukungan terhadap kegiatan usaha dan industri pariwisata akan membawa hasil positif terhadap perekonomian warga sekitar (Djabbar et al., 2021). Dengan keterlibatan dan dukungan masyarakat, maka masyarakat juga akan turut serta menikmati hasil usaha dan industri pariwisata. Bisa dengan menjadi karyawan, atau pekerja di salah satu usaha atau industri pariwisata. Bisa pula menjadi mitra positif bagi kegiatan usaha yang ada. Misalnya karang taruna yang aktif terlibat dalam pengelolaan keamanan dan pengelolaan lahan parkir bagi wisatawan yang datang ke lokasi wisata. Adapun komunitas masyarakat lain yang memiliki kemampuan mengolah makanan dan minuman dapat pula berjualan di sekitar lokasi wisata dengan tetap menjaga kenyamanan wisatawan yang berkunjung.

Selain itu, komunitas masyarakat yang memiliki kesadaran untuk membangun pariwisata akan berpikir untuk memanfaatkan potensi lokal yang ada untuk dikembangkan menjadi lokasi wisata yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat (Raharjana, 2012). Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata. Bisa jadi wisatawan yang datang, memang bertujuan untuk mengunjungi lokasi wisata yang sebelumnya sudah dikenal. Namun setelah mengetahui adanya lokasi wisata baru yang dibangun oleh masyarakat, bisa



jadi pengunjung akan menjadikan lokasi wisata tersebut sebagai daftar (list) lokasi wisata yang akan dikunjungi selanjutnya. Begitulah, peran masyarakat sangat penting di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata. Masyarakat dapat mengambil peran yang lebih luas di dalam kegiatan pariwisata di suatu daerah (Sugianto, 2016). Masyarakat dapat menginisiasi pembukaan lokasi pariwisata, terutama berbasis alam yang saat ini semakin banyak digandrungi oleh wisatawan. Tentu saja dengan sedikit sentuhan dan penataan. Sehingga tidak perlu membutuhkan biaya yang besar dan mahal. Untuk selanjutnya, dari pemasukan yang diperoleh dari wisatawan, baru dikembangkan berbagai fasilitas pendukung yang membuat wisatawan yang datang semakin nyaman dan ingin datang kembali.

Penyadaran terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata perlu dilakukan, baik oleh kelompok sadar wisata yang sudah ada, dunia usaha/ bisnis yang telah menjalankan usahanya di lokasi tersebut, maupun oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa (Resnawaty, 2016). Sosialisasi terhadap kebijakan ramah wisatawan harus terus tetap dilakukan, dengan cara-cara persuasif dan edukatif. Sehingga, lama kelamaan akan terbentuk masyarakat secara umum yang sadar terhadap pariwisata, dan terlibat aktif mengambil bagian positif di dalam kegiatan pariwisata. Untuk selanjutnya akan merasakan manfaat, baik secara ekonomi maupun lainnya dari kegiatan pariwisata.

4. Unsur Pemerintah (Government)

Pemerintah (government) memiliki peran penting dan sentral di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata (Simamora & Sinaga, 2016). Hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab utama pemerintah dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan. Mau tidak mau, pemerintah yang mendapat mandat

dan amanat dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan mengurus kepentingan rakyat, melaksanakan program pembangunan dan melayani kepentingan rakyat.

Pada pengembangan pembangunan sektor pariwisata, pemerintah memiliki beberapa peran berikut. *Pertama*, regulator. Peran sebagai regulator membuat pemerintah harus membuat berbagai kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan sektor pariwisata (Martins et al., 2017). Regulasi yang dibuat harus bisa memastikan semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan pariwisata bisa diatur dengan baik. Tidak ada pihak yang dirugikan dan dikurangi hak-haknya. Lebih dari itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dapat membuat kegiatan pariwisata bisa berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada hambatan yang terjadi. Kebijakan yang mempermudah, tidak mempersulit, tidak berbelit-belit. Regulasi yang dibuat tidak harus banyak, yang penting bisa memastikan bahwa kegiatan usaha dan industri wisata tidak merugikan para pihak yang juga ada di sekitar kegiatan pariwisata.

Kedua, fasilitator. Sebagai fasilitator, pemerintah perlu memberi pelayanan dan arahan kepada para pihak yang terlibat di dalam kegiatan usaha dan industri pariwisata (Nurhayati, 2016). Fasilitator bisa dalam bentuk memberi fasilitas kepada para pihak yang berada di dalam sektor pariwisata. Pemerintah juga perlu memberi pelayanan dan pendampingan kepada usaha dan industri pariwisata yang baru tumbuh dan berkembang. Memberi pelayanan prima bagi para pihak (stakeholders) yang bergerak pada usaha dan industri pariwisata. Sebagai fasilitator, pemerintah mengambil peran sebagai wasit jika terjadi sengketa atau konflik para pihak yang bekerja dan berusaha di sektor pariwisata.

Termasuk memberi pencerahan dan penyuluhan terhadap para pihak, mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha



dan industri pariwisata (Ridlwan et al., 2017). Dengan begitu para pelaku usaha dan industri mendapat arahan (guiden), di dalam melaksanakan kegiatan di sektor pariwisata. Kesalahan di dalam melaksanakan kegiatan akan menyebabkan kerugian bagi pelaku, yang bisa berujung pada pemberian sanksi (punishment) baik, berupa denda administratif, keuangan, maupun sanksi lain yang dapat merugikan, baik secara material maupun moril.

Ruang lingkup menjadi fasilitator dapat pula dalam bentuk pembangunan terhadap berbagai sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dibutuhkan oleh sektor pariwisata (Ghani, 2017). Misalnya pembangunan akses jalan dari dan menuju lokasi wisata. Hal ini penting untuk dilakukan, untuk memudahkan para wisatawan untuk mencapai lokasi wisata dengan nyaman. Memastikan daerah lokasi wisata sebagai daerah yang aman untuk dikunjungi para wisatawan. Sehingga pemberian pos-pos keamanan menuju lokasi-lokasi wisata juga perlu dilakukan. Begitu pula dengan akses transportasi yang masih belum memadai, perlu dibangun dan difasilitasi oleh pemerintah, sampai kemudian pihak swasta atau pihak lain mampu menyediakan secara mandiri kepada para wisatawan.

Lebih luas lagi, jangkauan fungsi fasilitator yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberi fasilitas yang mempermudah wisatawan untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan pariwisata yang ada (Sujai, 2016). Salah satunya adalah dengan adanya kalender wisata yang dibuat setiap tahun oleh pemerintah, yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat umum dan wisatawan. Selain itu adanya informasi yang lengkap yang disediakan oleh pemerintah mengenai objek dan lokasi wisata yang ada di daerahnya. Informasi tersebut senantiasa diperbarui (update) sesuai dengan data terbaru yang terus berkembang. Tidak kalah pentingnya adalah tersedianya informasi rute atau

kendaraan yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk mencapai lokasi/ objek wisata yang ada. Termasuk berbagai pilihan dan alternatif yang ada, dan tarif serta biaya yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat wisata tersebut. Hal tersebut menjadi lebih lengkap pada saat pemerintah memberi atau menyediakan semacam call center vang dapat memudahkan wisatawan untuk menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan wisata di daerah. Call center yang dimaksud memang disediakan secara khusus oleh pemerintah untuk melayani informasi yang dibutuhkan oleh para wisatawan. *Call center* yang dapat dijangkau oleh semua kalangan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Berkaitan dengan hal tersebut, call center menyediakan petugas yang menguasai dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa asing. Hal tersebut tentu saja sangat membantu bagi para wisatawan yang akan dan sedang berkunjung.

5. Unsur Media

Media juga memiliki peran penting di dalam pengembangan pembangunan pariwisata (Supriadi & Maharani, 2021). Media yang dimaksud disini adalah media massa mainstream yang ada di suatu daerah yang memiliki potensi wisata. Media massa, baik berupa koran, radio, televisi, dan media online dapat menjadi sarana publikasi yang efektif untuk mempromosikan lokasi wisata yang ada. Media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat. Media memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat (Klapper, 1960). Media juga dianggap memiliki peran sangat penting dalam mentransmisi (relaying) dan menstimulasi permasalahan (Negrine, 1996). Hal ini sangat penting dalam sosialisasi produk dan program juga ide-ide (Deacon & Monk, 2002). Cakupan (coverage) yang luas dalam masyarakat membuat media massa dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam meng-



komunikasikan program dan ide- ide atau barang serta pembentukan image.

Media massa, menjadi sarana yang cukup efektif dan signifikan untuk menggiring opini sesuai keinginan, dalam kontek perubahan ke arah yang lebih baik (Ruliana & Dwiantari, 2015). Di media, diolah setiap isu, opini, pendapat dan peristiwa. Saat ini era digital dan teknologi, tidak bermaksud mensubtitusi media jenis lain, media elektronik menjadi salah satu jenis media yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengelola sebuah isu dan opini publik. Dulu, media broadcasting (TV) paling banyak diminati masyarakat, dengan penetrasi hampir 90%. Teknologi informasi yang sedemikian cepat dan maju membuat dunia dan warga semakin menyatu dan seperti tanpa sekat. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain, dalam waktu yang hampir bersamaan dapat diketahui oleh penduduk yang berada di belahan dunia lain. Hal ini menjadi peluang tersendiri untuk menciptakan media yang cepat dari yang sekarang ada. Faktor kecepatan dalam dunia broadcasting, pertelevisian menjadi hal penting dan utama. Televisi yang sering terlambat dalam menginformasikan peristiwa akan ditinggalkan oleh pemirsa/ publik. Sebaliknya, televisi yang cepat akan selalu menjadi rujukan dalam peristiwa sehari-hari. Dengan catatan tanpa meninggalkan faktor akurasi dan keberimbangan. Disusul media radio 43%, majalah 24%, koran 16%, outdoor 11%, dan internet 9%. Ke depan, media audio visual (baca; TV) akan semakin kuat perannya seiring dengan keunggulan yang dimiliki karena sifatnya lebih nyata (pandang dan dengar). Apalagi konsumen TV juga semakin dimanjakan dengan berbagai program hiburan yang bersifat gratis. Sekarang petanya menjadi terbalik, konsumen berita yang ada di internet lebih tinggi daripada yang mengakses televisi dan radio. Hal ini dipermudah oleh gawai (gadget) yang harganya relatif murah dan terjangkau, begitu pula dengan paket data yang bersaing setiap operator, dengan pilihan paket yang ramah terhadap konsumen. Sehingga warga yang menikmati berita dan informasi beralih ke internet yang ada di gawai masing-masing.

Keberadaan media yang sedemikian banyak, terutama media daring (online) membuat pemberitaan atau info wisata begitu mudah untuk diperoleh (Fitriani, 2017). Masing-masing pengelola media daring berlomba untuk menjadi yang terdepan menginformasikan jika ada tempat wisata baru yang menarik untuk dikunjungi. Hal tersebut juga efektif untuk meningkatkan pengunjung ke website yang memberitakan tempat wisata tersebut. Bahkan media terkadang melebih- lebihkan informasi yang ada, supaya kekurangan dari lokasi wisata tersebut tidak menonjol, tetapi yang terpublikasi adalah sisi baik dan menariknya. Sementara sisi kekurangan dan tidak baik dari lokasi wisata dikurangi.

Terlebih lagi jika media yang ada bekerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata atau Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah, maka penulisan berita juga cenderung positif (Marta, 2019). Kerjasama yang dimaksud bisa berupa kerjasama paket pemberitaan dan iklan yang dikemas sedemikian rupa antara pemerintah daerah dengan media tertentu. Sehingga media cenderung memberitakan hal-hal yang positif saja dari wisata yang ada. Kondisi ini pada satu sisi membuat pembaca atau penonton atau pendengar akan mudah terpengaruh untuk datang ke lokasi-lokasi wisata yang diberitakan. Namun dalam negatifnya adalah, pada saat wisatawan sudah datang ke lokasi wisata tersebut, dan mendapati apa yang diberitakan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, akan menimbulkan kekecewaaan yang berujung pada sikap wisatawan yang tidak merekomendasi keluarga dan koleganya ke lokasi wisata tersebut.

Meski begitu ada media yang mengambil posisi netral dan mengambil jarak



terhadap berbagai pemangku kepentingan sektor pariwisata, baik pemerintah maupun dunia industri (Dwinary & Nugraha, 2020). Saat ada berita positif dan menarik untuk diberitakan, maka media tersebut memberikan sisi positif, baik, dan menarik tersebut. Namun jika ada sisi negatif dan buruk (bad) dari kegiatan pariwisata, media tersebut tetap memberitakannya. Hal ini dilakukan sebagai tanggung jawab moral, sebagai media yang memiliki fungsi kontrol terhadap berbagai kekuatan dan kepentingan yang ada. Media seperti ini tetap ada pada di daerah yang menjalankan program pembangunan sektor pariwisata. Hal ini menjadi bagian dari peran positif media, supaya apapun peristiwa yang terjadi, baik positif maupun negatif tetap diberitakan.

Begitu pula keberadaan media sosial memberi warna lain dalam pemberitaan sektor pariwisata. Meski dalam kasus tertentu, pemilik media sosial, secara personal kritis terhadap peristiwa yang terjadi. Namun keberadaan media sosial lebih besar memberi dampak positif dalam publikasi sektor pariwisata (Retnasary et al., 2019). Pemilik media adalah warganet yang suka dengan swafoto (selfie) maupun video, sehingga terjadi promosi otomatis (self promotion) pada saat warga menguopload kegiatan wisata yang dilakukan di akun media sosial masing- masing.

6. Unsur Kesehatan (Health)

Unsur kesehatan ternyata juga memiliki peran penting di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata. Pandemi covid-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir di beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa unsur kesehatan di sektor pariwisata, menunjukkan peran sangat penting (Sugihamretha, 2020). Pada saat semua unsur yang ada di dalam penta helix yang meliputi unsur; akademik, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media telah berperan maksimal di dalam pembangu-

nan sektor pariwisata, namun ada persoalan pada unsur kesehatan, maka seluruh unsur di penta helix tersebut menjadi siasia, atau bahkan menjadi tidak berguna sama sekali.

Unsur kesehatan ini yang di dalam penelitian ini ditemukan dan menjadi unsur baru di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata (Astirin et al., 2020). Penelitian ini menemukan satu unsur baru dalam pembangunan sektor pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata yang selama ini lebih dikenal dengan istilah penta helix, sekarang memiliki unsur baru, menjadi hexa helix. Unsur baru tersebut adalah unsur kesehatan (health). Unsur kesehatan selama ini tidak dibahas secara khusus dan mendalam di dalam pembangunan sektor pariwisata. Namun pada saat terjadi pandemi covid-19 yang mengganggu kesehatan manusia, maka unsur kesehatan menjadi satu unsur yang perlu mendapat perhatian di dalam pembangunan sektor pariwisata.

Kondisi ini memberi catatan penting bagi pembangunan sektor pariwisata, bahwa usaha dan industri pariwisata harus senantiasa memperhatikan aspek kesehatan (Kadarisman, 2021). Di setiap lokasi wisata harus ada alat pendeteksi bagi wisatawan yang berkunjung, terutama deteksi terhadap wisatawan yang kemungkinan menjadi penyebab terjadinya transmisi virus atau penyakit yang membahayakan bagi wisatawan lain. Dengan begitu, para wisatawan yang datang berkunjung bisa berwisata dalam kondisi yang sehat, tidak sakit, dan tidak menularkan penyakitnya kepada wisatawan lain. Hal ini juga tentu saja sama dengan memastikan lokasi wisata dan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya, tidak menyimpan virus atau dapat menjadi penyebab wisatawan sakit. Sehingga lokasi wisata tidak hanya aman dan nyaman bagi wisatawan, namun juga menyehatkan.

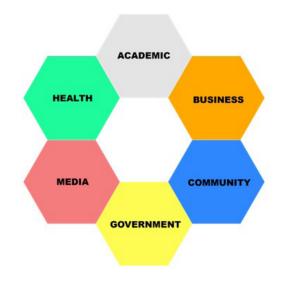
Di setiap lokasi wisata perlu tersedianya fasilitas kesehatan dan berobat



bagi wisatawan. Bersamaan dengan itu tentu saja ada tenaga medis yang bertugas untuk membantu wisatawan dalam menjaga diri dari potensi ancaman yang akan mengganggu kesehatan. Sehingga setiap wisatawan yang datang dapat mawas diri untuk menjaga kesehatan selama menjalani aktivitas wisata di lokasi wisata. Tenaga medis dapat memberi pertolongan pertama bagi para wisatawan yang mendapat masalah kesehatan. Dengan begitu wisatawan akan tetap aman, nyaman dan sehat selama berwisata.

Unsur pengembangan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep perspektif hexa helix dapat dilihat di dalam gambar berikut.

Gambar 9. Unsur Pengembangan Pembangunan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Sumenep Perspektif Hexa Helix, 2021.



7. Keterkaitan Unsur Hexa Helix

Setiap unsur di dalam hexa helix; academic, business, community, government, media, dan health memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata. Keterkaitan tersebut tidak bersifat tunggal atau linier, tetapi bersifat multi, dan bisa saling silang (cross). Hal tersebut memungkinkan terjadi karena masing-masing unsur memiliki peran yang beragam, dan hubungan serta keterikatan yang beragam pula. Namun ada unsur yang memiliki posisi dan peran sentral di dalam keterkaitan seluruh unsur hexa helix, yaitu unsur pemerintah (government). Seluruh unsur di dalam hexa helix tetap berkaitan dengan pemerintah.

Pertama, academic. Unsur academic memiliki keterkaitan dengan unsur pemerintah (government). Kajian yang dilakukan oleh dunia akademik, berguna bagi analisis kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tidak hanya sebagai basis analisis kebijakan, namun juga dapat digunakan untuk bahan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan sektor pariwisata yang sudah berjalan. Hasil penelitian (research) yang dihasilkan oleh kampus, baik yang sudah dipublikasi maupun belum, dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa yang memiliki program pembangunan sektor pariwisata yang relevan dengan objek dan lokasi penelitian. Selain kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kampus juga dapat menjadi program kerjasama (kolaborasi) antara pemerintah dengan perguruan tinggi.

Pada bagian pengabdian kepala masyarakat dan penelitian (research) juga memiliki kaitan dengan masyarakat (community). Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat dijadikan bahan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor pariwisata oleh masyarakat atau komunitas tertentu. Begitu pula dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi tridharma perguruan tinggi, dapat disinergikan dengan kegiatan yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki kegiatan dan program di sektor pariwisata. Keterkaitan antara perguruan tinggi dengan masyarakat dapat bersifat rutin dan intensif, sebab perguruan tinggi memiliki program rutin seperti praktik kerja lapangan (PKL) dan kuliah kerja nyata (KKN).



Perguruan tinggi juga memiliki keterkaitan dengan dunia usaha (business). Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dapat mengikuti program magang di perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata. Program pemagangan tersebut dapat diikat dalam perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dunia usaha. Kemudian lulusan perguruan tinggi dapat bekerja di perusahaan atau industri yang bergerak di sektor pariwisata. Perguruan tinggi dapat menyesuaikan materi perkuliahan dengan kebutuhan industri.

Kedua, business (usaha). Dunia usaha di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata memiliki keterkaitan dengan pemerintah (government). Dunia usaha pada saat hendak menjalankan usahanya perlu mendapatkan berbagai izin dari pemerintah sesuai dengan level dan ketentuan yang berlaku. Begitu pula pada saat menjalankan usahanya, dunia usaha perlu menaati ketentuan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, dunia usaha terikat pada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan, sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Termasuk kewajiban lain- lain yang berlaku pada setiap daerah.

Dunia usaha juga memiliki keterkaitan dengan masyarakat (community) di mana usahanya dijalankan. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh pengusaha tidak boleh mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Malah sebaliknya, kegiatan usaha perlu memberdayakan masyarakat di dalam kegiatan usahanya, menggandeng dan melibatkan masyarakat setempat, baik sebagai karyawan maupun sebagai mitra dari kegiatan usaha yang dijalankan. Dunia usaha juga memiliki tanggung jawab sosial (CSR) terhadap lingkungan masyarakat dimana usaha tersebut dijalankan. Sehingga keberadaan dunia usaha di sektor pariwisata akan membawa kebaikan bagi masyarakat sekitar, bukan masalah, atau dampak negatif.

Dengan unsur akademik, seperti perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lain, dunia usaha tentu saja memiliki keterkaitan dalam kebutuhan tenaga kerja dan sumber dava manusia (SDM). Usaha atau industri yang bergerak di sektor pariwisata tentu saja membutuhkan banyak tenaga kerja, dari berbagai level, baik staf, manajer sampai ke jajaran direksi. Semuanya berasal dari lembaga pendidikan, baik menengah maupun pendidikan tinggi. Semakin baik kualitas hasil lulusan lembaga pendidikan, maka semakin mudah perusahaan untuk mempekerjakan alumni lembaga pendidikan. Sebaliknya, semakin tidak profesional lulusan lembaga pendidikan, semakin sulit untuk direkrut oleh perusahaan. Kalaupun harus merekrut diperlukan pendidikan khusus sesuai kebutuhan perusahaan, dan itu membutuhkan biaya tambahan.

Ketiga, *community* (masyarakat). Sebaliknya kegiatan sektor pariwisata yang dijalankan secara mandiri dan swakelola oleh masyarakat dapat menjadi objek kajian dan penelitian (research) yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Hubungan perguruan tinggi dengan masyarakat bersifat timbal balik (reciprocal). Selanjutkan hasil penelitian tersebut, dapat dijadikan bahan untuk pengembangan atau evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat. Begitu pula dengan pemerintah dapat menjadikan hasil penelitian tersebut, sebagai acuan untuk melakukan program yang tepat, kepada pelaku usaha di bidang pariwisata yang selama ini telah dijalankan secara mandiri oleh masyarakat. Apakah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan dan sebagainya.

Keempat, government (pemerintah). Di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata, pemerintah memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak yang ada di dalam hexa helix. Pemerintah (gov-



ernment) memiliki keterkaitan dengan unsur akademik, baik perguruan tinggi, maupun sekolah menengah. Keterkaitan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk penelitian (research) maupun dalam bentuk pengabdian. Pemerintah juga memiliki keterkaitan dengan lembaga pendidikan untuk memberi arahan mengenai kurikulum di lembaga yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dan memiliki tanggung jawab untuk mengucurkan anggaran kepada lembaga pendidikan, dalam berbagia bentuk program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan sektor pariwisata.

Adapun dengan dunia usaha (business) pemerintah (government) memiliki keterkaitan di dalam memberikan ijin terhadap kegiatan usaha yang diajukan. Untuk selanjutnya, pemerintah (government) bertanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dijalankan oleh dunia usaha, supaya tidak ada pelanggaran yang dilakukan, dan jika ada, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan teguran dan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran. Bahkan bila diperlukan memberi sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mengindahkan teguran yang telah disampaikan. Pemerintah (government) dalam menjalankan perannya perlu dilakukan secara intensif, berupa pendekatan persuasif dan pembinaan kepada dunia usaha.

Sedangkan dengan masyarakat (community), pemerintah juga memiliki keterkaitan, terutama di dalam upaya penyadaran terhadap masyarakat supaya ramah (friendly) terhadap sektor pariwisata. Sosialisasi terkait kegiatan usaha dan industri di sektor pariwisata membawa dampak positif berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu pemerintah (government) tentu saja memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama memberdayakan masyarakat setempat, sehingga mau berdaya dan memanfaatkan potensi yang ada dengan adanya kegiatan usaha atau industri di sektor pariwisata. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bisa berupa pemberian keterampilan (skill) dan modal usaha, sehingga warga sekitar bisa mandiri dalam meningkatkan perekonomian.

Berkaitan dengan unsur kesehatan (health), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat di dalam kegiatan sektor pariwisata dijamin kesehatannya, baik pelaku wisata, pengunjung dan lainnya. Fasilitas yang berkaitan dengan jaminan kesehatan tersebut disediakan oleh pemerintah. Selama ini yang disediakan hanya pos lalu lintas dan pos keamanan (security) vang disediakan oleh pemerintah di dekat lokasi wisata. Ke depan fasilitas layanan kesehatan juga harus disediakan di lokasi-lokasi yang ada objek/ lokasi wisata. Dengan begitu jika ada gangguan kesehatan, bisa dilakukan pertolongan pertama.

Kelima, media. Media memiliki keterkaitan dengan pemerintah, dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah (government). Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah di sektor pariwisata perlu diawasi oleh media, jika terjadi penyimpang perlu diberitakan. Begitu pula dengan dunia usaha (business) perlu mendapat kontrol dari media massa, bila terjadi pelanggaran terhadap regulasi atau kebijakan yang ada, perlu diberitakan oleh media. Baik pemerintah maupun dunia usaha diharapkan taat kepada aturan dan ketentuan yang ada. Pada sisi lain, media dapat menjadi mitra pemerintah (government) dan dunia usaha (business) di dalam mempromosikan berbagai potensi wisata yang sedang dikembangkan oleh pemerintah dan dunia usaha. Media juga dapat berperan penting di dalam mendesiminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, sehingga dapat ketahui dan diakses oleh masyarakat secara umum.

Keenam, health (kesehatan). Kesehatan memiliki keterkaitan dengan hampir seluruh unsur di dalam hexa helix,

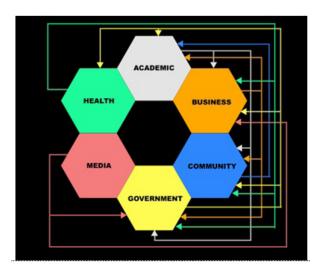


mulai dari bisnis, komunitas, dan pemerintah. Seluruh unsur tersebut perlu kesehatan. Bila ada yang mengalami gangguan kesehatan, maka tidak dapat berfungsi atau berperan dengan baik. Bahkan pada kasus covid-19 yang menjadi bencana non alam, maka seluruh peran dan fungsi yang dijalankan oleh kelima unsur (penta helix), tidak dapat berjalan. Kegiatan sektor pariwisata betul-betul berhenti secara penuh (total). Selama dua tahun industri pariwisata hampir tidak bergerak sama sekali. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian pada dunia usaha, jangankan pendapatan yang diperoleh, untuk menjalankan usaha secara rutin kesulitan.

Begitu pula dengan pemerintah, pada saat kegiatan usaha di sektor pariwisata tidak berjalan, maka pemerintah tidak mendapatkan pemasukan berupa pajak dan retribusi yang selama ini biasa diterima. Saat pemasukan dari pajak dan retribusi tidak diperoleh, maka pemerintah kesulitan membiayai belanja pembangunan yang selama ini telah disusun. Terjadi hal sebaliknya, banyak program pemerintah yang mengalami pengarahan kembali (refocusing). Program yang ada dikoreksi dan diarahkan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi. Bila kesehatan masvarakat tidak pulih, maka sektor lain termasuk ekonomi dan pariwisata juga tidak dapat kembali berjalan.

Masyarakat sekitar yang selama ini mendapatkan manfaat ekonomi ikutan (tricle down effect) dari kegiatan usaha atau industri pariwisata, juga merasakan dampaknya. Karena sektor pariwisata tidak berjalan, maka otomatis kegiatan warga dari usaha kuliner, usaha transportasi, usaha rumah kos, jasa *laundry*, dan lain sebagainya juga berhenti. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian tersendiri, karena tidak ada pemasukan bagi warga sekitar lokasi wisata yang selama ini tergantung kepada kegiatan usaha dan industri wisata.

Gambar 10. Keterkaitan Hexa Helix Di Dalam Pengembangan Pembangunan Sektor Pariwisata, 2021.



D. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpukan bahwa:

- 1. Keterlibatan enam unsur Hexa Helix ditunjukkan oleh peran dari masing - masing unsur pendidikan (akademic), dunia usaha (busines), masyarakat (community), pemerintah (government), media (mass media), dan kesehatan (health). Unsur kesehatan ditemukan sebagai unsur keenam dalam pengembangan sektor pariwisata dimasa pandemi. Namun pada prosesnya masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan kesadaran serta komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan baik dari unsur Pemerintah, pelaku usaha dan wisatawan. Kontribusi perguruan tinggi dan media juga sangat berperan utamanya dalam mensosialisasi dan mengedukasi pentingnya penerapan protokol kesehatan (prokes).
- 2. Keenam unsur *Hexa Helix* memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Masing-masing unsur di dalam *hexa helix* memiliki peran penting di dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata. Unsur pendidikan berperan di dalam melaku-



kan penelitian untuk mengembangkan sektor pariwisata, mempromosikan objek wisata yang ada melalui riset yang dipublikasikan serta melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sektor pariwisata, melalui pengabdian kepada masyarakat. Dunia usaha memiliki peran di dalam membangun objek wisata, termasuk membangun fasilitas di sekitar lokasi wisata, dan mempromosikan wisata yang dikelola. Masyarakat berperan di dalam mengembangkan lokasi wisata yang ada, dan menciptakan citra (image) positif terhadap wisata yang ada. Pemerintah berperan memfasilitasi kebijakan pengembangan sektor pariwisata, membina pelaku usaha dan masyarakat, mempromosikan dan melakukan *branding* pariwisata. Media memiliki peran untuk mempromosikan potensi wisata, mengedukasi wisatawan, melakukan kontrol terhadap pemerintah dan pengusaha. Unsur kesehatan berperan dalam menfasilitasi protokol kesehatan, mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan khususnya untuk mendukung bangkitnya sektor pariwisata dimasa pandemi. Peran penting dari masing-masing unsur sangat mempengaruhi sinergi hexa helix pengembangan sektor pariwisata. Namun faktanya dominasi unsur pemerintah masih sangat kuat, motivasi untuk pengembangan pariwisata masih bersifat parsial.

Selain itu, berdasarkan hasil kesimpulan diatas , maka disusun beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1. Pemerintah perlu menyusun kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumenep dengan perspektif Hexa Helix untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata di masa pandemi.
- 2. Pemerintah perlu membentuk tim pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep di masa pandemi

- meliputi enam unsur (Hexa Helix).
- 3. Pemerintah perlu melakukan pendistribusian wewenang secara proporsional kepada semua unsur Hexa Helix dengan menyusun Standart Operational Procedure (SOP).
- 4. Tim pengembangan sektor pariwisata Hexa Helix perlu menyusun program dan kegiatan secara terukur dan terintegrasi dalam upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata di masa pandemi.
- 5. Pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi kerja tim pengembangan pariwisata *Hexa Helix* secara berkala.



DAFTAR PUSTAKA

- Astirin, O. P., Nugraha, S., & Utomowati, R. (2020). Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Lingkungan Melalui Program Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan, SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat), 9(1), 19. https:// doi.org/10.20961/semar.v9i1.42309
- Bahrudin, A. (2017). Inovasi Daerah Sektor Pariwisata (Studi Kasus Inovasi Pembangunan Pariwisata Kab Purworejo Jawa Tengah). Mimbar Administrasi, 1(1), 50–69. http:// jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/ mia/article/download/572/556
- Damayanti, L. S. (2019). Peranan Keterampilan Berbahasa Inggris Dalam Industri Pariwisata. Journey: Jour-

- nal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management, 2(1), 71–82. https://doi.org/10.46837/journey. v2i1.42
- Darmadi, & Muhlisin. (2016). Ecotourism development of islamic based. Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 60–65.
- Dewi, I. G. A. I. S., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2019). Peranan Perusahaan Modal Asing Dalam Pengembangan Sumber Daya Pekeria Lokal di Kabupaten Badung. KERTHA WICAKSANA, 13(2), 90–96. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ kertawicaksana/article/vie w/1212

Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan **Budidaya Tambak Udang**

Shulhan, Zainol Kamal, Misnatun, Ahmad Effendi, Agus Hasan Mustofa, Khairun Nisa' (Tim Peneliti LPPM STIT Aqidah Usymuni Sumenep)

ABSTRAK

Meningkatnya kebutuhan pasar internasional terhadap udang vannamei, memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat Indonesia. Kebutuhan pasar global ini rupanya juga direspon oleh masyarakat Sumenep, khususnya masyarakat pesisir di kecamatan Dungkek, Batang-Batang, dan Batu Putih. Dalam kurun waktu lima tahun, tepatnya dari tahun 2016 hingga sekarang tahun 2021, kawasan sepanjang pesisir yang dulunya sangat lebat dengan barisan pohon cemara udang, kini sudah dialihfungsi menjadi lahan pertambakan udang. Penelitian ini dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi pengembangan budidaya tambak udang ini terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lombang, Bungin-Bungin, dan Lapa Taman. Di samping itu, penelitian ini juga akan mendeskripsikan dampak sosial-lingkungan yang dialami oleh masyarakat di kawasan pertambakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods) untuk memotret persoalan yang kompleks. Metode kuantitatif dengan teknik survey digunakan untuk mengetahui dampak sosial ekonomi, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan pengembangan budidaya tambak udang yang dialami oleh masyarakat sekitar area pertambakan. Adapun temuan dari penelitian adalah sebagai berikut; (1) Pelaku usaha tambak udang mengalami peningkatan pendapatan sebesar 900% dari rata-rata pendapatan hasil tani sebelumnya, yaitu Rp. 4.000.000/tahun meningkat menjadi Rp. +40.000.000/ tahun dihitung dari rata-rata luas lahan 1000m2 yang dimiliki oleh setiap keluarga; (2) Industri tambak udang telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Selain produsen/pemilik tambak, di satu desa, seperti di Lapa Taman, setidaknya ada +300 orang yang bekerja sebagai pengawas dan pengontrol di lokasi tambak dengan pendapatan +1.500.000/bulan dan +100 orang terserap di level gudang/pengepul dengan rata-rata pendapatan Rp. 3.000.000/bulan. Peningkatan pendapatan ini berdampak pada peningkatan kualitas perumahan penduduk masyarakat desa dan pemenuhan kebutuhan tersier.

Kata Kunci: Dampak, Sosial-ekonomi, Tambak Udang



A. Pendahuluan

Sosial ekonomi masyarakat merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang menyangkut kesejahteraan dan aspek-aspek sosial yang berhubungan dengan pola hidup dan dinamika interaksionalnya dengan lingkungan dalam sehari-hari. Kualitas sosial ekonomi masyarakat salah satunya ditentukan oleh pendapatan perkapita melalui perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan dan lain-lain. Semakin tinggi penghasilan (income) masyarakat meniscayakan semakin meningkatnya kualitas kehidupan sosialnya apabila didukung oleh intrumen sosial seperti kebiasaan baik, ketataan beragama dan kesadaran lingkungan.

Masyarakat bersama pemerintah berupaya untuk meningkatkan taraf sosial ekonomi masing-masing dengan berbagai upaya dan inovasi Pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang strategis dan sesuai dengan potensi alam sekitar. Pemerintah daerah juga menerbitkan regulasi untuk mengatur perlakasanaan usaha atau bisnis yang dilakukan pengusaha. Masyarakat dengan gigih bekerja baik secara mandiri sebagai wirausaha atau sebagai pegawai swasta dan pemerintahan. Banyak potensi dalam sektor usaha yang menfaatkan sumber daya alam yang dibidik oleh pengusaha. Salah satunya pengembangan tambak udang yang terdapat di beberapa daerah di Kabupaten Sumenep seperti di Kecamatan Batang-Batang dan Kecamatan Dungkek.

Usaha itu dilakukan dengan mengambil peluang (chance) sesuai perkembangan zaman. Menurut release data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa trend produksi udang belakangan ini menunjukkan data yang dinamis dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 15,7 persen (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2021). Potensi bisnis tambak udang sangat potensial dan prospek kerena termasuk komuditas unggulan ekspor nasional. Tohari dkk menyatakan bahwa udang merupakan salah satu komuditas sektor perikanan yang menjadi andalan di Indonesia (Tohari, 2020: 55-62).

Wilayah Kabupaten Sumenep yang banyak terdiri dari pesisi pantai sangat layak untuk dijadikan sentra pengembangan budidaya tambak udang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat beberapa lokasi yang telah dikembangkan budidaya tambak udang seperti di Kecamatan Batang-Batang dan Kecamatan Dungkek. Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang merupakan salah satu desa dimana dikembangkan sektor budidaya udang. Sedangkan di Kecamatan Dungkek, Desa Bungin-Bungin, dan Desa Lapataman merupakan desa yang terdapat pengembangan budidaya udang tambak.

Kedua kecamatan di atas menarik untuk dijadikan obyek kajian secara ilmiah kerena beberapa hal sebegai berikut: Pertama, keduanya terletak di beberapa bibir pantai bahkan salah satunya memiliki obyek wisata Pantai Lombang yang termasuk dalam kawasan yang dilindungi. Kawasan pantai sangat strategis untuk dikembangkan budidaya perikanan termasuk udang dengan memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan. Kedua, pengembangan budidaya tambak udang sudah lama berjalan baik yang dikelola oleh pelaku bisnis lokal maupun yang dikembangkan oleh investor. Ketiga, geliat ekonomi masyarakat secara sepintas dapat dikatakan mengalami peningkatan yang signifikan.

Dari penjelasan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana dampak sosial-ekonomi pengembangan budidaya tambak udang di Kabupaten Sumenep?"

B. Data dan Pembahasan

1. Karakteristik Pembudidaya Tambak Udang

a. Umur

penelitian menunjukkan Hasil bahwa masyarakat yang memiliki tam-



bak udang di lokasi penelitian berumur berkisar rata-rata 40-60 tahun dengan jumlah 139 orang (69,5%) dari dua ratus responden. Hal ini menunjukkan, masyarakat pembudidaya tambak udang tergolong mempunyai usia yang sangat produktif dalam meningkatkan produksi lahan tambak udang. Peningkatan produktifitas sangat nampak dari semangat dan etos kerja mereka dalam budidaya tambak udang. Kekuatan dan kecekatan mereka secara fisik juga didukung dengan kekuatan mental yang semakin bijaksana dan rasional dalam berfikir dan bertindak. Kondisi demikian telah dibuktikan dengan hasil budidaya tambak udang yang mereka peroleh setiap tahun mencapai 3-4 kali panen. Dari hasil FGD dengan masyarakat pembudidaya tambak udang di lokasi penelitian, mereka menuturkan jarang sekali produksi tambak udang milik masyarakat yang mengalami kegagalan, hampir dipastikan keseluruhannya mengalami keuntungan yang melimpah.

Tabel. 1 **Umur Masyarakat Pembudidaya Tambak Udang**

Kriteria	Kelas	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
Umur 15 – 25	Rendah	7	3,5%
Umur 25 – 40	Sedang	38	19%
Umur 40 – 60	Tinggi	155	77,5%
		200	100%

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan kapasitas berfikir masyarakat dan memajukan aktifitas kegiatan sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Masyarakat di lokasi penelitian merupakan masyarakat agraris dimana sumber kehidupan sangat bergantung kepada produksi hasil tanaman, baik yang berbentuk perkebunan atau persawahan. Maka, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, diharapkan semakin produktif hasil yang diperoleh.

Tabel, 2 Tingkat Pendidikan Pembudidaya Tambak Udang

Kriteria	Kelas	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
Tidak Sekolah	Rendah	23	11.5%
SD	Sedang	140	70%
SMP/SMA	Tinggi	37	18,5%
		200	100%

Hasil penelitian menunjukkan, sebagian besar masyarakat pembudidaya tambak udang di lokasi penelitian adalah berpendidikan Sekolah Dasar, yaitu berjumlah 140 orang (70%) dan tidak mengenyam pendidikan formal sebanyak 23 orang (11,5%). Sedangkan lulusan Sekolah menengah dan atas hanya berjumlah 37 orang (18,5%). Data ini menyimpulkan rata-rata pembudidaya tambak udang sudah berpendidikan. Tetapi, tingkat pengetahuan dan pengalaman mereka terutama dalam menganalisis suatu permasalahan yang dihadapi masih tergolong sedang atau tengah-tengah. Mekipun begitu, pengalaman mereka dalam produksi tambak udang sangat baik bahkan selalu mengalami keuntungan. Demi meningkatkan lagi usaha mereka, maka perlu adanya pendampingan dan pelatihan dari instansi terkait dalam upaya meningkatkan keterampilan dan melakukan antisipasi terhadap masalah yang sedang maupun akan dihadapi, tentunya yang berkaitan dengan budidaya dan peningkatan produksi tambak udang.



c. Jumlah Tanggungan Keluarga

Tabel. 3 Jumlah Tanggungan Keluarga Pembudidaya Tambak Udang

Kriteria	Kelas	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1-2 orang	Rendah	66	33%
3-4 orang	Sedang	113	56,5%
5-6 orang	Tinggi	21	10.5%
		200	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa 56,5% (113 responden) masyarakat pembudidaya tambak udang di lokasi penelitian memiliki tanggungan keluarga sebanyak 3-4 orang tergolong kategori sedang. Adapun 10,5% (21 responden) termasuk kategori tinggi, yaitu memiliki tanggungan keluarga sebanyak 5-6 orang. Jumlah tanggungan keluarga dapat mempengaruhi semangat kerja khususnya bagi kepala keluarga memiliki kreatifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan membuka produksi tambak udang, karena sampai saat ini, mayoritas masyarakat di lokasi penelitian sangat bergantung kepada hasil budidaya tambak udang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibanding dengan usaha tani lainnya. Maka, semangat dan kreatifitas kepala keluarga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan budidaya tambak udang. Jika tidak demikian, maka dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan mereka dan membuka peluang orang asing atau pemodal menguasai lahan-lahan milik mereka.

d. Ketergantungan Kepada Budidaya Tambak Udang

Tabel. 4 Tingkat Ketergantungan Masyarakat terhadap Budidaya Tambak Udang

Kriteria	Kelas	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
Umur 15 – 25	Rendah	7	3,5%

Umur 25 – 40	Sedang	38	19%
Umur 40 – 60	Tinggi	155	77,5%
		200	100%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua ratus responden, 155 orang (69,5%) petani sangat bergantung kepada budidaya tambak udang, yaitu mereka yang berumur berkisar 40-60 tahun. Ketergantungan mereka sangat tinggi disebabkan lebih banyak pengalaman dalam budidaya tambak udang dibanding dengan mereka yang berumur dibawahanya. Hasil produksi panen yang sering mereka hasilkan juga berpengaruh terhadap ketergantungan mereka terhadap budidaya tambak udang.

Dalam FGD, mereka menuturkan serupa ketergantungannya kepada budidaya tambak udang. Keuntungan yang sangat besar diperoleh dari tambak udang telah merubah pandangan mereka yang sebelumnya hanya bergantung dari hasil tani pohon kelapa, cemara dan buah-buahan yang dinilai pas-pasan bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tambak udang telah menjadi sumber ekonomi baru bagi mereka dan berharap dapat terus meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di lokasi penelitian.

e. Kepemilikan Lahan

Dari hasil penelitian menunjuk-kan bahwa lahan budidaya tambak udang sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh masyarakat sendiri sebanyak 94,5% (189 responden). Sebagian kecil lahan mereka disewakan dengan bagi hasil setiap panen sebanyak 3,5% (7 responden) tergolong rendah. Sedangkan mereka yang menyewakan lahannya dalam jangka waktu tertentu sebanyak 2% (4 responden). Hal ini membuktikan lahan mereka tidak dijual belikan kepada asing atau pemodal, khususnya di Desa Bungin-Bungin dan Lapataman. Dalam penuturan mereka dalam



FGD, kuatnya mempertahankan lahan pertanian untuk tidak berpindah kepemilikan didukung pemahaman dan kesadaran mereka sendiri yang jauh kedepan dan tentunya hal itu juga didukung aparat pemerintah desa demi kepentingan warganya.

Tabel. 5 Kepemilikan Lahan Udang

Kriteria	Kelas	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
Bagi Hasil	Rendah	7	3,5%
Sewa Murni	Sedang	4	2%
Milik Sendiri	Tinggi	189	94,5%
		200	100%

Masyarakat sepekat untuk menjaga tanah miliknya untuk tidak dijual ke orang asing atau orang yang bukan dari desat setempat. Pentingnya menjaga kepemilikan tanah agar tidak berpindah kepemilikan kepada pihak pemodal perlu dipertahankan demi kepentingan warga desa sendiri untuk keberlangsungan kehidupan dikemudian hari. Hal ini juga perlu mendapat perhatian pemerintah dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat desa dalam bercocok tanam khususnya dalam budidaya tambak udang. Maka pendampingan dari instansi pemerintah terkait sangat diperlukan dalam upaya mengatasi masalaha-masalah yang dihadapi masyarakat pembudidaya tambak udang.

2. Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Budidaya Tambak Udang

a. Interaksi Sosial

Berdasarkan hasil observasi dan FGD di lokasi penelitian menunjukkan bahwa pengembangan budidaya tambak udang menjadikan kohesifitas masyarakat semakin kuat. Mereka saling membantu dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan budidaya tambak

udang, terutama saat panen tiba. Kegiatan saling membantu ini dilakukan secara sukarela tanpa dibayar oleh pemilik tambak yang sedang panen. Selain itu, kekompakan mereka terbentuk dalam hal menjaga lahan yang dimiliki agar tidak lepas ke tangan asing atau orang luar wilayah setempat. Dibeberapa lokasi terbangun komitmen diantara masyarakat untuk tidak menjual tanahnya kepada pihak-pihak yang memiliki konsentrasi dalam budidaya tambak udang. Mereka hanva memberikan sewa atau bagi hasil jika tidak mampu mengelola sendiri, tetapi tidak sampai dijual. Kondisi seperti ini terlihat jelas dalam masyarakat khususnva Desa Lapataman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Komitmen bersama ini dikuatkan dengan peran Kepala Desa sendiri yang membantu warganya agar tidak menjual lahannya kepada pemodal.

Interaksi sosial dalam masyarakat juga terlihat dengan cara bergotong rovong, yaitu pada saat pembukaan tambak udang. Pembukaan tambak udang oleh masyarakat lokal umumnya dilakukan dengan cara bergotong royong bersama keluarga dekat dan tetangga, khususnya sesama petani tambak udang. Sebelum memulai menggarap lahannya, mereka mengabarkan terlebih dahulu, atau tepatnya mengundang secara tidak resmi sanak kerabat dan tetangga perihal akan digarapnya tambak udang. Mereka berharap, akan banyak kerabat dekat dan tetangga yang akan datang menyumbang tenaga atau membantu secara sukarela.

Setiap petani lokal sedikitnya memiliki luas tanah 500 m2 hingga satu hektar garapan tambak udang, bahkan sampai tiga hektar. Tanah garapan tambak udang merupakan tanah tegalan yang sebelumnya ditanami pohon kelapa, sedangkan lahan tambak udang di pinggiran pantai merupakan lahan yang subur ditumbuhi pohon cemara yang berderet sepanjang pantai utara kabupaten Sumenep. Namun, melihat peluang ekonomi



baru (baca: tambak udang) ini, sejak tahun 2019 satu-persatu masyarakat membabat perkebunan mereka menjadi tambak udang, sementara bagi masyarakat yang belum memiliki modal memberikan lahannya untuk digarap orang lain dengan sistem bagi hasil 3% sampai 5% dari omzet setiap panen. Sedangkan kerugian dari pohon kelapa yang ditebang oleh penyewa lahan diganti rugi satu juta rupiah perbatang pohon kelapa.

b. Luas Lahan dan Pendapatan Pembudidaya Tambak Udang

Melihat banyaknya petani tambak udang yang berhasil meraup keuntungan yang besar setiap kali panen, maka secara "simultan", tahun 2020, penggarap tambak udang mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Mereka tergiur dengan keuntungan tambak udang yang besar dibandingkan perolehan dari pohon kelapa maupun cemara yang menurut mereka tidak seberapa. Namun, perolehan yang besar itu juga sebanding dengan modal yang harus digelontorkan untuk biaya penggarapan dan biaya produksi.

Dari hasil wawancara yang diperoleh, para petani mendapatkan peningkatan hasil tani sampai 900% dari sebelumnya. Sebelum adanya tambak udang, petani di desa lokasi penelitian rata-rata bergantung kepada hasil pohon kelapa dimana mereka mendapatkan keuntungan hanya sebesar Rp. 4.000.000/tahun. Mereka bisa panen pohon kelapa sampai 8 kali panen setiap tahun. Setiap kali panen, petani mendapatkan keuntungan Rp. 500.000. Hal ini berbeda jauh ketika petani beralih kepada budidaya tambak udang yang bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat tergantung luas lahan yang dimiliki.

Tabel 6 Luas Kepemilikan Lahan Tambak Udang

Kriteria	Kelas	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
≤ 1000m2	Rendah	187	93,5%

≤ 2000m2	Sedang	8	4%
≥ 3000m2	Tinggi	5	2,5%
		200	100%

Tabel ini menunjukkan pembudidaya tambak udang rata-rata memiliki luas lahan ≤ 1000m2 sebanyak 93,5% (187 responden). Sedangkan mereka tergolong tinggi yang mempunyai luas lahan \geq 3000m2 hahanya 2,5% (5 responden). Hal ini disebabkan modal dari pengelolaan tambak udang yang sangat besar. Semakin luas garapan tambak udang, maka semakin membutuhkan modal yang besar pula. Biaya penggarapan tambak udang umumnya menelan biaya Rp. 70.000.000 -100.000.000 per 1000m2. Sedangkan biaya produksi satu kali panen membutuhkan Rp.30.000.000 - 50.000.000 per 1000m2. Mengingat besarnya biaya pembuatan tambak udang, Sedikit sekali petani yang memiliki modal secara mandiri, umumnya mereka memperoleh dana pinjaman dari bank dengan menggunakan sertifikat rumah dan tanah sebagai jaminan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, masyarakat pembudidaya tambak udang di lokasi penelitian dapat menghasilkan 1-2 ton/1000m2 sekali panen. Rata-rata mereka panen dalam setahun 3 kali. Maka dalam setahun mereka dapat menghasilkan 3-6 ton hasil tambak udang. Jika harga perkilo sebesar Rp. 60.000, maka 1 ton bisa mencapai Rp. 60.000.000. Maka dapat dipastikan penghasilan masyarakat melalui tambak udang setiap kali panen sebesar Rp. 60.000.000 - Rp. 120.000.000.

Jika biaya produksi satu kali panen Rp. 30.000.000 - Rp. 50.000.000 per 1000m2 (x 3 kali panen), maka biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 90.000.000/tahun - Rp. 150.000.000/tahun. Setelah dipotong biaya produksi, pendapatan pembudidaya tambak udang di lokasi penelitian rata-rata sebesar Rp. 30.000.000 – Rp. 70.000.000. Maka dalam setahun dapat mencapai Rp. 90.000.000 - Rp. 210.000.000. Dari hasil



pendapatan tersebut, dapat dipotong untuk pembayaran cicilan ke Bank sebesar Rp. 60.000.000/tahun atau Rp. 5.000.000/bulan. Maka petani masih bisa menabung sebesar Rp. 30.000.000/tahun - Rp. 150.000.000/tahun dan dapat digunakan untuk biaya produksi pada tahun-tahun selanjutnya.

Adapun hasil pendapatan lahan yang disewakan dengan sistem bagi berbeda dengan lahan yang digarap sendiri oleh petani. Pada umumnya, biaya penggarapan awal dan biaya produksi setiap panen ditanggung oleh kedua pihak. Jika petani menghasilkan 1-2 ton per 1000m2 sekali panen, dengan harga perkilo sebesar Rp. 60.000, maka mereka mendapatkan Rp. 60.000.000 – Rp. 120.000.000. Setelah dipotong biaya penggarapan awal dan biaya produksi masing-masing kedua pihak sebesar Rp. 50.000.000 - Rp. 75.000.000 sekali panen, maka kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000 - Rp. 45.000.000 setiap kali panen. Pendapatan tersebut diperoleh jika selama dalam produksi tidak mengalami kendala seperti cuaca, adanya virus dan harga yang tetap stabil.

Sedangkan sistem sewa murni, semua biaya penggarapan dan produksi ditanggung oleh orang yang menyewa. Hasil keseluruhan dari tambak udang kemudian dikurangi 4% diperuntukkan bagi pemilik lahan. Data ini didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dengan petani yang menyewakan lahannya kepada orang lain. Mereka menuturkan, disamping biaya yang sangat besar dibutuhkan dalam budidaya tambak udang, tenaga dan fikiran juga sangat dibutuhkan. Sewa murni memiliki resiko paling kecil bagi pemilik lahan dalam budidaya tambak udang.

c. Proses Budidaya Udang

Dari hasil FGD yang didapatkan, pengetahuan tentang penggarapan lahan tambak udang dan proses budidaya udang umumnya belajar secara alamiah kepada petani yang lebih dulu membudidaya udang. Tidak ada pelatihan khusus yang mereka peroleh dari instansi tertentu maupun dilakukan secara mandiri dari kelompok masyarakat. Mengingat rentan resiko gagalnya pertumbuhan udang vannamei ini, maka secara aktif mereka saling bertukar informasi kepada sesama petani tambak udang, baik mengenai bibit, pakan, maupun teknik perawatannya.

Dalam proses budidaya udang ini, lokasi tambak harus diawasi dua puluh empat jam penuh dalam sehari. Sebab, kincir angin sebagai alat perekayasa arus air harus berputar secara terus menerus. Jika tidak, udang akan mati seketika. Hal inilah mengharuskan petani benar-benar mawas dalam memantau kesediaan sumber listrik. Jika secara mendadak listrik dari PLN padam, maka secepatnya mereka menghidupkan mesin diesel yang sudah disediakan di lokasi tambak. Dalam pengawasan ini, terdapat satu sampai dua orang yang secara bergantian berjaga di gubuk kecil yang berada di lokasi tambak. Selain, mengawasi ketersediaan listrik, setiap hari petani harus memberi pakan dan mengamati perkembangan udang. Untuk mengurangi beban kerja ini, biasanya pemilik tambak merekrut satu sampai dua orang pekerja tetap dengan upah 1.200.000-1.500.000 perbulan. Selain upah pokok tersebut, sebagian pemilik tambak memberikan komisi kepada pekerja sesuai dengan besarnya keuntungan saat panen.

Masa budidaya udang membutuh-kan waktu sekitar 60-70 hari untuk siap dipanen. Saat panen sedikitnya membutuhkan tujuh orang yang bekerjasama dalam sepetak tambak. Mulai dari penjaringan udang, distribusi hasil panen, penyediaan konsumsi, dan pembersihan kolam tambak udang. Berdasarkan kebutuhan ini, petani tambak udang terdorong untuk saling membantu saat panen. Dengan harapan terjadi hubungan simbiosis mutualisme yang saling meringankan beban kerja saat panen.



Tabel 7 Kerugian yang Pernah Dialami

Kriteria	Kelas	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
Tidak Pernah	Rendah	24	12%
1-2 Kali	Sedang	102	51%
3-4 Kali	Tinggi	74	37%
		200	100%

Tabel 8 Faktor Penyebab Kerugian

Kriteria	Kelas	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
Tidak Tahu	Rendah	13	6,5%
Cuaca	Sedang	65	32,5%
Virus Mio	Tinggi	122	61%
		200	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang mengalami kerugian tergolong sedang sebanyak 51% (102 responden) dengan kriteria 1-2 kali mengalami kerugian. Faktor Virus Mio menjadi penyebab yang paling sering dialami oleh pembudidaya tambak udang di lokasi penelitian, yaitu 61% (122 responden). Virus mio merupakan hama yang banyak dikhawatirkan oleh pembudidaya tambak udang di lokasi penelitian karena merekat belum mengetahui cara mengatasinya.

Para petani menuturkan virus mio atau berak putih sangat sulit dicegah dan hal tersebut dapat merugikan para petani. Terdapat beberapa penyebab munculnya penyakit ini, diantaranya perubahan cuaca dan suhu perairan sehingga memicu stress pada udang. Kolam tambak udang yang jarang dibersihkan juga akan dapat mendatangkan virus pada udang. Para petani berharap ada solusi jitu dalam menangani masalah virus tersebut. Hal ini perlu ada perhatian dari pihak-pihak terkait khsusnya Kementerian Perikanan di Kabupaten Sumenep dalam rangka membantu mereka dengan cepat mengatasi masalah tersebut sehingga tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Pelatihan dan penyuluhan sangat diperlukan sehingga dapat menambah wawasan mereka dalam meningkatkan produksi tambak udang di Kabupaten Sumenep.

d. Distribusi Hasil Panen

Hasil panen dari penambak selanjutnya diangkut ke gudang pengepul. Sesampainya disana, hasil panen ditimbang dan ditentukan harga sesuai standar yang berlaku. Dalam kurun waktu tiga tahun ini, harga udang sangat stabil. Kisaran harga udang bergantung ukurannya; semakin besar ukuran udang semakin mahal pula harganya hingga mencapai Rp. 120.000/ kilogram. Tetapi umumnya, udang hasil budidaya petani lokal berkisar Rp. 60.000-90.000/kilogram dengan rata-rata keuntungan Rp. 12.000.000-15.000.000/petak. Dalam distribusi budidaya udang ini, pengepul cukup diuntungkan. Mereka tidak butuh modal besar, sebab pembayaran kepada petani dilakukan tiga hingga satu minggu setelah transaksi.

Dalam satu desa, seperti di lapa taman, terdapat empat pengepul. Setiap pengepul masing-masing memiliki pekerja 25-30 orang. Sedikitnya ada 100 orang masyarakat lokal yang terserap sebagai tenaga kerja. Bagian kerjayang membutuhkan cukup banyak pekerja adalah menvortir udang. Memisahkan udang yang ukurannya sangat kecil dari ukuran standar. Sedangkan pekerjaan lainnya bisa dilakukan dua sampai tiga orang seperti mengangkut box yang berisi udang ke pick up, dan pekerjaan lainnya yang tidak rumit.

Setiap gudang rata-rata menerima 3-4 ton udangperhari dari petani lokal. Sistem upah kepada pekerja bergantung banyak udang yang terkumpul di gudang. Satu ton udang diongkosi Rp. 1.000.000 yang kemudian dibagi rata dengan banyaknya jumlah pekerja. Sistem upah adalah sistem upah harian. Rata-rata pekerja menerima upah + Rp. 100.000/hari.



Dari pengepul lokal, selanjutnya didistribusikan ke pengepul yang lebih besar yang umumnya berada di jawa (luar madura).

e. Kontribusi Budidaya Tambak Udang terhadap Kesejahteraan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya tambak udang di lokasi penelitian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka memanfaatkan lahan pertanian sebelumnya seperti pohon kelapa, buah semangka dan cemara yang dianggap kurang produktif menjadi lahan tambak udang. Pendapatan yang begitu besar dari hasil tambak udang telah mengubah mereka berbudidaya tambak udang. Kontribusi tambak udang terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari aspek –aspek sebagai berikut.

1) Aspek Ekonomi dan Perumahan

Hasil observasi dan FGD, hasil budidaya tambak udang mampu memberikan kebutuhan rumah tangga dan pembangunan menjadi lebih baik. Para petani mengalami peningkatan ekonomi yang semula hanya pas-pasan menjadi berkecukupan. Mereka menuturkan, dari hasil panen digunakan untuk memperbaiki dan membangun rumah. Rata-rata rumah penduduk di sekitar tambak udang mengalami perkembangan dan kemajuan yang signifikan. Terdapat banyak rumah-rumah yang baru selesai dibangun atau diperbaiki dengan nuansa keramik. Selain membangun rumah, hasil pertanian tambak udang juga digunakan untuk membeli kendaraan mobil dan alat-alat transportasi lainnya. Dampak budidaya tambak udang di lokasi penelitian telah berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

2) Aspek Pendidikan

Dari pendapatan hasil tambak udang turut berkontribusi terhadap peningkatan pendidikan di lokasi penelitian. Dari hasil FGD, mereka menuturkan dari hasil tambak udang, dapat menyekolah-

kan putra-putrinya ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi keluarganya masih tergolong rendah. Justru yang terjadi di lokasi penelitian tidak demikian. Seharusnya, semakin tinggi pendapatan keluarga, maka semakin mudah bagi masyarakat meningkatkan pendidikan keluarganya. Hal tersebut belum disadari oleh petani tambak udang pada umumnya. Mereka tidak menganggap penting arti sebuah pendidikan melaui sekolah, yang paling penting bagi mereka adalah bertani dengan mengarahkan anggota keluarganya berbudidaya tambak udang. Bahkan mereka menuturkan, untuk apa sekolah tinggi-tinggi jika nantinya juga kembali bertani mengembangkan tambak udang.

3) Aspek Penyerapan Tenaga Kerja

Masyarakat di lokasi penelitian pada umumnya berprofesi sebagai petani vang sangat bergantung kepada hasil tani. Tambak udang merupakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat sendiri dan juga mampu membuka peluang bagi tenaga kerja untuk bekerja tambak udang di lokasi penelitan. Pembudidaya tambak udang di Desa Lapataman menuturkan, banyak para pekerja yang datang dari luar desa bahkan luar kecamatan yang datang ke Desa Lapataman sebagai pekerja harian. Kondisi ini berdampak terhadap pengurangan pengangguran dan lahan peningkatan ekonomi masyarakat secara luas.

f. Dampak Lingkungan Pengembangan Budidaya Tambak Udang

Dalam perindustrian nasional maupun lokal, limbah kerapkali menjadi persoalan sosial-lingkungan. Dalam banyak kasus, limbah industri besar maupun kecil sering dikeluhkan masyarakat luas karena mencemari lingkungan tempat tinggal mereka, baik pencemaran tanah, air, maupun udara. Limbah dari budidaya tambak



udang ini juga menjadi perhatian banyak kalangan; masyarakat lokal sekitar area tambak, aktivis lingkungan, pemerintah, maupun akademisi. Oleh karenanya pembuangan limbah haruslah diperhatikan dan diatur sedemikian rupa supaya tidak mengganggu masyarakat sekitar dan merusak ekosistem lainnya.

1) Dampak Limbah yang Dialirkan ke Laut

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan melalui wawancara dan observasi mengenai pembuangan limbah, baik oleh penambak lokal maupun asing, selama ini banyak dilakukan dengan cara membuang langsung ke laut. Cara ini merupakan cara yang paling praktis dan nyaman bagi penambak yang berada di pinggir pantai, tetapi tidak bagi masyarakat pengguna jalan di sepanjang pantai utara Sumenep. Pengguna jalan seperti nelayan, wisatawan - mengingat di tengah-tengah areal tambak ada wisata pantai lombang - dan masvarakat luas vang biasa melintas di sepanjang pantai sangat terganggu dengan pembuangan limbah tambak. Pengguna jalan yang mengendarai sepeda, motor, maupun mobil tidak bisa melintas jika kebetulan ada tambak yang sedang panen. Cairan limbah yang dibuang ke laut dialirkan begitu saja ke pantai, sehingga membentuk belahan tanah yang didalamnya dialiri limbah. Pengguna jalan tidak bisa melintas dengan mudah, ada yang harus muter mencari jalan alternatif yang itu sangat menyulitkan karena harus melewati pasir kering. Kalau pun ada yang nekat melintas, sangat rentan terjebak di tengah aliran limbah.

Selain terganggunya akses jalan, limbah yang dibuang ke laut ditengarai menghambat ekosistem laut. Beberapa nelayan kecil, khususnya mereka yang biasa menangkap ikan di laut dangkal, mengeluh karena menurunnya perolehan ikan tangkapan mereka. Meskipun belum diketahui secara pasti kausalitas antara limbah tambak dan pertumbuhan ekosistem laut, tetapi yang pasti lambat laun

limbah tambak udang ini akan mengotori kejernihan air laut.

2) Dampak Limbah yang Ditampung di Area Lokasi Tambak

Hasil FGD dengan penambak yang lokasi tambaknya jauh dari pantai, khususnya di desa Bungin-Bungin dan Lapa Taman, mereka menuturkan, membuang limbah dengan cara mengeruk tanah di sekitar areal tambak hingga membentuk cekungan terbuka yang dalamnya mencapai + 5 meter. Cara ini dibilang cukup praktis bagi penambak. Hal ini dilakukan karena mereka tidak mempunyai aliran pembuangan limbah yang bisa mengalir sampai ke laut. Khusus di Desa Lapataman, sungai yang ada tidak dapat digunakan karena sudah bukan milik umum atau disertifikat oleh perorangan. Hal serupa juga dialami pembudidaya tambak udang di Desa Lombang yang jauh dari pantai. Mereka menuturkan, pembuangan limbah ke laut hanya bisa mengandalkan aliran sungai kecil, tetapi limbah masih dapat menyerap kedalam tanah.

Di musim kemarau, sistem pembuangan limbah ini nampak tidak menggangu lingkungan sekitar, akan tetapi berbeda pemandangannya saat memasuki musim penghujan. Pada saat hujan mengguyur dengan intensitas yang cukup lama, cekungan air yang berisi limbah bercampur dengan air hujan, saat bendungan sudah tidak bisa menambung volume air, maka air limbah akan meluap ke sekitar areal tambak, termasuk juga menggenangi jalan aspal yang biasa dilintasi masyarakat umum.

Selain resiko di atas, limbah yang ditampung di areal lokasi tambak, juga mencemari air konsumsi rumah tangga. Air yang biasanya berasa segar, berubah menjadi payau dan berasa licin di kulit saat digunakan untuk mandi. Oleh karenanya, masyarakat yang biasa minum langsung dari air sumur, kini harus membeli air mineral kemasan buatan pabrik. Semen-



tara, untuk keperluan mandi dan mencuci, mereka masih menggunakan air sumur meskipun sangat dirasa tidak nyaman. Bagi penambak hal ini masih diterima karena dianggap setimpal dengan keuntungan yang mereka peroleh dari tambak udang, akan tetapi bagi masyarakat terdampak yang bukan penambak, merasa sangat dirugikan dengan pencemaran ini.

Air yang tidak lagi berasa segar dan tawar, juga merugikan petani di sekitar areal tambak, sebab air yang sudah berasa sedikit asin tidak bisa untuk menumbuhkan tanaman pertanian yang biasa mereka tanam, seperti semangka. Hal ini memaksa petani berhenti melakukan cocok tanam. Sebagai alternatifnya, mereka juga memproyeksikan lahannya untuk digarap tambak udang pula. Akan tetapi, karena membuka tambak udang itu membutuhkan biaya yang besar, maka tidak sedikit petani yang kehilangan matapencaharian mereka.

D. Kesimpulan

1. Dampak Sosial-Ekonomi

- a) Interaksi sosial dan gotong royong antar masyarakat di daerah industri tambak udang tetap terjaga, seperti terlihat dalam proses pembukaan lahan tambak udang dan saat panen. Mereka saling membantu satu sama lain secara suka rela. Hal ini telah dapat mengurangi biaya produksi tambak udang.
- b) Pelaku usaha tambak udang mengalami peningkatan pendapatan sebesar 900% dari rata-rata pendapatan hasil tani sebelumnya, yaitu Rp. 4.000.000/tahun meningkat menjadi Rp. 30.000.000 Rp. 70.000.000 sekali panen tambak udang, dihitung dari rata-rata luas lahan 1000m2 yang dimiliki oleh setiap keluarga.
- c) Industri tambak udang telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Setiap kepala keluarga yang memiliki tambak udang, sedikitnya membutuhkan 2 orang pekerja tetap

untuk memberi pakan, mengontrol dan mengawasi lokasi tambak udang. Pekerja tetap ini, setiap orang diupah 1.200.000-1.500.000/bulan. Sedangkan di level tengkulak, satu gudang yang membutuhkan pekerja 25-30 orang. Di satu desa, seperti di Lapataman terdapat empat gudang jadi dalam gudang/tengkulak di satu Desa Lapataman mampu menyerap tenaga kerja 100-120 orang yang rata-rata menerima upah harian sebesar + Rp. 100.000 bergantung banyak udang yang diterima gudang setiap hari.

d) Peningkatan pendapatan ini berdampak pada peningkatan kualitas perumahan penduduk masyarakat desa dan pemenuhan kebutuhan tersier, seperti kendaraan roda empat (mobil).

2. Dampak Lingkungan Limbah Tambak Udang

- a) Pencemaran air tanah/sumur.
- b) Menggangu jalan umum, baik di jalan raya beraspal, atau jalan di sepanjang pantai.
- c) Menimbulkan bau
- d) Meningkatnya habitat nyamuk
- e) Mengganggu keindahan pariwisata
- f) Ancaman banjir dan abrasi karena banyaknya pepohonan kelapa dan cemara yang ditebang.

3. Saran dan Rekomendasi Bagi Petani Tambak Udang

- a) Mengurangi pakan yang berbahan kimia
- b) Memperhatikan dampak limbah udang, baik bagi lingkungan sekitar maupun
- c) Tidak membukan lahan tambak udang di area sekitar rumah penduduk.
- d) Peduli terhadap pendidikan bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- e) Tidak menghamburkan hasil panen yang melimpah kepada hal-hal yang tidak produktif, tetapi disarankan bijk



dalam penggunaannya.

Bagi Pemerintah Daerah

- a) Rutin melakukan penyuluhan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas tambak udang, baik dari segi pakan, kemudahan permodalan dan distribusi hasil panen yang menguntungkan.
- b) Menyelesaikan dampak limbah tambak udang yang dialami masyarakat penduduk sekitar seperti pencemaran air sumur dan air laut.
- c) Membantu petani tambak udang dalam irigasi pembuangan limbah tambak udang.
- d) Penataan kawasan industri dan usaha produktif tambak udang yang tidak mengganggu sektor dan lokasi pariwisata dan ramah lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Johnson, R. Burke & Larry Christensen. Educational Research Ouantitative, Qualitative, and Mixed Approachhes. USA: SAGE Publications, 2013.
- Creswell, John W. &Vicki L.Piano Clark. Designing and Conducting: Mixed Methods Research. London: Sage Publications, 2007.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, *Kualitatif dan R&D.* Bandung: Afabeta, 2011.
- Hardani dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Creswell, John W. Research Designe Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Herdiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2012.

- Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Yin, Robet K. Case Studi Research: Design and Methods. Terj. M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Edi Indrizal. 2014. Diskusi Kelompok Terarah Focus Group Discussion (FGD) (Prinsip-prinsip dan Langkah Pelaksanaan Lapangan). Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial-Budaya.Volume16,No.1.http:// repo.unand.ac.id/4984/1/Artikel%20Edi%20Indrizal.pdf. 01 September 2021.
- Yati Afianti. 2008. "Focus Group Discussion (Diskusi kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif". Jurnal Keperawatan Indonesia. Volume 12,No.1,https://media.neliti.com/media/publications/110859-ID-focus-group-discussion-diskusi-kelompok. pdf.01 September 2021.
- Farida Nugrahani. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books, 2014.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, 2011.
- Mile, M.B. & A.M. Huberman. Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Beverly Hills: Sage Publication, 1984.

Model Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Komunikasi Efektif Pada Kelompok Relawan Tanggap Bencana Covid-19 di Kabupaten Sumenep

Moh. Zuhdi, Ahmad Muwafiq, Abd. Sukkur Rahman, Moh. Ikmal (Tim Peneliti LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam [STIQNIS])

ABSTRAK

Berbagai upaya dalam rangka menekan laju pertumbuhan penyebaran wabah ini terus dilakukan. Salah satu strategi utama untuk mengendalikan COVID-19 ini adalah di disamping difokuskan pada intervensi non-farmasi, seperti pembatasan sosial juga difokuskan pada angka partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi nasional sebagai bentuk pencegahan diri dari potensi penyebaran virus tersebut. Pembentukan satgas penanggulangan bencana covid sampai pada pengurangan aktifitas sosial masyarakat sebagaimana dijelaskan diatas pun ditempuh, namun upaya mendorong tingkat kesadaran prilaku masyarakat untuk taat pada prokes sekaligus bersedia melakukan vaksin terus mengalami hambatan-hambatan. Pada bulan Maret 2020, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari AJAR, Kontras, Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat, P2D, PKBI, YLBHI, YLKI, dan WALHI menyerukan kepada pemerintah untuk memperbaiki respons yang dinilai jauh dari pemenuhan hak untuk melindungi warga negara. Terdapat lima hal yang digugat oleh Koalisi Masyarakat Sipil terhadap pemerintah yaitu (1) memperbaiki mekanisme merespons pandemi dengan memberikan respons yang cepat, akurat, dan bertanggungjawab; (2) membenahi manajemen komunikasi publik; (3) menjaga hak privasi warga dengan mengungkap kasus tanpa membuka identitas pasien; (4) meminimalisir stiqma dan diskriminasi; dan (5) mengatasi kelangkaan masker dan sabun antiseptik dengan harga terjangkau.

Kata Kunci: Komunikasi, Relawan, Covid-19

A. Pendahuluan

Berbagai upaya dalam rangka menekan laju pertumbuhan penyebaran wabah ini terus dilakukan. Salah satu strategi utama untuk mengendalikan COVID-19 ini adalah di disamping difokuskan pada intervensi non-farmasi, seperti pembatasan sosial juga difokuskan pada angka partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi nasional sebagai bentuk

pencegahan diri dari potensi penyebaran virus tersebut. Pembentukan satgas penanggulangan bencana covid sampai pada pengurangan aktifitas sosial masyarakat sebagaimana dijelaskan diatas pun ditempuh, namun upaya mendorong tingkat kesadaran prilaku masyarakat untuk taat pada prokes sekaligus bersedia melakukan vaksin terus mengalami hambatan-hambatan. Pada bulan Maret 2020, Koalisi



Masyarakat Sipil yang terdiri dari AJAR, Kontras, Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat, P2D, PKBI, YLBHI, YLKI, dan WALHI menyerukan kepada pemerintah untuk memperbaiki respons yang dinilai jauh dari pemenuhan hak untuk melindungi warga negara. Terdapat lima hal yang digugat oleh Koalisi Masyarakat Sipil terhadap pemerintah yaitu (1) memperbaiki mekanisme merespons pandemi dengan memberikan respons yang cepat, akurat, dan bertanggungjawab; (2) membenahi manajemen komunikasi publik; (3) menjaga hak privasi warga dengan mengungkap kasus tanpa membuka identitas pasien; (4) meminimalisir stigma dan diskriminasi; dan (5) mengatasi kelangkaan masker dan sabun antiseptik dengan harga terjangkau.

Guna merespon penanganan bencana covid 19 ini, pemerintah kabupaten Sumenep melalui tim satgas covid 19 sudah melakukan 5 hal vaitu pertama pembentukan Satgas. Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatanan Penanganan Covid-19, juga Tim Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Covid-19. Kedua, mengeluarkan surat edaran kepada semua OPD, Tomas, Toga, Pengasuh Pondok Pesantren, Takmir Masjid/Mushalla untuk melakukan pola hidup sehat dan tidak mengadakan kegiatan yang menghadirkan banyak massa/masyarakat.

Ketiga, Pemkab telah melakukan penyemprotan disinfektan ke beberapa fasilitas umum, seperti Kantor OPD, tempat ibadah (Masjid/Gereja/Vihara), Pondok Pesantren, Pasar, Terminal, dan lainnya. Selain itu, Pemkab juga sudah menyiapkan anggaran dari dana APBD Kabupaten Sumenep untuk Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatanan Penanganan Covid-19 ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep Madura Jawa Timur menerapkan empat pelaksanaan kebijakan menghadapi status tanggap darurat COVID-19. Kebijakatan tersebut diperkuat dengan SK

Bupati Nomor 188/237/2020 untuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan COVID-19. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terbagi menjadi menjadi empat seksi. Yakni promotif preventif, kuratif, tracing (pelacakan), dan program social setting need.

Tindakan promotif preventif itu adalah sosialisasi pola hidup bersih sehat. Yakni sesuai protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, hingga penerapan physical distancing. Sedangkankan Tindakan Kuratif adalah di antaranya menjadikan RSUD Moh. Anwar Sumenep sebagai rumah sakit rujukan awal COVID-19, penyediaan ruang isolasi dan sebagainya. Sedangkan tindakan tracing adalah dengan melakukan pelacakan kepada masyarakat yang baru datang dari luar daerah, baik yang ada di desa atau pada saat di perbatasan, pelabuhan dan sebagainya. Dengan tujuan pemeriksaan apakah aman dari terjangkit virus atau tidak. Sedangkan program social setting need adalah memperhatikan stabilitas ekonomi dengan menggunakan dana belanja tak terduga dari Pemerintah Kabupaten. Selain itu sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), anggaran kegiatan setiap OPD yang non reguler untuk dialokasikan kepada penanganan COVID-19. Tak terkecuali Dana Desa (BLT-DD) itu.

Semangat dan ekspektasi yang tinggi dari pemerintah kabupaten sumenep dalam penanganan bencana covid 19 tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan kultural dan perilaku social masyarakat baik berupa penolakan-penolakan dan sikap dan perilaku meremehkan wabah ini seiring dengan minimnya literasi informasi masyarakat akan wabah covid 19 ini sekaligus bahaya dan dampaknya serta minimnya literasi informasi masyarakat akan strategi mitigasi. Disamping persoalan diatas, persoalan lain yang dihadapi pemerintah dalam program penanganan bencana covid 19 ini



adalah rendahnya pelibatan kelompok relawan dalam upaya jembatan komunikasi pemerintah dan rakyat bawah. Keberadaan kelompok relawan baik berupa organisasi social maupun organisasi keagamaan bagaimanapun tidak bisa dikesampingkan bahwa kedudukan dan keberadaan mereka memberikan pengaruh besar dalam struktur dan perilaku social masyarakatnya.

Dari pemaparan di atas, cukup jelas bahwa ketidakmampuan pemerintah dan tidak adanya komitmen yang kuat untuk mengarahkan dan mengintegrasikan gerakan masyarakat sipil sebagai sebuah kebijakan yang terarah, akan semakin memperlambat efektifitas dan efisiensi kinerja dalam mengatasi efek pandemi COVID-19. Oleh karena itu, menjadi hal yang mendesak bagi pemerintah untuk mulai menerapkan participatory governance dengan merangkul gerakan masyarakat sipil (dan pihak swasta) guna mengatasi pandemi COVID-19 secara lebih cepat, tepat, dan sinergis. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah bagian dari upaya konstribusi akademis tim peneliti dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan diatas melalui strategi penguatan partisipasi masyarakat melalui komunikasi efektif pada kalangan relawan tanggap bencana Covid-19 di Kabupaten Sumenep dengan mengurai dua pertanyaan pokok yaitu bagaimana pola komunikasi kebencanaan yang dibangun sebagai upaya mitigasi bencana covid-19 secara dini oleh pemerintah kabupaten Sumenep serta bagaimana model penguatan kelembagaan kelompok relawan dalam upaya menanggulangi bencana covid-19 di kabupaten Sumenep.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap suatu organisme, lembaga, atau gejala tertentu melalui suatu pengamatan atau analisis untuk meng-

hasilkan data deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang, gejala atau perilaku yang diamati. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistik, untuk mengungkap ontologi paradigma penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti bersifat aktif dalam melakukan interaksi dengan subjek penelitian dalam situasi apa adanya tanpa adanya rekayasa, sehingga data diperoleh dari fenomenanya yang bersifat asli dan natural.

Sementara teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh secara langsung (data primer), selebihnya adalah data tambahan berupa literatur, dokumen dan lain-lain. Sehingga untuk memperoleh data yang representatif, maka dalam penelitian ini menggunkan cara tertentu dalam mengumpulkan data. Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Moleong membagi kriteria dalam menetapkan validitas dan reabilitas dalam penelitian kualitatif yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transfrerability), kebergantungan pendability) dan kepastian (confirmability). Dengan demikian untuk mengukur validitas penelitian, peneliti menggunakan teknik trianggulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik trianggulasi terdapat empat macam yaitu pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, teori. Berdasarkan jenis tersebut teknik trianggulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik trianggulasi sumber data, yang berarti peneliti memanfaatkan sumber dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang



diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisir data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data. Sedangkan Bogdan dan Biklen (1982) dalam Lexy Moleong menjelaskan bahwa analisis daya adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data induktif. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, vaitu data vang diperoleh, dikumpulkan, dikelompokkan, dikategorikan berdasarkan sifat data, kemudian diadakan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan.

C. Data dan Analisis Hasil

1. Capaian Vaksinasi di Kabupaten Sumenep

Angka penyebaran virus di jawa timur semakin menyebar terutama ke wilayah Madura, data satgas covid COVID 19 Pemprov Jatim menyebutkan bahwa jumlah warga terkonfirmasi covid 19 sebanyak 5.440 orang dengan rincian di kabupaten Sumenep sebanyak 1.772 orang, Kabupaten Bangkalan 1.664 orang, Kabupaten Pamekasan 1.153 orang dan Kabupaten Sampang tercatat paling sedikit warga yang terpapar yaitu sejumlah 901 orang.

Data distribusi penularan covid 19 inilah yang mendorong pemerintah termasuk provinsi jawa timur untuk melakukan kegiatan vaksinasi secara massif sebagai upaya menekan penularan wabah

covid 19 ini pada masyarakat. Namun meski demikian jumlah capaian vaksinasi di Madura masih minim angka partisipasi masyarakatnya. Berdasarkan data capaian vaksinasi di Sumenep sebesar 46,57 persen. "Dari 845 ribu lebih target sasaran vaksin, tercapai 393.605 atau 46,57 persen. Angka capaian vaksinasi covid-19 tersebut terus mengalami kenaikan yang signifikan. Hingga memasuki tanggal 23 Oktober 2021, capaian vaksinasi covid-19 di Kabupaten Sumenep sebesar 46,57 persen. Dari 845 ribu lebih target sasaran vaksin di Kabupaten Sumenep, tercapai 393.605 atau 46,57 persen. Angka ini meningkat cukup drastis dibanding 2 minggu sebelumnya yang masih berkisar 30 persen.

Meningkatnya capaian vaksinasi covid-19 di Kabupaten Sumenep menunjukkan kesadaran masyarakat terus mengalami perkembangan. Lambat laun, masyarakat yang mulanya banyak yang "enggan" melakukan vaksin karena pengaruh berita hoaks sedikit demi sedikit bisa teratasi. Di banyak tempat, masyarakat mulai menyadari tentang pentingnya vaksin dalam rangka pencegahan covid-19.

Walaupun pada mulanya program vaksinasi mengalami banyak kendala di masyarakat, seperti dengan maraknya berita hoaks tentang vaksin, namun lambat laun masyarakat tampak menyadari tentang pentingnya vaksin. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang memilih ikut vaksin yang diselenggarakan pemerintah baik di Kecamatan, balai desa maupun di puskesmas setempat.

a. Pola Komunikasi Kebencanaan di Kabupaten Sumenep

Komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tapi juga penting pada saat dan pra bencana. Sebagaimana dikatakan bahwa komunikasi adalah cara terbaik untuk kesuksesan mitigasi bencana, persiapan, respon, dan pemulihan situasi pada saat bencana. Kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan tentang ben-



cana kepada publik, pemerintah, media dan pemuka pendapat dapat mengurangi resiko, menyelamatkan kehidupan dan dampak dari bencana.

Penanggulangan bencana, harus didukung dengan berbagai pendekatan baik soft power maupun hard power untuk mengurangi resiko dari bencana. Pendekatan soft power adalah dengan mempersiapkan kesiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian informasi tentang bencana. Menurut Haddow dan Haddow terdapat 5 landasan utama dalam membangun komunikasi bencana yang efektif yaitu:

- Costumer Focus, vaitu memahami 1. in-formasi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam hal ini masyarakat dan relawan. Harus dibangun mekanisme komunikasi yang menjamin informasi disampaikan dengan tepat dan akurat.
- 2. Leadership commitment, pemimpin vang berperan dalam tanggap darurat harus memiliki komitmen untuk melakukan komunikasi efektif dan terlibat aktif dalam proses komunikasi.
- 3. Situational awareness, komunikasi efek-tif didasari oleh pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi yang terkendali terkait bencana. Prinsip komunikasi efek-tif seperti transparansi dan dapat di-percaya menjadi kunci.
- 4. *Media partnership*, media seperti televi-si, surat kabar, radio, dan lainnya adalah media yang sangat penting untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada publik. Kerjasama dengan media menyangkut kesepahaman tentang kebu-tuhan media dengan tim yang terlatih un-tuk berkerjasama dengan media untuk- mendapatkan informasi dan menyebar-kannya kepada publik.

b. Strategi Komunikasi Relawan di Kecamatan Batang-Batang dan Bluto

Dewasa ini keberadaan komunikasi sebagai sebuah ilmu dan aktivitas semakin

disadari teramat penting. Sebagai manusia yang hidup dan berinteraksi dengan orang lain, komunikasi selalu dibutuhkan. Sejak manusia dilahirkan, komunikasi telah dilakukan begitu seterusnya hingga masa akhir kehidupan. Dengan demikian kita dapat mengatakan komunikasi merupakan aktivitas yang tidak bisa ditiadakan selama manusia hidup. Hal ini sejalan dengan vang dikatakan Ruben dan Steward bahwa tidak ada kegiatan yang lebih mendasar untuk kehidupan kita secara pribadi, sosial atau professional kecuali komunikasi.

Lebih lanjut Ruben dan Steward mengatakan "Kesadaran bahwa komunikasi merupakan proses yang mendasar, mau tidak mau menyiratkan bahwa hal itu mudah dipahami atau dikendalikan. Sebaliknya, komunikasi itu sangat kompleks dan memiliki banyak bentuk. Banyak contohnya dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, profesional, teknologi, nasional ataupun tradisional. Penegasan tentang pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia juga disampaikan oleh Scheidel dalam Mulyana yang mengemukakan "Bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang sekitar kita dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Namun menurut Sheidel tujuan dasar kita berkomunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka komunikasi dapat dikatakan sebagai perilaku atau aktivitas manusia yang utama dalam kehidupannya di muka bumi. Tidak mungkin manusia tidak melakukan kontak sosial dengan orang lain dan lingkungannya. Itu semua tentu saja dilakukan dengan komunikasi. Selain merupakan aktivitas mendasar dalam kehidupan manusia, komunikasi juga memiliki tujuan penting untuk menyelesaikan tugas-tugas



penting bagi kebutuhan manusa serta untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi komunikasi mempunyai fungsi isi, yang melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas dan fungus hubungan untuk melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain.

Terkait dengan fungsi hubungan, komunikasi adalah jalur yang menghubungkan manusia di dunia, sarana untuk menampilkan kesan, mengekspresikan diri, mempengaruhi orang lain dan mengorbankan diri kita sendiri. Melalui komunikasilah manusia membangun hubungan dengan orang lain yang berbeda. Komunikasi adalah sarana mencapai kegiatan bersama, menghubungkan satu dengan yang lain dan alat berbagi ide. Dalam kelompok, organisasi dan masyarakat, komunikasi adalah sarana yang dapat mempertemukan kebutuhan dan tujuan kita sendiri dengan kebutuhan dan tujuan pihak lain. Di dalam organisasi yang lebih besar, masyarakat dan komunitas dunia, komunikasi menyediakan jaringan hubungan yang memungkinkan kita untuk melakukan aksi bersama, pembentukan identitas bersama dan pembangunan kepemimpinan.

Sama pula dalam pelaksanaan program vaksinasi nasional sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam rangka mengurangi pertumbuhan penyebaran virus covid- 19 ini. Upaya massif yang dilakukan pemerintah maupun daerah serta masyarakat relawan terus dilakukan dibeberapa tempat. Keberhasilan program vaksinasi tentu tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat di dalamnya. Sama seperti pada daerah kabupaten Sumenep bahwa capaian vaksinasi di daerah termasuk didaerah kabupaten Sumenep sendiri tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada partisipasi aktif dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat di Kabupaten Sumenep menjadi kunci utama dalam capaian program vaksinasi Covid-19.

Karena itu, langkah pemerintah kabupaten Sumenep dan Satgas Covid-19 menggandeng semua pihak terkait, menjadi strategi yang tepat mulai dari tingkat kabupaten hingga Kecamatan dan pedesaan. Bagaimanapun juga, upaya mensukseskan program covid-19 sangat memerlukan kebersamaan dan keterlibatan semua elemen, mulai dari aparat pemerintahan hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Tidak bisa dipungkiri, peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat menentukan dalam upaya membangun komunikasi efektif dengan masyarakat pada umumnya. Sebab tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dangan warga di sekitarnya sehingga keterlibatannya selalu dibutuhkan dalam program vaksinasi covid-19. Lebih-lebih di daerah pedesaan. Dalam hal ini, masyarakat di pedesaan cenderung punya ketergantungan yang begitu besar terhadap seorang tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam setiap kebijakan. Lebih- lebih dengan maraknya berita bohong (berita hoaks) yang selama ini terjadi terkait program vaksinasi di tengah-tengah masyarakat. Banyaknya masyarakat yang termakan berita hoaks menjadi kendala tersendiri dalam upaya pelaksanaan vaksinasi covid-19. Akibat beredarnya berita hoaks tersebut, banyak sekali masyarakat yang khawatir dan takut untuk melakukan vaksin.

Berdasarkan data kominfo RI, pertanggal 29 Oktober 2021, sebaran konten berita hoaks terkait vaksin covid-19 sebanyak 2.327 sebaran di berbagai media sosial. Diantaranya adalah sebaran di Facebook sebanyak 2.137, instagram 19, Twitter 108, Youtube 43 dan Tiktok 21.11 Dalam hal ini, Media Sosial Facebook menempati posisi teratas yang paling banyak digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab terhadap program pemerintah untuk vaksinasi covid-19.

Model penguatan partisipasi masyarakat melalui komunikasi efektif pada



kelompok tanggap bencana covid-19 di kabupaten Sumenep dilakukan dengan cara yang beragam. Semua model tersebut tentu dengan tujuan yang sama, yakni dalam rangka meningkatkan capaian vaksinasi di masyarakat yang hingga kini masih terus diupayakan melalui sosialisasi intensif dengan pola komunikasi yang diharapkan efektif dalam upaya penyadaran masyarakat tentang manfaat vaksin. Di Kecamatan Batang- batang, misalnya, penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan capaian vaksinasi dilakukan dengan beberapa model komunikasi. Dalam hal ini, Satgas Covid-19 melakukan beberpa upaya yang diharapkan dapat mengdongkrak angka capaian vaksinasi, terutama setelah capaian vaksinasi di Kecamatan Batang-batang dinyatakan sangat rendah, hingga di posisi 3 paling bawah di Kabupaten Sumenep. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Rapat Koordinasi Bersama Kades

Kegiatan pelaksanaan percepatan penanganan bencana covid 19 di kabupaten sumenep terutama di kecamatan Batang-batang dan Bluto dilakukan bersama Tim Satgas Covid-19. Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan pembekalan dan pemantapan kepada semua kades di Kecamatan setempat untuk berperan aktif melakukan sosialisasi kepada warga tentang manfaat vaksin yang sehat dan halal. Rapat koordinasi ini dilakukan bekali-kali sekaligus juga evaluasi bersama terkait capaian vaksinasi yang telah dilakukan. Pembinaan oleh pihak Kecamatan dan Tim Satgas Kecamatan kepada kades ini juga seringkali dilakukan dalam acara-acara formal seperti dalam pengukuhan Perangkat desa dan Pengukuran Badan Perwakilan Desa (BPD) se Kecamatan Batang-batang. Dalam kesempatan ini, Camat selalu mewanti-wanti agar Kepala Desa dan Seluruh Perangkat serta BPD

terus melakukan langkah-langkah solutif dalam menyikapi persoalan pandemi covid-19 dan juga vaksinasi di desa masing-masing, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan dampak bahaya penyebaran virus covid 19 ini juga sekaligus rendahnya penerimaan warga masyarakat atas program vaksinasi nasional ditengah maraknya pemberitaan-pemberitaan hoaks akibat vaksin tersebut.

2. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Rapat Koordinasi Bersama Tokoh Kiai dan Pimpinan Organisasi Keagamaan

Dalam beberapa kesempatan, Camat Batang-batang bersama Satgas Covid-19 juga melakukan rapat koordinasi bersama para tokoh kiai dan juga pimpinan organisasi keagamaan dalam rangka mensukseskan vaksinasi untuk warga. Dalam forum ini, semua pihak diminta pendapat dan pandangan terkait problem-problem yang menyangkut pelaksanaan vaksinasi untuk kemudian dicarikan solusi bersama. Rapat koordinasi bersama tokoh ini rutin diadakan di Kecamatan Batang- batang dengan dikoordiner langsung oleh Camat. Selain untuk penyamaan persepsi dan penguatan langkah strategis pelaksanaan vaksinasi, dalam forum ini juga biasa dilakukan evaluasi bersama dalam rangka penguatan gerakan satgas covid-19 dalam upaya meningkatkan capaian vaksinasi. Dengan menggandeng para tokoh kiai dan pimpinan organisasi keagamaan ini, Satgas Covid-19 lebih melakukan proses vaksinasi, dimana para tokoh dapat terlibat langsung memberikan penyadaran dan dorongan kepada masyarakat luas untuk ikut vaksin. Kehadiran tokoh kiai dan pimpinan organisasi keagamaan baik di kecamatan batang-batang maupun kecamatan bluto lebih mudah diterima di masyarakat dimana secara kultur, masyarakat di Sumenep pada umumnya masih erat dengan kultur relegius yang selalu menjadikan tokoh kiai dan ustad sebagai ruju-



kan atas setiap permasalahan. Termasuk dalam hal ini permasalah vaksnisasi.

3. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemberian Hadiah Doorprize

Langkah lain yang dilakukan Satgas Covid-19 dalam upaya meningkatkan capaian vaksinasi di Kecamatan Batangbatang adalah dengan pemberian hadiah doorprize bagi warga yang bersedia melakukan vaksin covid-19.

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemberian Sembako

Salah satu dampak yang cukup serius dalam masa penanganan bencana covid 19 ini adalah stabilitas ekonomi nasional yang ditandai rendanya tingkat konsumsi nasional sekaligus daya beli masyarakat. Fenomena ini berkaitan dengan beberapa skema aturan pemerintah terkait dengan pembatasan social sekaligus kegiatan- kegiatan yang mendorong aktivitas kerumunan. Bagi para pelaku usaha tentu skema kebijakan ini tentu sangatlah berdampak pada tingkat pendapatan para pedagang dan pelaku usaha yang ada. Fenomena semacam ini tentu juga menjadi tantangan sekaligus pertimbangan pemerintah guna melakukan upaya stimulasi ekonomi masyarakat sekaligus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional sebagai bagian dari prioritas nasional yang mendesak guna langkah-langkah pemulihan ekonomi kedepan. Melalui pemberian sembako kepada warga yang bersedia melakukan vaksin juga terjadi di sebagian desa di Kecamatan Batang-batang maupun di kecamatan Bluto. Tujuan juga sama, dalam rangka mendorong warga agar lebih semangat melakukan vaksin.

5. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Testimoni Tokoh Kiai

Cara lain yang juga dilakukan Satgas Covid-19 dalam rangka meningkatkan capaian vaksinasi di Kecamatan Batangbatang adalah dengan melibatkan tokoh kiai sebagai panutan masyarakat untuk ikut serta melakukan vaksin. Tujuan utamanya untuk memberikan percontohan kepada masyarakat agar yang mulanya ragu untuk bervaksin menjadi yakin bahwa vaksin aman, sehat dan halal.

Bahkan, dalam ikut serta melakukan yaksin ini, tokoh kiai juga diminta untuk rekaman video berupa testimoni yang berisi ajakan kepada warga untuk ikut vaksin serta menvatakan bahwa vaksin covid-19 aman, sehat dan halal. Video tersebut kemudian disebar luas untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka menangkal maraknya pemberitaan negatif tentang vaksin, sehingga mereka terdorong untuk ikut vaksin.

6. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Sosialisasi Berbasis Kampung

Dalam ranga mengedukasi dan meyakinkan warga tentang vaksin sehat dan aman, sebagian desa di Kecamatan Batang-batang juga rutin melakukan sosialisasi keliling berbasis kampung dengan mobil informasi. Selain mengajak warga untuk ikut bervaksin, sosialisasi keliling berbasis kampung ini juga memberikan informasi tentang jadwal vaksinasi yang dilaksanakan di Balai Desa.

7. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Vaksinasi Jemput Bola

Cara lain yang tak kalah penting dalam upaya penguatan partisipasi masvarakat dalam program vaksinasi covid-19 adalah dalam bentuk vaksinasi jemput bola. Hal ini dilakukan sebagian desa di Kecamatan Batang-batang maupun di kecamatan Bluto dengan melibatkan RT dan RW untuk mendata warga di daerahnya yang sudah siap bervaksin dengan target jumlah yang ditentukan. Salah satu desa yang menerapkan ini adalah desa Batangbatang Daya dan Desa Aengbaja Raja Bluto Dalam hal ini, pengurus RT dan RW keliling dari rumah ke rumah warga untuk



melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga yang mau melakukan vaksin. Tujuannya untuk memudahkan layanan vaksinasi kepada warga, dimana mereka tidak harus pergi ke balai desa atau puskesmas untuk bervaksin.

D. Penutup

Berdasarkan hasil kajian dan studi literature terkait bagaimana mengoptimalkan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat melalui komunikasi public yang efektif pada kelompok relawan bencana covid 19 di Kabupaten Sumenep, maka beberapa hal yang dapat dijadikan evaluasi sekaligus rekomendasi kebijakan kedepan adalah sebagai berikut : Pendekatan kearifan lokal, jalur komunikasi tradisional, dan jejaring lokal. Pemerintah dalam hal ini Satgas Covid 19 Kabupaten Sumenep maupun kelompok relawan perlu terus mengoptimalkan nilai, jaringan, media komunikasi dan pesan kearifan lokal (local wisdom) atau tradisional dalam komunikasi publik. Misalnya menggunakan media komunitas, medium seni, budaya, bahasa, nilai, dan kebiasaan lokal. Juga penggunaan jejaring lokal dengan komunikasi formal dan informal dalam level komunikasi kelompok dan antar pribadi. Para pihak ini dekat dengan akar rumput (masyarakat) dan dapat diberdayakan sebagai perpanjangan jejaring komunikasi publik pemerintah. Publik Indonesia masih memiliki kepercayaan dan ketergantungan yang tinggi kepada pimpinan tradisional dan jalur komunikasi lokal dalam pembuatan keputusan pribadi dan bersama.

Pemerataan dan penguatan kampung Destana (desa tangguh bencana) ke seluruh desa-desa yang ada pada semua kecamatan di kabupaten Sumenep dengan melibatkan infrastruktur kelembagaan yang ada antara BPBD, desa dan kelompok relawan yang ada. Kegiatan sosialisasi tanggap bencana bisa dikemas dengan kegiatan simulasi mitigasi bencana dari tahap pra bencana maupun pada saat ben-

cana berlangsung dengan menggunakan media sosialisasi yang mudah dipahami oleh warga sekitar. Kegiatan simulasi tanggap bencana covid 19 bisa dikemas dengan kegiatan sosialisasi bahaya covid-19 dan bagaimana menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitarnya. Disamping itu upaya lain dalam rangka mendorong keberlanjutan program kampong tangguh bencana adalah memperkuat aturan hukum yang mengikat warga masyarakat agar membentuk budaya hukum bagi warga sekitar.

Penegakan *law enforcement*. Pemerintah harus bersikap tegas dalam penanganan pelanggaran protokol Covid-19 maupun kepada penyebar berita hoaks yang berusaha menghambat upaya tim satgas covid-19 dalam percepatan vaksinasi dengan tujuan demi terwujudnya penegakan hukum dan memutus rantai penyebaran virus. Kebijakan ini perlu terus dikomunikasikan untuk membangun konsonansi pesan dan kepercayaan publik pada ketegasan pemerintah dalam penanganan pandemi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. Suharsimi 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Atkin, Charles K&Ronald E. Rice (eds)
 2013. Theory and Principles of
 Public Comunication Campaigns
 4th edition. Thousand Oaks:
 Sage Publication, Inc.
- Haryanti, dkk 2018. *Government Public Relation and Social Media*. Bridging
- Haddow, G. D, dan Kims. 2008. *Disaster Com-munications, In A Changing Media World*. London. Elsevier
- Kriyantono, Rachmat & Halimatus Sa'diyah. (2018). *Kearifan Lokal dan Strategi Komunikasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kusumasari, Bevaola 2014. *Manajemen* bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta: Gava



Media.

- Lee, Mordecai., Neeley, Grant & Stewart, Kendra (Ed.) 2012. The Practice of Government Public.
- Little john, 2007. Teori Komunikasi; Theories Of Human Communication. Jakarta: Salemba Humanika
- Lee, Mordecai., Neeley, Grant & Stewart, Kendra (Ed.). (2012). The Practice of Government Public. London: CRC Press
- Milles, MB dan AM Huberman, 1992. Qualitative Data Analysis; A Sourcebook Of New Methods. Beverly Hills: SAGE.
- Mulyana, Deddy, 2008. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Naturalistik. Makalah. Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian bagi CPNS-Dosen UNY tahun 2006, pada tanggal 26-27 Desember 2006.
- Milles, MB dan AM Huberman, 1992. *Qual*itative Data Analysis; A Sourcebook Of New Methods. Beverly Hills: SAGE, Hal 80
- Mulyana, D. 2006. Ilmu Komunikasi, Suatu pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moenawar, M. Ghozalie. (2020). "Menjaga Komunikasi Ketika Publik Sensi: Adaptasi Terhadap Communication Asymmetries". [Video]. Webinar Series #1 UAI: Menjaga Komunikasi Ketika Publik Sensi. Selasa, 9 Juni 2020, 10.00-12.30 WIB via zoom. Jakarta: Prodi Ilmu Komunikasi, Puskakom dan KOMIK Universitas Al Azhar Indonesia, diakses dari https://www.youtube.com/ watch?v=cI4ekvzbWIc, diakses pada 10 Juni 2020, pk 12.00 WIB Ramadani, Thoriq. (2019). "Implementasi

- Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik di Kementerian.
- Setio, H. H. B (ed). 2011. Komunikasi Bencana. Yogyakarta: Mata Padi Presindo
- Stewart, L. P., dan R. D. Brent 2013, Komunikasi dan Perilaku Manusia. Jakarta: Rajawali Press
- Sulistyo, Arty Indyah. 2006. "Prinsip Dasar, Perumusan Masalah, dan Pengumpulan Data Penelitian Naturalistik". Makalah. Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian bagi CPNS-Dosen UNY tahun 2006, pada tanggal 26-27 Desember 2006
- Watari, Doli. (2018). "Belum Optimal, Kemkominfo Ingatkan Lima Tugas Humas Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, April 17, 2018. Diakses dari http:// diskominfo.siakkab.go.id/belum-optimal-kemkominfoingatkan-lima-tugas- humas-pemerintah/2/, diakses pada 4 Juni 2021, pk. 07.00 WIB

Sumber Daring

- https://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/capaian-vaksinasi-covid-19-asn-pemkabmenep-526-persen
- https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/cara-sumenep-dongkrak-capaian-vaksinasikan-di-ponpes-pelabuhan-dan-wilayah-perbatasan/
- https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/sumenep-kehabisan-stok-vaksin-sinovac/
- https://www.kominfo.go.id/content/detail/37792/penanganan-sebaran-konten-hoaks-vaksincovid-19-jumat-29102021/0/ infografis

Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui BUM Desa di Kabupaten Sumenep

Sutrisno, Abdur Rakib, Abdul Azis, Ach. Baidlawi Bukhari (Tim Peneliti LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam [STAI] Nurud Dhalam Ganding Sumenep)

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) didirikan dengan harapan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pada kenyataannya ada beberapa BUM Desa yang keberadaannya terkesan berjalan secara alami, bahkan mungkin sebagian masyarakat desa tidak mengerti tentang peran dan fungsi BUM Desa, ini menunjukkan bahwa apa yang ditekankan pemerintah tentang pembangunan berbasis masyarakat melalui pendirian BUM Desa masih terdapat kendala di lapangan dan perlu dicarikan solusinya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena dapat menggambarkan dan menafsirkan data yang menjadi bahan penelitian yang ada pada lokasi penelitian. Dengan penelitian deskriptif ini akan didapatkan gambaran secara terarah dan sistematis, faktual dan akurat tentang faktor-faktor, sifat dan gejala yang diamati, sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian dapat terealisasi.

Penelitian ini menunjukan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Beberapa unit usaha yang didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memberi kemudahan pada msyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat menghemat pengeluaran karena tidak harus pergi ke kota, di samping juga memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya, seperti pemasaran produk lokal atau produk rumahan. Faktor pendukung terlaksananya kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) antara lain; pengelolaan yang profesional, dukungan dari pemerintah desa, dukungan BPD dan masyarakat umum. Sedangkan faktor penghambatnya adalah; geografis yang sulit, minimnya sosialisasi, belum punya CV atau PT secara independent, dan kurangnya fasilitas dan pendanaan.

Kata Kunci: Peningkatan, Ekonomi, BUMDESA



A. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional dasarnya berawal dari pembangunan Desa, karena apabila setiap desa telah melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara Nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia (Dita, 2017). Tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan, karena sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup di kawasan pedesaan.

Pasca Reformasi, program pembangunan mulai diperbaharui dengan menekankan pembangunan berbasis masyarakat, di mana desa menjadi sasaran utama yang harus dikembangkan karena desa merupakan roda kehidupan manusia dimulai. Banyak program yang dicanangkan pemerintah untuk memajukan desa. Pemerintah pusat telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (Based on village). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan pemerintah bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup: a) Peningkatan kelembagaan, b) Pemberdayaan masyarakat, c) Peningkatan ekonomi local, d) Pembangunan sarana dan prasarana.

Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan didirikannya lembaga perekonomian desa, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pada awal diberlakukannya peraturan pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BUM Desa diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kemudian melalui Permen Desa PDTT nomor 3 tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tidak lagi hanya sebagai badan usaha milik Desa semata, akan tetapi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah sebuah lembaga yang berbadan hukum yang didirikan oleh desa. BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah badan hukum vang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Hampir seluruh desa di Kabupaten Sumenep sudah mendirikan BUM Desa, namun demikian, pada kenyataannya ada beberapa BUM Desa yang keberadaannya terkesan berjalan secara alami, bahkan mungkin sebagian masyarakat desa tidak mengerti tentang peran dan fungsi BUM Desa, ini menunjukkan bahwa apa yang ditekankan pemerintah tentang pembangunan berbasis masyarakat melalui pendirian BUM Desa masih terdapat kendala di lapangan dan perlu dicarikan solusinya. Tim peneliti mengambil dua obkjek BUM Desa sebagai sampel dalam penelitian ini, dan tim peneliti sengaja mengambil objek di daerah yang agak jauh dari perkotaan supaya keberadaan BUM Desa sebagaimana dimaksud bisa diketahui apakah benar- benar dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat atau sebaliknya. Adapun objek dari penelitian ini adalah BUM Desa Tarebung di Desa Lenteng Barat dan BUM Desa Wangi di Desa Ganding.

Fenomena keberadaan BUM Desa di Kabupaten Sumenep inilah yang membuat tim peneliti tertarik untuk menelusuri dan menganalisa lebih lanjut sejauh mana peran BUM Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dirumuskan pokok permasalahanya menjadi



dua, yaitu: Bagaimana peran BUM Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumenep? Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat BUM Desa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten sumenep?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena dapat menggambarkan dan menafsirkan data yang menjadi bahan penelitian yang ada pada lokasi penelitian. Dengan penelitian deskriptif ini akan didapatkan gambaran secara terarah dan sistematis, faktual dan akurat tentang faktor-faktor, sifat dan gejala yang diamati, sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian dapat terealisasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interprestasi sehingga sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Peningkatan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi atau aset desa yang dimobilisasi oleh masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi atau aset harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat setempat.

Untuk lebih meningkatkan potensi dalam proses peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa, maka pengurus BUM Desa Tarebung dan BUM Desa Wangi melakukan langkah-langkah strategis, yaitu dengan jalan memberikan pelatihan sebagai bekal untuk pengurus dan masyarakat memasukidunia usaha. Adapun langkah-langkah tersebut adalah: a) Pelatihan usaha, b) Pemagangan, c) Penyusunan proposal, d) Permodalan, e) Jaringan bisnis. Impelemntasi dari penerapan langkah-langkah strategis yang dilakukan di BUM Desa Tarebung dan BUM Desa Wangi menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa Tarebung dan BUM Desa Wangi berdampak positif pada masyarakat desa setempat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara) dan observasi maka peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa di Kabupaten Sumenep vang berasl dari beberapa unit usaha sebagai berikut: 1) Unit Usaha Digitalisasi Desa, 2) Unit Usaha Home Industri, 3) Unit Kerajinan Rakvat. Dari ketiga unit usaha yang dirintis oleh BUM Desa Tarebung sebagaimana dimaksud, diperoleh laba kotor sebesar Rp. 149.222.500. ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan mendapat respon yang baik dari masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan Ach. Lutfi selaku Direktur BUM Desa Tarebung

Sementara BUM Desa Wangi hingga kini telah memiliki beberapa unit usaha, seperti percetakan (foto copy) dan Penggilingan padi. Inisiatif terhadap unit usaha ini karena masyarakat desa Ganding yang mayoritasi penduduknya berpengahasilan dari pertanian (padi) sehingga mendirikan unit usaha penggilingan padi merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat pedesaan. Sedangkan pertimbangan terhadap pendirian unit percetakan karena di desa Ganding terdapat beberapa sekolah bahkan ada satu kampus untuk pendidikan tinggi yang sarat dengan percetakan (foto copy) dalam setiap harinya. Semenjak adanya unit-unit usaha yang dikelola oleh dua BUM Desa ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi



kebutuhannya. Selain itu juga sebagian dari mereka baik pemuda maupun masyarakat desa Lenteng Barat dan Desa Ganding pada umumnya diikutsertakan dalam menjalankan usaha BUM Desa sehingga dari dilibatkannya pemuda dan masyarakat dapat menambah pendapatan mereka selain sebagai petani maupun pengrajin.

1. Peran BUM Desa terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Peran BUM Desa terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat menjadi motor penggerak dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di Desa, karena masyarakat bisa memanfaatkan jasa layanan unit-unit usaha yang dikembangkan oleh kedua BUM Desa dan juga bisa dijadikan untuk tempat berwirausaha. Ini merupakan salah satu bentuk nyata peran BUM Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, di mana adanya keterlibatan masyarakat dalam mengelola BUM Desa membawa dampak perubahan yang baik dalam perekonomian masyarakat.

Di samping itu pula, adanya BUM Desa secara tidak langsung dapat menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran yang ada di desa at. Berikut ini tabel yang menunjukan kenaikan pendapatan masyarakat setelah adanya BUM Desa.

Data Pendapatan Masyarakat Pengelola BUM Desa

		PENDA	PATAN	JUM-
NO	NAMA	SEBELUM	SESUDAH	LAH KE- NAIKAN
1	Ach. Lutfi	Rp.950.000	Rp.1.600.000	59,38%
2	Halimuddin	Rp.825.000	Rp.1.400.000	58,93%
3	Syauqi	Rp.800.000	Rp.1.400.000	57,14%
4	Ruwaidi Roy	Rp.700.000	Rp.1.450.000	48,28%
5	Moh. Hawail	Rp.900.000	Rp.1.300.000	69,23%
6	Ach. Naily	Rp.800.000	Rp.1.300.000	61,54%
7	Zainuddin	Rp.1.100.000	Rp.1.850.000	59,46%
8	Abd. Hayyi	Rp.900.000	Rp.1.500.000	60,00%
9	Hosnan	Rp.850.000	Rp.1.350.000	62,96%

	58,71%			
12	Sudahnan	Rp.840.000	Rp.1.475.000	56,95%
11	Rakib	Rp.750.000	Rp.1.400.000	53,57%
10	Ach. Badri	Rp.800.000	Rp.1.400.000	57,14%

Sumber: Hasil Wawancara Warga Desa Lenteng Barat

Simpulan dari hasil tabel yang ada di atas menunjukkan bahwa BUM Desa dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sebanyak 58,71% dari pendapatan masyarakat sebelum adanya BUM Desa.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi **BUM Desa**

Setiap usaha atau program hampir dipastikan ada faktor yang mempengaruhidalam pelaksanaanya. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan BUM Desa Tarebung dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Faktor pendukung tercapainya usaha BUM Desa adalah: Pengelolaan yang profesional, Dukungan dari Pemerintah Desa, Dukungan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kondisi Sosial (Masyarakat Umum).
- b. Adapun faktor penghambatnya antar lain: Geografis Sulit, kurang sosialisasi dari pengurus ke masyarakat bawah, Kurangnya Fasilitas dan pendanaan, Belum Mempunyai CV atau PT secara independent

D. Kesimpulan

Kesimpulan dalam kajian menunjukan bahwa adanya BUM Desa Tarebung mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Beberapa unit usaha yang didirikan BUM Desa Tarebung memberi kemudahan pada masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat menghemat pengeluaran karena tidak harus pergi ke kota, disamping juga memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya, seperti pemasaran



produk lokal atau produk rumahan.

Setiap usaha atau program hampir dipastikan ada faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaanya. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan BUM Desa Tarebung dapat dijabarkan sebagai berikut. 1) Faktor pendukung tercapainya usaha BUM Desa adalah: Pengelolaan yang profesional, Dukungan dari Pemerintah Desa, Dukungan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kondisi Sosial (Masyarakat Umum), 2) Faktor penghambatnya antar lain: Geografis Sulit, Minimnya sosialisasi, Kurangnya Fasilitas dan pendanaan, Belum Mempunyai CV atau PT secara independen. Sementara kajian ini juga memiliki beberapa rekomendasi, yaitu (1) Kepada BUM Desa. Dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa perlu disosialisasikan lebbih inten lagi, dan untuk keterlibatan masvarakat dalam pengelolaan BUM Desa lebih diperbanyak lagi guna memberi manfaat yang lebih luas dan meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat (2) Pemerintah Desa. Pemerintah Desa lebih mensupport terhadap program-program yang dikembangkan oleh BUM Desa, terutama dari segi permodalan karena dengan lebih banyak modal yang diusahakan maka dengan sendirinya akan mampu meningkatkan pelayanan kepada msyarakat, (3) Pemerintah Kabupaten Sumenep. Keberadaan BUM Desa di Kabupaten Sumenep tidak semuanya tergolong BUM Desa sehat, harapan kami pemerintah tetap memberikan pembinaan sesuai amanah undang-undang, karena dengan adanya pembinaan yang konsinten pendudkung dapat meningkatkan kinerja para pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

DAFTAR PUSTAKA

Dita Angga Rusiana, BUM Desa Motor Penggerak Desa, ditulis pada tanggal 26 Januari 2017.

Kementrian Negara, "Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal" terdapat di http://www. kemenegpdt.go.id/ , diakses pada tanggal 5 September 2021.

Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014, Pasal 1, Avat 6

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021

Kamus Besar Indo-Bahasa (KBBI) https://www. nesia google.com/search?q=analisis+adalah&oq=analisi&aqs=chrome.0.69i59j69i57j6 9i60.3039j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, akses 18-10-2021 (10.07)

Edi Sueharto, Metodologi Peningkatan Ekonomi Masyarakat : Jurnal Jakarta: BEMJ,PMI, Comdev, 2004,

Edi Sueharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Rekan Aditama, 2010.

Lokal: Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 18 (2): hal. 103-123.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021

Udhi Purnomo, BUM DESA "KARYA MANDIRI", Desa Balingasal, Kec. Padureso, Kabupaten Kebumen. 13 Iuli 2020

Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara, Jurnal Riset Akuntansi JUARA, Vol. 9 No. 2 September 2019

Suharismin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Renika Cipta, 1989, hal. 280

Irawan Soehartono "Metode Penelitian Sosial", Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2008.



Analisis Sosial Masyarakat Sumenep dalam Meningkatkan Kualitas Garam Rakyat

Mukhlishi, Ubaidillah Cholil, Moh. Fadli, Nurul Huda, Zainol Huda, Dedi Eko Riyadi Hs, Tamimah, Mohammad Sholeh (Tim Peneliti STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep)

ABSTRAK

Madura merupakan salah satu pulau di provinsi Jawa Timur yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep Sumenep berada diujung Timur Pulau Madura merupakan wilayah selain terdiri wilayah daratan juga terdiri dari kepulauan yang tersebar ke 126 pulau. Sumenep merupakan salah satu wilayah penghasil garam di Madura, Per 30 Agustus 2021 Produksi garam di Sumenep mencapai 40,775.39 Ton.

Dinas Perikanan Sumenep mencatat produksi garam pada tahun 2015 sebanyak 236.117,96 ton, tahun 2016 sebanyak 17.109, 20 ton, tahun 2017 sebanyak 232.393,29, dan tahun 2020 sebanyak 236.368 ton. Namun demikian sektor produksi garam masih termarjinalkan karena daya saing SDM rendah, kapasitas produksi kecil dan dengan mutu garam yang tidak seragam, lemahnya kultur kewirausahaan petambak garam. Sampai saat ini produksi garam dalam negeri hanya laku untuk garam konsumsi sedangkan garam industri masih impor. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian tentang analisis sosial masyarakat sumenep dalam meningkatkan kualitas garam rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi di dua desa; Desa Pinggirpapas dan Desa Gresik Putih. Analisis dilakukan melalui tiga teknik: observasi, interview, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapai petani garam di dua desa tersebut disebabkan oleh faktor berikut; (1) siklus cuaca yang tidak menentu; (2) minimnya modal; dan (3) rendahnya harga jual garam nasional.

Kata Kunci: Analisis Sosial, Petani Garam, Masyarakat, Garam Rakyat

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim, kaya akan sumber daya kelautan juga kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan yang tersebar pada 3,351 juta km2 wilayah laut dan 2,936 km2 wilayah perairan zona ekonomi ekslusif dan landasan kontinen (BPS, 2018:83). Pandemi COVID-19 masih berdampak nyata pada seluruh aspek

kehidupan perekonomian nasional bahkan dunia. Penurunan terjadi pada sejumlah sektor ekonomi. Ketika sektor yang lain mengalami penurunan atau perlambatan, sektor Pertanian justru mengalami peningkatan pada kwartal 2 dan 3 tahun 2020. Pada triwulan II PDB sektor pertanian tumbuh 16,24% dan pada triwulan III tumbuh 2,15%. Pertumbuhan sektor pertanian sekaligus membuat kontri-



businya terhadap ekonomi nasional terus menguat. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi pada PDB triwulan III yang makin meningkat menjadi sebesar 571,87 triliun rupiah atau 14,68% (Kementerian Pertanian, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020, produksi garam nasional pada tahun 2016 sebanyak 168 ribu ton, tahun 2017 sebanyak 1,1 juta ton, tahun 2018 2,7 juta ton, 2019, 2,3 juta ton, dan tahun 2020 sebanyak 3 juta ton (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa produksi garam dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan garam bagi sektor industri. Namun di perkirakan Indonesia masih belum terbebas dari impor garam dalam waktu dekat, karena kebutuhan garam bagi sektor industri saat ini terus meningkat dengan produktivitasnya yang tinggi. Disisi lain, kualitas garam produksi lokal masih dianggap belum memenuhi kebutuhan kualitas tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya, kadar NaCl harus minimal 97 persen (Kementerian Perindustrian, 2021). Produksi garam di Indonesia pada umumnya dilakukan secara individual oleh petani garam secara tradisional dan sangat bergantung pada kondisi iklim-cuaca (Azizi et.al., 2011; Kumala, 2012).

Madura terletak di sebelah utara dan timur Laut Jawa, sedangkan di sebelah selatan dan barat adalah Selat Madura. Madura merupakan salah satu pulau di provinsi Jawa Timur yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep (Nur & Nuraini, 2011). Sumenep berada diujung Timur Pulau Madura merupakan wilayah selain terdiri wilayah daratan juga terdiri dari kepulauan yang tersebar ke 126 pulau. Sumenep merupakan salah satu wilayah penghasil garam di Madura, Per 30 Agustus 2021 Produksi garam di Sumenep mencapai 40,775.39 Ton.

Dinas Perikanan Sumenep men-

catat produksi garam pada tahun 2015 sebanyak 236.117,96 ton, tahun 2016 sebanyak 17.109, 20 ton, tahun 2017 sebanyak 232.393,29, dan tahun 2020 sebanyak 236.368 ton. Namun demikian sektor produksi garam masih termarjinalkan karena daya saing SDM rendah, kapasitas produksi kecil dan dengan mutu garam yang tidak seragam, lemahnya kultur kewirausahaan petambak garam. Sampai saat ini produksi garam dalam negeri hanya laku untuk garam konsumsi sedangkan garam industri masih impor.

Perilaku Masyarakat Pesisir **Petambak Garam**

Program Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh permerintah di masa lalu belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada masyarakat pesisir, hal ini disebabkan karena kebijaksanaan pemerintah dimasa tersebut masih berorientasi pada eksploitasi. Suksesnya di darat sebagai sasaran utama pembangunan nasional sehingga masyarakat pesisir menjadi terlupakan bahkan diabaikan. Secara sosial ekonomi masvarakat pesisir sangat tertinggal, bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian, dapat dipahami bila kantong-kantong kemiskinan adalah daerah pesisir. Masyarakat petambak garam Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari masyarakat pesisir yang selama ini belum mampu merealisasikan program-program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas garam rakvat.

Temuan dilapangan dengan berbagai tantangan di bidang marketing atau pemasaran dan permodalan ini cukup ironis jika dibandingkan dengan keinginan dan harapan yang disampaikan oleh petambak garam dalam aspek kemitraan. Ditengah lesunya sektor perekonomian dua tahun terakhir akibat dampak Covid-19 dan ditambah lagi dengan rendahnya peranan lembaga koperasi dalam usaha garam rakyat, justru keinginan



terbesar petambak garam di Kabupaten Sumenep mengharapkan pola kemitraan yang dijalin dengan koperasi berjalan dengan baik.

1. Perilaku Sosial Masyarakat Pesisir

Zamroni (1992) menyatakan bahwa perilaku sosial merupakan hubungan antara tingkah laku masyarakat dengan tingkah laku lingkungan. Indikator-indikator perubahan perilaku sosial berbeda-beda pandangan setiap ahli. Jayasuriya dan Wodon (2002) melakukan riset di sejumlah negara menggunakan 2 kategori utama yaitu pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Africa (2003) menggunakan in dikator kebutuhan dasar minimum sistim informasi data masyarakat (MBN-CBIS) dengan 3 indikator utama yaitu *survival*, security dan enabling. Usman (2003) memberikan 3 komponen utama dalam mengupas permasalahan di masyarakat yang terkait dengan kondisi lingkungan yaitu: demografi, ekonomi dan budaya. Orang pesisir memiliki rasa harga diri yang amat tinggi dan sangat peka. Perasaan itu bersumber pada kesadaran mereka bahwa pola hidup pesisir memang pantas mendapat penghargaan yang tinggi.

Ciri-ciri perilaku social di atas memiliki relevansi dengan ciri-ciri kepemimpinan sosial masyarakat pesisir. Berdasarkan kajian filologis atau naskah-naskah klasik (kuno) yang banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, seperti Kitab Sindujoyo Pesisiran dan Babad Gresik Pesisiran, syarat-syarat pemimpin di kalangan masyarakat pesisir adalah sebagai berikut (Widayati, 2001:3):

- 1. Siap menolong siapa saja yang meminta bantuan;
- 2. Mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri;
- 3. Dermawan kepada semua orang;
- 4. Selalu menuntut ilmu dunia dan akhirat untuk keseimbangan kehidupan;
- 5. Tidak berambisi terhadap jabatan atau kedudukan walaupun banyak berjasa;

- 6. Rendah hati (tidak sombong), tetapi tidak rendah diri (minder);
- 7. Sangat benci penindasan dan berbuat adil kepada siapa saja;
- 8. Rajin bekerja dan beribadah, khususnva shalat lima waktu;
- 9. Sabar dan bijaksana;
- 10. Berusaha membahagi akan orang lain.

Sebagian nilai-nilai perilaku sosial di atas merupakan modal sosial yang sangat berharga jika didayagunakan untuk membangun masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir. Demikan juga, syaratsyarat pemimpin dan kepemimpinan masyarakat pesisir memiliki relevansi yang baik untuk merekonstruksi kepemimpinan bangsa dan Negara Indonesia. Penjelajahan terhadap nilai-nilai budaya kepesisiran ini tentu saja memiliki kontribusi yang sangat strategis untuk membangun masa depan bangsa yang berbasis pada potensi sumber daya kemaritiman nasional.

2. Pemberdayaan

Perumusan Dasar program penanganan pengentasan masyarakat miskin ini diarahkan dan dilaksanakan melalui 4 (empat) pendekatan yaitu:

- 1. Pendekatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat miskin baik fisik maupun non fisik, kualitas sistim social masyarakat (dititikberatkan pada aspek kelembagaan dalam masyarakat);
- Pendekatan peningkatan dan perluasan kegiatan usaha bagi masyarakat miskin baik melalui kebijakan pembinaan dan pendampin gan serta penciptaan lapangan kerja baru untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi (minimal peningkatan pendapatan);
- 3. Pendekatan peningkatan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat miskin melalui berbagai fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat supaya aksesbilitas masyarakat miskin memiliki peluang yang sama (tingkat pososi tawar-menawar);



4. Pendekatan peningkatan jaminan sosial melalui berbagai program social needs yang bisa secara langsung diakses oleh masyarakat miskin.

Meski peran pemerintah sangat besar dalam rangka menangani kemiskinan, namun partisipasi masyarakat tetap diperlukan untuk menjamin berhasilnya program yang dicanangkan. Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat.

Banyak kasus yang menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini terjadi karena:

- 1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan;
- 2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut:
- 3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara-cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut;
- 4. Pembangunan dipahami akan menguntung rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan (Kartasasmita, 1997).

Karena itu menjadi tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa pembangunan:

- 1. Harus menguntungkan rakyat;
- 2. Harus bisa dipahami oleh rakyat;
- 3. Harus mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaannya;
- 4. Dilaksanakan sesuai dengan maksud dan keinginan rakyat secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis Sosial Masyarakat Sumenep dalam Meningkatkan Kualitas Garam Rakyat

Dari hasil penelitian secara umum, Desa Pinggir papas merupakan tempat

yang strategis dalam produksi garam. Sebab, dipengaruhi oleh angin kering, dan lagi jenis tanahnya termasuk jenis tanah alluvium hidromof berteksturh alus (lempung). Disamping itu kondisi iklim di desa pinggir papas ini adalah tropis. Luas lahan tambak di Pinggir papas terbilang luas dibanding 6 Desa lainnya. Pinggir papas memiliki luas tambak berkisar 826,77 Ha. Setelah itu Desa Karanganyar dengan luas tambak 630,23 ha, yang disusul Marengan Laok (351,47 ha), Kalimook (104,05 ha), Kertasada (94,82 ha), Kalianget Barat (38,88 ha), dan posisi buncit diduduki Kalianget timur dengan luas lahan tambak 16.29 ha.

Sedangkan permasalahan dialami oleh para petani garam di Desa Pinggirpapas dan Desa Gresik Putih antara lain sebagai berikut:

1. Siklus Cuaca yang Tidak Menentu.

Perubahan musim hujan yang tidak menentu membuat petambak kesulitan memprediksi waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan penggaraman. Akibatnya, banyak dari petani garam yang menganggur dan tidak memproduksi garam. sedangkan garam lokal dari produksi petambak tradisional hanya diserap masvarakat untuk garam konsumsi saja. Disisi lain pengaruh buruknya cuaca berdampak terhadap ketidakstabilan pendapatan ekonomi masyarakat petani garam mengingat dalam memproduksi garam masih menggunakan proses produksi pembuatan garam secara tradisional, yang mana hanya mengandalkan panas sinar matahari, air laut, angin, lahan pegaraman dan tenaga petani.

2. Minimnya Permodalan.

Modal merupakan satu faktor produksi yang berkaitan dengan hasil produksi, hasil produksi dapat meningkat karena digunakannya alat-alat produksi yang efisien. Semakin besar modal yang digunakan akan berpengaruh terhadap jumlah produksi yang dihasilkan, oleh



karena itu, maka tingkat penggunaan proses vang diperlukan untuk produksi akan semakin meningkat pula. Lingkungan eksternal secara tidak langsung memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam mendukung produktivitas petani garam. Adanya permodalan bagi usaha petani garam tradisional salah satunya adalah dengan bantuan pemerintah berbentuk pemberian modal. Dukungan pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (PEM-DA) memberikan arahan dan dukungan terhadap upaya pengembangan aktivitas yang berlangsung. Hal ini yang dialami oleh petani/petambak garam di dua desa tersebut. Kurangnya modal menjadi salah satu penyebab penurunan produktivitas.

3. Rendahnya Harga Jual.

Harga jual garam menentukan keuntungan yang diterima pelaku usaha. Jika harga garam murah maka kelayakan usaha garam dipertanyakan apakah menguntungkan atau tidak bagi pelaku usaha. Kehadiran garam impor dari luar negeri memaksa petani lokal harus bersaing dengan harga dan kualitas produk garam luar negeri. Hal ini menjadi sangat ironis, dimana Indonesia sebagai negara maritim yang total keseluruhan luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² terdiri dari 17.508 pulau. Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil dengan luas lautan sekitar 3.273.810 km². Seharusnya memungkinkan bagi Indonesia sejahtera di bidang kemaritiman dan berpeluang menjadi salah satu negara penghasil garam terbaik dunia. Namun realitanya, Indonesia saat ini masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi akan garam impor. Hal ini mengakibatkan harga garam lokal menjadi rendah.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang dialami petani garam antara lain. Pertama, buruknya cuaca berdampak terha-

dap ketidakstabilan pendapatan ekonomi masyarakat petani garam mengingat dalam memproduksi garam, masyarakat Desa Pinggirpapas masih menggunakan proses produksi pembuatan garam secara tradisional, yang mana hanya mengandalkan panas sinar matahari, air laut, angin, lahan pegaraman dan tenaga petani. Kedua, minimnya permodalan yang dimiliki oleh petani/petambak garam. Kurangnya modal petanigaram dalam memproduksi garam menjadi salah satu penyebab penurunan produktivitas.Ketiga, rendahnya harga jual hasil produksi garam. Kehadiran garam impor memaksa petani lokal harus bersaing dengan harga dan kualitas produk garam luar negeri. Hal ini menyebabakan harga garam lokal harus mampu bersaing dengan garam import, sehingga harga garam lokal menjadi rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Africa, T., 2003. Social Statistics in the Development Agenda: Two Cases for Relevance
- Boelaars, Yan. 1994. Kepribadian Indonesia Modern: Suatu Penelitian Antropologi Budaya. Jakarta: Gramedia.
- Jayasuriya, R. and Q. Wodon, 2002. Explaining Country Efficiency in Improving Health and Education Indicato: The Role of urbani zation. The World Bank.
- Kartasamita, Ginandjar 1997. Administrasi Pembangunan: Perkembangan pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: LP3ES
- Korten DC dan Syahrir (ed). 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- PT. Garam Persero. 2000. Paparan Swasembada Garam Nasional Melalui Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar), Kota Pasuruan 2011

Sihombing, U. 2000. Pendidikan Luar Seko-

KARATON: Jurnal Pembangunan Sumenep

lah Manajemen Strategi, Konsep, Kiat dan Pelaksanaan. Penerbit: P.D. Mahkota, Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS, PT Gramedia, Jakarta

Undang-undang RI No. 32 Th. 2004. 2004. Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Usman, S., 2003. Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 310

Implementasi Teknologi Produksi Virgin Coconut Oil (VCO) Berbasis Desa Binaan di Kabupaten Sumenep

N. Eko Satriawan, Mohammad Hosnan, Musthafa, Moh. Halim, Ach. Kholish, Ach. Haris Abdi Manaf (Institut Sains dan Teknologi Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep)

ABSTRAK

Desa Nyabakan Timur merupakan salah satu desa dimana 30% penduduknya merupakan petani kelapa yang teletak di salah satu kecamatan penghasil komoditas kelapa terbesar di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi petani kelapa serta hubungannya pada proses implementasi teknologi pengolahan kelapa menjadi ragam produk olahan kelapa dengan skema penyuluhan serta pelatihan berkelanjutan dalam bentuk Desa Binaan untuk menghasilkan sentra UMKM Produsen produk olahan kelapa seperti VCO di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petani kelapa masih banyak yang berusia produktif, namun pendidikan masih rendah, bahkan banyak yang belum menyentuh sekolah menengah serta tidak tamat sekolah Dasar. Persepsi petani kelapa terhadap produksi kelapa dianggap sangat besar, namun harga jual kelapa masih murah pada tingkat petani. Hasil implementasi teknologi produksi VCO berdampak pada pengetahuan petani kelapa dalam pemanfaatan buah kelapa menjadi berbagai jenis produk olahan khususnya VCO. Pasca pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan produksi olahan kelapa, banyak petani yang berminat membuka usaha produksi olahan kelapa, banyak diantara petani menilai desa tersebut bisa menjadi sentra produksi olahan kelapa. Hal tersebut didukung oleh penilaian petani pada tingkat kesulitan produksi yang rendah, walaupun biaya bahan baku yang dikeluarkan dinilai besar.

Kata Kunci: kelapa, produk olahan, VCO, Desa Binaan, UMKM

A. Pendahuluan

Kelapa (Cocos nucifera) sebagai the tree of life merupakan buah yang paling banyak tumbuh di kepulauan negara-negara Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara serta merupakan salah satu negara penghasil kelapa paling banyak di dunia. Kelapa telah menjadi komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, khususnya sebagai sumber pendapatan dan devisa negara. Kelapa juga memiliki potensi strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga kelapa perlu dikaji dan dikembangkan menjadi produk olahan pangan unggulan.

Berdasarkan data Dirjen Perkebunan tahun 2021 Indonesia memiliki 3.401.893 Ha luas areal perkebunan kela-



pa dimana 99,06% atau setara 3.369.878 Ha merupakan perkebunan rakyat yang melibatkan lebih dari 6 juta rumah tangga petani dengan hasil produksi sebesar 2.811.954 Ton dalam bentuk kopra. Produksi buah kelapa di provinsi Jawa Timur menduduki peringkat ketiga tertinggi setelah Riau dan Sulawesi Utara dengan luas areal 251.169 Ha serta hasil produktivitas sebesar 235.168 Ton.

Salah satu kabupaten di Jawa Timur vang memiliki potensi terhadap pengembangan produk olahan kelapa adalah Kabupaten Sumenep, produktivitas perkebunan kelapa di kabupaten Sumenep tahun 2019 mencapai 1.217 Kg/Ha pada luas areal 51.014 Ha dengan nilai produksi 44.952 Ton serta jumlah petani 254.629 KK (Dirjen Perkebunan, 2021). Desa Nyabakan timur merupakan salah satu desa di Kecamatan Batang-Batang dengan jumlah penduduk 6.050 Jiwa yang terdiri atas 1.707 KK dimana 30% merupakan petani kelapa.

Potensi Sumber Daya Alam yang masih tinggi di Kabupaten Sumenep belum mampu diimbangi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Khususnya Kabupaten Sumenep yaitu 66,43 yang masih berada di bawah Indeks Pembangunan Manusia rata-rata Provinsi Jawa Timur yaitu 71,71 dan masih berada di bawah Indeks Pembangunan Manusia rata-rata tingkat Nasional sebesar 71,94 (BPS, 2021). Peningkatan nilai IPM dapat membantu dalam proses pemanfaatan potensi SDA yang ada di daerah.

Kelapa telah menjadi komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, khususnya sebagai sumber pendapatan dan devisa negara. Kelapa merupakan hasil alam yang dapat dimanfaatkan untuk setiap bagian yang dimilikinya dan menghasilkan berbagai jenis produk yang memiliki nilai jual yang baik (Pham, 2016). Kelapa memiliki peluang pengembangan produk agribisnis yang besar dengan potensi nilai ekonomi yang sangat besar.

Buah kelapa terdiri atas 4 komponen utama yaitu 33% sabut, daging buah 30%, air 22%, dan tempurung 22% (Karouw, dkk, 2019). Namun, pengembangan industri kelapa masih lebih terfokus pada daging buah dan mengesampingkan komponen lainnya yang masih memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dengan nilai ekonomi yang relatif tinggi. Pemanfaatan daging buah kelapa masih banyak terfokus pada bahan baku minyak kelapa seperti kopra, namun saat ini pengembangan ke arah produk minyak kelapa alami seperti Virgin Coconut Oil (VCO) juga sudah banyak dilakukan.

Buah kelapa harus mampu diarahkan menjadi berbagai jenis produk olahan yang memiliki nilai guna dan ekonomi tinggi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan produk olahan kelapa adalah diversifikasi atau penganekaragaman. Penganekaragaman dapat berdampak pada meningkatnya keanekaragaman produksi dan konsumsi pangan yang bergizi dan aman, serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penganekaragaman buah kelapa dapat menghasilkan produk-produk olahan seperti cocofiber (serat kelapa), cocopeat (serat halus kelapa), minyak kelapa murni atau Virgin Coconut Oil (VCO), minyak goreng kelapa atau Virgin Coconut Cooking Oil (VCCO), tepung kelapa (Dessicated coconut), nata de Coco, kecap kelapa, dodol kelapa, arang batok kelapa, briket, dan asap cair (Wallace, 2019). Terwujudnya penganekaragaman buah kelapa ini tidak terlepas dari pengolahan pangan yang berbasis teknologi sesuai dengan konsep penganekaragaman pangan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 2002.

Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep menjadi daerah yang paling potensial dalam upaya penganekaragaman buah kelapa, karena merupakan daerah dengan hasil produksi komoditi kelapa paling besar di Kabupaten Sumenep. Desa Nyabakan Timur merupakan



salah satu desa dimana 30% penduduknya merupakan petani kelapa dan sebagian besar merupakan penduduk dengan tingkat perekonomian menengah kebawah yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1 juta per bulan.

Masa panen buah kelapa setiap 40 hari sekali serta hasil panen yang langsung dipasok ke pasar lokal dengan rata-rata harga Rp. 2.000 rupiah per buah. Memberikan peluang besar dalam proses pengolahan buah kelapa menjadi berbagai jenis produk olahan agar dapat meningkatkan nilai ekonomi hingga 10 kali lebih tinggi dibandingkan jika hanya menjual buah kelapa sebagai produk mentah. Produksi olahan kelapa dapat dilakukan secara rumahan dengan biaya yang relatif murah. Ketersediaan buah kelapa yang melimpah dan disertai dengan keterampilan dan teknologi pengolahan buah kelapa yang akan diperoleh pasca kegiatan penyuluhan, pelatihan, serta pembinaan yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf pendapatan, khususnya para petani kelapa di Desa Nyabakan Timur menjadi UMKM mandiri serta menjadi salah satu sentra UMKM Produsen produk olahan kelapa seperti VCO di Kabupaten Sumenep.

Dari uraian di atas terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan dalam kajian ini. Pertama, bagaimana Mengetahui deskripsi petani kelapa di Desa Binaan? Kedua, bagaimana Mengetahui Persepsi Petani Kelapa pada usahatani kelapa berkelanjutan di Desa Binaan? Ketiga, bagaimana pengaruh Mengetahui pengaruh implementasi teknologi berupa Penyuluhan dan pelatihan produksi VCO pada petani kelapa di Desa Binaan? Keempat, bagaimana Persepsi petani binaan pada implementasi teknologi berupa Penyuluhan dan pelatihan produksi VCO?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Menurut Singarimbun dan Effendi, 2011). Muljono (2012) mengatakan penelitian kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan.

Penelitian dilakukan di satu Desa yakni Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa desa tersebut menurut data BPS (2020) tercatat sebagai desa penghasil kelapa terbesar di Kecamatan Batang-batang. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2021 seperti tertera pada table 3.1. di bawah.

Populasi penelitian adalah petani kelapa di Desa Nyabakan Timur Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin karena sudah umum dilakukan dalam penelitian dan batas toleransi kesalahan hingga 5 persen. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin (Riduwan 2012) yaitu:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel N : Jumlah Populasi

d² : Presisi (ditetapkan 5% dengan tingkat keper-

cayaan 95%)

Sampel dipilih secara sengaja (*Purposive*), karena akan diberikan pelatihan dan pembinaan lajutan. Dengan diuraikannya kriteria populasi, maka didapatkan jumlah populasi petani kelapa sebesar 515 petani. Berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, diperoleh jumlah sampel keselurah sebesar 35 petani kelapa.



Selain dari responden sebagai sampel penelitian, data dan informasi juga dikumpulkan dari informan yang terkait dengan penelitian. Informan ini adalah orang di luar responden yang memiliki informasi terkait dengan peubah penelitian. Informan tersebut antara lain: penyuluh perkebunan dan pertanian, petugas desa, tokoh informal, tokoh formal, Dinas Pertanian dan Holtikultura

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner, FGD di tingkat desa, dan wawancara mendalam dengan stakeholder terkait di tingkat Kabupaten. Adapun data sekunder sebagai data penunjang diperoleh dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistika (BPS), Data Kabupaten Sumenep, Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep. Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner yang berisi pertanyaan baik tertutup maupun terbuka. Pertanyaan yang disajikan di dalam kuesioner adalah pertanyaan yang terkait langsung dengan tujuan hipotesis penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

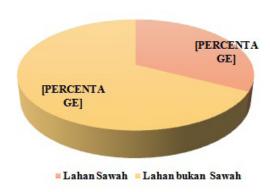
1. Kondisi Geografis Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep

Secara geografis, Kecamatan Batang-batang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Adapun Kecamatan Batang-batang menaungi 16 desa yang meliputi: Tamidung, Batang-batang laok, Batang-batang Daya, Totosan, Banuaju Barat, Banuaju Timur, Jenangger, Nyabakan Timur, Nyabakan Barat, Lombang, Bilangan, Dapenda, Legung Timur, Legung Barat, Jangkong dan Kolpo. Kecamatan Batang-batang merupakan salaH satu kecamatan pesisir laut yang berada di Kabupaten Sumenep. Sedangkan ketinggian letak desa Nyabakan Timur berada pada sekitar 31 meter dari permukaan laut (mdpl).

Luas wilayah Kecamatan Batangbatang tercatat seluas 80,36 km2 yang dihuni 54.277 penduduk yang tersebar di 16 desa. Adapun luas keseluruhan desa Nyabakan Timur yakni 4,90 km2 yang dihuni oleh penduduk sebanyak 5.560 jiwa. Secara luas keselurahan Kecamatan Batangbatang, Desa Nyabakan Timur hanya menempati sekitar 5,01 persen dari total luas Kecamatan Batang-batang.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 menyatakan bahwa luas area lahan perkebunan/ladang/tegal di Desa Nyabakan Timur pada tahun 2020 sebesar 217 Hektar are (Ha). Data secara rinci terlihat pada gambar 1.

LUAS LAHAN PERTANIAN



Gambar 1. Persentase Luas Lahan Pertanian Desa Nyambakan Timur Kecamatan Batang-batang Tahun

Pada gambar 1 menjelaskan bahwa luas lahan pertanian di Desa Nyambakan Timur pada tahun 2020 terbagi menjadi dua bagian, yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan bukan sawah adalah berupa ladang, kebun atau ladang. Terlihat pada gambar 1 bahwa lahan bukan sawah lebih besar 67 persen dibandingkan dengan lahan sawah, yaitu sebesar 33 persen saja dari luas lahan pertanian yang ada di Desa Nyabakan Timur. Komoditi tanaman perkebunan yang terdapat di Desa Nyabakan Timur yaitu pohon kelapa, siwalan, jambu mente, dan cabe jamu.



2. Kondisi Demografis Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep

Berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) tercatat bahwa jumlah penduduk pada Kecamatan Batang-batang sebesar 53.466 jiwa yang tersebar di 16 desa. Sedangkan desa Nyabakan Timur adalah desa terpada kedua yang dihuni oleh penduduk sebesar 5.560 jiwa, setelah desa Batang-batang Daya yang dihuni oleh penduduk sebesar 6.540 jiwa. Persentase penduduk terpilah jenis kelamin pada Desa Nyabakan Timur, terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Persentase Penduduk Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-Batang berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

Pada gambar 2 menjelaskan bahwa penduduk di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang tahun 2020 secara keseluruhan didominasi oleh penduduk perempuan sebesar 53 persen atau sebanyak 2.692 jiwa. Sedangkan penduduk laki-laki sebesar 47 persen atau sebanyak 2.598 jiwa, lebih sedikit dibandingkan perempuan yang berada desa tersebut.

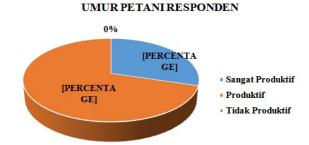
PETANI KELAPA DESA NYABAKAN TIMUR

4.2. Karakteristik Individu Responden

Karakeristik individu merupakan salah satu faktor penting untuk diketahui dalam rangka untuk mengetahui kencenderungan perilaku dan pengetahuan seseorang dalam kehidupannya. Kemampuan atau potensi yang dimiliki petani dapat dipelajari melalui karakteristik yang melekat pada petani itu sendiri. Karakteristik yang diamati adalah umur, pendidikan, pendapatan, jenis kelamin, dan luas lahan yang di usahakan oleh petani.

4.2.1. Umur Petani

Umur menjadi salah satu faktor sosial yang berpengaruh terhadap aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Suparmoko (2002) mengatakan bahwa penduduk yang berumur produktif adalah penduduk yang berumur antara 25-50 tahun (khususnya di bidang pertanian). Hal ini artinya umur sangat berpengaruh terhadap kemajuan kerja petani dan keberlanjutan usaha tani kelapa. Persentase umur responden dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Persentase Umur Petani Kelapa Responden di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batangbatang Tahun 2021

Terlihat pada gambar 3 yang menunjukkan bahwa temuan dilapangan umur petani kelapa adalah pada usia produktif, yaitu rentang usia 25-50 tahun sebesar 70 persen dari seluruh responden. Sedangkan usia sangat produktif yaitu dengan usia kurang dari 25 tahun sebesar 30 persen. Berbanding terbalik dengan usia yang tidak produktif yaitu dengan usia lebih dari 50 tahun sebesar 0 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemeran utama pada pertanian kelapa adalah seorang petani muda, namun para petani muda



menjalankan usaha pertanian yang diwariskan oleh keluarga dan orang tuanya dalam bertani kelapa.

Kelompok umur sangat prduktif dan produktif pada umumnya dilapangan memiliki tanggungan keluarga yang masih membutuhkan perhatian besar dari kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat diasumsikan mereka memiliki semangat dan motivasi relatif lebih tinggi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan usaha tani kelapa.

Umur responden dengan kategori dewasa, menunjukkan bahwa responden dalam kategori produktif, pada usia produktif inilah seorang petani dapat diharapkan mampu melakukan suatu kegiatan seoptimal mungkin, dimana hal tersebut berkaitan dengan kondisi perkembangan fisik, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sehingga dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya dan mengerjakan sesuatu pekerjaan yang ditekuninya. Menurut Karsidi (2003) umur petani akan mempengaruhi kemampuan fisik bekerja dan cara berpikir petani. Petani yang berumur lebih muda biasanya lebih dinamis, lebih berani mengambil resiko dan memiliki kemampuan fisik yang lebih besar. Petani yang lebih tua biasanya lebih banyak pengalaman sehingga lebih matang dalam pengelolaan usaha taninya. Oleh karena itu faktor umur akan mempengaruhi perilaku petani dan produktivitas usaha tani yang dikelolanya.

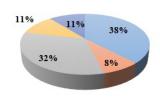
4.2.2. Tingkat Pendidikan

Keadaan responden menurut tingkat pendidikan dapat diketahui dari kemampuan pengetahuan responden terhadap berbagai hal termasuk pengetahuan petani dalam menghadapi masalah usahataninya. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan responden berpengaruh juga terhadap kecenderungan pada kemampuan menyerap berbagai informasi yang diperoleh. Persentase tingkat pendidikan

petani kelapa responden dapat dilihat pada gambar 4.

TINGKAT PENDIDIKAN PETANI RESPONDEN

SD SMP SMA PERGURUAN TINGGI TIDAK TAMAT SD



Gambar 4. Persentase Tingkat Pendidikan Petani Kelapa Responden di Desa Nyabakan Timur Kecamatan **Batang-Batang Tahun 2021**

Terlihat pada gambar 4 menunjukkan bahwa pendidikan petani responden dengan pendidikan terbesar yaitu lulusan SD/Sederajat sebesar 38 persen, lalu diikuti oleh lulusan SMA/Sederajat sebesar 32 persen. Sedangkan petani yang sudah menempuh pendidikan ke perguruan tinggi Diploma/Sarjana sebesar 11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa petani kelapa memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Namun petani kelapa yang tidak tamat SD/Sederajat sebesar 11 persen juga, hasil dilapangan ditemukan bahwa rendahnya pendidikan petani karena keterbatasan kemampuan keluarga petani dalam menempuh pendidikan. Secara keseluruhan yang terlihat pada gambar 4 menjelaskan bahwa petani reponden banyak yang telah menempuh pendidikan tinggi. Petani dengan pedidikan yang tinggi, memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik, sehinggi informasi tentang inovasi baru tentang usaha tani kelapa mudah diserap dan dimengerti. Hal ini menggambarkan bahwa pola pengambilan keputusan petani pada aspek ekonomi, ekologi dan sosial akan dibatasi oleh kemampuan intelektual petani.

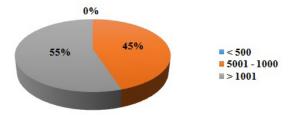
4.2.3. Luas Lahan

Luas lahan merupakan aset yang dimiliki petani, yang dapat mempengaruhi total produksi dan akhirnya akan



mempengaruhi aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Luas lahan berpengaruh terhadap produksi kelapa. Semakin luas lahan yang ditanami, maka jumlah pohon yang dimiliki akan semakin banyak yang memberikan hasil panen yang banyak pula. Semakin banyak hasil produksi yang diperoleh, mendorong petani untuk memperoleh informasi tentang usahatani kelapa dalam meningkatkan keuntungan usaha tani untuk meningkatkan pendapatan petani. Menurut Kementan (2014) luas lahan ideal untuk usaha tani kelapa adalah minimal satu hektar, dikarenakan kelapa harus memiliki lahan yang luas lahan jarak tanam antara pohon kelapa adalah 2,7 x 2,7 m. Selanjutnya, persentase luas lahan perkebunan kelapa yang dimiliki oleh pentane responden, dapat dilihat pada gambar 5.

Luas Lahan Kebun Kelapa Responden



Gambar 5. Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Responden di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-Batang Tahun 2021

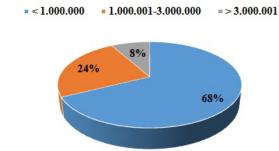
Terlihat pada gambar 5, menjelaskan petani kelapa responden memliki lahan pertanian kelapa lebih dari 1000 m2 sebesar 55 persen, dimana ada beberapa petani kelapa memiliki lahan lebih dari 1 hektar are (ha). Sedangkan petani responden yang memiliki lahan kurang dari 1000 m2 sekitar 45 persen. Status lahan yang diusahakan oleh petani adalah lahan dengan kepemilikan sendiri. Luas lahan yang dimiliki oleh petani didominasi berasal dari warisan keluarga. Menurut Sinaga (2015) luas lahan yang terlalu luas bukan berarti dapat memberikan hasil produksi tinggi, tetapi lahan yang terlalu sempit juga

tidak efisien dalam pengelolaan lahan, gambaran ini menunjukkan bahwa usaha tani kelapa memberikan sumbangan dalam pendapatan dan sebagai sumber keberlanjutan ekonomi dan penguatan aspek ekologi dimana petani akan menjaga kondisi lain dan memanfaatkan lahan untuk berusaha tani serta usaha tani kelapa menjadi tradisi Desa Nyabakan Timur dilihat dari aspek sosial.

4.2.4. Pendapatan

Pendapatan petani diperoleh dari kegiatan berusaha tani (on-farm) dan kegiatan-kegiatan lain di luar usaha tani (off-farm dan atau out-farm). Pendapatan dari usaha tani merupakan nilai jual produk pertanian yang dihasilkan setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan, seperti: sewa lahan, biaya membeli sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida), serta biaya mengupah tenaga kerja luar. Pendapatan petani merupakan salah satu faktor yang menentukan kehidupan petani terutama dalam pemenuhan kebutuhan petani baik untuk pendidikan anggota keluarga ataupun modal dalam usahatani. Tingkat pendapatan rata-rata petani dihitung berdasarkan seluruh penghasilan dalam satu bulan yang bersumber dari pendapatan usaha tani. Persentasi pendapatan responden dapat dilihat pada gambar 6.





Gambar 6. Persentase Pendapatan Petani Responden di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-Batang **Tahun 2021**

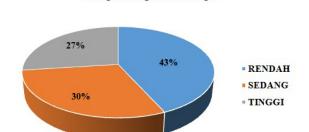


Terlihat pada gambar 6 bahwa persentase pendapatan petani terbesar adalah kurang dari 1 juta rupiah sebesar 68 persen dari keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa petani tidak bisa hanya mengandalkan usaha tani kelapa untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Untuk mendapatkan penghasilan yang besaar dari usaha kelapa, maka petani membutuhkan sentuhan inovasi dan teknologi untuk menjadi produk olahan lebih lanjut, agar tidak hanya mengandalkan produk mentah dari kelapa untuk dijual sebagai penghasilannya.

4.3 Persepsi Petani Kelapa Desa Nyabakan Timur

4.3.1. Persepsi Harga Kelapa

Persepsi petani terhadap kelapa dan produk olahan kelapa diukur dengan menanyakan penilaian 37 orang petani kelapa terhadap tingkat keuntungan usaha kelapa, tingkat kesesuaian usaha kelapa dengan keadaan petani yang sekarang, kerumitan-kemudahan tingkat kelapa sekarang sebelum menjadi produk olahan atau pertanian berkelanjutan, dan melihat tingkat persepsi petani kelapa pada hasil-hasil yang telah didapatkan hingga sekarang. Persepsi petani pada harga jual kelapa, dapat dilihat pada gambar 7.



Persepsi Harga Jual Kelapa

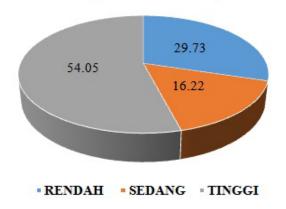
Gambar 7. Persepsi Petani Kelapa terhadap usaha tani Kelapa di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batangbatang Tahun 2021

Berdasarkan yang terlihat pada gambar 7 menunjukkan bahwa persepsi petani pada harga jual kelapa menilai rendah atau kurang menguntungkan sebesar 43 persen, diikuti dengan persepsi petani menilai harga jual kelapa sedang sebesar 30 persen, sedangkan petani yang menilai harga jual kelapa dengan persepsi tinggi sebesar 27 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas petani menilai bahwa harga jual kelapa sangat murah dan kurang menguntungkan, jika hanya dijual dengan kelapa mentahan tanpa di produksi ulang. Petani membutuhkan sentuhan inovasi baru untuk meningkatkan harga jual kelapa, dan mudah diterima pasar dengan harga jual yang tinggi.

4.3.2. Persepsi Produksi Kelapa yang Tinggi

Data produksi kelapa yang ada di Desa Nyabakan timur, sering kali tidaksama dengan persepsi petani kelapa. Hal ini bisa menyebabkan banyaknya kelapa yang ada di petani tidak dimanfaatkan atau tidak terjual karena harga yang terlalu murah, yang disebabkan banyaknya produksi kelapa. Bahkan beberapa kasus temuan dilapangan, kelapa yang telah di panen dibiarkan membusuk karna tidak laku terjual. Berikut persepsi petani terhadap tingginya produksi kelapa terdapat pada gambar 8.

Persepsi Produksi Kelapa



Gambar 8. Persepsi Petani Terhadap Tingginya Produksi Kelapa di Desa NyabakanTimur Kecamatan Batang-Batang Tahun 2021

Terlihat pada gambar 8 bahwa petani yang menyatakan produksi kelapa

yang tinggi lebih dari 54 persen, sedangkan yang menyakan produksi kelapa yang rendah sekitar 29 persen. Hal ini menyatakan bahwa petani menyatakan bahwa produksi kelapa yang ada di desa tersebut lumayan besar atau tinggi. Hal tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan, bahwa banyaknya kelapa yang terbuang sia-sia hingga membusuk dan tidak termanfaatkan karena tidak terjual.

4.3.3. Analisis Internal Strategi Menumbuhkan Minat Petani Kelapa Terhadap Pelatihan Pengolahan Kelapa

Tidak adanya kerja sama antara petani dan kelompok tani



Gambar 9. Produksi Olahan Kelapa Petani di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Tahun 2021

Jumlah petani kelapa yang sangat besar di Desa Nyabakan Timur, namun kurang adanya kerjasama antara petani kelapa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan petani kelapa yang telihat pada gambar 9, bahwa petani kelapa yang menyatakan tidak ada kerjasama antar petani dan tidak ada kelompok tani kelapa lebih dari 50 persen. hal ini sejalan dengan temuan dilapangan bahwa kelapa tua yang dihasilkan oleh petani responden, dijual secara mandiri ke pasar tradisional dan beberapa dijual kepada tengkulak untuk di dijual ke luar daerah di sekitar pulau Madura, dan juga petani kelapa di Desa Nyabakan Timur tidak memiliki kelompok tani untuk mengkoordinasikan petani kelapa atas hasil panen kelapa untuk olahan produk kelapa sebagai bisnis berkelanjutan. Persentase petani kelapa yang menyatakan tidak adanya produksi kelapa berkelanjutan terlihat pada gambar 10.





Desa Nyadakan Timur Kecamatan Batang-datang Tahun 2021

Terlihat pada gambar 10 bahwa lebih dari 86 persen petani menyatakan tidak ada produksi olahan kelapa. Hal ini menvatakan minimnya pengetahuan, kreatifitas dan inovasi petani kelapa untuk pemanfaatan kelapa untuk produk olahan kelapa menjadikan nilai yang lebih tinggi. Namun ada beberapa petani yang mengetahui produk olahan kelapa seperti minyak goreng dari kelapa tua namun dengan harga jual minyaknya lumayan mahal, dan pembuatannya kurang higienis. Petani yang mengetahui produksi minyak goreng dari kelapa tua sekitar 14 persen. Hal ini menyiratkan bahwa produksi minyak goreng dari kelapa tua kurang diminati, karna produksinya yang sulit dan harga jualnya yang murah, berbeda dengan produksi Virgin Coconut Oil (VCO) yang mudah namun harga jual yang tinggi.

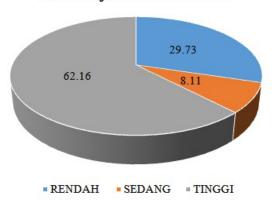
4.3.4. Analisis Eksternal Strategi Menumbuhkan Minat Petani Kelapa Terhadap Pelatihan Pengolahan Kelapa

Faktor strategis eksternal untuk menumbuhkan minat petani yaitu dengan



penyuluhan dan sosialisasi program dari pemerintah setempat. Namun, temuan di lapangan menyatakan bahwa petani kelapa tidak mengeahui tentang tentang adanya program penyuluhan tentang usaha tani kelapa tua dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya peran pemerintah untuk meningkatkan usaha tani kelapa berkelanjutan pada tingkat petani. Banyak petani menilai bahwa minat petani pada usaha tani berkelanjutan seperti usaha produksi olahan sangat tinggi. Berikut persentase minat petani pada usaha produksi olahan kelapa pada gambar 11.

Membuka Usaha Produksi Olahan Kelapa dan Menjadi Sentra Produksi



Gambar 11. Minat produksi olahan kelapa Petani di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Tahun 2021

Terlihat pada gambar 11 bahwa minat petani untuk membuka usaha produksi kelapa sangat tinggi yaitu sebesar 62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa harapan petani untuk usaha tani berkelanjutan yaitu dengan membuka produksi olahan kelapa pada tingkat petani. Namun harapan ini harus didukung oleh pemerintah daerah maupun pemerintah setempat, agar petani bisa selalu bersemangat dan bisa ekonomi keluarga dan mengangkat nama daerahnya. Sejalan dengan hal tersebut, banyaknya pemuda-pemudi di daerah tersebut lebih memilih pindah ke luar kota untuk meningkatkan ekonominya karena peluang pekerjaan di daerah Nyabakan Timur sangat sedikit. Membuka

usaha produksi olahan kelapa pada tingkat petani juga menjadi peluang meciptakan tenaga kerja baru sangat tinggi.

4.3.5. Implementasi Teknologi Produksi VCO

Kelapa memiliki peluang pengembangan produk agribisnis yang besar dengan potensi nilai ekonomi yang sangat besar. Maka dari itu, Buah kelapa harus mampu diarahkan menjadi berbagai jenis produk olahan yang memiliki nilai guna dan ekonomi tinggi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan produk olahan kelapa adalah diversifikasi atau penganekaragaman.

Penganekaragaman buah kelapa dapat menghasilkan produk-produk olahan seperti cocofiber (serat kelapa), cocopeat (serat halus kelapa), minyak kelapa murni atau Virgin Coconut Oil (VCO), minyak goreng kelapa atau Virgin Coconut Cooking Oil (VCCO), tepung kelapa (Dessicated coconut), nata de Coco, kecap kelapa, dodol kelapa, arang batok kelapa, briket, dan asap cair.

Proses Implementasi dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu pengambilan data, penyuluhan dan pelatihan, serta analisis terhadap keberhasilan penyuluhan dan pelatihan yang menggambarkan persepsi petani kelapa terhadap metode atau teknologi pengolahan yang diberikan. Sebagai upaya mengetahui kondisi petani kelapa di Nyabakan Timur, terlebih dahulu dilakukan pengambilan data dan analisis kondisi petani kelapa yang meliputi penghasilan petani, luas lahan, dan minat untuk mengikuti pelatihan. Pengambilan data sampel yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap 37 petani kelapa desa Nyabakan Timur yang diambil secara acak di 6 dusun. Berdasarkan hasil wawancara, secara umum para petani mempunyai minat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan pengolahan kelapa menjadi produk VCO.

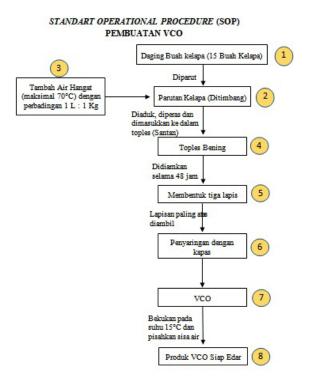
Penyuluhan dan pelatihan merupakan proses implementasi yang dilak-

sanakan dengan mengundang seluruh warga yang telah diwawancara, yaitu 37 petani kelapa. Antusisame masyarakat terhadap pelatihan tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang hadir mencapai 91%, yaitu 34 petani kelapa, yang terdiri dari 33 perempuan dan 1 laki-laki.

Pelatihan yang dilaksanakan di Desa Nyabakan Timur merupakan wujud implementasi yang fokus pada pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO). Produksi virgin coconut dilakukan dengan metode fermentasi. Pemilahan metode ini didasarkan pada kesederhanaan berupa tingkat kesulitan dan pemahaman dari metode serta tidak membutuhkan alat dan modal kerja yang mahal, sehingga dapat di aplikasikan secara langsung oleh petani kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara kerja produksi virgin coconut oil (VCO) menggunakan metode Fermentasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan kelapa sekitar 10-15 buah (untuk pembuatan 1 liter VCO), kemudian diparut. Parutan kelapa dicampur dengan air hangat dengan perbandingan 1 Kg kelapa dengan 1 Liter air.
- b. Campuran air dan kelapa diaduk hingga rata dan diperas. Kemudian hasil perasan disaring dan disimpan dalam toples bening. Santan didiamkan selama 48 jam.
- c. Setelah 48 jam santan akan membentuk tiga lapisan. Lapisan bawah (air), Lapisan tengah (blondo), sedangkan lapisan atas minyak kelapa (VCO).
- d. Lapisan atas (VCO) diambil dan disaring menggunakan kapas agar tidak bercampur dengan blondo.

Implementasi teknologi lain yang diberikan yaitu terkait proses pemisahan kandungan air yang masih terdapat pada minyak kelapa (VCO) hasil produksi menggunakan konsep kimia fisika yaitu berdasarkan pada perbedaan sifat fisik antara air dan minyak berdasarkan pada titik bekunya.

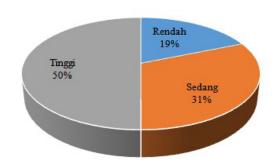


Gambar 12. Standart Operational Procedure (SOP) Pembuatan VCO

4.3.6. Persepsi Petani Kelapa terhadap Implementasi Teknologi produksi VCO

Berdasarkan pada proses implementasi yang telak di laksanakan, dilakukan survey untuk menilai persepsi petani kelapa di Desa Nyabakan Timur terhadap metode produksi Virgin Coconut Oil (VCO) yang diberikan. Berikut persepsi petani kelapa terhadap biaya produksi VCO terlihat pada gambar 13.

Biaya yang dikeluarkan saat produksi VCO



Gambar 13. Persepsi Petani Kelapa Terhadap Biaya Produksi VCO di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Tahun 2021



Terlihat pada gambar 13 bahwa petani yang menyatakan produksi VCO mengeluarkan biaya yang tinggi sebesar 50 persen, diikuti dengan persepsi petani dengan mengeluarkan biaya yang sedang sebesar 31 persen. Sedangkan yang menilai rendah sebesar 19 persen. Persepsi petani yang menilai tinggi disebabkan karena untuk mendapatkan VCO sebanyak 1 liter membutuhkan 10 hingga 15 kelapa tua. Sedangkan harga kelapa tua seharga 2.000/buah jika hanya untuk membuat minyaknya saja. Namun pemanfaatan kelapa tua tidak hanya untuk VCO saja, air kelapanya bisa diproduksi menjadi Nata de Coco, dan ampas perasan kelapa pembuatan VCO di produksi menjadi tepung. Harga VCO 1 liter sebesar 40-50 ribu rupiah, harga 1 kilogram Nata de Coco sebesar 15 ribu rupiah, sedangkan harga 1 kilogram tepung kelapa sebesar 60-70 ribu rupiah. Jika dilihat secara keseluruhan, biaya produksi kelapa sangat murah. Tentunya akan terlihat sangat mahal biaya produksinya jika hanya untuk memproduksi VCO saja.

Persepsi petani kelapa dalam pelatihan dan penyuluhan produksi VCO, terlihat pada gambar 14 bahwa tingkat kesulitan dalam memproduksi VCO tidak sulit. Mayoritas petani kelapa menilai bahwa pembuatan produksi VCO sangat mudah. Hal ini sejalan dengan praktek yang telah di demonstrasikan di pratekkan sendiri oleh responden ketika pelatihan dan penyuluhan bahwa pembuatan VCO tidaklah sulit yang harus menggunakan metode pemanasan pada bahan. Berbanding terbalik dengan proses pembuatan minyak goreng kelapa tua yang harus menggunakan pemanasan terlebih dahulu untuk memisahkan minyak dengan kandungan air pada santan kelapanya. Terlihat persentase petani pada persepsi kesulitan dalam produksi VCO pada gambar 14.

Kesulitan dalam Produksi VCO



Gambar 14. Persepsi Petani Kelapa Terhadap Tingkat Kesulitan Produksi VCO di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Tahun 2021

E. KESIMPULAN

5.1. Simpulan

- 1. Petani kelapa di lokasi penelitian banyak yang berusia produktif, namun pendidikan petani kelapa masih rendah, dimana masih banyak yang belum menyentuh sekolah menengah dan bahkan ada beberapa petani yang tidak tamat sekolah Dasar. Hal tersebut sejalan dengan tingkat pendapatan petani, dimana rata-rata pendapatan petani kurang dari 1 juta rupiah. Sedangkan lahan yang dimiliki petani untuk berusaha tani kelapa, rata-rata memliki luas lahan lebih dari 500 meter m2
- 2. Persepsi petani kelapa terhadap produksi kelapa diperoleh bahwa produksi kelapa dianggap sangat besar, namun harga jual kelapa masih murah pada tingkat petani. Di lokasi penelitian, petani kelapa tidak memiliki organisasi seperti kelompok tani, banyak diantara petani kelapa yang bekerja sendiri tanpa ada kerja sama diantara petani, petani juga menyatakan bahwa tidak ada nya produksi olahan kelapa menyebabkan nilai jual kelapa yang rendah
- 3. Hasil implementasi teknologi produksi VCO berdampak pada pengetahuan petani kelapa dalam pemanfaatan buah



- kelapa menjadi berbagai jenis produk olahan khususnya VCO. Petani kelapa berkomitmen untuk terus memanfaatkan teknologi pengolahan yang disertai dengan pembentukan kelompok tani kelapa di Desa Nyabakan Timur sebagai wadah kerjasama kelompok
- 4. Pasca pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan produksi olahan kelapa, banyak petani yang berminat membuka usaha produksi olahan kelapa, banyak diantara petani menilai desa tersebut bisa menjadi sentra produksi olahan kelapa. Hal tersebut didukung oleh penilaian petani pada tingkat kesulitan produksi yang rendah, walaupun biaya bahan baku yang dikeluarkan dinilai besar.

5.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah di lakukan, kami tim peneliti dari LPPM Institut Sains dan Teknologi Annugayah merekomendasikan:

- 1. Bagi pemerintah Desa, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan potensi desa sebagai produk unggulan dan program peningkatan ekonomi masyarakat
- 2. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG), dibutuhkan program pembinaan serta pendampingan berkelanjutan terhadap kelompok petani kelapa di Desa Nyabakan Timur yang telah terbentuk hingga menjadi sentra UKM produsen produk olahan kelapa di Kabupaten Sumenep
- 3. Bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Sumenep dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pembentukan UKM Produsen olahan produk kelapa dengan memberdayakan petani kelapa yang jumlahnya sangat besar di Kabupaten Sumenep dapat menjadi salah satu cara meningkatkan kesejahteraan Masyarakat khususnya para Petani atau Masyarakat umum yang memiliki

- sumber daya alam berupa pohon kelapa
- 4. Bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Sumenep, kesuksesan dalam program pembinaan serta pendampingan dapat dijadikan Standart Operational Procedure (SOP) atau standart baku untuk pembinaan serta pendampingan kelompok petani kelapa di desa-desa lain di Kabupaten Sumenep
- 5. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pembentukan sentra UKM Produsen produk olahan kelapa berbasiskan warga binaan dapat menjadi program unggulan untuk menghasilkan produk-produk unggulan daerah yang berdasarkan pada kearifan lokal serta wadah peningkatan kesejahteraan rakyat
- 6. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perlu adanya pendampingan berupa tim pendamping atau penyuluh dalam proses pemasaran hasil produksi berbasiskan produk-produk unggulan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- David FR. 2009. Manajemen Strategis Konsep. Edisi Ke-12. Jakarta (ID): Salemba Empat
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2019. Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020. Jakarta: Sekretariat Ienderal Perkebunan
- John K, Maurice O, Joseph M. 2013. The influence of innovativeness on the growth of SMEs In Kenya. International Journal of Business and Social Research (IJBSR), Volume -3, No.-1, January 2013.
- Hadivati. 2011. Kreativitas dan inovasi berpengaruh terhadap kewirausahaan *Usaha Kecil.* Jurnal manajemen dan kewirausahaan, vol. 13 no.1, Maret 2011: 8-16.
- Hartini. 2012. Peran inovasi: pengembangan kualitas produksi dan kinerja bisnis. Jurnal manajemen dan ke-



- wirausahaan, vol.14, no.1, Maret 2012:63-90.
- Hayes KJ, Aljiz K, Dadich A, Fitzgerald JA, Sloan T. 2015. Trialability, Observability, and Risk Reduction Accelerating Individual Innovation Adoption Decision. Journal of Health Organization and Management. 29 (2): 271-294.
- Indriastuti, Arifah. 2012. Peningkatan kinerja UKM dengan pengelolaan intellectual capital dan inovasi. Proceedings of Conference In Business, Accounting and Management (CBAM) 2012. Vol. 1 No. 1 December 2012
- Karsidi R. 2003. Pemberdayaan Masyaraka Petani dan Nelayan kecil. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor (ID). IPB
- Karouw, S., Santosa, B. & Maskromo, I. TEKNOLOGI PENGOLAHAN MIN-YAK KELAPA DAN HASIL IKU-TANNYA / Processing Technology of Coconut Oil and Its By Products. J. Penelit. dan Pengemb. Pertan. 38, 86 (2019).
- Madrid-Guijarro, Domingo Garcia, & Howard Van Auken, 2009. Barriers to innovation among Spanish Manufacturing SME. Journal of Small Business Management 2009 47(4), pp. 465–488.
- Ngugi K., Mcorege M.O, Muiru M.J. 2013. The influence of innovativeness on the growth of SMEs In Kenya. International Journal of Business and Social Research (IJBSR), Volume -3, No.-1, January 2013.
- Nurhayati, Hubeis AVS, Saleh A, Ginting B. 2018. Strategi Komunikasi dalam Diseminasi Inovasi Teknologi Budidaya Padi Berbasis Pemetaan Peng-

- guna di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Jurnal Penyuluhan. 14(2): 324-334.
- Pham, L. J. Coconut (Cocos nucifera). in Industrial Oil Crops (2016). doi:10.1016/B978-1-893997-98-1.00009-9
- Rofiaty, Idrus, & Ubud S. 2008. Pengaruh kondisi lingkungan, perilaku berbagai pengetahuan, proses perencanaan strategi, terhadap inovasi dan kinerja (studi pada UKM sentra kerajinan kulit di Jawa Timur). Jurnal aplikasi manajemen, volume 8 no. 3, agustus.
- Rogers EM. 2003. Diffusion of innovation. 5th edition. Newyork (US): Free **Press**
- Suparmoko. 2002. Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta (ID): BPFE
- Sileshi T. 2014. Innovation and barriers to innovation: small and medium enterprises in Addis Ababa. Journal of Small Business and Entrepreneurship Development March 2014, Vol. 2, No. 1, pp. 83-106
- Sinaga. 2015. Optimasi Pengaruh Faktor-Faktor Produksi Usahatani Padi Sawah. Jurnal Darma Agung. 2(1)26-29.
- Siregar. 2010. Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kecil Keripik Pisang Kondang Jaya. Binaan Koperasi BM
- Tabas, Beranova, Varina. 2010. Barriers to development of the innovation potential in the small and medium-sized enterprises. Acta univ. agric. Et silvic. Mendel. Brun., 2011, LIX, No. 7, pp. 447–458
- Wallace, T. C. Health Effects of Coconut Oil—A Narrative Review of Current Evidence. Journal of the American College of Nutrition (2019) doi:10. 1080/07315724.2018.1497562.





Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2021

Tri Hendra Wahyudi, M. Hasan Ubaid, M. Fajar Shodiq Ramadlan (Tim Peneliti LPPM Universitas Brawijaya)

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus diupayakan untuk mengarah pada pelayanan publik yang prima. Hal ini sudah sesuai dengan tugas utama dari pemerintah, yang salah satunya ialah melaksanan pelayanan umum (public service), selain tugas untuk melakukan pembangunan (development) dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat (empowerment).

Dalam pelayanan publik, setidakn-ya terdapat tiga unsur penting. Pertama, organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan, dalam hal ini pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kedua, penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Ketiga, kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Kepuasan masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk melihat sejauh mana persepsi masyarakat atas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan maupun program. Oleh karena itu, evaluasi atas kinerja pemerintah penting untuk dilakukan secara berkala. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik disebutkan setidaknya minimal dilakukan satu kali dalam setahun.

Atas dasar pentingnya penyusunan survei kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep ini, maka Survei Kepuasan Masyarakat penting dilaksanakan dengan tujuan antara lain: pertama, memperoleh penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, kedua; untuk mengetahui preferensi dan harapan masyarakat terhadap performa dan kinerja pemerintahanan Kabupaten Sumenep selanjutnya.

B. METODE STUDI KAIIAN

Metode yang dipakai dalam survei ini yakni dengan menggunakan *Multi Stage Random Sampling*. Artinya, survei dilakukan dengan mengambil jumlah responden yang dirandom pada setiap tingkatan. Dalam lingkup Kabupaten, maka semua Kecamatan dalam Kabupaten tersebut diambil. Kemudian mengacak Desa-Desa dalam semua Kecamatan untuk mengambil sejumlah desa yang telah ditentukan secara proposional. Semakin banyak jumlah populasi dalam satu Kecamatan, maka akan semakin banyak pula jumlah desa yang tersampling.

Proses selanjutnya adalah dengan mengacak dalam tingkatan RT/RW, hal ini dilakukan untuk mengambil sejumlah RT/ RW dimana sebagian populasi dari RT/RW tersebut akan terambil sebagai responden.



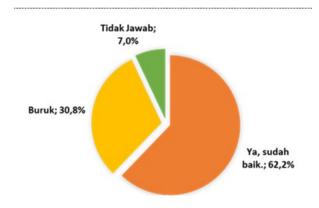
Selanjutnya, merandom KK (Kepala keluarga) dalam satu RT yang sudah tersampling. Langkah ini untuk menentukan KK siapa yang akan terambil sebagai sampling. Terakhir, adalah dengan melakukan kishgrid pada nama-nama dalam satu KK yang sudah tersampling untuk diambil sebagai responden.

Dalam survei ini data dikumpulkan melalui wawancara yang beracuan pada sebuah daftar pertanyaan (kuisioner). Dalam hal ini pewawancara akan membacakan pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisioner dan mencatatkan jawaban yang diberikan oleh responden. Pertanyaanpertanyaan di dalam kuisioner meliputi

- Data pewawancara dan tanggal wawancara;
- Data demografi dan sosioekonomi responden;
- Data aktivitas dan mobilitas masvarakat Kabupaten Sumenep;
- Data persepsi masyarakat atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- Data preferensi dan harapan masyarakat atas pemerintah Kabupaten Sumenep selanjutnya.

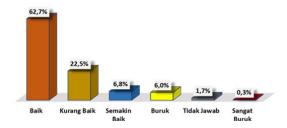
Teknik analisa data yang dipergunakan dalam mengolah data survei bersifat deskriptif. Teknik yang dipergunakan meliputi tabel frekuensi, diagram, dan grafik. Untuk data tekstual, kami menggunakan klasifikasi urgensi sehingga hasil pengolahan datanya berupa pemetaan dan skor urgensi.

C. TEMUAN-TEMUAN PENELITIAN



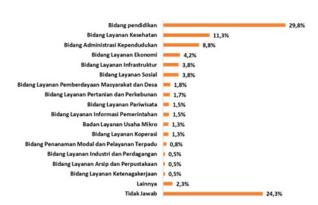
Ket: Kualitas Pelayanan Publik di Sumenep

Lebih dari separuh responden atau 62 persen menyatakan bahwa sudah baik, sedangkan yang menjawab kualitasnya buruk sebesar 30,8 persen.



Ket: Kinerja Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

Mayoritas responden atau sebesar 62 persen menyatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sudah baik dan hanya 22 persen yang menjawab kurang baik.



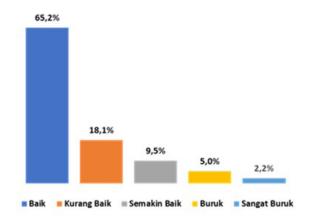
Ket: Bidang Pelayanan Publik yang Dianggap Baik

Tiga urutan tertinggi pelayanan publik yang dianggap baik, yakni bidang pendidikan, bidang layanan kesehatan, dan bidang administrasi kependudukan.



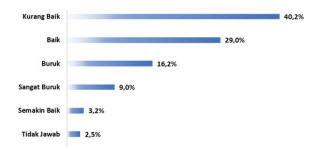
Ket: Bidang Pelayanan Publik yang Dianggap Belum Baik

Tiga urutan tertinggi pelayanan publik yang masih dianggap belum baik, yakni bidang infrastruktur, administrasi kependudukan dan layanan kesehatan. Bidang infrastruktur mendapat penilaian yang belum baik karena masih ditemukan beberapa jalan dan jembatan yang kondisinya rusak, sehingga melekat dalam ingatan masyarakat.



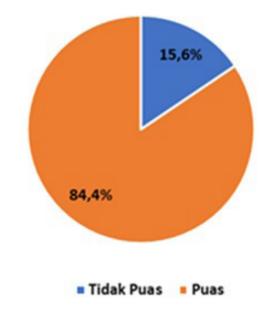
Ket: Kualitas Pendidikan Formal dan Informal

Mayoritas responden atau sebesar 65,2 persen menyatakan bahwa kualitas pendidikan di Sumenep sudah baik, sedangkan yang menyatakan kurang baik sebesar 18,1 persen, dan yang menyatakan buruk hanya 5 persen.



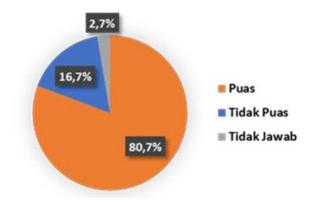
Ket: Kesejahteraan Guru Honorer/Diniyah

Aspek kesejahteraan guru honorer dan guru diniyah, mayoritas responden atau sebesar 40 persen menyatakan kesejahteraannya kurang baik. Yang menyatakan baik hanya 29 persen. Dari sini menunjukkan bawha isu kesejahteraan guru honorer dan guru diniyah penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.



Ket: Kepuasan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

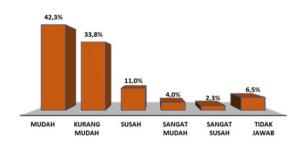
Pelayanan kesehatan di Puskesmas mendapat persepsi puas yang mencapai 84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di wilayah puskesmas yang berbasis di Kecamatan sudah sangat baik.



Ket: Kepuasan Pelayanan Kesehatan di RSUD Sumenep

Kepusan terhadap pelayanan RSUD Sumenep mencapai 80 persen. Hal ini menunjukkan bawha kepuasan masyarakat tinggi. Meskpin ada sebagai yang tidak puas, dan ini perlu tetap diperbaiki dan dipertahankan dengan menjaga performa layanan kesehatan.





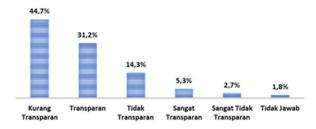
Ket: Kemudahan dalam Perizinan

Berkaitan dengan kemudahan pelayanan perizinan, seperti pengurusan SIUP, izin investasi, mayoritas esponden atau sebesar 42 persen menyatakan mudah, sedangkan yang menyatakan tidak mudah cukup tinggi, yakni 33 persen.



Ket: Kemudahan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan, mayoritas responden atau sebesar 55 persen menyatakan mudah, dan 20 persen menyatakan kurang mudah.



Ket: Transparansi Pemerintah

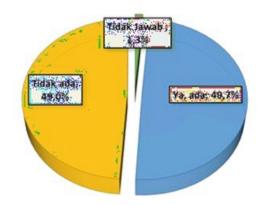
Dalam persepsi responden, sebesar 44 persen menganggap Pemerintah Kabupaten Sumenep kurang transparan, dan 14 persen menyatakan tidak transparan, 2,7 persen menyatakan sangat tidak transparan, dan hanya 31 persen yang menyatakan transaparan. Berdasarkan data ini, kinerja

Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam isu-isu trasnparasi masih sangat minim, dan perlu ditingkatkan ke depan.



Ket: Aspek yang Perlu Adanya Transparansi

Ketika responden ditanya lebih jauh, bidang apa yang perlu dilakukan transparansi oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, mayoritas responden atau sebesar 50 persen menjawab semua unsur penting, seperti anggaran APBD, pengadaan dan pembangunan infrastruktur, pengangkatan pejabat pubkik, dan rekrtumen CPNS/Pegawai Pemerintah.



Ket: Saluran Partisipasi Masyarakat

Ketika responden ditanya, apakah Pemerintah Kabupaten Sumenep menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam pembangunan atau penyampaian keluhan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Responden terbagi dua, 49 persenmenyebutkan tidak ada, 49 persen menyebutkan ada.





Ket: Permasalahan Mendesak di Kabupaten Sumenep

Tiga permasalahan teratas dan mendesak di Kabupaten Sumenep yang perlu segera diselesaikan atau dicarikan solusi oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep diantaranya, sulitanya mencari pekerjaan sebesar, perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, persoalan narkoba atau kenakalan remaja.



Ket: Program yang Diharapkan

Sedangkan untuk program atau kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Sumenep diantaranya, penciptaan lapangan kerja sebesar 39 persen, perbaikan infrastruktur (jalan, gedung, dll) sebesar 14,2 persen, dan berikutnya soal pengendalian harga bahan pokok sebesar 9 persen.

D. KESIMPULAN

Dalam penelitian Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2021 ini setidaknya dapat disimpulkan beberapa hal utama. Diantaranya:

Pelayanan publik yang berlangsung di Sumenep secara umum menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi. Hal ini terlihat dari sekitar 62 persen lebih

- yang menyatakan pelayanan publik di Sumenep sudah baik, termasuk dengan kinerja pemerintah dalam meningkat kualitas layanan. Tingginya kepuasan publik ini dapat dilihat sebagai kepercayaan publik atas pemerintah Kabupaten Sumenep yang selama ini berusaha dengan baik dalam meningkatkan kualitas layanan;
- Tiga urutan teratas bidang pelayanan pubik yang dianggap baik ialah bidang pendidikan, bidang layanan kesehatan, dan bidang administrasi kependudukan. Sedangkan untuk bidang pelayanan publik yang dianggap belum baik ialah bidang infrastruktur, administrasi kependudukan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hal-hal yang berkaiatan lansgung dengan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan layanan infrastruktur adalah hal prioritas yang menjadi perhatian dan evaluasi dari masyarakat. Oleh karena itu, hal paling mendasar untuk menaikkan kepuasan dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah, salah satu bidang yang harus mendapat perhatian tinggi ialah perbaikan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Sehingga hal ini akan berdampak pada kepuasaan dan kepercayaan terhadap pemerintah;
- Pada isu soal kesejahteraan guru honorer dan guru diniyah, berdasarkan survei ini, mayoritas menganggap belum sejahtera. Oleh karena itu, penting kiranya Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer dan guru dinayah ini. Jika memang peningkatan guru honorer dan diniyah sudah diformulasikan dalam kebijakan, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat luas, karena secara umum guru honorer dan guru diniyah dinilai belum sejahtera;
- Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD Sumenep secara umum su-



dah mendapat nilai kepuasan tinggi. Hal ini terbukti dari nilai kepuasan yang mencapai 80 persen. Nilai kepuasan yang sangat tinggi ini menjadi modal dasar yang harus dipertahankan oleh pemerintah agar kepuasan dan kepercayaan masyarakat tetap tinggi. Sedangkan untuk yang masih belum puas, rata-rata persoalannya karena dipengaruhi oleh soal kurang baiknya pelayanan dan adanya ketidakadilan dalam penerimaan layanan, sehingga hal ini bisa menjadi perhatian oleh pemerintah.

- Pada aspek pemerintahan yang baik (good governance), masyarakat memberikan perhatian yang cukup tinggi dan menilai Pemerintah Kabupaten Sumenep kurang transparan. Transparansi ini adalah salah satu pilar dari pemerintahan yang baik selain akuntabilitas dan partisipasi.
- permasalahan utama mendesak dan dinilai perlu segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep ialah sulitnya mencari pekerjaan, infrastruktur jalan yang rusak, dan terakhir soal narkoba dan kenakalan remaja.

E. REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2021, setidaknya ada beberapa rekomendasi yang bisa diambil. Diantranya:

Kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Sumenep yang mendapat nilai cukup tinggi perlu dipertahankan dengan terus menerus meningkatkan pelayanan publik, khususnya pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sektor strategis tersebut perlu diberikan perhatian lebih oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep agar nilai kepuasan masyarakat tetap tinggi;

- Pelayanan publik yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep ialah gratis, seperti pengurusan kependudukan, urusan sosial, dan sebagainya. Namun sebagian masyarakat masih ada yang menganggap berbiaya, sehingga perlu dipasang papan tulisan di masing-masing kantor OPD yang menyatakan pelayanan gratis. Hal ini untuk menegaskan bahwa pelayanan sepenuhnya gratis dan agat dapat melekat diingatan masyarakat;
 - Pada aspek tatakelola pemerinatahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sumenep masih dianggap kurang transparan. Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan yang mendorong adanya transparansi, misalnya transparansi ABPD, transparansi dalam pengangkatan pejabat publik, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan pemerintah. Transaparansi dan akuntabilitas pemerintahan bisa diciptakan salah satunya dengan menerapkan *electronic* government (e-gov). Secara konseptual, e-gov adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah guna menghasilkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. Selain itu juga untuk memudahkan akses layanan kepada masyarakat dengan penggunaan teknologi. Memang di Kabupaten Sumenep ini tidak bisa secara total diterapkan e-gov, karena akses teknologi dan akses internet masih belum merata antara wilayah daratan dan wilayah kepulauan, sehingga e-gov dapat diterapkan secara bertahap, sambil terus memperluas pemerataan jaringan telekomonuikasi dan internet ke semua wilayah.





DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Nomor 63 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia (Kemenpan RB) Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Potter, J. J., & Cantarero, R. (2014). Community Satisfaction.

Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. UGM PRESS.



Survei Indeks Kesalehan Sosial **Masyarakat Sumenep Tahun 2021**

Sri Handayani, Sri Rizqi Wahyuningrum, Dr. Mohammad Ali Al Humaidy, Afifullah (Tim Peneliti LPPM IAIN Madura)

LATAR BELAKANG

Pesan universal setiap agama memiliki kesamaan pada aspek kebaikan terhadap sesama. Kesamaan spirit kebaikan sosial, terutama keberpihakan kepada kaum lemah, miskin, rentan dan serba kekurangan seringkali menjadi topik utama di setiap agama. Dalam hal memahami hal nilai tersebut seorang pemeluk dituntut peduli, santun pada orang lain, suka menolong, memiliki ketertarikan pada masalah umat, serta memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, kemudian berempati dalam keseharian.

Enam agama yang berkembang di Indonesia dan memiliki pemeluk yang cukup besar memiliki ajaran kesalehan sosial yang beririsan satu dengan yang lain. Jika dalam Islam memiliki istilah saleh sosial sebagai ejawantah dari ibadah *muta'addiyah* yang menekankan pada manfaat bagi orang lain, kemudian pada istilah Kristen dikenal dengan istilah Social Piety sebagai bentuk dari Godlines (Jalan Tuhan). Sedangkan di dalam ajaran Katolik juga dikenal Bonum Commune mengenalkan prinsip subsidiaritas, saling membantu. Di dalam agama Hindu dikenal istilah Strada dan Bakti yang menekankan pada kebaikan pada hal di luar dirinya, baik itu manusia maupun alam sekitar, seperti yang diajarkan juga dalam Tri Hita Karana. Agama Buddha juga mengenalkan Sad Paramitha (enam perbuatan luhur), aspek kesalehan sosial dipahami pada Dana Paramitha (kedermawanan), Sila Paramitha (tidak mengutamakan diri sendiri), Viriya Paramitha (Keuletan dan Pengabdian, kemudian berikutnya adalah Prajna Paramitha (kebijaksanaan). Kesalehan sosial dalam agama Konghucu mengacu pada ajaran Kebajikan, yang dipahami melalui hubungan Manusia dengan Alam (Di), manusia dengan manusia (Ren).

Mengidentifikasi kesalehan sosial bukan hal mudah, pengamalan keagamaan umumnya bersifat individual, unik, dan sering bersifat manifest bahkan emosional serta sarat dengan subjektifitas pelakunya, sehingga sepertinya sulit dikuantifikasikan. Meski demikian bukan berarti hal itu tidak bisa diidentifikasi. Kesalehan sosial tetap bisa diidentifikasi dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu, pertama, pengamalan atau perilaku keagamaan adalah lahir dari sikap keagamaan, sementara sikap keagamaan lahir dari pemahaman seseorang atas nilai-nilai yang difahami (kognitif), dirasakan (afektif), dan dilakukan (konatif). Kedua, prilaku seseorang termasuk dalam hal pengamalan kesalehan sosial adalah didasari atas kebiasaan hidup sehingga membentuk pola prilaku atau kecenderungan sikap, hal inilah yang kemudian termanifest dan bisa dikuantifikasi.

Dengan demikian secara konsep-



tual kesalehan sosial bisa dikaji secara kuantitatif. Namun demikian, melakukan kajian kesalehan sosial bukan berarti tanpa ada kesulitan, secara teknis operasional selama ini kajian terhadap tema ini belum banyak dilakukan, sehingga landasan konseptual atau teori yang sesuai dengan kebutuhan kajian ini belum tersedia dan landasan operasionalnya yang lebih aplikatif mungkin belum ada. Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada tiga nilai dasar kesalehan sosial yaitu, pertama, nilai stabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat, nilai solidaritas sosial vang bertujuan untuk meningkatnya solidaritas sosial di masyarakat, dan yang terakhir adalah indeks gotong-royang yang bertujuan agar terwujudnya nilai-nilai gotong-royong dalam kehidupan masvarakat.

Penelitian ini dilakukan tuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana pengetahuan masyarakat Sumenep tentang nilai stabilitas, nilai solidaritas sosial, dan nilai-nilai gotong-royong serta pengamplikasinnya dalam kehidupan masyarakat di Sumenep. bagaimana pola kausalitas antara pengetahuan, ibadah ritual dengan kesalehan sosial, serta untuk mengetahui seberapa tinggi nilai indeks kesalehan sosial pada masyarakat di Sumenep. Melalui kajian ini diharapkan dapat diciptakan suatu iklim yang dapat menumbuh suburkan lahirnya berbagai bentuk ibadat dan kesalehan sosial oleh masyarakat yang dapat memberikan implikasi sosio-kultural positif bagi pembangunan masyarakat Sumenep di masa yang akan datang.

TUIUAN DAN SASARAN

Kegiatan "Survei Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat Sumenep tahun 2021" ini bertujuan untuk: a) untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat dengan mengaplikasikan nilai stabilitas dalam kehidupan masyarakat

Sumenep. b) untuk meningkatnya solidaritas sosial di masyarakat, dan yang terakhir adalah indeks gotong-royang yang bertujuan untuk terwujudnya nilai-nilai gotong-royong dalam kehidupan masyarakat.

METODE STUDI KAJIAN

Penentuan responden yang selanjutnya disebut dengan sampel penelitian pada penelitian ini menggunakan random sampling(teknik pengambilan sampel secara acak). Tingkat kesalehan dapat dilihat dari responden dengan kategori usia produktif rentang usia 15-64 tahun. Berikut banyak responden terpilih sebagai responden penelitian dapat dilihat pada Tahel 1:

Tabel 1 Banyak Kecamatan, Desa dan Responden Terpilih di Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Banyak Desa	Jumlah Desa Terpi- lih	Jumlah Respon- den
1	Pragaan	14	2	10
2	Bloto	20	2	10
3	Saronggi	14	2	10
4	Giligenting	8	1	5
5	Talango	8	1	5
6	Kalianget	7	1	5
7	Kota Sumenep	16	2	10
8	Batuan	7	1	5
9	Lenteng	20	2	10
10	Ganding	14	2	10
11	Guluk-guluk	12	2	10
12	Pasongsongan	10	1	5
13	Ambunten	15	2	10
14	Rubaru	11	2	10
15	Dasuk	15	2	10
16	Manding	11	2	10
17	Batuputih	14	2	10
18	Gapura	17	2	10
19	Batang-Batang	16	2	10
20	Dungkek	15	2	10
21	Nonggunong	8	1	5



22	Gayam	10	1	5
23	Raas	9	1	5
24	Sapeken	9	1	5
25	Arjasa	19	2	10
26	Kangayan	9	1	5
27	Masalembu	4	1	5
Total		332	43	215

Tersebar pada 27 kecamatan dengan proporsi desa terpilih pada masing-masing kecamatan (jumlah desa per kecamatan 1-10 desa terambil acak 1 desa, jumlah desa per kecamatan 11-20 desa terambi lacak 2 desa). Pada masing-masing desa tersebut akan diambil responden sebanyak 5 responden secara acak, sehingga total responden terdapat sebanyak 215 responden.

Pengambilan responden acak ini dengan asumsi seluruh masyarakat desa di Kabupaten Sumenep memiliki kemampuan yang sama.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2017-2019

Jenis	Penduduk Sumenep (Jiwa)				
Kelamin	2017	2018	2019		
Laki	514.288	516.322	517.987		
Wanita	566.916	568.905	570.923		
Total	1.081.204	1.085.227	1.088.910		

Analisa data berdasar pada 215 (lima ratus empat puluh) responden dengan pernyataan survei yang disajikan dalam bentuk kuesioner. Analisis data pada instrumen ini menggunakan analisis proporsi, statistika deskriptif, dan total indeks. Penyajian data menggunakan tabel dan grafik agar mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, data yang telah terkumpul akan dilakukan uji instrumen, vaitu uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengetahui ketepatan dan kelayakan butir-butir pertanyaan atau pernyataan pada instrumen survei (kuesioner).

PEMBAHASAN

Adapun nilai keshalehan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Stabilitas social, Solidaritas social dan nilai gotomg royong. Semua indicator tersebut dijabarkan dalam pernyataan-pernyataan.

1. Indikator nilai Stabilitas sosial

Indikator stabitas sosial dijabarkan dalam 6 pernyataan dari sub indikator stabilitas sosial.

a. Selalu melakukan kegiatan masyarakat atau pemerintah sesuai rencana

Pada pernyataan ini rata jawabannaya adalah 4, 23 ini menunjukan bahwa masyarakat cenderung baik dalam melakukan kegiatan sesuai dengan rencana pemerintah dan masyarakat. Indikasi tersebut menunjukkan masyarakat cenderung mentaati setiap keputusan pemerintah.

- b. Selalu menerima jika terjadi perubahan misalkan aturan di lingkungan jika sifatnya tidak merubah sistem Pada pernyataan ini masyarakat sumenep menerima setiap perubahan dalam bentuk aturan asalkan tidak merubah system. Kategori nya adalah baik atau setuju dengan nilai 4,11.
- c. Selalu berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi Pada indikator ini masyarakat Sumenep selalu berpartisispasi untuk pengembangan ekonomi jika dilihat dari skor 4.15. Hal ini mengindikasikan masyarakat sumenep cenderung kompak sehingga stabilitas social dapat terwujud.
- d. Selalu berusaha untuk Meminimalisir konflik antar masyarakat Dalam hal meminimalisir konflik masyarakat Sumenep selalu berupaya untuk tidak menimbulkan konflik. Hal tersebut dapat terlihat dari skornya menunjukkan 4,33 sehingga konflik dapat cepat terurai.



- e. Selalu berpartisipasi pada pembangunan yang sifatnya cenderung berubah. Partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan adalah baik dengan skor 3,84, hal ini mengindikasikan masvarakat terlibat dalam setiap perubahan. Jika sebuah masyarakat cenderung antipasti terhadap perubahan dalam pembangunan tentu akan menghambat perbaikan sosial dan ekeonomi kabaupaten sumenep.
- f. selalu mentoleran suatu perubahan asalkan tidak menyalahi aturan agama Dilihat dari mayoritas agama islam dan Madura terkenal dengan taat kepada ajaran islam maka setiap apapun perubahan selalu di bandingkan dengan nilai ajaran agama apakah hal tersebut sesuai dengan ajaran atau tidak. Hal ini dapat dilihat hasil dari jawaban senilai 4.41. Dari seluruh indicator stabilitas social masyarakat sumenep, ternyata perubahan yang tidak menyalahi aturan agama mempunyai point tertinggi dibandingkan sub indicator nilai stabilitas social lainnya.

Dari keseluruhan sub indikator dalam stabilitas social maka nilai indeksnya untuk tahun 2021 sebesar 4.41

2. Indikator Nilai Solidaritas Sosial

- a. Dalam berinteraksi atau berhubungan dengan kelompok warga, selalu mengutamakan moral dalam bergaul Pada sub indikator nilai solidaritas mengenai interaksi dalam berhubungan dengan masyarakat diperoleh sebesar 4,4. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumenep baik dalam berinteraksi. Nilai ini akan menjadi anugerah yang baik jika selalu dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga konflik cenderung dapat dihindarkan.
 - b. Akan tetap memilih berteman atau berinteraksi dengan kelompok masyarakat yang melanggar aturan. Padas sub indikator ini masyarakat su-

menep tetap berinteraksi dengan nilai 3,5 katagori baik. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat cenderung untuk dapat menetralkan keadaan tetapi masih tetap waspada sehingga konflik dapat di hindarkan mengingat pada dasarnya manusia dilahirkan pada keadaan suci dan tidak berdosa. Setiap manusia mempunyai tempat yang sama hanya tingkat amal shaleh yang membedakannya

Selalu menjunjung tinggi kepercayaan

- vang dianut bersama dalam berinteraksi dengan individu atau kelompok masyarakat Dalam toleransi dengan pada tingkat kepercayaan yang dianut bersama adalah baik yanitu dengan nilai 4,4. Ini mengindikasikan masyarakat sumenep cenderung memandang kepercayaan seseorang merupakan ruang pribadi seseorang atau kelompok. Setiap individu yang lain tidak boleh dan berhak untuk ikut mempengaruhi atau
 - mengintimidasi sebuah kepercayaa. Adanya intimidasi atau mempengruhi kepercayaan seseorang atau kelompok cenderung akan meningkatkan konflik yang cukup tinggi dalam masyarakat. Jika dilihat skornya baik maka masyarakat Sumenep cenderung baik dalam menjunjung nilai kepercaayaan yang dianut.
- d. pernah membuka rahasia kelompok masyrakat kepada pihak lain Pada sub indikator membuka rahasia kepada kelompok atau pihak lain. Masyarakat Sumenep cenderung kurang baik dengan skor 2,23 ini mengindikasikan masyarakat cenderung dapat dipercaya dalam menyimpan hal untuk tidak dapat tersebar ke pihak luar. Secara tidak langsung penyebaran rahasia kepihak lain menjadi hal yang tidak boleh karena kemungkinan akan membawa keudharatan pada masvarakat vang lebih luas.



- e. Selalu nyaman jika berada pada kelompok yang mempunyai pengalaman emosional bersama
 - Masyarakat Sumenep selalu merasa enak jika bergabung dengan orang yang mempunyai emosional pengalaman bersama. Secara bijak kecenderungan sebuah kesamaan akan membawa kekompakan dalam berinteraksi, hal ini akan lebih mudah untuk mencapai terwujudnya sebuah tujuan, Seperti terbentuknya sebuah organisasi atau kelompok karena mempunyai tujuan yang sama dan emosional yang sama.nilai kategori ini sebesar 3,95
- Selalu menuntut kawan atau kelompok masyarakat agar mengikuti emosionalnya
 - Pada Sub indikator ini masyarakat Sumenepcenderung kurang jika dilihat skornya sebesar 2,45. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat Sumenep tidak mengintimidasi kekingginannya dapat di ikuti individu atau kelompok. Hal ini sangatlah baik dalamhidup bersosial. Terlalu menunutut untuk ikut rencana atau kemauan individu atau kelompok secara paksa akan membuka konflik anatr masyarakat. Adanya konflik antar masyarakat memicu stabilitas social pada masyarakat. Adanya banyak konflik akan mebawa hal yang cenderung merugikan bagi sebuah wilayah untuk maju dan berkembang. Banyaknnya konflik akan membawa masyarakat menjadi tergangga dalam beraktivitas baik dalam ekonomi, social dan yang lainnya. Penghindaran konflik oleh masyarakat dengan tidak memaksa kehendak adalah hal yang patut dipertahankan. Tentunya pemakasaan kehendak boleh dilalkukan jika masyarakat telah melanggar aturan dan hokum yang telah ditetapkan agama dan Negara secara umum.
- g. Merasa enak berinteraksi jika mempu-

- nyai tujuan yang sama
- Pada sub indikator ini masyarakat Sumenep mempunyai nilai skor sebesar 4,34 yang berarti baik. Hal ini menunjukkan bahwa berinteraksi antar individu atau kelompok akan menjadi lebih mudah jika mempunyai tujuan yang sama. Oleh sebab itu tujuan yang sama sangatlah penting dalam mewujudkan tujuan bersama. Kelompok musyawarah atau forum diskusi bersama akan membentuk sebuah keselarasan yang maksimal ini sebuah hal yang penting dalam berinteraksi.
- h. Akan marah-marah atau kecewa jika keinginan/ tujuan tidak terpenuhi dalam kelompok masyarakat
 - Nilai skor dalam sub idikator ini adalah 2,78 ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumenep dalam kategori tidak bisa marah marah dan kecewa jika tujuannya tidak terpenuhi. Ini menunjukkan tingkat emosional masyarakat Sumenep sudah mulai bisa meredam sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Hal ini akan memberikan aura positif pada masyarakat sumenep sehingga tingkat konflik pada masyarakat menjadi minim. Menajemn emosional sangatlah penting dalam berinteraksi pada sekelompok masyarakat. Emosional inilah yang dapat memicu konflik.

3. Indikator Nilai Gotong royong

- a. Selalu melakukan Pekerjaan secara bersama sama dalam kegiatan untuk kepentingan bersama
 - Masyarakat Sumenep dalam melakukan bersama-sama dalam kegiatan untuk kepentingan bersama mempunyai skor 4,5 ini menunjukkan baik dalam sub indicator ini. Tingkat kekompakan sangat baik hal ini hendaklah tetap di pertahankan. Mewujudkan sebuah keinginan bersama akan terasa cepet terwujud dan mudah



jika ada kebeersamaa yang kuat dalam mencapainya.

- b. Selalu memegang kejujuran dalam berinteraksi di masyarakat Masyarakat Sumenep sangat baik dalam menjunjung kejujuran dalam berinteraksi dengan nilai skor 4,6 . Hal ini menunjukkan prioritas pertama dalam berinteraksi yaitu kejujuran. Tanpa adanya kejujuran maka interaksi antar masyarakat menjadi penuh curiga yang membawa suasana atau aura penuh curiga. Kejujuran menjadi point terpenting dalam berinteraksi.
- Selalu mendatangi tetangga jika ada kesusahan dan membantunya sesuai kemampuan Masyarakat Sumenep mempunyai kecenderungan untuk selalu membantu tetangga yang mengalami kesusahan dengan nilai 4,55 hal ini menunjukkan tingkat kebersamaan dan saling empati pada masyarakat.
- d. Saling memahami jika ada sesuatu hal yang perlu diselesaikan untuk kepentingan bersama Untuk sub indicator nilai gotong royong masyarakat Sumenep termasuk baik dengan nilai skor 4,35 Keadaan ini dapat menjelaskan bahwa masyarakat Sumenep cenderung untuk saling memahami jika yang di inginkan menyangkut kepentingan bersama. Adanya salaing empati pada kepentingan kelompok secara luas memungkinkan konflik akan cenderung kecil. Hal ini perlu di pertahankan.
- e. Selalu saling menghargai dalam setiap tindakan bermasyarakat Tingkat menghargai yang tinggi pada setiap tindakan masyarakat menyebabkan konflik antar masyarakat cenderung kecil. Skor pada sub indikator ini adalah 4,36

- Selalu sedia untuk menolong jika ada tetangga yang kesulitan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya Masyarakat Sumenep mempunyai kecenderungan menolong masyarakat setempat mengalami kesulitan dengan nilai skornya 4,49. Hal ini menunjukkan masyarakat berempati terhadap kesulitan masyarakat sekitar. Sikap ini menjadi hal yang baik untuk dipertahankan
- Selalu mengasihi antar individiu atau kelompok masyarakat sebagai makhluk ciptaan tuhan Masyarakat Sumenep cenderung mengasihani kepada individu atau kelompok dengan menganggap bahwa semua yang menjadi makhluk ciptaan tuhan hendaklah saling mengasihi dengan skor 4,40
- h. Setiap ada kegiatan desa tidak pernah mengharapkan bayaran Adanya kesadaran dalam tiap diri masyarakat Sumenep untuk kepentingan bersama menunjukkan adanya keikhlasan untuk melakukan tanpa meminta bayaran. Nilai pada sub indicator ini adalah 3,8
- Setiap ada yang meninggal, masyarakat sekitar secara sukarela datang dan membantu tuan rumah tanpa di undang Masyarakat Sumenep selalu sukarela datang jika ada yang meninggal. Nilai skor sebesar 4,66 yaitu sangat baik. dari seluruh sub indicator nilai gotong royong ini mempunyai skor tertinggi. Adanya rasa empati yang tinggi terhadap keluarga yang ditinggal karena ada orang yang meninggal.
- Setiap ada pernikahan, masyarakat sekitar secara sukarela datang dan membantu tuan rumah tanpa di undang



Dalam sub indikator sukarela datang dalam membantu ketika ada pernikahan adalah baik. Ini menunjukkan rasa gotong royong di masyarakat sumenep baik dengan skor 3,45.hanya saja nilai skor paling rendah dibandingkan nilai dari sub indicator nilai gotong royong lainnya. Keadaan ini dimungkinnkan karena dalam hal kegiatan pernikahan merupakan kegembiraan

Setiap ada kepentingan secara sukarela untuk ikut dalam mensukseskan kegiatan desa Setiap adanya kegiatan untuk memajukan desa atau kelurahan masyarakat sumenep termasuk baik dengan skor 4,28. Adanya tindakan sukarela dalam memajukan daerah setempat, ini menjadi bekal sebuah desa atau kelurahan dapat maju demi kepentingan bersama.

4. Skor Indeks Tingkat Kesalehan Ka**bupaten Sumenep**

Skor indeks tingkat keshalehan dalam indicator tingkat stabilitas sosisal kabupaten Sumenep sebesar 83,6 % ini mengindikasikan bahwa stabilitas social dari masyarakat Sumenep termasuk sangat Baik. Hal ini memberikan dampak yang kondusif pada wilayah kabupaten Sumenep.

Sedangkan untuk indicator pada solidaritas social ternyata lebih rendah dari nilai stabilitas sosial seberas 70, 13%. Hanya saja nilai yang diperoleh termasuk kategori baik. Ini indicator tersebut hendaklah di tingkatkan.

Indikator pada nilai gotong royong mempunyai skor 86,27% ini termasuk sangat baik atau nilai rata-rata dari indicator ini sebesar 4,31. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumenep mempunyai tingkat kesholehan dalam nilai gotong royong yang tinggi. Dari seluruh indicator tingkat keshalehan social maka yang paling tinggi adalah nilai gotong royong.

Skor indeks tingkat keshalehan social di masyarakat sumenep secara keseluruhan adalah 80,46 % masuk kategori tinggi dalam skor persentase berdasarkan interval.

KESIMPULAN

Dalam penelitian dalam indeks kesalehan sosial masyarakat Sumenep Tahun 2021 ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal utama. Diantaranya:

- 1. Dari keseluruhan sub indikator dalam stabilitas sosial maka nilai indeksnya untuk tahun 2021 sebesar 4.13. hal ini menunjukkan kesalehan masyarakat Sumenep dalam bidang stabilitas sosial.sangat tinggi. Tingginya nilai stabilitas sosial bisa jadi disebabkan nilai-nalai keagamaan masyaraka Sumenep sangat baik, hal ini terbukti dari seluruh indikator stabilitas sosial masyarakat sumenep, ternyata perubahan yang tidak menyalahi aturan agama mempunyai point tertinggi dibandingkan sub indikator nilai stabilitas sosial lainnya.
- Masyarakat Sumenep memiliki solidaritas yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai interaksi sosial yang tinggi yaitu 3,51 juga ditunjukkan dengan sikap yang tidak marah. Selain itu juga tidak mudah bergaul dengan pihak-pihak yang senantiasa melakukan perlanggaran. Diperkuat lagi dengan berpegang teguh kepada keyakinan yang dianut.
- Semangat gotong royong masyarakat Sumenep sangat tinggi, hal ini terlihat dari beberapa pertanyaan yang diajukan terkait gotong-royong semua pertanyaan tersebut memiliki nilai skor di atas 4. Adapun nilai rata-rata sebesar 4,31. Nilai skor tertinggi dari ketiga indikator kesalehan sosial, nilai indikator gotong royong yang paling tinggi yaitu sebesar 4,31
- keseluruhan indikator yang 4. Dari membentuk maka tingkat kesalehan sosial masyarakat Sumenep sebesar



4,06. Sedangkan Skor indeks tingkat kesalehan sosial di masyarakat sumenep secara keseluruhan adalah 80,46 % masuk kategori tinggi dalam skor persentase berdasarkan interval.

REKOMENDASI

Hasil pembahasan dan simpulan pada penelitian indeks kesalehan masyarakat Sumenep tahun 2021, studi ini merekomendasi untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat kesalehan sosial menjadi modal yang cukup diperhitungkan dalam pembangunan Sumenep kedepan. Adanya kesalehan sosial yang baik akan membuat sebuah suasana dan kondisi lebih kondusif dalam mewujudkan sebuah tujuan untuk maju.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP BAPPEDA



